BADAN POM







LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2026

BALAI BESAR POM DI PANGKAL PINANG

JALAN PULAU BANGKA, AIR ITAM
PANGKALPINANG, KEP. BANGKA BELITUNG.

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dalam periode Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja output maupun outcome.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai bagian dari upaya Balai Besar POM di Pangkal Pinang untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Kep. Bangka Belitung. Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 ini tertuang Perjanjian Kinerja, pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja Tahun 2026, evaluasi dan hasil analisis pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Nomenklatur indikator kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang di masa yang akan datang.

Pangkal Pinang, 20 Juli 2026



Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Lampiran iv
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar xvii
Ringkasan Eksekutif xviii
Highlight xxiv

BAB I. Pendahuluan 2
1.1 LATAR BELAKANG 2
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 8
1.4 ISU STRATEGIS 9

BAB II. Perencanaan Kinerja 13
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA 13
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 16
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) 18
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 31
2.5 METODE PENGUKURAN 34

BAB III. Akuntabilitas Kinerja 39
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 39
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 280
3.3 REALISASI ANGGARAN 330

BAB IV. Penutup 348
4.1 KESIMPULAN 348
4.2 SARAN 351

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

1) Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO ke BPOM
3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5) Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
6) Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder
7) Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
8) Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
11) Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Keten
12) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
13) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
14) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
15) Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
16) Jumlah Desa Pangan Aman
17) Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2025
18) Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan atau IP-CPPOB

19) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
20) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
21) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 5. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 6. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Revisi Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 7. Realisasi IKU Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026
Lampiran 8. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Output Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026
Lampiran 9. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Indikator Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026
Lampiran 10. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026
Lampiran 11. Capaian RAPK Triwulan II Tahun 2026 BBPOM di Pangkal Pinang
Lampiran 12. Tabel Keselarasan Nomenklatur Data Kinerja Triwulan Tahun 2026
Lampiran 13. Tabel Keselarasan Data Perencanaan Kinerja Tahun 2026
Lampiran 14. Tabel Keselarasan Data Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Lampiran 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026
Lampiran 16. Penyesuaian anggaran Triwulan II Tahun 2026
Lampiran 17. Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja
Lampiran 18. Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja Setelah Perbaikan
Lampiran 19.Perbandingan Capaian Kinerja TW II 2026 dengan Target Jangka Menengah
Lampiran 20. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II 2026
Lampiran 21. Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2026
Lampiran 22. Nota Dinas Sekretaris Utama tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan

Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden.

Lampiran 23. Lembar Persetujuan Data Kinerja Bulan Juni 2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Pangkal Pinang 5
Tabel 2.1. Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 19
Tabel 2.4 Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 31
Tabel 2.7 Kriteria Predikat NKO 35
Tabel 2.8 Sumber Predikat AKIP 36
Tabel 2.8 Kriteria Predikat realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah 36
Tabel 2.9 Kriteria Predikat Indikator Kinerja 37
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026 41
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026 44
Tabel 3.3 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 46
Tabel 3.4 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 47
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 48
Tabel 3.6 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 50
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 52
Tabel 3.8 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 55
Tabel 3.9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 55
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 55

Tabel 3.11 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 57
Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 58
Tabel 3.13 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 60
Tabel 3.14 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 62
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 63
Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 65
Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 71
Tabel 3.18 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 74
Tabel 3.19 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 76
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 77
Tabel 3.21 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 80
Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 83
Tabel 3.23 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 86
Tabel 3.24 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 88
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 89
Tabel 3.26 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 92
Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 95

Tabel 3.28 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 98
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 100
Tabel 3.30 Matriks Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 102
Tabel 3.31 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 104
Tabel 3.32 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 108
Tabel 3.33 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 109
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 109
Tabel 3.35 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 110
Tabel 3.36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 111
Tabel 3.37 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 115
Tabel 3.38 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 116
Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 116
Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 119

Tabel 3.41 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 120
Tabel 3.42 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 123
Tabel 3.43 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 123
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 124
Tabel 3.45 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 127
Tabel 3.46 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 128
Tabel 3.47 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 131
Tabel 3.48 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 131
Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 132
Tabel 3.50 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 135
Tabel 3.51 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 136
Tabel 3.52 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 140
Tabel 3.53 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 141

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 141
Tabel 3.55 Matriks Rekomendasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 142
Tabel 3.56 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 143
Tabel 3.57 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 147
Tabel 3.58 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 147
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 148
Tabel 3.60 Matriks Rekomendasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 150
Tabel 3.61 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 151
Tabel 3.62 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 155
Tabel 3.63 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 155
Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 155
Tabel 3.65 Matriks Rekomendasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 157
Tabel 3.66 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 160
Tabel 3.67 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 165
Tabel 3.68 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 166

Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 166
Tabel 3.70 Matriks Rekomendasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 167
Tabel 3.71 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 171
Tabel 3.72 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 173
Tabel 3.73 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 173
Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 174
Tabel 3.75 Matriks Rekomendasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 175
Tabel 3.76 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman..... 178
Tabel 3.77 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 182
Tabel 3.78 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 182
Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 183
Tabel 3.80 Matriks Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 185
Tabel 3.81 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan..... 186
Tabel 3.82 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan . 189
Tabel 3.83 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 190

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 190
Tabel 3.85 Matriks Rekomendasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 192
Tabel 3.86 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 194
Tabel 3.87 Jumlah Desa Pangan Aman 196
Tabel 3.88 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Jumlah Desa Pangan Aman 197
Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Jumlah Desa Pangan Aman 197
Tabel 3.90 Matriks Rekomendasi Jumlah Desa Pangan Aman 199
Tabel 3.91 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman 200
Tabel 3.92 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 203
Tabel 3.93 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 203
Tabel 3.94 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 204
Tabel 3.95 Matriks Rekomendasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ... 206
Tabel 3.96 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 208
Tabel 3.97 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 211
Tabel 3.98 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 212
Tabel 3.99 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 212

Tabel 3.100 Matriks Rekomendasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 214
Tabel 3.101 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 216
Tabel 3.102 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 219
Tabel 3.103 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 219
Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 220
Tabel 3.105 Matriks Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 222
Tabel 3.106 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 224
Tabel 3.107 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 227
Tabel 3.108 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 228
Tabel 3.109 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 228
Tabel 3.110 Matriks Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 230
Tabel 3.111 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 233
Tabel 3.112 Indeks Pelayanan Publik 235
Tabel 3.113 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Indeks Pelayanan Publik 236

Tabel 3.114 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Indeks Pelayanan Publik 236
Tabel 3.115 Matriks Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik 237
Tabel 3.116 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik 240
Tabel 3.117 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 244
Tabel 3.118 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 244
Tabel 3.119 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 244
Tabel 3.120 Matriks Rekomendasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 246
Tabel 3.121 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 247
Tabel 3.122 Nilai AKIP UPT BPOM 251
Tabel 3.123 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Nilai AKIP UPT BPOM 251
Tabel 3.124 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Nilai AKIP UPT BPOM 251
Tabel 3.125 Matriks Rekomendasi Nilai AKIP UPT BPOM 255
Tabel 3.126 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai AKIP UPT BPOM 257
Tabel 3.127 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 261
Tabel 3.128 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 261
Tabel 3.129 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 262
Tabel 3.130 Matriks Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 264
Tabel 3.131 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 266
Tabel 3.132 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 271
Tabel 3.133 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Indeks Manajemen Risiko 272
Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Indeks Manajemen Risiko 272

Tabel 3.135 Matriks Rekomendasi Indeks Manajemen Risiko 274
Tabel 3.136 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Manajemen Risiko 276
Tabel 3.137 Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026 280
Tabel 3.138 Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025 322
Tabel 3.139 Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2026 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025 . 325
Tabel 3.140 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran 330
Tabel 3.141 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan 332
Tabel 3.142 Perbandingan Realisasi Output dengan Realisasi Anggaran 334
Tabel 3.143 Penyesuaian Anggaran dalam Mencapai Kinerja 336
Tabel 3.144 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 340
Tabel 3.145 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output 344

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyebaran Pegawai di Balai Besar POM di Pangkal Pinang 6
Gambar 1.2 Peta Provinsi Kep.Bangka Belitung 7
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang.....8

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi misi melalui rencana strategis tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan Balai Besar POM Pangkal Pinang ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang, pada tahun 2026 telah ditetapkan 7 sasaran kegiatan diantaranya yaitu.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Layanan Publik UPT yang prima
7. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pencapaian 7 Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Berdasarkan **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026, terdapat 2 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% karena capaiannya melebihi 110% yaitu indikator **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar** dan **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026 sebesar **102,93%** dengan predikat **Istimewa**.

Dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat **11 (sebelas)** indikator dengan kategori **sangat baik, 6 (enam)** indikator dengan kategori **baik**, **2 (dua)** indikator dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**, dan **8 (delapan)** indikator belum dapat diukur capaiannya karena penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan utama atau Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 7 Sasaran Kegiatan. Dari 20 Rincian Output (RO), 19 RO dapat dihitung tingkat efisiensinya, sedangkan 1 RO lainnya tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya yaitu RO Layanan BMN. RO Layanan BMN belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum ada capaian input (anggaran) sampai dengan Triwulan II ini. Anggaran RO Layanan BMN rencana akan direalisasikan pada Bulan November 2026.

19 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya diperoleh nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,10 dengan capaian **TE 100% (Efisien)**. Hal ini dikarenakan nilai Indeks Efisiensi (1,10) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan persentase capaian output yang lebih tinggi dari persentase capaian input.

Dari 7 sasaran kegiatan, hanya 5 sasaran kegiatan yang bisa dihitung tingkat efisiensinya. Hasil pengukuran 5 sasaran kegiatan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,13 sehingga kategorinya capaiannya **100% (Efisien)** dengan rata-rata persentase capaian output sebesar 112,53% dan persentase capaian input (anggaran) sebesar 99,36%.

Pada tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar Rp 13.918.203.000. Pada bulan Desember 2025 dilaksanakan revisi

kewenangan DJA untuk pergeseran anggaran kedalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Dilakukan pergeseran anggaran dari pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 2.230.083.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 88.350.000 sehingga total pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 11.688.120.000 atau pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000.

Pada bulan April dilaksanakan revisi kewenangan DJA berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.04.26.260 tanggal 8 April 2026 tentang Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN TA 2026 dimana dilakukan revisi penurunan target Rincian Output (RO) akibat adanya efisiensi anggaran pada bulan Desember 2025 sesuai hasil kesepakatan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit teknis sebelumnya. Penurunan target tersebut dilakukan pada KRO BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT), BDB.001 (Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan), BDB.002 (Desa Pangan Aman), BDB.003 (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas), BDC (Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE), BMB.001 (Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT), QDG (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT), QIA.001 (Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT), QIA.002 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT), QIC.001 (Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT), dan QIC.004 (Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT). Selain penyesuaian target output tersebut dilakukan juga pemotongan anggaran untuk beberapa akun belanja barang sebesar Rp 10.808.000. Pada bulan Mei dilakukan kembali revisi kewenangan DJA berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3 dimana dilakukan pemotongan target output dan anggaran pada RO Perkara QCD.U66 (PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PANGKAL PINANG) sesuai dengan SBK 1 Perkara. Sampai dengan bulan Juni 2026, total pagu blokir Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 88.350.000 dan **Pagu Total sebesar Rp 11.655.304.000**.

Pada Triwulan II 2026, total realisasi anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang yaitu sebesar Rp **6.521.886.372** dari pagu yang bisa digunakan (diluar pagu blokir) sebesar Rp **11.566.954.000** dengan capaian sebesar **56,38%** atau **55,96%** bila

dibandingkan dengan Pagu Total (dengan pagu blokir). Pada triwulan II, capaian penyerapan Balai Besar POM di Pangkal Pinang belum mencapai target penyerapan IKPA indikator Penyerapan Anggaran dengan target dan capaian masing-masing belanja yaitu: Belanja Pegawai dengan target 40% capaian 49,95%; Belanja Barang dengan target 50% dan capaian 45,43%; dan Belanja Modal dengan target 40% dan capaian 100%.

Sampai dengan Triwulan II, tidak terdapat Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang tidak mencapai target. Tapi dalam pelaksanaan kegiatannya, masih terdapat kendala yang dihadapi Balai Besar POM di Pangkal Pinang, yang menyebabkan dua indikator yang melebihi dari 110% yaitu pada IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Pada IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, capaian indikator yang melampaui target merupakan hasil dari optimalisasi pemenuhan target output kegiatan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja indikator.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik difokuskan pada penguatan strategi dan efektivitas kegiatan pengawasan. Ke depan, Balai Besar POM di Pangkal Pinang perlu melakukan perencanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan sebaran produk di wilayah pengawasan agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas akan terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala, khususnya terkait dengan ketentuan terbaru mengenai pelabelan produk tembakau dan rokok elektronik.

Pada IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, Presentasi keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 38,33 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 57,50, sehingga capaian indikator ini melebihi dari 110%. Upaya yang akan dilakukan terhadap capaian indikator ini akan melakukan pengusulan revisi target RAPK.

Pada tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang sudah mengambil langkah antisipatif atas kendala-kendala yang ada, dari beberapa kendala yang ada, telah dilakukan identifikasi risikonya sebesar 96,77%.

Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan perbaikan kinerja untuk indikator yang belum memuaskan sehingga dapat terwujud manajemen kinerja yang lebih produktif, efektif, dan efisien.

HIGHLIGHT

Kamis (23/4/2026) Balai Besar POM di Pangkal Pinang menyelenggarakan kegiatan Sharing Session pencapaian WBBM bersama Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaaan Imigrasi Tanjung Pandan.

Dalam kegiatan ini tim ZI kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaaan Imigrasi Tanjung Pandan berbagi pengalaman dan praktik baik dalam upaya memperoleh predikat WBBM.



Dalam upaya memperkuat pelayanan publik yang cepat, dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan pemasangan alat layanan publik yang diberi nama "Sidulang POM (Sistem Digital Layanan Publik BBPOM di Pangkal Pinang)" di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangka yang dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juni 2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan kehadiran layanan digital Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada MPP di Kabupaten Bangka dapat memberikan kemudahan akses untuki masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bangka untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, dekat dan mudah diakses seperti pengurusan perizinan serta konsultasi produk obat dan makanan.



Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, dalam rangka Kegiatan Operasi Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kep. Bangka Belitung, PPNS BBPOM di Pangkal Pinang dan Petugas Korwas PPNS Polda Babel melakukan Operasi Pengawasan Obat dan Makanan. Petugas menemukan Obat Setelan, Obat Keras dan produk sediaan farmasi lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan terjadi dugaan tindak pidana berupa mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau tanpa keahlian dan kewenangan tapi melakukan praktik kefarmasian. Produk temuan diedarkan oleh terlapor yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Selanjutnya kasus akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. BBPOM Pangkal Pinang berkomitmen selalu melindungi masyarakat dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan.



BBPOM di Pangkal Pinang melaksanakan Sosialisasi Monitoring Efek Samping Obat (MESO) melalui aplikasi e-MESO BPOM di RSUD Kriopanting, Kabupaten Bangka Selatan.(24/06/2026)

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya farmakovigilans serta pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO). Peserta juga mendapatkan praktik penggunaan aplikasi e-MESO BPOM untuk pelaporan secara elektronik.



Balai Besar POM di Pangkal Pinang (BBPOM di Pangkal Pinang) menyelenggarakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk nyata dalam perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pancasila BBPOM di Pangkal Pinang diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) peserta yang terdiri dari penyelenggara pelayanan publik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Stakeholders, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Pelaku Usaha, Media Massa dan masyarakat selaku pengguna/penerima layanan publik. (27/04/2026)



BBPOM di Pangkal Pinang menyelenggarakan Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kimia Obat dan NAPZA pada 22–26 Juni 2026.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai verifikasi metode analisa dan penetapan kadar Candesartan Cilexetil dan Amlodipin Besilat (tablet) secara KCKT, serta perhitungan uncertainty menggunakan baku tunggal dan baku seri. Materi disampaikan oleh Tia Agustiany, S.Si., yang dilanjutkan dengan praktik laboratorium dan pembahasan hasil sebagai penguatan pemahaman peserta.



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Terkait Penyerahan Antibiotik di Kabupaten Bangka Tengah merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya pengendalian resistensi antimikroba (AMR) sekaligus meningkatkan pemahaman serta kepatuhan tenaga kesehatan dan pelaku usaha kefarmasian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kolaborasi antara Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pengawasan obat, khususnya antibiotik, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari risiko penyalahgunaan dan dampak resistensi antimikroba (25/06/2026).



Balai Besar POM di Pangkal Pinang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Kewajaran Pesanan dan Pemanfaaran Smart POM dalam Pelaporan CAPA. (22/05/2026)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait analisa kewajaran pesanan dalam distribusi obat dan optimalisasi pemanfaatan Smart POM sebagai sarana pelaporan tindaklanjut hasil pemeriksaan.



Balai Besar POM di Pangkalpinang melaksanakan KIE Obat dan Makanan di SMA Negeri 3 Toboali yang diikuti oleh 60 siswa dan siswi pada 16 April 2026.

Mengusung tema "Cerdas Memilih Pangan, Wujudkan Remaja Sehat Tanpa Stunting," kegiatan diisi dengan materi mengenai Pola Asuh dan Gizi Seimbang untuk Pencegahan Stunting yang disampaikan oleh nutrisionis Puskesmas Toboali. Selain itu, siswa siswi diajak untuk cerdas menjadi konsumen dengan Cek KLIK yang disampaikan oleh PFM BBPOM di Pangkal Pinang.



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tantangan pengawasan obat dan makanan semakin hari semakin besar. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri obat dan makanan. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang cukup strategis karena berdampak langsung pada perlindungan konsumen serta menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk di tingkat daerah dan nasional. Atas dasar tersebut, Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome tersebut, terlebih dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pengawas obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Pangkal Pinang, ditetapkan Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan wilayah kerja 5 Kabupaten Kota di Pulau Bangka.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar POM Pangkal Pinang

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai UPT Badan POM adalah sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok**

   UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi UPT

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pangkal Pinang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Analisis Lingkungan Strategis

A. Internal

Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh sumber daya baik segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana.

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Pangkal Pinang

Luas Tanah & Bangunan	Rumah Dinas	Listrik	Sarana Komunikasi
L.Tanah 5526 m^2 **L.Bangunan** 2075 m^2 **Luas Kantor** 780 m^2 **Luas Laboratorium** 1295 m^2	Belum ada, Rumah dinas berupa rumah kontrak	207.000 watt - **kantor** : 33.000 watt - **Laboratorium**: 174.000 watt	- **Saluran telepon** (Ruang pimpinan, ULPK, dan Tata Usaha) - Internet jaringan Moratelindo - Tiap ruangan terhubung dengan telepon extension sebanyak 27 unit - Conference Video - LAN server internal

Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri dari 2 orang Struktural (1 orang Kepala Balai dan 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha), 16 orang staf tata usaha, 18 orang staf pengujian, 6 orang staf Pemeriksaan, 4 orang staf Penindakan, dan 4 orang staf Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain ASN, terdapat 11 orang tenaga outsourcing.

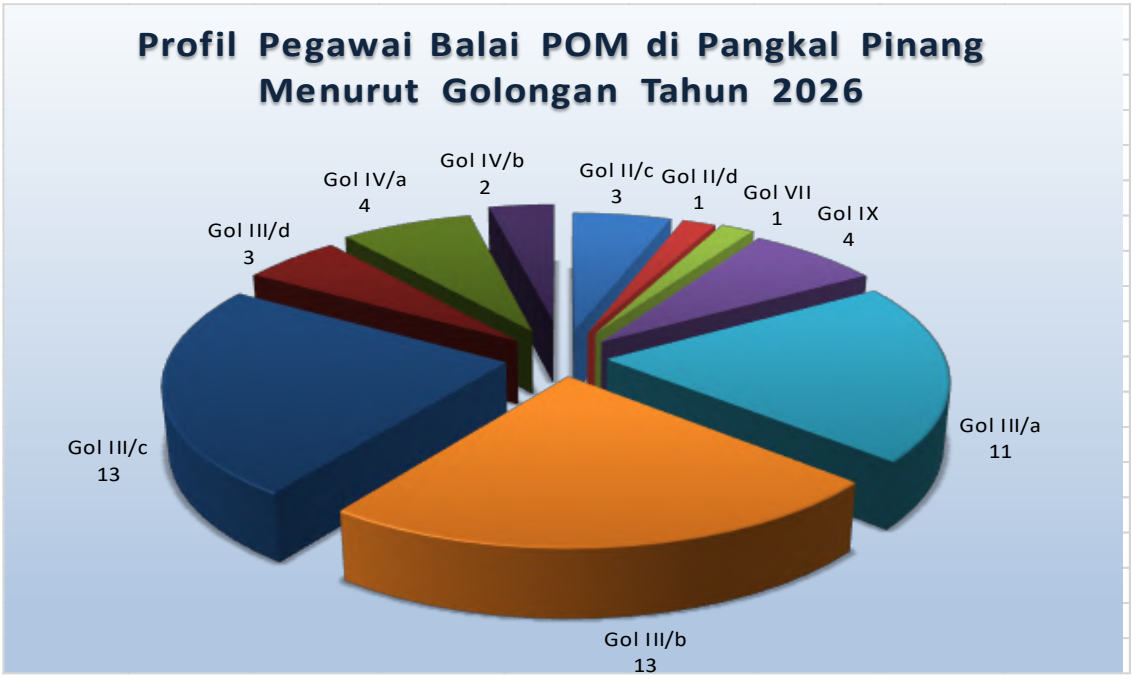

Gambar 1.1 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan Golongan Tahun 2026

B. Eksternal

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000. Berdasarkan kondisi tersebut wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang digambarkan sebagai berikut:

1. Data Umum Wilayah Kerja

a. Luas Wilayah Kerja

Total luas wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas 81.725,06 km2, Luas daratan setidaknya mencapai 16.424,06 kilometer persegi, atau 20,10 persen dari total wilayah. Sementara luas laut kurang lebih 65.301 kilometer persegi, atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbatasan wilayah:

- di sebelah Utara : Laut Natuna
- di sebelah Selatan : Laut Jawa
- di sebelah Barat : Selat Bangka
- di sebelah Timur : Selat Karimata



Gambar 1.2 Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. **Jumlah Kabupaten/Kota**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terdapat pulau-pulau kecil disekitarnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

a. Kabupaten Bangka,
b. Kabupaten Bangka Tengah,
c. Kabupaten Bangka Barat,
d. Kabupaten Bangka Selatan,
e. Kabupaten Belitung,
f. Kabupaten Belitung Timur dan
g. Kota Pangkal Pinang.

c. **Pola Transportasi Balai Besar POM Pangkal Pinang di Wilayah Kerja**

Pola transportasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang adalah menggunakan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.

d. **Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja**

Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dengan waktu 1 jam - 5 jam dan/atau transportasi laut 30 menit - 4 jam.

e. **Waktu yang diperlukan di satu Wilayah Kerja**

Waktu yang diperlukan petugas Balai Besar POM Pangkal Pinang di satu wilayah kerja berkisar antara 1-3 hari.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang seperti terlihat pada gambar 1.1 disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang

1. Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,

urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung muncul isu-isu strategis yang harus diperhatikan, antara lain:

A. ISU INTERNAL

1. Sampel Sediaan Farmasi yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling dikarenakan keterbatasan variasi jumlah sampel di wilayah pengawasan Balai Besar POM Pangkal Pinang.
2. Peralatan laboratorium sering mengalami kerusakan karena sudah berumur lebih dari 15 tahun, dibutuhkan peremajaan alat untuk memperlancar proses pengujian.
3. Keterbatasan anggaran perbaikan dan pemeliharaan alat laboratorium menyebabkan hanya alat prioritas yang dapat diperbaiki.
4. Ruang laboratorium untuk pengujian Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik masih terbatas, berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu keselamatan kerja.
5. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori sampel dan nama jenis Pangan Olahan yang di sampling.
6. Alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi PFM di fungsi pengujian sangat terbatas dan belum dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan gap kompetensi pegawai.
7. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan.

8. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori maupun waktu sampling sampel PIRT.
9. Data pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi yang diinput pada SIPT tidak sesuai dengan jumlah sarana yang ditelah diawasi.
10. Adanya pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang dilaporkan melalui SIPT tidak sesuai dengan produk yang sebenarnya diawasi.
11. Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek.
12. Pengembangan kompetensi pegawai fungsi penindakan belum terlaksana sesuai perencanaan.
13. Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak disampaikan secara tepat waktu ke stakeholder terkait
14. Pengelolaan Barang Bukti belum optimal.
15. Aplikasi Dashboard Penindakan belum berjalan secara optimal.
16. Pemanfaatan Data Kerawanan Kejahatan belum optimal.
17. Alat pengolah data di bagian Penindakan belum sesuai standar spesifikasi dari Direktorat Siber.
18. Pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai dari tahap perencanaan hingga evaluasi membutuhkan monitoring secara berkelanjutan.
19. Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi belum optimal.
20. Upaya perlindungan data untuk mencegah kebocoran data dan informasi belum optimal.
21. Diperlukan adanya pengembangan inovasi pelayanan publik yang lebih berdampak kepada masyarakat untuk mendukung proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
22. Adanya perbedaan pemahaman antar pegawai mengenai penyuapan, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
23. Monitoring pengumpulan raw data kinerja masing-masing fungsi belum optimal.
24. Kualitas pelaksanaan anggaran belum optimal dan masih menjadi temuan dalam audit Inspektorat maupun BPK.

25. Pemangkasan anggaran berpotensi menyebabkan penyesuaian kegiatan pengawasan sarana dan produk.
26. Pengelolaan manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai pedoman yang berlaku.
27. Ruang arsip (Record Center) belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.
28. Masih terdapat penciptaan arsip yang belum mengikuti pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku.
29. Pengelolaan persediaan belum optimal, terdapat selisih antara data gudang dan aplikasi SAKTI.
30. Sarana prasarana K3 belum tersedia secara optimal sesuai standar.
31. Pengadaan melalui e-purchasing tidak sampai selesai.

B. ISU EKSTERNAL

1. Sampel Sediaan Farmasi yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling dikarenakan keterbatasan variasi jumlah sampel di wilayah pengawasan Balai Besar POM Pangkal Pinang
2. Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
3. Kebijakan timeline pengujian yang selalu berubah setiap tahun dan belum dituangkan dalam Pedoman Sampling
4. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat
5. Potensi adanya KLB keracunan pangan meningkat dengan berjalannya program MBG
6. Satgas KLB keracunan pangan belum terbentuk dan bekerja secara optimal
7. Pemberian Gratifikasi dari Pelaku Usaha kepada Petugas
8. Sarana yang diperiksa dalam kondisi tutup tidak beroperasi akan tetapi tidak bisa dikonfirmasi kepada pemilik sarana karena tidak terdapat kontak yang bisa dihubungi
9. Petugas mengalami penolakan dari sarana saat dilakukan pemeriksaan
10. Penyesuaian kebijakan pengawasan dari pusat menuntut UPT untuk cepat beradaptasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi operasional
11. Risiko keselamatan petugas saat melakukan pengawasan obat dan makanan

12. Perubahan metode penilaian SRL dari "pernah dan mampu uji" menjadi "harus melalui verifikasi MA menimbulkan kebutuhan pemisahan kegiatan peningkatan SRL dan MA Terverifikasi
13. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA
14. Dukungan BPOM terhadap program MBG meliputi sampling, pemeriksaan, penyuluhan dan pengujian
15. Beredar isu atau hoaks mengenai Obat dan Makanan serta sentimen negatif terhadap BPOM
16. Adanya program lain dari kementerian/lembaga di sekolah dengan tahapan program yang hampir sama sehingga menghambat keberlanjutan program
17. Terdapat tumpang tindih program di desa dari kementerian/lembaga lain yang menggunakan metode serupa, sehingga menghambat keberlanjutan program Keamanan Pangan Terpadu
18. Terjadinya efisiensi anggaran yang menyebabkan PEMDA tidak melaksanakan replikasi program keamanan pangan terpadu
19. Pengetahuan pelaku UMKM masih rendah terkait perizinan melalui OSS terbaru
20. Masih rendahnya komitmen pelaku usaha dalam melaksanakan tahapan pendampingan UMKM
21. Rendahnya putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan sehingga tidak memberikan efek jera
22. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
23. Intervensi dari pihak eksternal dalam penindakan atau penyidikan
24. Peningkatan peredaran produk ilegal dan berbahaya melalui platform digital/online
25. Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan belum terlaksana secara optimal
26. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik disebabkan oleh ekspektasi yang tinggi terhadap BPOM

27. Masyarakat membutuhkan akses informasi dan edukasi obat dan makanan yang lebih mudah dan berbasis digital
28. Adanya ancaman siber seperti malware, ransomware, phishing, dan serangan DDoS, serta risiko dari pihak ketiga
29. Jumlah responden yang tidak mencukupi untuk pengisian survey
30. Masih rendahnya komitmen Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK BPOM.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II PENGUKURAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja pengawasan obat dan makanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya RPJMN 2025-2029, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar ditetapkannya Renstra Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pangkal Pinang 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2025-2029. Renstra ini dibuat sesuai dengan SOTK baru Badan POM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rancangan Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah mulai disusun sejak awal tahun 2025. Setelah mengalami beberapa kali penyesuaian pada bulan Desember 2025 Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah menetapkan secara resmi Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2026.

Secara ringkas, Visi, Misi, dan Tujuan Balai Besar POM di Pangkal Pinang sesuai dengan Badan POM adalah sebagai berikut:

I. Visi

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

II. Misi

Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

IV. TUJUAN

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM
4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan dapat mencapai sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang selama lima tahun (2025–2029) disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2025–2029. Sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2026 telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Meningkatnya efektivitas KIE;
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
6. Layanan Publik UPT yang prima;
7. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Total capaian indikator tersebut dihitung secara periodik untuk memperoleh Nilai Kinerja Organisasi periodik.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Berikut tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026.

Tabel 2.1. Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	31,25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94

RKT Tahun 2026 ini disusun dan ditetapkan pada 07 Oktober 2025, target yang tertuang dalam RKT merupakan target tahun 2026 pada dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut sebagai Perjanjian Kinerja.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud komitmen dari penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang menandatangani Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2026 dengan indikator kinerja utama yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang diwujudkan serta target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang serta didukung dengan alokasi anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp 13.918.203.000.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	94
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, maka Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebagai unit kerja eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pada tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar Rp 13.918.203.000. Pada bulan Desember 2025 dilaksanakan revisi

kewenangan DJA untuk pergeseran anggaran kedalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Dilakukan pergeseran anggaran dari pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 2.230.083.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 88.350.000 sehingga total pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 11.688.120.000 atau pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000. Pada saat PK disusun, anggaran disusun berdasarkan revisi DIPA kedua dengan pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000, namun total pagu tetap sama atau tidak berubah. Total Pagu tersebut dijabarkan kedalam setiap pagu untuk 20 Rincian Output yang mendukung pencapaian tujuan Balai Besar POM di Pangkal Pinang.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini terdapat perubahan/perbedaan jika dibandingkan dengan RKT Tahun 2026, yaitu:

1. Jumlah IKU berkurang dari 28 menjadi 27, terdapat 1 IKU yang tidak masuk kedalam dokumen PK yaitu Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikarenakan anggaran untuk sampling MBG tidak ada pada DIPA 2026 yang menjadi dasar penyusunan anggaran dalam dokumen PK.
2. Terdapat perubahan target pada 17 IKU, disebabkan oleh hasil perhitungan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya serta kondisi lain yang relevan.

Perubahan secara rinci antara RKT dan PK tahun 2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,25	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	27			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100			Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	85			Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92			Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75			Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92			Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,60			Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81			Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase pemenuhan target	100			Persentase pemenuhan target	100	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		pengendalian AMR di wilayah UPT				pengendalian AMR di wilayah UPT		
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77			Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40			Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81					Anggaran untuk sampling MBG tidak ada pada DIPA 2026
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	10			Jumlah Sekolah yang melaksanakan	7	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		keamanan pangan				pembudayaan keamanan pangan		mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Jumlah desa pangan aman	6			Jumlah desa pangan aman	3	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31,25	3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
5	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75	6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	7		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
	Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	81,80		Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	Target pada PK merupakan hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5			Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94			Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Berikut di bawah ini tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 sesuai penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pangkal Pinang,

Tabel 2.4 Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	343,795,000
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.85	5,983,000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	143,609,000
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,198,400
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	9,369,600
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,751,400
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,852,220
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	17,020,380

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	145,595,160
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	253,730,440
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	4,144,000
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	14,986,000
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	16,159,400
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			78.2	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.6	3,639,932,000
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	22,160,000
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	116,138,000
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	25	25	70	70	95	95	100	7	69,515,000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
18	Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	25	25	50	50	70	70	100	3	72,577,000
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	50	70	80	100	100	100	100	1	36,673,000
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	2.7	12.9	41.23	52.05	62.88	71.2	75.15	89.73	94.3	99.5	31.25	20,097,000
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		33.33	33.33	33.33	33.33	38.33	38.33	51.67	51.67	66.67	85	92.5	142,830,000
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	94	5,230,000
23	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.85	7,591,000
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.4	661,291,000
25	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	156,999,000
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,454,781,000
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.94	315,112,000
TOTAL														11,688,120,000

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil aktivitas pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan tiap bulan digunakan untuk penilaian kinerja secara

berkala. RAPK tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pada Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2026 terdapat 7 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja yang berkontribusi pada pencapaian sasaran.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Sedangkan NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus no. 1 sbb:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a) Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

A. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip NKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

i. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

ii. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

B. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masingmasing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8 Sumber Predikat AKIP

No	Unit Organisasi	Predikat AKIP
1.	BPOM	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari KemenpanRB
2.	Unit Kerja Eselon I (UK1)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
3.	Unit Kerja Eselon II (Satker Mandiri)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
4.	Unit Kerja Eselon II (non Satker Mandiri)	Menggunakan nilai UK1
5.	UPT	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

b) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan triwulan bersangkutan dengan target tahunan yang terdapat dalam dokumen PK. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.8 Kriteria Predikat realisasi kinerja sampai dengan triwulan bersangkutan dengan target tahunan

Kategori	**Penjelasan**	**Notifikasi Warna**
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

c) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.9 Kriteria Predikat Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Mekanisme pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja BBPOM di Pangkal Pinang:

1. Tim Monev Tata Usaha menyiapkan media pengumpulan data pada madu pelawan
2. Penanggung Jawab Data tiap Tim Kerja melakukan penginputan data kinerja
3. Ketua Tim Kerja melakukan verifikasi data kinerja yang diinput
4. Ketua Tim Monev memeriksa Kelengkapan data kinerja yang telah diinput oleh semua Tim Kerja
5. Ketua Tim Kerja dan Ketua Tim Monev melakukan evaluasi dan pembahasan di rapat bulanan Bersama Kepala Balai
6. Tim Monev TU melakukan input dan pelaporan data kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada subbab analisis capaian kinerja ini akan diuraikan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Selain itu, juga dilakukan perbandingan realisasi Triwulan II dengan target tahunannya. Setiap indikator akan dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dan menganalisis capaian setiap indikator kinerjanya. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026, terdapat 7 sasaran kegiatan dan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
18. Jumlah desa pangan aman
19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
23. Indeks Pelayanan Publik UPT
24. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
25. Nilai AKIP UPT BPOM
26. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Berkaitan dengan proses penetapan Rencana Strategis BPOM 2025-2029, terdapat perubahan jumlah sasaran kegiatan yang semula 8 sasaran kegiatan menjadi 7 sasaran kegiatan (terdapat pengurangan satu sasaran kegiatan yaitu Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT). Berdasarkan hal tersebut, pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026, **jumlah sasaran**

kegiatan menjadi 7 dan **keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Total capaian indikator tersebut dihitung secara periodik untuk memperoleh Nilai Kinerja Organisasi periodik. Berikut Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100	101,27%	-	101,27%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100	101,11%	-	101,11%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	-	100,00%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63%	-	103,63%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86,73	102,04%	-	102,04%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	-	100,00%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100	106,10%	-	106,10%
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100	103,52%	-	103,52%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99%	-	105,99%

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian		
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53%	-	102,53%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03%	Normalisasi	110,00%
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,4	78,5	100,13%	-	100,13%
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	100,67%	-	100,67%
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00%	-	100,00%
		18	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00%	-	100,00%
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00%	-	100,00%
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	62,88	68,32	108,65%	-	108,65%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38,33	57,5	150,01%	Normalisasi	110,00%
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	-	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian		
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	
Total Capaian PK								1955,62%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)								102,93%
Predikat NKO								Istimewa

Nilai Kinerja Organisasi dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Berdasarkan tabel di atas, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026, terdapat 2 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% karena capaiannya melebihi 110% yaitu indikator **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar** dan **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026 sebesar **102,93%** dengan predikat **Istimewa**.

Berikut capaian kinerja dari 27 Indikator Kinerja Utama pada Triwulan II Tahun 2026 yang dinyatakan dalam kategori sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100	101,27%	Sangat Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100	101,11%	Sangat Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63%	Sangat Baik
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86,73	102,04%	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100	106,10%	Sangat Baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100	103,52%	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99%	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53%	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03%	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian	
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,4	78,5	100,13%	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	100,67%	Sangat Baik
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00%	Baik
		18	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00%	Baik
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00%	Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	62,88	68,32	108,65%	Sangat Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38,33	57,5	150,01%	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	

Dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat **11 (sebelas)** indikator dengan kategori **sangat baik**, **6 (enam)** indikator dengan kategori **baik**, **2 (dua)** indikator dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**, dan **8 (delapan)** indikator belum dapat diukur capaiannya karena penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

SK 1 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Capaian Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT** diukur dengan 15 indikator sebagai berikut:

1. **Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.3 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27%	Sangat Baik

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4, dimana A adalah Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, C adalah Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan D adalah Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Pada Triwulan II 2026 pelaksanaan pengujian sesuai renlak sampling dan pengujian. Hasil perhitungan realisasi dari masing-masing komponen untuk

menghasilkan realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II 2026 diperoleh nilai komponen A = 100%, B = 100%, C = 100% dan D = 100% sehingga diperoleh realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan rumus (A + B + C + D)/ 4 sebesar 100%.

Realisasi Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang diperoleh (100,00%) jika dibandingkan dengan target triwulan II 2026 (98,75%) diperoleh capaian 101,27% dengan kategori "Sangat Baik".

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.4 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	98,75	100,00	101,27

Berdasarkan Tabel di atas, indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target sebesar 98,75% baik pada Triwulan I maupun Triwulan II Tahun 2026. Pada kedua triwulan tersebut, realisasi kinerja mencapai 100,00%, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 101,27%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dan melampaui target secara konsisten pada Triwulan I dan Triwulan II. Tidak adanya perubahan antara capaian Triwulan I dan Triwulan II menunjukkan bahwa seluruh sampel sediaan farmasi berisiko yang menjadi sasaran pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsistensi capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko telah berjalan secara efektif dan mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target Indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2026 mengalami revisi target sejak Januari 2026, yang semula 90,25% menjadi 98,75%. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari biro perencanaan bahwa target di tahun berjalan tidak boleh lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 (98,75%), realisasi kinerja triwulan II tahun 2026 (100,00%) diperoleh capaian sebesar 101,27% dengan kategori tercapai / melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II ini diperoleh sebesar 100,00%, masih memenuhi target yang ditetapkan (98,75%) dengan capaian 101,27%.

Capaian yang diperoleh ditunjang oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut :

1. Koordinasi yang baik antara petugas sampling, penerima sampel dan pengujian.
2. Setiap tahapan yang berpengaruh terhadap pencapaian dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap bulan
3. Adanya penyesuaian target sampling untuk sediaan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dengan parameter uji cemaran logam Pb, Cd, dan As menjadi salah satu strategi untuk pencapaian timeline pengujian sesuai standar.
4. Memastikan peralatan laboratorium beroperasi dengan baik yang menunjang terlaksananya pengujian sesuai SLA yang sudah ditetapkan.

5. Memastikan komunikasi dan koordinasi antara pengujian dan bagian sampling baik internal maupun dalam region Pekanbaru berjalan dengan baik, sehingga dapat mengantisipasi apabila ada hambatan terkait pengujian.
6. Tetap memastikan jaminan mutu hasil pengujian sebagaimana yang diatur dalam ISO/IEC 17025:2017.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk memastikan realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan perlu dilakukan upaya perbaikan kinerja khususnya terhadap kendala yang ditemukan pada triwulan II yaitu sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait Nota Dinas Penyesuaian Target RO 2026, apakah dapat dilakukan pengurangan di kategori sampel Day Cream / Night Cream
2. Memprioritaskan perbaikan alat laboratorium utama yang mendukung pemenuhan timeline pengujian.
3. Melakukan pelatihan penggunaan alat *Atomic Absorption Spectrophotometer* (atau Spektrofotometer Serapan Atom) yang baru untuk mempercepat proses pengujian cemaran logam.
4. Menyesuaikan pelaksanaan sampling obat kategori JKN pada Kabupaten yang memiliki stok yang memadai.

Selain itu, ada beberapa upaya antisipatif untuk penyempurnaan kinerja ke depannya, diantaranya :

1. Melakukan monitoring pemenuhan timeline sesuai pedoman
2. Melakukan koordinasi yang baik antara sampling dan pengujian sehingga SLA baik pelaksanaan sampling, pelaksanaan pengujian dan pelaporan hasil pengujian memenuhi timeline seperti yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling.
3. Mengawal semua tahapan proses dari sampling sampai pelaporan yang mempengaruhi perhitungan indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Tabel 3.6 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	1. Masih sulit ditemukan sampel kategori Kosmetik Risiko Tinggi - Day Cream / Night Cream. Kategori ini cukup sulit ditemukan di lapangan dikarenakan adanya pergeseran tren pasar sediaan kosmetik dari Day Cream / Night Cream menjadi Moisturizer. Target bulan April masih dapat dicapai, namun masih terdapat target Kosmetik kategori Day Cream / Night Cream hingga akhir tahun 2. Saat ini masih dalam proses instalasi alat AAS yang baru sehingga pada bulan Mei belum bisa melakukan pengujian sampel dengan parameter logam Pb, Cd, dan As	1. Lakukan pemetaan ketersediaan merk dagang untuk kategori sampel Day Cream / Night Cream di pasaran 2. Jika tidak dapat ditemukan di lapangan, agar dapat diusulkan ke unit pengampu teknis untuk perubahan jenis sediaan Day / Night Cream menjadi sediaan lain 3. Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait Nota Dinas Penyesuaian Target RO 2026, apakah dapat dilakukan pengurangan di kategori sampel Day Cream / Night Cream 4. Agar dikaukan koordinasi dengan bagian sampling untuk tidak menyampling sediaan dengan parameter cemaran logam Pb, Cd, dan As.	1. Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait pelaksanaan sampling sediaan farmasi bulan Mei hingga Desember 2026 sesuai Nota Dinas dari Sekretaris Utama BPOM Nomor PR.04.02.2.04.26.321 mengenai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026 2. Melakukan koordinasi dengan petugas sampling untuk tidak melakukan sampling sampel dengan parameter cemaran logam Pb, Cd, dan As.	Mei 2026	Y	O-01 O-50	1. Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline
Mei	1.Terdapat tambahan sampel bulan mei diantaranya yaitu 1 sampel Obat (Dikarenakan dalam 1 kemasan terdapat 1 NIE dengan 2 nomor bets sehingga sampel terhitung 2 sampel), 3 sampel INWAS KOS dan 6 sampel INWAS SK. 2.Terdapat kendala dalam mencari sampel INWAS KOS dan INWAS SK secara online di marketplace. Sulit melakukan pembelian sampel dengan nomor bets yang sama dan jumlah yang cukup banyak 3. Adanya reagen yang masih proses pengadaan untuk melakukan uji endotoksin pada sediaan obat,sehingga rencana pengujian endotoksin diundur ke bulan september	1.Lakukan penyesuaian untuk pelaksanaan sampling bulan selanjutnya. 2. Lakukan pendataan lebih banyak akun marketplace online sebagai cadangan apabila sampel sulit ditemukan. 3. Agar melakukan koordinasi dengan bagian pengadaan untuk memastikan reagen untuk pengujian endotoksin telah dipesan.	1. Menginformasikan kepada PJ sampling kosmetik dan suplemen kesehatan untuk mendata lebih banyak lagi akun marketplace online sebagai cadangan tempat sampling apabila sampel sulit ditemukan pada perencanaan sampling online selanjutnya 2. Akan dilakukan koordinasi dengan bagian pengadaan untuk memastikan reagen untuk pengujian endotoksin telah dipesan.	Juni 2026	Y	O-01 O-50	1. Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline
Juni	1. Terdapat kendala dalam memenuhi target sampel Obat Kategori JKN di Kota Pangkal Pinang, dikarenakan kekosongan stok di sarana JKN (Puskesmas) akibat kendala pengadaan obat yang	1.Agar menyesuaikan pelaksanaan sampling obat kategori JKN pada Kabupaten yang memiliki stok yang memadai 2. Agar melakukan pemetaan merk dan bobot kosmetik	1. Merencanakan pelaksanaan sampling obat kategori JKN 1-3 bulan kedepan dengan target yang lebih banyak pada Kab. Bangka Tengah / Kab. Bangka Selatan	Juli 2026	Y	O-01 O-50	1. Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	di alami oleh GFK Dinas Kesehatan Kota Pangkal Plnang 2. Terkendala dalam memenuhi target sampel Kosmetik Bentuk Sediaan Lip Color, dikarenakan keterbatasan jumlah untuk setiap item dengan nomor bets yang sama dan kecilnya bobot sampel yang beredar di pasaran. 3. Terjadi antrian alat AAS menggunakan GFA untuk pengujian logam	bentuk sediaan Lip Color serta target sarana yang memungkinkan untuk disampling 3. Agar dilakukan pengaturan penggunaan alat AAS	2. Melakukan pemetaan merk kosmetik bentuk sediaan Lip Color dengan bobot sampel yang cukup besar dan melakukan pendataan lebih banyak target sarana sampling kosmetik sebagai cadangan tempat sampling apabila sampel sulit ditemukan 3. Akan dibuat jadwal penggunaan AAS				Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian yaitu dilakukannya proses revisi anggaran baik untuk sampling maupun pengujian. Alokasi anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penyebab tercapainya target dari suatu kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,00%. Hal ini tentunya ditunjang oleh beberapa program atau kegiatan diantaranya :

1. Proses revisi anggaran yang baik untuk sampling maupun pengujian. Alokasi anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penyebab tercapainya target dari suatu kinerja.
2. Peningkatan kompetensi personel pengujian yang dilakukan melalui bimbingan teknis pengujian baik internal maupun eksternal.
3. Berkoordinasi dengan Balai Penguji yang lain di region Pekanbaru terkait parameter uji regionalisasi baik yang diuji di BBPOM di Pangkal Pinang maupun di Balai yang lain.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	231.138.023	78.694.815	34,05	**2,97**	**1,97**	**75% (Tidak Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi, pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dikategorikan tidak efisien. Meskipun realisasi kinerja telah mencapai 100,00% atau 101,27% dari target yang ditetapkan, realisasi penggunaan anggaran baru mencapai 34,05% dari target anggaran. Kondisi tersebut menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2,97 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1,97, sehingga berdasarkan hasil pengukuran dikategorikan tidak efisien.

Rendahnya realisasi anggaran terutama disebabkan oleh tidak terealisasinya rencana pembelian reagen. Terdapat rencana penarikan dana QIA.002 pada bulan Juni untuk pembelian reagen sebesar Rp154.338.840 yang telah dikontrakkan dengan penyedia dan semula direncanakan dikirimkan pada tanggal 18 Juni 2026. Namun, penyedia mengajukan adendum kontrak sehingga jadwal pengiriman diundur menjadi tanggal 26 Juni 2026. Meskipun telah dilakukan adendum kontrak, penyedia tidak dapat menyelesaikan kontrak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya, realisasi anggaran untuk pembelian reagen tersebut tidak dapat dicapai pada periode pelaporan.

Dengan demikian, rendahnya realisasi anggaran pada periode ini bukan disebabkan oleh tidak tercapainya target kinerja, karena realisasi output telah mencapai 100,00%, melainkan terutama dipengaruhi oleh keterlambatan penyelesaian kontrak oleh penyedia yang berdampak pada tertundanya realisasi anggaran pembelian reagen. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak dan memastikan kesesuaian antara rencana penarikan dana, jadwal pengadaan, dan realisasi kegiatan pada periode berikutnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

1. Melakukan pengawalan dan evaluasi pencapaian output setiap bulannya untuk memastikan target tercapai minimal 100% dan mengupayakan pencapaian di atas target dengan anggaran yang ada.
2. Melakukan revisi anggaran sisa kegiatan yang sudah terlaksana untuk dioptimalisasikan kepada kegiatan yang lain sesuai dengan kebutuhan laboratorium untuk mencapai target kinerja ini.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target diantaranya :
   - Percepatan pengadaan pengujian seperti reagensia, baku pembanding, suku cadang dan pendukung pengujian untuk memenuhi kebutuhan di laboratorium.
   - Melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai dengan program kalibrasi yang sudah ditetapkan.
   - Jika terjadi kerusakan alat laboratorium, segera dilaporkan pada aplikasi "Pucak Ok" dan berkoordinasi dengan bagian Tata usaha supaya proses perbaikan alat bisa dilaksanakan segera sebelum timeline pengujian sampel.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan monitoring dan evaluasi laporan interim TW I telah dilakukan penyesuaian kegiatan sampling sampel dengan parameter uji cemaran logam Pb,Cd, dan As. Penyesuaian ini bertujuan untuk tetap menjaga tercapainya timeline pengujian sesuai standar.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Adanya proses efisiensi anggaran di Triwulan 1 maka dilakukan usulan penyesuaian target jumlah sampel, hal ini untuk memastikan anggaran yang tersedia masih cukup untuk pengadaan sampel dan reagen.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Tindak lanjut atas rekomendasi /rencana aksi kinerja telah dievaluasi pelaksanaannya sehingga kendala yang dihadapi pada TW 1 tidak terulang kembali pada TW selanjutnya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pada awal tahun 2026 telah dilakukan penyesuaian target dari IKU Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Penyesuaian target berdasarkan capaian pada laporan kinerja tahun 2025 dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

2. **Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO**

Pelaporan KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) merupakan pelaporan kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Sedangkan Pelaporan ESO (Efek Samping Obat) merupakan pelaporan mengenai respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keamanan obat dan pemantauan keamanan obat di suatu negara. Pelaporan KTD/ESO merupakan indikator penting yang menunjukkan bagaimana pemantauan keamanan obat di suatu negara berjalan dengan baik.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam melaporkan KTD/ESO yang terjadi di masyarakat. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Balai Besar POM Pangkal Pinang yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh Balai Besar POM Pangkal Pinang pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.8 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan II.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga tidak bisa dievaluasi perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan I dengan Triwulan II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	-	-	

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga tidak bisa dievaluasi perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan II dengan Target pada tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil koordinasi dan pendampingan ke tenaga kesehatan selaku PIC di fasilitas pelayanan kesehatan, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaporan KTD/ESO diantaranya yaitu :

1. Tenaga kesehatan selaku PIC sarana ragu dalam memilih KTD/ESO yang akan dilaporkan
2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar
3. Adanya interfensi dari dokter selaku pemangku kepentingan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mengizinkan pelaporan KTD/ESO dikarenakan perbedaan persepsi mengenai kriteria KTD/ESO yang dapat dilaporkan

Ketiga hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan yang bertugas sebagai PIC sarana.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai target Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans dan berpotensi besar dapat melaporkan KTD/ESO. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memahami kriteria KTD/ESO yang dapat dilaporkan dan segera melakukan pelaporan apabila terjadi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) di sarananya.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan melalui media daring maupun luring guna memperkuat komitmen dan keterlibatan aktif fasilitas pelayanan kesehatan dalam sistem pelaporan farmakovigilans.
3. Melakukan audiensi ke dokter selaku pemangku kepentingan di fasilitas pelayanan kesehatan. Audiensi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria KTD/ESO yang dapat dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 3.11 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan dan lupa mengenai teknis pelaporan menggunakan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Mei 2. Melakukan follow up sarana target dan memberikan link materi yang berisi materi dan buku saku petunjuk pelaporan KTD/ESO melalui e-meso	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM 2. Melakukan follow up saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Mei	Mei	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
Mei	1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juni 2. Melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM (Pada bulan juni telah diperoleh info rencana pelaporan dari PIC sarana RSUD Drs. H. Abu Hanifah dan RSUD Kriopanting) 2. Melakukan follow up saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juni	Juni	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
Juni	1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar 3. Adanya interfensi dari dokter yang tidak mengizinkan pelaporan KTD / ESO dikarenakan perbedaan persepsi mengenai jenis KTD / ESO yang dapat dilaporkan	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juli 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO 3. Agar melakukan audiensi ke dokter di puskesmas dan rumah sakit yang terdeteksi mempunyai perbedaan persepsi mengenai KTD / ESO	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM 2. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juli	Juli	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 dalam rangka mencapai target indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO diantaranya yaitu melakukan identifikasi sarana puskesmas dan rumah sakit yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO setiap bulannya, melakukan *follow up* ke sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO dan melakukan audiensi ke dokter di puskesmas dan rumah sakit yang terdeteksi mempunyai perbedaan persepsi mengenai pelaporan KTD/ESO. Seluruh upaya yang telah dilakukan pada Triwulan II tersebut menghasilkan realisasi pelaporkan KTD/ESO oleh 6 Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan rincian 2 laporan dari rumah sakit dan 4 laporan dari puskesmas. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu sebesar 27.85%, realisasi pelaporan tersebut telah mencapai 47.86% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan berdampak positif pada *progress* pencapaian target. Dari ketiga upaya tersebut, pelaksanaan *follow up* langsung ke sarana target menjadi kegiatan yang paling berdampak terhadap peningkatan jumlah laporan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5.982.000	5.982.000	100,00	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran pada triwulan II tahun 2026 belum dapat dihitung karena capaian indikator output belum tersedia.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan KIE secara hybrid (daring dan luring) serta pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada PIC sarana secara daring

dan luring. Koordinasi dan pendampingan secara daring terbukti dapat meningkatkan komitmen PIC sarana dalam melakukan pelaporan KTD/ESO, meskipun dampaknya tidak sebesar jika dilakukan secara luring. Upaya ini meningkatkan efektifitas kegiatan pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan penggunaan anggaran yang efisien. Selain itu, sebagai upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran, terhadap Rp 2.343.000 sisa anggaran yang tidak terserap pada TW I dimanfaatkan pada TW II untuk kegiatan Sosialisasi SE Kewajaran Pesanan dan Pelaporan CAPA melalui SMARTPOM sehingga Rencana Penarikan Dana TW II disesuaikan dengan realisasi anggaran setelah kegiatan tambahan tersebut terlaksana.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada triwulan II yaitu dengan melaksanakan kegiatan secara daring dan luring yang memungkinkan jangkauan pembinaan yang lebih luas tanpa terkendala oleh batasan wilayah dengan tetap mengutamakan kualitas pembinaan

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja peningkatan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, telah dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran guna mendukung pelaksanaan KIE Farmakovigilans dan monitoring pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran seefektif mungkin, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja yang telah dicapai pada Triwulan II tahun 2026, hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencapaian target diantaranya yaitu :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans dan berpotensi besar dapat melaporkan KTD/ESO.

- Meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan melalui media daring maupun luring
- Melakukan audiensi ke dokter selaku pemangku kepentingan di fasilitas pelayanan kesehatan berkaitan dengan pelaporan KTD/ESO.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya diantaranya yaitu :

- Melanjutkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans dan berpotensi besar dapat melaporkan KTD/ESO.
- Terus meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan selaku PIC sarana, khususnya secara langsung dengan memanfaatkan kegiatan pemeriksaan rutin ke sarana pelayanan kefarmasian.

3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.13 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	Sangat Baik

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan atau ketentuan lainnya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel
B. Kesesuaian Parameter Uji
C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian
F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II adalah 100%. Realisasi ini diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian terhadap 82 sampel pangan olahan berisiko. Dari enam kriteria penilaian semuanya mencapai nilai optimal. Target yang ditetapkan pada TW II adalah 98,90%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 101,11%. Target pada TW II berbeda dengan target awal penyusunan Renstra tahun 2025–2029. Terjadi kenaikan target dari 91% menjadi 98,90%. Perubahan target dilaksanakan setelah adanya pembahasan dengan kedeputian 3 terkait target dan perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025. Perubahan target ini dilakukan karena untuk menyesuaikan realisasi dengan target awal yang telah ditetapkan. Target awal ditetapkan lebih rendah karena indikator ini merupakan indikator baru sehingga pada saat penyusunan target belum ada kertas kerja yang dapat menggambarkan capaian dari tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan pada awal tahun adalah 91% karena belum ada nilai *baseline* untuk indikator ini sehingga belum

memperhatikan pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap target. Dengan adanya peningkatkan target diharapkan realisasi dan capaian untuk indikator ini tidak melebihi 110%. Pada TW II, capaian yang diperoleh 101,11 dengan realisasi 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mampu dicapai oleh BBPOM di Pangkal Pinang. Hasil capaian ini menyebabkan BBPOM di Pangkal Pinang masuk dalam kriteria "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.14 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	98,9	100,00	101,11

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan I dan Triwulan II menunjukkan kinerja yang konsisten. Target yang ditetapkan pada masing-masing triwulan sebesar 98,90%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 100,00%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 101,11% dari target yang telah ditetapkan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh sampel pangan olahan berisiko yang memerlukan tindak lanjut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian yang melampaui target pada kedua triwulan mengindikasikan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Tidak terdapat perbedaan capaian antara Triwulan I dan Triwulan II, yang menunjukkan stabilitas kinerja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sampel pangan olahan berisiko. Konsistensi ini diharapkan dapat dipertahankan pada triwulan berikutnya melalui penguatan koordinasi, optimalisasi proses monitoring,

serta peningkatan efektivitas pengawasan untuk menjaga mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,90	100,00	101,11 ▲	Tercapai/ Melampaui

Pada Triwulan I terjadi perubahan target bulanan, triwulan dan tahunan. Target awal yang ditetapkan adalah 91% dan untuk saat ini target dinaikkan menjadi 98,90%. Target yang ditetapkan untuk Tahun 2026 adalah 98,90% sama dengan target triwulan karena sifatnya flat. Realisasi Triwulan II telah mencapai target triwulan dan tahunan yaitu 100% dengan kategori "**Tercapai/Melampaui**". Dari enam komponen penilaian yang ditetapkan, semua komponen mencapai nilai maksimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan BBPOM di Pangkal Pinang dalam mencapai target Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II didukung oleh koordinasi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam pelaksanaan sampling, pengujian, serta tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan memperhatikan prioritas pengawasan, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan pengujian.

Pada bulan Mei 2026 dilakukan penyesuaian target Rincian Output (RO) Pengawasan Makanan sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target jumlah sampel makanan yang diperiksa berubah dari 192 sampel menjadi 169 sampel. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan proporsi target sampling antara kategori pangan olahan berisiko dan PIRT berisiko. Pada saat revisi target ditetapkan, seluruh 15 sampel PIRT telah selesai dilakukan sampling sehingga

tetap diproses sesuai rencana awal. Dengan demikian, penyesuaian proporsi target sampling lebih banyak dilakukan pada kategori pangan olahan berisiko. Meskipun demikian, perubahan target RO tidak mengubah target capaian indikator, karena indikator diukur berdasarkan persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, bukan berdasarkan jumlah sampel yang diperiksa. Melalui penyesuaian perencanaan sampling dan optimalisasi sumber daya, seluruh target sampling hasil revisi tetap dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Strategi penyesuaian perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang telah diterapkan pada Triwulan I terus dipertahankan pada Triwulan II sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan reagen, media, dan sarana laboratorium dilakukan secara optimal tanpa mengurangi kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan pengujian. Selain itu, BBPOM di Pangkal Pinang tetap menjalin koordinasi yang intensif dengan laboratorium penguji regional Pekanbaru untuk memastikan seluruh sampel dapat diuji, hasil pengujian diterima tepat waktu, dan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, yang menjamin kompetensi personel, validitas metode pengujian, ketertelusuran hasil pengujian, pengendalian mutu internal, serta keandalan peralatan laboratorium. Monitoring dan evaluasi terhadap progres sampling, pengujian, dan tindak lanjut juga dilakukan secara berkala sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Berbagai upaya tersebut menghasilkan realisasi sebesar 100,00%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,90%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,11%.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

BBPOM di Pangkal Pinang melaksanakan beberapa upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja terkait persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dicapai. Upaya-upaya berikut merupakan tindak lanjut dari upaya yang telah dilakukan sejak Triwulan I. Adapun upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan berisiko

yang menjadi target kinerja setiap akhir bulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kategori sampel yang diperiksa dan yang masuk ke laboratorium sesuai dengan rencana dan Pedoman Sampling.

2. Meningkatkan koordinasi dengan balai di lingkup regional Pekanbaru untuk memastikan bahwa sampel regional yang dikirimkan dapat diuji dengan baik dan sesuai ketentuan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan pendukung pengujian lainnya untuk memastikan bahwa pengujian sampel pangan olahan berisiko dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mengajukan penambahan alat gelas dan cawan sekali pakai untuk mengatasi kekurangan alat gelas di laboratorium mikrobiologi.
4. Melakukan penyesuaian terhadap target sesuai dengan kesepakatan baru yang ditetapkan oleh pengampu.
5. Melakukan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kondisi peralatan yang dimiliki siap untuk melakukan pengujian.

Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	**Pemeriksaan** Terdapat Nota Dinas dari Sekretaris Utama BPOM Nomor PR.04.02.2.04.26.321 mengenai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target sampel pangan olahan bulan Mei hingga Desember 2026. Total target tahunan awal yaitu 192 sampel, direvisi menjadi 169 sampel Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan April	Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait perhitungan persentase setiap Kategori dan Sub Kategori sampel pangan olahan sesuai Nota Dinas Penyesuaian Target RO 2026	Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait pelaksanaan sampling pangan olahan bulan Mei hingga Desember 2026 sesuai Nota Dinas dari Sekretaris Utama BPOM Nomor PR.04.02.2.04.26.321 mengenai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026	Mei	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Pengujian Realisasi : - Sampai dengan bulan April jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 40 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 40 sampel, masih menggunakan target sesuai dengan renlak awal Kendala : Pada bulan April tidak terdapat kendala yang menggangu proses pengujian di laboratorium kimia pangan dan mikrobiologi. Personel lab fokus pada pengerjaan verifikasi metode temuan KAN sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pengujian sampel. Personel memiliki kompetensi yang berbeda dalam melakukan verifikasi metode sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : Telah dilakukan perbaikan UPS untuk destilasi unit	Melakukan bimtek/pelatihan untuk pengembangan kompetensi analis. Melakukan koordinasi dengan pemeriksaan terkait perubahan target sampel pangan olahan.	Mengajukan usulan judul untuk pengembangan komptensi terkait verifikasi metode dan perhitungan ketidakpastian. Melakukan koordinasi untuk menyusun renlak baru sesuai target baru.	Mei	Ya	O-54	Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji
Mei	**Pemeriksaan** Realisasi : Pada Bulan Mei telah dilakukan sampling 23 sampel pangan olahan (Target mei 22 sampel, Lebih 1 dari sampel kasus infokom). Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling hasil revisi penyesuaian target RO Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya sampel tambahan yang melebihi target bulanan	PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya sampel tambahan yang melebihi target bulanan	Juni	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sampling komoditi pangan olahan bulan Mei **Pengujian** Realisasi : - Sampai dengan bulan Mei jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 63 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 63 sampel, terdapat penyesuaian dan revisi terhadap renlak untuk menindaklanjuti perubahan target RO sampel pangan Kendala : Pada bulan Mei kendala yang dihadapi pada pengujian logam. Kendala yang dihadapi adalah analis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pengujian karena masih dalam tahap penyesuaian menggunakan alat baru. Perubahan LCP pengujian dan konsep pengambilan keputusan yang ditetapkan PPPOMN masih dalam proses penyesuaiann sehingga terdapat beberapa perhitungan yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama, salah satunya perhitungan untuk ketidakpastian pengujian. Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : Diskusi dan sharing knowledge antar penguji di laboratorium pangan dan mikro terkait permasalahan dalam pengisian LCP	Perlunya segera dilakukan bimtek untuk pengembangan kompentensi analis khususnya tentang verifikasi metode dan perhitungan ketidakpastian pengujian	Bimtek internal pengujian	Juni	Ya	O-54	Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji
Juni	**Pemeriksaan**						

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Realisasi : Pada Bulan Juni telah dilakukan sampling 19 sampel pangan olahan (Target Juni 20 sampel, kurang 1 sampel sebagai kompensasi dari kelebihan sampling bulan sebelumnya). Pelaksanaan sampling mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Juni	Berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya perbedaan antara realisasi dengan target bulanan	Juli	Tidak	-	-
	Pengujian Realisasi : - Sampai dengan bulan Juni jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 82 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 82 sampel, terdapat penyesuaian dan revisi terhadap renlak untuk menindaklanjuti perubahan target RO sampel pangan Kendala : Kendala yang dihadapi di bulan Juni adalah tingginya jumlah sampel masuk ke laboratorium. Selain sampel rutin dan sampel regional, terdapat sampel pihak ketiga (DAK) dari kabupaten Bangka Tengan dan Bangka yang masuk dalam waktu berdekatan dengan parameter uji yang bervariasi dan timeline 15 HK. Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : Penyusunan prioritas atau penjadwalan pengujian	Perlu dilakukan koordinasi dengan pemilik sampel DAK agar sampel tidak masuk laboratorium secara bersamaan	Berkomunikasi dengan dinas kesehatan / pemilik sampel DAK agar dilakukan pembagian jadwal pengiriman sampel ke laboratorium	Juli	Ya	O-70	Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sampel sesuai dengan urutan timeline						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Triwulan II, indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan berhasil mencapai realisasi sebesar 100,00% atau 101,11% dari target sebesar 98,90%. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan program pengawasan pangan olahan yang dilaksanakan secara terencana, didukung koordinasi yang baik antar fungsi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang tersedia.

Program yang paling berkontribusi terhadap pencapaian indikator ini adalah pelaksanaan sampling, pengujian laboratorium, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pangan olahan berisiko. Kegiatan tersebut merupakan proses bisnis utama yang secara langsung menghasilkan output berupa sampel yang diuji dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Alokasi anggaran terbesar pada indikator ini difokuskan untuk mendukung pelaksanaan sampling di lapangan, pengujian laboratorium, penyediaan reagen, media, bahan habis pakai, serta pengiriman sampel ke laboratorium regional apabila diperlukan. Meskipun terdapat penyesuaian penggunaan anggaran pada Triwulan II, optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan sumber daya memungkinkan seluruh kegiatan prioritas tetap terlaksana sesuai target.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan pendukung, antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi sampling, pengujian, dan tindak lanjut hasil pengawasan melalui rapat evaluasi rutin serta pemanfaatan aplikasi Madu Pelawan, sehingga kendala yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
2. Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium Kimia Pangan dan Mikrobiologi yang menjamin kompetensi

personel, penggunaan metode uji yang tervalidasi, ketertelusuran pengukuran, serta pelaksanaan pengendalian mutu internal. Penerapan sistem manajemen tersebut menghasilkan data pengujian yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko.

3. Digitalisasi pengelolaan data laboratorium dan pelaporan hasil pengujian, melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT), aplikasi Madu Pelawan, media penyimpanan berbasis cloud (Google Drive), serta penyusunan Catatan Pengujian hingga Laporan Hasil Uji (LHU) secara elektronik. Digitalisasi tersebut meningkatkan validitas data, mempercepat proses pelaporan, mempermudah pemantauan status sampel, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengujian.
4. Koordinasi yang intensif antara fungsi pemeriksaan, laboratorium, dan laboratorium penguji regional Pekanbaru dalam pengelolaan sampel yang memerlukan pengujian lanjutan. Koordinasi tersebut memastikan proses pengujian dan penyampaian hasil uji dapat diselesaikan tepat waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan tindak lanjut.

Di sisi lain, kegiatan yang tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian indikator adalah kegiatan dukungan manajemen, seperti administrasi perkantoran, rapat koordinasi umum, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun tidak menghasilkan output yang secara langsung memengaruhi persentase sampel yang ditindaklanjuti, kegiatan tersebut tetap berperan sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas, penguatan tata kelola organisasi, dan peningkatan kompetensi pegawai.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indikator pada Triwulan II menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengawasan pangan olahan telah berjalan secara efektif melalui sinergi antara kegiatan pengawasan, sistem manajemen laboratorium yang memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017, digitalisasi proses bisnis, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya yang optimal. Hal tersebut menjadi faktor utama yang mendukung konsistensi capaian kinerja yang melampaui target pada Triwulan II.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	27.608.941	22.952.541	83,13	**1,22**	**0,22**	**95% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi, penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memperoleh nilai efisiensi sebesar 95% (efisien). Dari pagu anggaran Triwulan II sebesar Rp27.608.941, realisasi anggaran mencapai Rp22.952.541 atau 83,13%, sedangkan realisasi output mencapai 100,00% atau 101,11% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang tersedia.

Efisiensi penggunaan anggaran pada Triwulan II merupakan hasil dari optimalisasi perencanaan kegiatan yang telah dilakukan sejak Triwulan I sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi anggaran. Penyesuaian rencana sampling dan pengujian yang telah disusun sebelumnya dapat diimplementasikan secara lebih efektif dengan mempertimbangkan tingkat risiko produk, prioritas pengawasan, serta ketersediaan reagen, media, dan bahan habis pakai di laboratorium. Selain itu, pemanfaatan sarana laboratorium yang tersedia secara optimal serta koordinasi dengan laboratorium penguji regional Pekanbaru untuk pengujian tertentu turut mendukung tercapainya target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.

Meskipun demikian, besaran efisiensi anggaran pada indikator ini tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh unit kerja karena dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, kebutuhan pengujian yang bersifat

dinamis, serta karakteristik sampel yang memerlukan jenis pengujian yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan anggaran lebih diposisikan sebagai faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja, sedangkan keberhasilan pencapaian target sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan, sampling, pengujian, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mempertahankan efisiensi penggunaan anggaran, BBPOM di Pangkal Pinang telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Menyusun rencana sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko dan skala prioritas, sehingga anggaran difokuskan pada kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala setiap bulan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dengan progres pelaksanaan kegiatan, serta melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kondisi di lapangan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan reagen, media, bahan habis pakai, dan peralatan laboratorium melalui pengelolaan persediaan yang lebih terencana, sehingga dapat mengurangi pembelian yang tidak diperlukan tanpa memengaruhi mutu hasil pengujian.
4. Menerapkan digitalisasi proses bisnis laboratorium melalui pemanfaatan SIPT, aplikasi Madu Pelawan, dan sistem pelaporan elektronik sehingga proses administrasi pengujian menjadi lebih cepat, mengurangi penggunaan alat tulis kantor, serta meningkatkan efisiensi operasional.
5. Memperkuat koordinasi antara fungsi pemeriksaan, laboratorium, dan laboratorium penguji regional Pekanbaru agar pengelolaan sampel dan pelaksanaan pengujian berjalan tepat waktu dan menghindari duplikasi penggunaan sumber daya.

Upaya-upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penggunaan anggaran pada Triwulan II, yang ditunjukkan dengan tercapainya target indikator secara optimal meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 83,13% dari pagu yang tersedia. Dengan demikian, pengelolaan anggaran telah mendukung pencapaian kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Triwulan II mengacu pada hasil evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 sebagai dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah melampaui target yang ditetapkan. Informasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam mempertahankan strategi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II melalui optimalisasi koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pemanfaatan aplikasi Madu Pelawan dan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) untuk memastikan proses sampling, pengujian, dan tindak lanjut berjalan sesuai rencana. Penyesuaian aktivitas juga dilakukan dengan memprioritaskan pengawasan terhadap sampel pangan olahan berisiko sesuai hasil analisis risiko dan prioritas pengawasan nasional.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Informasi penggunaan anggaran pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengelolaan anggaran pada Triwulan II. Penyesuaian yang telah dilakukan pada Triwulan I sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dipertahankan melalui pengendalian penggunaan reagen, media, bahan habis pakai, dan sumber daya laboratorium secara lebih optimal. Monitoring realisasi anggaran dilakukan secara berkala sehingga penggunaan anggaran tetap selaras dengan pelaksanaan sampling dan pengujian. Upaya tersebut menghasilkan penggunaan anggaran yang lebih efisien pada Triwulan II tanpa memengaruhi pencapaian target kinerja.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan tindak lanjut yang telah direncanakan pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I terus diimplementasikan pada Triwulan II. Beberapa tindak lanjut yang telah

dilaksanakan antara lain penguatan koordinasi teknis sebelum pelaksanaan sampling, peningkatan komunikasi antara tim pemeriksaan dan laboratorium dalam penentuan parameter uji, pemantauan penyelesaian pengujian secara berkala melalui aplikasi Madu Pelawan, serta optimalisasi digitalisasi proses bisnis laboratorium. Implementasi tindak lanjut tersebut mampu mempertahankan realisasi indikator sebesar 100,00% sehingga target kinerja tetap tercapai.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Hasil evaluasi pada Triwulan II akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Beberapa langkah yang akan terus dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi teknis dalam perencanaan sampling untuk meminimalkan kesalahan kategori sampel, memastikan kesesuaian parameter pengujian antara tim pemeriksaan dan laboratorium, mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017, serta melanjutkan pengembangan digitalisasi proses pengujian dan pelaporan laboratorium. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung laboratorium dan peningkatan kompetensi personel akan terus diidentifikasi dan dipenuhi sesuai prioritas untuk menjaga mutu hasil pengujian. Mengingat capaian indikator secara konsisten telah melampaui target pada Tahun 2025, Triwulan I, dan Triwulan II Tahun 2026, hasil evaluasi ini juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses review target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar target yang ditetapkan lebih realistis, menantang, dan mencerminkan kapasitas organisasi.

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.18 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	Baik

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan.

Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\Sigma\,(30\% \times A1, A2, \ldots, An) + (35\% \times B1, B2, \ldots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \ldots, Cn)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Terdapat perubahan mengenai manual indikator dan perhitungan pada persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar. Realisasi indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan II adalah 100%. Target dari indikator ini adalah 100%, artinya apabila ada sampel keracunan pangan atau KLB yang masuk ke laboratorium maka harus diuji secara lengkap berdasarkan juknis keracunan pangan. Realisasi dan capaian sebesar 100% diperoleh dari pengujian sampel kasus keracunan pangan sebanyak dua sampel pada Triwulan I. Dengan hasil ini capaian BBPOM di Pangkal Pinang masuk dalam kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.19 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	100	100	100,00

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar pada Triwulan I dan Triwulan II menunjukkan realisasi sebesar 100% terhadap target 100%, sehingga persentase capaian kinerja pada kedua triwulan mencapai 100,00%. Pengukuran indikator ini dilakukan secara akumulatif sehingga capaian pada Triwulan II merupakan akumulasi realisasi sejak awal tahun.

Pada Triwulan I telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dan seluruh sampel yang diterima berhasil diuji sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga target indikator dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan II tidak terdapat kejadian KLB keracunan pangan di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang, sehingga tidak ada sampel KLB yang diterima untuk dilakukan pengujian. Oleh karena itu, realisasi indikator pada Triwulan II tetap sebesar 100% sebagai akumulasi dari capaian Triwulan I.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kesiapsiagaan laboratorium dalam penanganan KLB keracunan pangan telah berjalan dengan baik. Laboratorium tetap mempertahankan kesiapan personel, metode pengujian, peralatan, serta koordinasi dengan fungsi pemeriksaan dan instansi terkait sehingga apabila terjadi KLB keracunan pangan, pengujian dapat segera dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat sampel KLB pada Triwulan II, kinerja indikator tetap terjaga sesuai target melalui pendekatan pengukuran yang bersifat kumulatif.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar yang ditetapkan untuk Tahun 2026 adalah 100%. Sampai dengan Triwulan II, realisasi indikator tetap mencapai 100%, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan adalah 100,00% dengan kategori tercapai/melampaui.

Capaian tersebut merupakan akumulasi realisasi sejak awal tahun. Pada Triwulan I telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dan seluruh sampel yang diterima berhasil diuji sesuai standar sehingga target indikator telah tercapai. Selanjutnya, pada Triwulan II tidak terdapat kejadian KLB keracunan pangan di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang, sehingga tidak terdapat sampel KLB yang perlu diuji. Oleh karena itu, realisasi indikator pada Triwulan II tetap sebesar 100% sebagai akumulasi capaian Triwulan I.

Meskipun target tahunan telah tercapai sampai dengan Triwulan II, BBPOM di Pangkal Pinang tetap mempertahankan kesiapsiagaan dalam penanganan KLB keracunan pangan melalui pemeliharaan kompetensi personel, kesiapan sarana dan prasarana laboratorium, serta koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut diperlukan agar apabila terjadi KLB pada triwulan berikutnya, seluruh sampel dapat segera diuji sesuai standar sehingga capaian indikator tetap dapat dipertahankan hingga akhir Tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar sampai dengan Triwulan II telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran secara akumulatif, dimana pada Triwulan I telah dilakukan pengujian terhadap seluruh sampel KLB keracunan pangan yang diterima sehingga memenuhi target indikator. Pada Triwulan II tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di

wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang, sehingga tidak terdapat sampel KLB yang memerlukan pengujian. Dengan demikian, capaian indikator tetap dipertahankan sebesar 100%.

Pada bulan Mei 2026 dilakukan penyesuaian target Rincian Output (RO) Pengawasan Makanan sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target jumlah sampel makanan yang diperiksa berubah dari 192 sampel menjadi 169 sampel. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan proporsi target sampling pada kategori pangan olahan berisiko dan PIRT berisiko. Namun demikian, perubahan target RO tersebut tidak mengubah target capaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar, karena indikator ini diukur berdasarkan persentase sampel KLB yang diuji sesuai standar apabila terjadi kejadian KLB, bukan berdasarkan jumlah target sampel dalam Rincian Output Pengawasan Makanan. Oleh karena itu, penyesuaian target RO tidak memengaruhi perhitungan maupun capaian indikator ini.

Keberhasilan mempertahankan capaian indikator didukung oleh kesiapan sistem penanganan KLB yang telah dibangun melalui koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan instansi terkait dalam pelaporan serta penanganan kejadian keracunan pangan. Di sisi internal, BBPOM di Pangkal Pinang juga terus menjaga kesiapan laboratorium melalui penerapan Sistem Manajemen Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017, pemeliharaan kompetensi personel, ketersediaan metode pengujian yang tervalidasi, serta kesiapan sarana dan bahan pendukung pengujian sehingga apabila terjadi KLB, pengujian dapat segera dilaksanakan sesuai standar.

Selain itu, pengalaman penanganan KLB pada Triwulan I serta upaya koordinasi dan identifikasi kebutuhan pengujian yang telah dilakukan sejak tahun 2025 menjadi modal penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan organisasi. Meskipun pada Triwulan II tidak terdapat sampel KLB yang diuji, kesiapan tersebut tetap dipertahankan untuk memastikan bahwa setiap kejadian KLB yang mungkin terjadi pada periode berikutnya dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai standar.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sampai dengan Triwulan II, indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Mengingat indikator ini bergantung pada adanya kejadian KLB keracunan pangan dan pengukurannya bersifat akumulatif, BBPOM di Pangkal Pinang akan terus mempertahankan kesiapsiagaan agar capaian kinerja dapat dipertahankan hingga akhir Tahun 2026 apabila terjadi KLB pada periode berikutnya.

Beberapa upaya yang akan terus dilakukan untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja tersebut antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah, serta instansi terkait lainnya dalam pelaporan, penanganan, dan pengiriman sampel KLB keracunan pangan sehingga respon terhadap kejadian dapat dilakukan secara cepat dan sesuai prosedur.
2. Menjaga kesiapan laboratorium melalui pemenuhan ketersediaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, bahan habis pakai, serta memastikan peralatan laboratorium selalu dalam kondisi siap digunakan sehingga seluruh kebutuhan pengujian KLB dapat dipenuhi sesuai standar.
3. Mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, termasuk menjaga kompetensi personel, pelaksanaan pengendalian mutu pengujian, serta validitas metode uji untuk menjamin hasil pengujian yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenai keamanan pangan dan pencegahan keracunan pangan sebagai upaya preventif untuk menurunkan risiko terjadinya KLB.
5. Mengoptimalkan peran Tim Gerak Cepat (TGC) Penanganan KLB Keracunan Pangan di lingkungan BBPOM di Pangkal Pinang melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta mendorong keterlibatan aktif dalam Tim Gerak Cepat tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar penanganan KLB dapat dilakukan secara terpadu dan responsif.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya tersebut, BBPOM di Pangkal Pinang diharapkan mampu mempertahankan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi KLB keracunan pangan serta memastikan seluruh sampel yang diterima pada periode berikutnya dapat diuji sesuai standar sehingga target indikator kinerja tahunan tetap tercapai.

Tabel 3.21 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	**Pemeriksaan** Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan April **Pengujian** Realisasi : Terdapat 1 kejadian keracunan pangan (tidak ada penetapan KLB) di SMK N 1 Sungailiat yang berasal dari menu MBG (SPPG Imam Bonjol) pada bulan Maret. Jumlah sampel diterima lab : 2 sampel burger Parameter uji terkonfirmasi : AKK dan Salmonella Pada bulan April tidak ada sampel KLB KP Kendala : Tidak terdapat laporan/dokumen kronologi kejadian dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga pelaporan pada SPIMKER perlu perbaikan Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dan pembentukan Tim Gerak Cepat UPT	- Agar dilakukan koordinasi dan pemantauan dengan TGC UPT	- Melaksanakan koordinasi dan pemantauan dengan TGC UPT	- Mei	Tidak Ya	- S-03 O-09	- 1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar
Mei	**Pemeriksaan** Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan Mei **Pengujian** Realisasi : Pada bulan Mei tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang.	Forum koordinasi dengan linsek terkait KLB Agar dilakukan koordinasi dengan pengirim sampel dan pengembangan kompetensi penanganan sampel KLB KP	Penyusunan rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan Melakukan koordinasi dengan pengirim sampel Mengikuti bimtek penanganan sampel KLB KP	Juni Juni	Tidak Ya	- S-03 O-09	- 1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Laboratorium menerima sampel KLB KP karena MBG dari BPOM di Belitung berjumlah 8 sampel dan seluruhnya telah dilakukan pengujian sesuai dengan standar. Kendala : Laboratorium hanya menerima sampel tanpa penjelasan kronologi dari pengirim sampel dan tidak ada kaji ulang permintaan pengujian yang sesuai dengan identifikasi epidemiologi. Laboratorium harus mengulang pengujian dengan berbagai parameter karena permintaan uji yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan penggunaan reagen dan media yang tidak efisien dan waktu pengujian yang lama. Kurangnya pemahaman mengenai penanganan sampel KLB KP. Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan fungsi pemeriksaan dan BPOM di Belitung agar alur penanganan sampel KLB KP sesuai dengan kaidah epidemiologi.						Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar
Juni	**Pemeriksaan** Tidak terjadi kasus KLB pada bulan Juni **Pengujian** Realisasi : Pada bulan Juni tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Kendala : Tidak terdapat kendala pengujian sampel KLB KP pada bulan Juni karena tidak terdapat sampel Capaian terhadap target :	koordinasi dengan linsek terkait KLB Agar dilakukan pemantauan terhadap berita KLB keracunan pangan	Penyusunan rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan Melakukan pemantauan berkala terhadap informasi adanya KLB keracunan pangan	Juli Juli	Tidak Ya	- O-09	- Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pemantauan berita KLB KP						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sampai dengan Triwulan II, indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar telah mencapai target sebesar 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan, khususnya kegiatan pengambilan sampel, pengujian laboratorium, investigasi, dan koordinasi dalam penanganan kejadian keracunan pangan.

Berbeda dengan indikator lainnya, pelaksanaan pengujian sampel KLB keracunan pangan tidak didukung oleh alokasi anggaran yang bersifat khusus. Kegiatan pengujian KLB dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran pada kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko serta sumber daya laboratorium yang tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian indikator lebih dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam merespons kejadian KLB, meliputi kompetensi personel, kesiapan laboratorium, koordinasi lintas fungsi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pengujian, dibandingkan dengan besarnya alokasi anggaran.

Pada Triwulan II tidak terdapat kejadian KLB keracunan pangan sehingga tidak terdapat sampel yang harus diuji. Meskipun demikian, kegiatan yang mendukung kesiapsiagaan tetap dilaksanakan, antara lain pemeliharaan kesiapan laboratorium, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, serta pemantauan terhadap potensi kejadian keracunan pangan. Kegiatan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa apabila terjadi KLB pada periode berikutnya, seluruh sampel dapat segera diuji sesuai standar.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	0	0	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar belum dapat dihitung karena pada Triwulan II tidak terdapat Rencana Penarikan Dana (RPD) maupun realisasi anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini. Pengujian sampel KLB keracunan pangan tidak direncanakan sebagai kegiatan rutin, melainkan dilaksanakan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang tersedia pada kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko. Sampai dengan Triwulan II tidak terdapat kejadian KLB keracunan pangan di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang, sehingga tidak terdapat kebutuhan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengujian sampel KLB. Oleh karena itu, nilai Indeks Efisiensi (IE), Tingkat Efisiensi (TE), dan capaian efisiensi belum dapat dihitung.

Karakteristik indikator ini berbeda dengan indikator kinerja lainnya karena pencapaiannya bergantung pada terjadinya kejadian KLB yang bersifat insidental dan tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator lebih dipengaruhi oleh kesiapan sistem pengawasan, koordinasi lintas sektor, kesiapan laboratorium, serta kompetensi personel dalam merespons kejadian keracunan pangan dibandingkan dengan besarnya penggunaan anggaran. Apabila terjadi KLB, kebutuhan anggaran untuk pengujian akan dipenuhi melalui optimalisasi anggaran kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko sesuai mekanisme yang berlaku.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Meskipun indikator ini tidak memiliki alokasi anggaran khusus, BBPOM di Pangkal Pinang terus melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar penanganan KLB keracunan pangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila terjadi kejadian pada periode berikutnya. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas, serta instansi terkait untuk mempercepat penerimaan informasi dan pelaporan apabila terjadi dugaan KLB keracunan pangan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko untuk mendukung kesiapan penanganan KLB, termasuk penyediaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, bahan habis pakai laboratorium, serta sarana pendukung pengujian tanpa memerlukan alokasi anggaran tersendiri.
3. Mempertahankan kesiapan Laboratorium Kimia Pangan dan Mikrobiologi melalui penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017, sehingga kompetensi personel, metode pengujian, peralatan, dan sistem pengendalian mutu senantiasa siap digunakan apabila diperlukan pengujian sampel KLB.
4. Melaksanakan pemantauan dan identifikasi secara aktif terhadap laporan dugaan keracunan pangan serta memperkuat koordinasi internal antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium agar respons terhadap setiap kejadian dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai standar.

Dengan upaya tersebut, BBPOM di Pangkal Pinang mampu menjaga kesiapsiagaan laboratorium dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mendukung penanganan KLB keracunan pangan. Meskipun indikator ini tidak memiliki alokasi anggaran tersendiri, kesiapan personel, sarana laboratorium, dan mekanisme koordinasi tetap terpelihara sehingga target indikator dapat dipertahankan apabila terjadi KLB pada periode berikutnya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026, BBPOM di Pangkal Pinang memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, serta perencanaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 dimanfaatkan untuk mempertahankan kesiapsiagaan dalam penanganan KLB keracunan pangan. Meskipun pada Triwulan II tidak terdapat kejadian KLB keracunan pangan, BBPOM di Pangkal Pinang tetap melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan instansi terkait guna memastikan setiap dugaan kejadian keracunan pangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga tetap dilakukan untuk memastikan mekanisme penanganan KLB berjalan sesuai ketentuan, termasuk menjaga kesiapan laboratorium dalam melaksanakan pengujian apabila terjadi KLB pada periode berikutnya.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Informasi penggunaan anggaran pada Triwulan I dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya pada Triwulan II. Mengingat indikator ini tidak memiliki alokasi anggaran tersendiri, BBPOM di Pangkal Pinang tetap mengoptimalkan pemanfaatan anggaran kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko untuk mendukung kesiapan penanganan KLB, termasuk pemeliharaan ketersediaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, serta sarana pendukung pengujian. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku sehingga kesiapan laboratorium tetap terjaga tanpa memerlukan pengalokasian anggaran khusus.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada Triwulan I terus dipertahankan pada

Triwulan II. Beberapa tindak lanjut yang telah dilaksanakan antara lain penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam sistem pelaporan KLB, pemeliharaan kesiapan laboratorium melalui pemenuhan kebutuhan pengujian, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan. Meskipun pada Triwulan II tidak terdapat kejadian KLB keracunan pangan, implementasi tindak lanjut tersebut berhasil mempertahankan kesiapan organisasi sehingga indikator tetap mencapai target sebesar 100%.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II menjadi dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. BBPOM di Pangkal Pinang akan terus memperkuat sistem deteksi dini dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan KLB keracunan pangan, termasuk dengan Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, kesiapan laboratorium akan terus dipertahankan melalui pemenuhan kebutuhan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, pemeliharaan peralatan, serta peningkatan kompetensi personel sesuai penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa apabila terjadi KLB pada periode berikutnya, seluruh sampel dapat segera diuji sesuai standar sehingga target kinerja tahunan tetap dapat dipertahankan.

5. **Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.23 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63%	Sangat Baik

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian

dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

B. Kesesuaian Target Sampel

G. Kesesuaian Parameter Uji

H. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

I. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

J. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

K. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Realisasi indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 100% dengan target 96,5%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 103,63% dan termasuk dalam kategori "**Sangat Baik**".

Pada Triwulan II, seluruh target 15 sampel PIRT berisiko telah selesai diperiksa, diuji, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam batas waktu yang ditetapkan. Seluruh tahapan pengawasan telah dilaksanakan sesuai pedoman, mulai dari penentuan target sampel berbasis risiko, pelaksanaan pengujian dengan parameter yang sesuai, penyampaian laporan hasil pengujian secara tepat waktu, hingga pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Dengan terselesaikannya seluruh target sampel pada Triwulan II, indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2026.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pangan industri rumah tangga di wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang telah berjalan secara efektif melalui koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan

laboratorium, sehingga seluruh proses pengawasan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kualitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.24 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	99,33	102,93	96,5	100	103,63

Berdasarkan tabel di atas, indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan peningkatan capaian dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I, target yang ditetapkan sebesar 96,5% dengan realisasi 99,33%, sehingga capaian kinerja mencapai 102,93%. Sementara itu, pada Triwulan II target tetap sebesar 96,5%, sedangkan realisasi menjadi 100%, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 103,63%.

Pada bulan Juni 2026 dilakukan penyesuaian mekanisme pengisian Rencana Hasil Pengawasan Kinerja (RHPK), khususnya pada kolom realisasi (kolom M). Sesuai ketentuan tersebut, data realisasi diinput kembali secara kumulatif mulai bulan Januari 2026. Penyesuaian ini merupakan perubahan pada mekanisme pelaporan kinerja di dalam aplikasi RHPK dan tidak mengubah metode penilaian maupun substansi perhitungan indikator.

Setelah dilakukan penyesuaian penginputan sesuai ketentuan pada RHPK baru, realisasi indikator BBPOM di Pangkal Pinang tetap tercatat 100% karena seluruh target 15 sampel PIRT berisiko telah selesai diperiksa, diuji, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dengan demikian, perubahan pada aplikasi RHPK tidak memengaruhi pencapaian kinerja, tetapi hanya memastikan bahwa pelaporan realisasi dilakukan secara kumulatif dan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,50	100,00	103,63 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2026 ditetapkan sebesar 96,50%. Sampai dengan Triwulan II, BBPOM di Pangkal Pinang berhasil mencapai realisasi sebesar 100,00%, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan mencapai 103,63% dan termasuk dalam kategori "Tercapai/Melampaui".

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target indikator telah berhasil dipenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh terselesaikannya seluruh target pengawasan terhadap 15 sampel PIRT berisiko, yang meliputi kegiatan sampling, pengujian laboratorium, pelaporan hasil pengujian, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sesuai ketentuan. Seluruh tahapan dilaksanakan tepat waktu dan memenuhi seluruh komponen penilaian indikator.

Pada bulan Juni 2026 dilakukan penyesuaian mekanisme penginputan realisasi pada RHPK, yaitu pengisian kembali data realisasi secara kumulatif mulai bulan Januari. Penyesuaian tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme pelaporan kinerja dan tidak mengubah metode penilaian maupun hasil perhitungan indikator. Oleh karena itu, realisasi indikator tetap sebesar 100,00%.

Sesuai dengan perencanaan kinerja Tahun 2026, pelaksanaan indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditargetkan selesai pada Triwulan II. Dengan telah tercapainya seluruh target pengawasan terhadap 15 sampel PIRT berisiko, maka target indikator untuk Tahun 2026 telah diselesaikan sepenuhnya pada Triwulan II. Pada Triwulan III dan Triwulan IV tidak direncanakan lagi pelaksanaan kegiatan maupun penambahan realisasi untuk indikator ini, sehingga fokus BBPOM di Pangkal Pinang adalah mempertahankan kualitas dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II mencapai 100,00%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 96,50% dengan capaian kinerja 103,63%. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan, hingga tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Pada bulan Mei 2026 dilakukan penyesuaian target Rincian Output (RO) Pengawasan Makanan sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target jumlah sampel makanan yang diperiksa berubah dari 192 sampel menjadi 169 sampel. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan proporsi target sampling antara kategori pangan olahan berisiko dan PIRT berisiko. Namun demikian, perubahan target RO tidak mengubah target capaian indikator kinerja, karena indikator diukur berdasarkan persentase sampel yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, bukan berdasarkan jumlah sampel yang diperiksa.

Khusus pada indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, hasil penyesuaian RO menyebabkan target sampling berubah dari 15 sampel menjadi 14 sampel. Namun, pada saat revisi target ditetapkan, seluruh 15 sampel PIRT telah selesai dilakukan sampling sesuai rencana pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh 15 sampel tetap diperiksa, diuji, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga tidak dilakukan pengurangan terhadap sampel yang telah diambil. Penyesuaian proporsi target sampling selanjutnya dilakukan pada kategori pangan olahan berisiko, sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap sampel PIRT yang telah disampling.

Seluruh target sebanyak 15 sampel PIRT berisiko tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sesuai pedoman sampling dan pengujian. Meskipun pada awal tahun terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi anggaran serta perubahan target sampling, BBPOM di Pangkal Pinang mampu melakukan penyesuaian perencanaan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan pengawasan. Koordinasi dengan unit pengampu teknis terkait perubahan kategori sampel, pengaturan kembali jadwal sampling, serta optimalisasi sumber daya laboratorium

menjadi faktor penting yang mendukung penyelesaian seluruh target pada Triwulan II.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, yang menjamin kompetensi personel, validitas metode pengujian, ketertelusuran hasil pengujian, pengendalian mutu internal, serta keandalan peralatan laboratorium. Penerapan sistem tersebut memberikan keyakinan bahwa seluruh hasil pengujian yang menjadi dasar tindak lanjut telah memenuhi persyaratan mutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres sampling dan pengujian turut berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian indikator ini

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Meskipun target indikator telah diselesaikan pada Triwulan II, BBPOM di Pangkal Pinang tetap melakukan berbagai upaya penyempurnaan sebagai bekal pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium sejak tahap penyusunan rencana sampling hingga penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian kategori sampel berdasarkan kemampuan laboratorium dan tingkat risiko produk.
3. Mengidentifikasi kebutuhan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, serta sarana pendukung pengujian lainnya sejak awal tahun untuk memastikan seluruh parameter uji dapat dilaksanakan sesuai pedoman.
4. Mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 melalui peningkatan kompetensi personel, pemeliharaan validitas metode, pelaksanaan pengendalian mutu internal, kalibrasi dan verifikasi peralatan, serta tindak lanjut terhadap hasil audit internal dan asesmen eksternal guna menjamin keberlangsungan mutu hasil pengujian.
5. Mempertahankan digitalisasi laboratorium melalui pengelolaan Catatan Pengujian, Laporan Hasil Uji, dan pemantauan penyelesaian sampel secara

elektronik guna meningkatkan efisiensi proses kerja, ketertelusuran data, dan ketepatan waktu pelaporan.

Tabel 3.26 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	**Pemeriksaan** Realisasi : Telah dilakukan sampling 1 sampel PIRT Kategori pangan Hasil Olahan Biji Bijian, Kacang Kacangan Dan Umbi setelah Surat dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan No. T-PW.04.03.54.03.26.727 perihal Jawaban Usulan Perubahan Kategori PIRT diterima Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi PIRT bulan April	Agar selalu berkoordinasi dengan tim pengujian	Menginformasikan PJ sampling untuk selalu berkoordinasi dengan tim pengujian setiap akan dilakukan sampling	Mei	Tidak	-	-
	Pengujian Realisasi : Pada bulan April laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT Capaian terhadap target : Realisasi pada bulan April adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan terkait kendala peralatan yang dimiliki agar dapat dilakukan perubahan kategori pangan sampel PIRT tersebut agar realisasi IKU tercapai	Agar segera dilakukan pelaporan sampel PIRT ke pusat melalui SIPT	Melakukan pengecekan laporan pada SIPT dan memastikan sudah terkirim ke pusat untuk seluruh sampel sebelum 30 Juni 2026	Mei	Ya	O-10	Sampel PIRT terlambat dilaporkan
Mei	**Pemeriksaan** Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan Mei. Seluruh sampel PIRT telah selesai di	-	-	-	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sampling terakhir pada bulan April **Pengujian** Realisasi : Sampai dengan bulan Mei laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target waktu dan standar Capaian terhadap target : Realisasi pada bulan Mei adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pada sampel PIRT yang melebihi target revisi	Dilakukan penyesuaian renlak dengan target RO revisi	Juni	Ya	O-10	Sampel PIRT terlambat dilaporkan
Juni	**Pemeriksaan** Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan Juni. Seluruh sampel PIRT telah selesai di sampling terakhir pada bulan April **Pengujian** Realisasi : Sampai dengan bulan Juni laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan NOTA DINAS NOMOR: PW.04.03.54.06.26.636 tanggal 10 Juni 2026 dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dinyatakan bahwa seluruh pelaporan sampel PIRT telah sesuai.	- Agar dilakukan evaluasi terhadap capaian target	- Melakukan evaluasi terhadap capaian dan kesesuaian terhadap target pada TW II	- Juli	Tidak Ya	- O-10	- Sampel PIRT terlambat dilaporkan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target waktu dan standar Capaian terhadap target : Realisasi pada bulan Mei adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan didukung oleh pelaksanaan Program Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya kegiatan pengawasan pangan olahan yang meliputi perencanaan sampling berbasis risiko, pemeriksaan sarana, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Program yang paling mendukung pencapaian indikator adalah kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan berisiko, karena secara langsung didukung oleh alokasi anggaran untuk pengadaan sampel, reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, bahan habis pakai laboratorium, operasional pengujian, serta pemeliharaan sistem mutu laboratorium. Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan indikator karena memastikan seluruh proses pengujian dilaksanakan secara konsisten, kompeten, dan menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan dalam tindak lanjut hasil pengawasan.

Selain kegiatan utama tersebut, beberapa kegiatan pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan indikator antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, pengelolaan data dan pelaporan secara real time

melalui SIPT dan aplikasi Madu Pelawan, pembinaan kepada pelaku usaha PIRT dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan, serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan.

Sementara itu, penyesuaian rencana pelaksanaan akibat efisiensi anggaran pada awal tahun merupakan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, melalui pengelolaan anggaran yang adaptif, koordinasi lintas fungsi, optimalisasi sumber daya laboratorium, dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium secara konsisten, perubahan tersebut tidak memengaruhi pencapaian target indikator. Hal ini dibuktikan dengan terselesaikannya seluruh target pengawasan sebanyak 15 sampel PIRT berisiko pada Triwulan II sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63	0	0	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum dapat dihitung karena pada Triwulan II tidak terdapat Rencana Penarikan Dana (RPD) maupun realisasi anggaran yang dialokasikan pada indikator ini. Pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko serta sumber daya laboratorium yang dimiliki oleh BBPOM di Pangkal Pinang. Oleh karena itu, nilai Indeks Efisiensi (IE), Tingkat Efisiensi (TE), dan capaian efisiensi belum dapat dihitung.

Meskipun demikian, seluruh target pengawasan terhadap 15 sampel PIRT berisiko telah berhasil diselesaikan pada Triwulan II sesuai ketentuan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa BBPOM di Pangkal Pinang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui koordinasi

yang baik antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium yang menerapkan Sistem Manajemen Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017, serta pengelolaan kegiatan yang efektif. Dengan optimalisasi sumber daya tersebut, seluruh tahapan sampling, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut dapat diselesaikan tepat waktu meskipun pada Triwulan II tidak terdapat RPD maupun realisasi anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk indikator ini.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya dilaksanakan melalui penyelarasan antara perencanaan sampling, kemampuan laboratorium, dan ketersediaan anggaran pada kegiatan pengawasan pangan olahan berisiko. Selama Triwulan II, BBPOM di Pangkal Pinang terus mengoptimalkan pemanfaatan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, bahan habis pakai, serta peralatan laboratorium yang tersedia sehingga seluruh target pengujian dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian dilakukan secara berkala untuk memastikan penggunaan sumber daya berjalan secara efektif. Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 juga mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui pengendalian mutu pengujian, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, peningkatan kompetensi personel, serta digitalisasi proses pencatatan dan pelaporan hasil pengujian. Dengan optimalisasi sumber daya tersebut, seluruh target indikator dapat diselesaikan pada Triwulan II tanpa memerlukan alokasi anggaran tersendiri.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026, BBPOM di Pangkal Pinang memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan kinerja sehingga target indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat diselesaikan seluruhnya pada Triwulan II Tahun 2026.

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Informasi kinerja yang diperoleh dari Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 dimanfaatkan untuk melakukan

penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian PIRT berisiko. Penyesuaian dilakukan melalui penguatan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, penyempurnaan perencanaan sampling berbasis risiko, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian sampling, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penyesuaian tersebut terbukti mendukung penyelesaian seluruh target sebanyak 15 sampel PIRT berisiko sesuai ketentuan pada Triwulan II.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Hasil evaluasi penggunaan anggaran pada Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 menjadi dasar dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pada Triwulan II. Meskipun indikator ini tidak memiliki alokasi anggaran tersendiri, pelaksanaan kegiatan didukung melalui anggaran pengawasan pangan olahan berisiko serta sumber daya laboratorium yang tersedia. Optimalisasi penggunaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, peralatan laboratorium, dan sumber daya manusia dilakukan secara terintegrasi sehingga seluruh target pengawasan dapat diselesaikan tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dan hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 telah ditindaklanjuti secara konsisten selama pelaksanaan kegiatan. Tindak lanjut tersebut meliputi peningkatan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, penyesuaian rencana pelaksanaan sesuai kondisi lapangan, pemenuhan kebutuhan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, serta pemeliharaan, kalibrasi, dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, pengendalian mutu laboratorium dan monitoring penyelesaian sampel dilakukan secara berkala sehingga seluruh proses pengujian dan tindak lanjut dapat diselesaikan tepat waktu. Implementasi rekomendasi tersebut berkontribusi terhadap tercapainya realisasi indikator sebesar 100% pada Triwulan II.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Penyelesaian seluruh target indikator pada Triwulan II menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya. BBPOM di Pangkal

Pinang akan mempertahankan mekanisme koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, memperkuat perencanaan sampling berbasis risiko, serta terus meningkatkan kompetensi personel laboratorium melalui penerapan ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, evaluasi terhadap kebutuhan sarana, prasarana, reagen, media mikrobiologi, dan baku pembanding akan dilakukan sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan pengawasan pada tahun berikutnya tetap efektif dan tepat waktu. Pengalaman pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 juga akan menjadi masukan dalam penyusunan target dan strategi pengawasan PIRT berisiko pada periode selanjutnya.

6. **Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder**

Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.28 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86,73	102,04%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan, persentase capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 102,04% dengan realisasi sebesar 86,73%. dengan target pada Triwulan II yaitu 85%. Sehingga untuk Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder masuk dalam kategori capaian sangat baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80	85	86,73	102,04

Berdasarkan di atas, persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Triwulan I. Pada Triwulan I, dari target sebesar 85%, realisasi yang dicapai sebesar 44,03% atau 51,80% dari target. Selanjutnya pada Triwulan II, dengan target yang tetap sebesar 85%, realisasi meningkat menjadi 86,73% sehingga capaian kinerja mencapai 102,04%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin efektifnya tindak lanjut yang dilakukan oleh stakeholder terhadap keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan. Capaian yang melebihi target mengindikasikan adanya peningkatan komitmen stakeholder dalam melaksanakan tindakan perbaikan, didukung oleh penguatan koordinasi, komunikasi, serta pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPOM di Pangkal Pinang. Hasil ini diharapkan dapat dipertahankan melalui monitoring yang berkesinambungan dan pembinaan kepada stakeholder guna memastikan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan tetap terjaga pada periode berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	86,73	102,04 ▲	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan Tabel diatas, indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder memiliki target Tahun 2026 sebesar 85,00%. Sampai dengan Triwulan II, realisasi yang dicapai sebesar 86,73%, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan mencapai 102,04%. Dengan demikian, kategori pencapaian indikator ini adalah tercapai/melampaui target.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut stakeholder terhadap keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan yang didukung oleh koordinasi, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan oleh BPOM di Pangkal Pinang. Pencapaian indikator ini diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir tahun melalui monitoring berkala, pembinaan kepada stakeholder, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang masih dalam proses.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai 86,73% atau 102,04% terhadap target tahunan sebesar 85,00%, sehingga target kinerja telah berhasil dilampaui. Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya komitmen stakeholder dalam menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi yang intensif dengan stakeholder, serta pembinaan dan komunikasi yang berkesinambungan mampu mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Penggunaan mekanisme pemantauan secara rutin juga memudahkan identifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sehingga dapat segera dilakukan upaya percepatan penyelesaian.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada pembenahan aspek teknis perhitungan serta penguatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Langkah yang perlu dilakukan antara lain Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan, BPOM di Pangkal Pinang akan terus memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut oleh stakeholder. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder akan ditingkatkan melalui pendampingan, pembinaan, serta penyampaian informasi secara berkala agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, akan dilakukan pemetaan terhadap rekomendasi yang belum atau berpotensi terlambat ditindaklanjuti sebagai dasar dalam menetapkan langkah percepatan penyelesaian. Optimalisasi pemanfaatan data hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan. Melalui upaya tersebut, diharapkan capaian kinerja tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas tindak lanjut yang memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan ketentuan di bidang obat dan makanan.

Tabel 3.30 Matriks Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	"Kendala : Dari 94 rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha hanya terdapat 82 jawaban Tindak Lanjut. Dari 12 rekomendasi yang belum dijawab, 4 diantaranya merupakan hasil pengawasan bulan maret (2 Melebihi timeline dan 2 sesuai timeline) dan sisanya merupakan hasil pengawasan bulan April Dari 15 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, baru terdapat 8 jawaban Tindak Lanjut. Dari 7 rekomendasi yang belum dijawab, seluruhnya merupakan rekomendasi yang diberikan pada tanggal 21 dan 23 April 2026 (masih sesuai timeline) Target tidak tercapai dikarenakan pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan jawaban merupakan target pemeriksaan bulan April yang baru di periksa pada tanggal 21-23 April 2026 sehingga pelaku usaha dan lintas sektor belum dapat memberikan tindak lanjut secara langsung dengan waktu yang terlalu singkat"	"1. Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan 2. Lakukan penyesuaian perencanaan agar pemeriksaan ke lintas sektor terakhir dilakukan pada bulan Oktober 2026"	"1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap sarana yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan"	Mei 2026	T	-	-
Mei	Dari 110 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 101 jawaban Tindak Lanjut. Dari 19 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, telah terdapat 15 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 85.38%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : Pelaku usaha / Lintas Sektor hanya akan mengirimkan Tindak Lanjut jika semua temuan telah diselesaikan	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	Juni 2026	T	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juni	Dari 130 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 115 jawaban Tindak Lanjut. Dari 20 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, telah terdapat 17 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 86.73%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : 1. Pelaku usaha / Lintas Sektor hanya akan mengirimkan Tindak Lanjut jika semua temuan telah diselesaikan 2. Pelaku usaha di bidang distribusi pangan tidak mengetahui cara menjawab CAPA	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	Juli 2026	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian realisasi indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2026 didukung dengan adanya petugas yang responsif dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi yang ada. Setiap petugas inspeksi telah memahami dan menindaklanjuti hasil inspeksi sarana sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku dan sesuai dengan SOP yang ada. Dalam mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu komitmen dari semua pihak terutama dari sarana agar senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM Pangkal Pinang dengan tepat waktu, perlu monitoring secara berkala menggunakan melalui tools monev inovasi AMOI CAKEP Balai Besar POM di Pangkal Pinang sehingga rekomendasi dapat selalu ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai dengan timeline.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.31 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86,73	102,04	6.236.200	6.792.600	108,92	**0,94**	**-0,06**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi, pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder termasuk dalam kategori tidak efisien. Meskipun capaian kinerja telah melampaui target dengan realisasi sebesar 86,73% atau 102,04% terhadap target tahunan, realisasi penggunaan anggaran mencapai 108,92% dari target anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,94 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,06, yang menunjukkan bahwa peningkatan kinerja belum diikuti oleh penggunaan sumber daya yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan capaian kinerja tersebut diperlukan pengeluaran anggaran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan tingkat kinerja yang dihasilkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Selama Triwulan II Tahun 2026, BPOM di Pangkal Pinang telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, antara lain melalui penyusunan jadwal pengawasan secara terpadu, penggabungan pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu agenda, optimalisasi koordinasi dengan stakeholder, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja. Selain itu, pemanfaatan media komunikasi daring dalam pelaksanaan koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah dilakukan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan dinas dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Dalam mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut lintas kegiatan contohnya bersamaan dengan kegiatan pengawasan. Hal ini mengurangi frekuensi perjalanan dinas yang terpisah dan menekan biaya operasional. adapun terkait serapan anggaran yang melebihi RPD yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi antara mapping anggaran dengan Perjanjian Kinerja (PK) hasil revisi, serta memastikan bahwa perhitungan serapan anggaran mengacu pada data dan struktur mapping yang telah diperbarui. Pemanfaatan sistem informasi pelaporan dan monitoring secara digital juga mempermudah koordinasi serta pelacakan tindak lanjut rekomendasi oleh stakeholder tanpa perlu pertemuan tatap muka yang memerlukan anggaran tambahan. Selain itu, penerapan monev menggunakan tools AMOI CAKEP dalam menetapkan prioritas rekomendasi yang harus segera diingatkan kembali untuk segera merespon rekomendasi dari Balai Besar POM Pangkal Pinang. serta dengan memperkuat kolaborasi bersama stakeholder dan mengedepankan komunikasi digital serta pemantauan terintegrasi, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas dan kecepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan, sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait lintas sektor.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
- Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung kegiatan pencapaian pada indikator ini khususnya untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran
   - Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
   - Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
   - Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2026 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
   - Laporan kinerja pada triwulan sebelumnya digunakan untuk mengkaji apakah bentuk rekomendasi yang diberikan sudah cukup jelas dan mudah bagi stakeholder dalam menindaklanjutinya.
   - Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya
   - Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada subindikator terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan
   - Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat memastikan implementasi nyata di lapangan.

7. **Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan nilai rata-rata dari persentase Sarana produksi Obat, persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, persentase Sarana produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
  - Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
  - Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
  - Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada :regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Dikarenakan pada wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pangkal Pinang untuk sarana produksi sediaan farmasi hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) maka perhitungan persentase pada indikator ini hanya diambil dari persentase persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam. Adapun untuk perhitungan capaian persentase pada indikator ini adalah sebagai berikut :

% Sarprod OBA = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.32 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	Baik

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi sediaan farmasi hingga Triwulan II Tahun 2026 mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh sarana diperiksa sesuai target yang ditetapkan, dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu, sehingga dikategorikan dalam kategori "Baik" dengan notifikasi warna hijau. Kinerja ini mencerminkan efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan pengawasan terhadap standar yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.33 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100	100	100,00

Bila dibandingkan antara realisasi triwulan I dengan realisasi triwulan II, tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan jumlah sarana yang diperiksa sampai dengan triwulan II. Sehingga capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II sama dengan capaian triwulan I dan termasuk dalam kategori tercapai atau melampaui target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 ▲	Tercapai/ Melampaui

Bila dibandingkan antara realisasi triwulan II dan target tahun 2026, diperoleh kesimpulan bahwa capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan termasuk dalam kategori tercapai atau melampaui target yang ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian 100% pada Triwulan II perihal pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi disebabkan tidak adanya penambahan jumlah sarana yang diperiksa sampai dengan triwulan II. Tidak terdapat hambatan atau kendala yang terjadi pada triwulan II.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Meskipun target pada indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai, diperlukan komitmen dan konsistensi petugas pemeriksa agar capaian ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Beberapa upaya yang perlu dipersiapkan untuk pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi di triwulan III diantaranya yaitu memastikan bahwa target pemeriksaan masih beroperasi, mengumpulkan data riwayat pemeriksaan sarana, merencanakan waktu pemeriksaan sarana dan petugas yang akan melakukan pemeriksaan sarana.

Tabel 3.35 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan April	-	-	-	Tidak	-	-
Mei	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan Mei	-	-	-	Tidak	-	-
Juni	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan Juni	-	-	-	Tidak	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi hingga triwulan II yaitu sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang bersifat teknis, terstruktur, dan adaptif. Program peningkatan kapasitas SDM pengawas dan optimalisasi jadwal inspeksi lapangan menjadi faktor penunjang yang mendukung kelancaran kegiatan pengawasan. Selain itu, telah digunakan inovasi AMOI CAKEP untuk pemantauan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan dan ketepatan waktu pembuatan surat tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan capaian kinerja sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan sumber daya, efektivitas manajemen program dan *tools* pembantu pelaksanaan monitoring hasil pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap

faktor-faktor penghambat dan pendukung perlu terus dilakukan sebagai dasar penguatan berkelanjutan dalam siklus manajemen kinerja pengawasan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	5.666.440	7.989.244	140,99	0,71	-0,29	Tidak Efisien

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini sebesar -0,29 dengan Indeks efisiensi 0,71 diperoleh dengan membandingkan % capaian output dengan % capaian input (anggaran). Karena % capaian input lebih besar dari % capaian output diperoleh Tingkat efisiensi -0,29. Tingkat efisiensi < 0 menunjukkan bahwa capaian dinilai tidak efisien. Dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 7.989.244 (140,99%) diperoleh capaian output sebesar 100%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil mapping staf Perencanaan adalah anggaran dengan MAK 3165.QIC.001.55.A, 3165.QIC.001.55.B, 3165.QIC.001.55.C dan 3165.QIC.001.55.D. Anggaran yang sudah direalisasikan sampai dengan triwulan II 2026 ini sebesar Rp 7.989.244. Meskipun tidak terdapat target pemeriksaan pada triwulan II, namun terdapat realisasi anggaran pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi di dalam kota dan di luar kota. Capaian ini diperoleh dari pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang memiliki kode MAK yang sama dengan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi. Selain anggaran dari MAK 3165.QIC.001.55.A, 3165.QIC.001.55.B, 3165.QIC.001.55.C, 3165.QIC.001.55.D, indikator Persentase sarana

produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan juga ditunjang oleh anggaran peningkatan kapasitas SDM yaitu MAK 3165.QIC.004.55.S, 3165.QIC.004.55.T dan 3165.QIC.004.55.K yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi. Realisasi anggaran peningkatan kapasitas SDM ini melebihi RPD yang ditetapkan karena terdapat kegiatan pelatihan bagi petugas pengawas diluar kegiatan terpadu yang telah direncanakan sebelumnya sehingga realisasi melebihi target RPD yang ditetapkan dengan capaian anggaran 140,99%. Sementara untuk realisasi output kinerja, walaupun sesuai target dengan capaian sebesar 100%, namun karena capaian output lebih kecil dari capaian input, tingkat efisiensinya -0,29 (Tidak Efisien).

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Beberapa Upaya pencapaian target efisiensi ini antara lain :

1. Melakukan pengawalan dan evaluasi pencapaian output setiap bulannya untuk memastikan target tercapai minimal 100% dan mengupayakan pencapaian input (anggaran) tidak melebihi perencanaan bulanan yang ditetapkan.
2. Melakukan revisi anggaran sisa kegiatan yang sudah terlaksana untuk dioptimalisasikan ke kegiatan lain yang dapat menunjang target kinerja ini
3. Penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan anggaran

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.

- Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung pencapaian pada indikator ini dan menyiasati adanya efisiensi anggaran
   - Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
   - Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada triwulan sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
   - Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2026 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
   - Laporan kinerja triwulan I 2026 digunakan untuk mengkaji terkait dengan Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan melihat tren kepatuhan sarana.
   - Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.
4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya
   - Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada subindikator terkait Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
   - Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat memastikan implementasi nyata di lapangan.

8. **Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

– Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

– Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

– Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara perhitungan: % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

  a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;

  b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah

pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

- pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level maka grading sebagai A (MK);
- pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
- pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.37 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, diperoleh realisasi sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 94,25%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 106,10% dengan kategori "Sangat Baik". Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan telah berjalan secara optimal, dimana seluruh sarana yang menjadi target pemeriksaan telah dilakukan pengawasan dan terhadap hasil pemeriksaan telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian yang melampaui target ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui perencanaan yang baik, koordinasi antara petugas pengawas dan pelaku usaha, serta komitmen dalam memastikan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu pangan olahan. Keberhasilan pencapaian indikator ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan pembinaan, pendampingan, dan monitoring

terhadap pelaku usaha pangan olahan guna meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.38 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10	94,25	100,00	106,10

Berdasarkan Tabel 3.36, kinerja indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II menunjukkan capaian yang tetap optimal dibandingkan Triwulan I. Target pada kedua triwulan ditetapkan sebesar 94,25%, dengan realisasi mencapai 100,00%, sehingga persentase capaian pada masing-masing triwulan sebesar 106,10%. Tidak adanya perubahan pada target, realisasi, maupun persentase capaian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan telah berlangsung secara konsisten dan efektif, serta mampu mempertahankan kinerja di atas target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan sepanjang Semester I Tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10 ▲	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan Tabel 3.37, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" pada Triwulan II Tahun 2026 berhasil mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan realisasi sebesar **100,00%** dari target tahunan yang

ditetapkan sebesar **94,25%**. Capaian efisiensi kinerja ini menyentuh angka **106,10%**, sehingga menempatkan indikator ini ke dalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Tingginya capaian pada pertengahan tahun ini mengindikasikan bahwa Balai Besar POM di Pangkalpinang telah melakukan akselerasi dan pengawasan yang masif serta responsif terhadap sarana produksi pangan olahan di wilayah Bangka Belitung, yang didorong oleh efektivitas penjadwalan inspeksi berkala serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan lebih awal dari target lini masa tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Indikator "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" yang mencapai **106,10%** pada Triwulan II ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Strategi Pengawasan dan *Early Action* (Internal)**: Balai Besar POM di Pangkalpinang menerapkan strategi akselerasi inspeksi sejak awal tahun anggaran (Triwulan I dan awal Triwulan II). Penjadwalan audit sarana produksi pangan olahan dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan proses digitalisasi pelaporan melalui inovasi AMOI Cakap, sehingga dapat memonitoring waktu pelaksanaan Tindak lanjut dan Perbaikan CAPA yang dilakukan oleh sarana produksi.
2. **Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha UMKM Lokal (Eksternal)**: Karakteristik pelaku usaha pangan olahan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, yang didominasi oleh UMKM pangan khas daerah, menunjukkan tren peningkatan kesadaran terhadap regulasi keamanan pangan. Efektivitas pembimbingan/desk *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) yang dilakukan petugas secara proaktif membuat pelaku usaha lebih cepat merespons dan menyelesaikan perbaikan sarana mereka.
3. **Pemanfaatan Pengawasan Berbasis Risiko yang Tepat Sasaran**: Penerapan skala prioritas berbasis risiko terhadap sarana produksi pangan olahan berjalan efektif. Petugas berhasil mengidentifikasi dan memprioritaskan sarana dengan tingkat risiko tinggi dan sedang di awal tahun, sehingga pada pertengahan tahun (Triwulan II), intervensi pengawasan dan penyelesaian

tindak lanjutnya telah selesai melampaui target proporsional tahunan yang direncanakan.

Melampauinya target ini membuktikan efisiensi kerja yang tinggi, di mana seluruh sarana yang menjadi target antara pada paruh pertama tahun 2026 telah tuntas diperiksa sekaligus diselesaikan aspek hukum/tindak lanjut administratifnya secara *zero outstanding*.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi Pangan Olahan, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, dilakukan peningkatan kualitas perencanaan pengawasan berbasis data risiko yang lebih komprehensif, guna memastikan sasaran pengawasan lebih tepat dan berdampak signifikan terhadap keamanan produk yang telah diproduksi oleh sarana tersebut.

Kedua, diperlukan penguatan kapasitas SDM, baik dalam aspek teknis pemeriksaan maupun kemampuan komunikasi dengan pelaku usaha, agar proses pengawasan berjalan efektif dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat. Ketiga, perlu optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengawasan, untuk mempercepat pelaporan, monitoring, serta evaluasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan akan memperkuat pemahaman terhadap regulasi serta mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga proses tindak lanjut dapat berjalan lancar.

Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi selama bulan maret	-	-	-	Tidak	-	-
Mei	Terdapat Nota Dinas dari Sekretaris Utama BPOM Nomor PR.04.02.2.04.26.321 mengenai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pemeriksaan sarana produksi bulan Mei hingga Desember 2026. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan April	Lakukan penyesuaian target pemeriksaan sesuai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026	Melakukan revisi rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi mulai bulan Mei hingga Desember 2026	-	Tidak	-	-
Juni	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan Mei	-	-	-	Tidak	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan ini antara lain adalah Program Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan, yang mencakup kegiatan inspeksi rutin sarana produksi, pembinaan kepada pelaku usaha, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan ini didukung dengan perencanaan berbasis risiko dan monitoring evaluasi menggunakan tool monev RHPK inovasi dari Balai Besar POM Pangkal Pinang (AMOI CAKEP). Selain itu, ketersediaan SDM yang kompeten, pelaksanaan pengawasan sesuai SOP, serta pemanfaatan sistem informasi seperti SIPT (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu) juga menjadi faktor

pendorong utama. SIPT memungkinkan proses pelaporan dan tindak lanjut dilakukan secara sistematis dan terekam dengan baik, sehingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja juga sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan program yang baik, pelaksanaan kegiatan yang efisien, dukungan teknologi informasi, serta keterlibatan aktif seluruh petugas pengawas.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.41 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100	106,10	18.342.254	27.017.141	147,29	**0,72**	**-0,28**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada Tabel 3.34, penggunaan anggaran untuk indikator "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" pada Triwulan II dinilai Tidak Efisien dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,72 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,28. Kondisi tidak efisien ini secara administratif disebabkan oleh akselerasi penyerapan anggaran yang melebihi target perencanaan penarikan dana (RPD) Triwulan II, di mana realisasi anggaran mencapai 147,29% (Rp27.017.141 dari rencana Rp18.342.254). Faktor utama penyebab terjadinya ketidaksesuaian ini adalah Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang Belum Termutakhirkan: Meskipun pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dipercepat demi efektivitas pengawasan, penyesuaian/revisi halaman III DIPA (rencana penarikan dana bulanan/triwulanan) belum sepenuhnya diselaraskan secara *real-time* di sistem keuangan, sehingga memicu deviasi yang besar antara realisasi belanja riil dan target RPD Triwulan II.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Guna memperbaiki deviasi anggaran tersebut dan memastikan terciptanya efisiensi serta keselarasan antara kinerja fisik dan keuangan pada paruh kedua

tahun ini, Balai Besar POM di Pangkalpinang akan segera melakukan evaluasi ketat. upaya efisiensi biaya operasional akan dioptimalkan melalui penerapan metode klasterisasi wilayah kunjungan—dengan menggabungkan agenda pengawasan, sampling, dan tindak lanjut dalam satu kali perjalanan dinas terpadu—serta memperkuat koordinasi antara fungsi Perencana, Bendahara, dan Kelompok Substansi Pemeriksaan dalam menyelaraskan kalender kegiatan fisik dengan rencana penarikan anggaran bulanan demi menekan nilai deviasi dan mengembalikan status kinerja keuangan ke kategori "Efisien".

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim Triwulan II tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut diantaranya :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   1. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan, sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait lintas sektor.
   2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
   3. Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung kegiatan pencapaian pada indikator ini khususnya untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran
   - Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
    1. Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
    2. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2026 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi triwulan sebelumnya.
    3. Laporan kinerja Triwulan II tahun 2026 digunakan untuk mengkaji apakah bentuk rekomendasi yang diberikan sudah cukup jelas dan mudah bagi stakeholder dalam menindaklanjutinya.
    4. Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.
4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
    A. Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada sub-indikator terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan
    B. Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja

9. **Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen

kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

- Fasilitas distribusi kosmetik meliputi fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.42 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan realisasi berbanding target, diperoleh persentase capaian indikator Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II tahun 2026 yaitu sebesar 103,52%. Capaian ini termasuk dalam kategori capaian yang sangat baik dengan ditandai notifikasi warna biru.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.43 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52	96,6	100,00	103,52

Hasil realisasi Triwulan II pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 100 dengan persentase capaian 103,52%. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi

tersebut dengan realisasi Triwulan I, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. Namun terdapat perubahan rumus RHPK pada bulan april, dimana rumus awal pada kolom "%Sardist OBA dan SK" yang semula digabung menjadi 1 diubah menjadi 2 kolom yaitu kolom "%Sardist OBA" dan kolom "%Sardist SK". Hal ini menyebabkan total faktor pembagi yang semula berjumlah 3 (%Sardist Obat, %Sardist OBA dan SK, %Sardist Kosmetik), berubah menjadi 4 faktor pembagi (%Sardist Obat, %Sardist OBA, %Sardist SK, %Sardist Kosmetik). Perubahan ini menyebabkan perbedaan hasil perhitungan nilai realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada bulan April yang semula sebesar 97,69, berubah menjadi 98,27. Pada bulan mei dan juni, nilai realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100 dengan persentase capaian 103,52%. Hal ini menandakan bahwa seluruh pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi hingga bulan mei dan juni diperiksa dan ditindaklanjuti seseuai ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,60	100,00	103,52 ▲	Tercapai/ Melampaui

Hasil realisasi Triwulan II pada indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 100. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan target tahun 2026, diperoleh nilai persentase capaian sebesar 103,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi Triwulan II termasuk dalam kategori tercapai/ melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 103,52%. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator Persentase Fasilitas

Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan adanya keterpaduan dan kesinambungan dalam seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Perencanaan yang tepat sasaran Proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada data analisis risiko dan hasil pemetaan tahunan menggunakan history hasil pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Penetapan prioritas sasaran pemeriksaan berbasis risiko memungkinkan kegiatan pengawasan difokuskan pada fasilitas yang memiliki potensi ketidaksesuaian tertinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat guna.
2. Pelaksanaan yang efisien dan sesuai SOP Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan terlatih, dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Kesiapan tim pengawas, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi internal yang solid berkontribusi besar dalam memastikan bahwa pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi teknis maupun administratif.
3. Pelaporan yang tepat waktu dan terintegrasi Hasil pemeriksaan dilaporkan secara sistematis melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, yang mendukung efisiensi dalam dokumentasi serta mempercepat proses penilaian dan tindak lanjut. Pemanfaatan SIPT juga mempermudah pelacakan status rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan. Selain itu, terdapat Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) yang bermanfaat untuk memonitoring ketepatan waktu petugas dalam memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan melaporkannya melalui SIPT.
4. Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Konsisten Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara cepat dan terarah, baik melalui pembinaan langsung kepada fasilitas distribusi maupun penerbitan sanksi administratif apabila diperlukan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi

ditindaklanjuti tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha turut mendorong tingginya tingkat kepatuhan.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara perencanaan strategis, pelaksanaan teknis yang disiplin, pelaporan yang tepat waktu, serta tindak lanjut dan evaluasi yang konsisten. Capaian ini juga mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam memastikan bahwa sediaan farmasi yang beredar di masyarakat melalui jalur distribusi resmi yang berada dalam pengawasan yang ketat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko

   Perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemetaan dan analisis risiko fasilitas distribusi serta pembaharuan *database* secara berkala, agar perencanaan pengawasan lebih tepat sasaran dan berbasis data terkini. Ini dapat dilakukan melalui integrasi data pengawasan tahun sebelumnya dengan hasil evaluasi risiko terbaru.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

   Peningkatan kompetensi teknis dan administratif petugas pengawas perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis, guna memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan mendalam.

3. Optimalisasi Penggunaan SIPT dan Sistem Pelaporan Digital

   Diperlukan penguatan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) agar seluruh tahapan – dari pemeriksaan hingga tindak lanjut – dapat terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan monitoring dan pelaporan kinerja.

4. Percepatan Tindak Lanjut dan Peningkatan Pembinaan:

Mendorong pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui peningkatan intensitas pembinaan, pendekatan persuasif, serta pemberian peringatan atau sanksi secara terstruktur bagi yang tidak patuh.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

   Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, untuk dijadikan bahan perbaikan strategi pengawasan ke depan. Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) dapat dimanfaatkan untuk efisiensi proses ini.

6. Penguatan Sinergi Antar Stakeholder

   Meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas kesehatan, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, dan instansi terkait, guna memperluas jangkauan pembinaan dan mempercepat respons terhadap temuan lapangan.

Tabel 3.45 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	1. Terdapat personil pemeriksaan yang sakit sehingga terjadi kekurangan tim pemeriksa 2. Padatnya kegiatan bulan April (Bimtek IP CPPOB, Audit Kearsipan, Inspektur CDOB, Bimtek Vaksin, Bimtek Pengawasan OBA) yang menyebabkan terjadinya kekurangan tim pemeriksa	Berkoordinasi dengan Tim Kerja lain terkait usulan pegawai yang memungkinkan untuk diperbantukan dalam Tim Pemeriksaan	Meminta usulan pegawai ke Ketua tim kerja lain yang memungkinkan untuk diperbantukan dalam Tim Pemeriksaan	Mei	T	-	-
Mei	Jumlah hari kerja pada bulan Mei yang terbatas sehingga menyebabkan petugas melakukan pemeriksaan beruntun pada minggu ke-2 dan ke-3 bulan Mei. Hal ini menyebabkan pembuatan Surat TL baru dapat diselesaikan pada akhir bulan Mei dan Input SIPT baru bisa diselesaikan pada awal bulan Juni	Lakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana dengan mempertimbangkan jadwal sampling, sertifikasi dan pendampingan serta hari libur	Melakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi bulan Juni sebaik mungkin agar pembuatan tindak lanjut dan input SIPT dapat diselesaikan tepat waktu	Juni	T	-	-
Juni	Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi bulan juni	Lakukan perencanaan pemeriksaan mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO.	Melakukan perencanaan pemeriksaan bulan Juli mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO	Juli	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan terfokus. Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) membantu proses pelaporan dan tindak lanjut secara cepat dan akurat. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor memperkuat efektivitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi berkala menggunakan inovasi dari Balai Besar POM di Pangkal Pinang yaitu AMOI CAKEP juga dioptimalkan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.46 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100	103,52	49.568.560	39.013.113	78,71	1,32	0,20	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 78,71% terhadap target RPD TW II, sedangkan realisasi output sebesar 100, target output sebesar 96,6 sehingga persentase capaian output adalah 103,52% dengan tingkat efisiensi 0,20. Dengan kata lain penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan capaiannya sebesar 78,71% dan termasuk dalam kategori capaian Efisien. Hal ini disebabkan karena biaya operasional yang dilakukan dalam mencapai target pada Triwulan II lebih kecil dibandingkan dengan Rencana penarikan dana yang telah ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sehingga proses pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalanan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan lebih efisien dari sisi biaya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian target IKU ini. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggabungan kegiatan pengawasan rutin dengan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga kegiatan dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, dilakukan perencanaan lebih awal agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal untuk mempercepat capaian indikator. Penambahan petugas lapangan dengan melibatkan petugas dari fungsi lain secara temporer juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan di wilayah yang memiliki cakupan sarana distribusi cukup tinggi.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian anggaran dilakukan melalui revisi internal pada pos perjalanan dinas. Sebagian anggaran dari kegiatan lain yang tidak berjalan maksimal seperti kegiatan terpadu dengan pusat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut. Efisiensi anggaran juga diperoleh melalui integrasi kegiatan pengawasan lintas program, sehingga beberapa kali kunjungan dapat mencakup lebih dari satu kegiatan pengawasan, termasuk pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini mendukung pencapaian target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih terarah dan terukur

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan melalui aplikasi MADU PELAWAN menunjukkan progres capaian yang konsisten dan positif. Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 103,52% dan telah melampaui target yang ditetapkan (96,6). Rekomendasi untuk menjaga kesinambungan tindak lanjut pemeriksaan telah dijalankan dengan baik, termasuk peningkatan koordinasi antar fungsi dan pemanfaatan data pengawasan tahun sebelumnya untuk menentukan prioritas pemeriksaan

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Mengacu pada hasil evaluasi capaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, perencanaan Triwulan II tahun 2026 difokuskan pada penguatan tindak lanjut hasil pengawasan, terutama pada sarana yang belum memenuhi ketentuan dan belum memberikan respon (CAPA) terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian kembali target pemeriksaan untuk menyeimbangkan proporsi pengawasan antar wilayah dan menghindari potensi penumpukan pada akhir tahun. Pelaporan hasil tindak lanjut akan dioptimalkan dengan pelaksanaan monitoring menggunakan inovasi AMOI CAKEP.

10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Sedangkan pengertian diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.47 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan realisasi berbanding target, diperoleh persentase capaian indikator Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II tahun 2026 yaitu sebesar 105,99%. Capaian ini termasuk dalam kategori capaian yang sangat baik dengan ditandai notifikasi warna biru.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.48 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,33	105,45	93,25	98,83	105,99

Hasil realisasi Triwulan II pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 98,83 dengan persentase capaian 105,99%. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan realisasi Triwulan I yaitu 98,33 dengan persentase capaian 105,45%, diketahui terdapat peningkatan nilai realisasi dan persentase capaian. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sehingga jumlah pembilang dan penyebut pada rumus perhitungan setiap indikator juga bertambah dan menandakan bahwa seluruh pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada Triwulan II diperiksa dan ditindaklanjuti seseuai ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99 ▲	Tercapai/ Melampaui

Hasil realisasi Triwulan II pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 98,83. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan target tahun 2026, diperoleh nilai persentase capaian sebesar 105,99%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi Triwulan I termasuk dalam kategori tercapai/ melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 105,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan adanya keterpaduan dan kesinambungan dalam seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Perencanaan yang tepat sasaran

   Proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada data analisis risiko dan hasil pemetaan tahunan menggunakan history hasil pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Penetapan prioritas sasaran pemeriksaan berbasis risiko memungkinkan kegiatan pengawasan difokuskan pada fasilitas yang memiliki potensi ketidaksesuaian tertinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat guna.

2. Pelaksanaan yang efisien dan sesuai SOP

   Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan terlatih, dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Kesiapan tim pengawas, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi internal yang solid berkontribusi besar dalam memastikan bahwa pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

3. Pelaporan yang tepat waktu dan terintegrasi

   Hasil pemeriksaan dilaporkan secara sistematis melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, yang mendukung efisiensi dalam dokumentasi serta mempercepat proses penilaian dan tindak lanjut. Pemanfaatan SIPT juga mempermudah pelacakan status rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan. Selain itu, terdapat Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) yang bermanfaat untuk memonitoring ketepatan waktu petugas dalam memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan melaporkannya melalui SIPT.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Konsisten

   Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara cepat dan terarah, baik melalui pembinaan langsung kepada sarana distribusi maupun penerbitan sanksi administratif apabila diperlukan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha turut mendorong tingginya tingkat kepatuhan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

   Untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi pangan olahan, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan:

   1. Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko

      Perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemetaan dan analisis risiko sarana distribusi serta pembaharuan *database* secara berkala, agar perencanaan pengawasan lebih tepat sasaran dan berbasis data terkini. Ini dapat dilakukan

melalui integrasi data pengawasan tahun sebelumnya dengan hasil evaluasi risiko terbaru.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

   Peningkatan kompetensi teknis dan administratif petugas pengawas perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis, guna memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan mendalam.

3. Optimalisasi Penggunaan SIPT dan Sistem Pelaporan Digital

   Diperlukan penguatan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) agar seluruh tahapan – dari pemeriksaan hingga tindak lanjut – dapat terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan monitoring dan pelaporan kinerja.

4. Percepatan Tindak Lanjut dan Peningkatan Pembinaan:

   Mendorong pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui peningkatan intensitas pembinaan, pendekatan persuasif, serta pemberian peringatan atau sanksi secara terstruktur bagi yang tidak patuh.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

   Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, untuk dijadikan bahan perbaikan strategi pengawasan ke depan. Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) dapat dimanfaatkan untuk efisiensi proses ini.

Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten, diharapkan kinerja pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan dapat terus ditingkatkan dan berkontribusi pada perlindungan keamanan pangan olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel 3.50 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	1. Terdapat personil pemeriksaan yang sakit sehingga terjadi kekurangan tim pemeriksa 2. Padatnya kegiatan bulan April (Bimtek IP CPPOB, Audit Kearsipan, Inspektur CDOB, Bimtek Vaksin, Bimtek Pengawasan OBA) yang menyebabkan terjadinya kekurangan tim pemeriksa	Berkoordinasi dengan Tim Kerja lain terkait usulan pegawai yang memungkinkan untuk diperbantukan dalam Tim Pemeriksaan	Meminta usulan pegawai ke Ketua tim kerja lain yang memungkinkan untuk diperbantukan dalam Tim Pemeriksaan	Mei	T	-	-
Mei	Jumlah hari kerja pada bulan Mei yang terbatas sehingga menyebabkan petugas melakukan pemeriksaan beruntun pada minggu ke-2 dan ke-3 bulan Mei. Hal ini menyebabkan pembuatan Surat TL baru dapat diselesaikan pada akhir bulan Mei dan Input SIPT baru bisa diselesaikan pada awal bulan Juni	Lakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana dengan mempertimbangkan jadwal sampling, sertifikasi dan pendampingan serta hari libur	Melakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan bulan Juni sebaik mungkin agar pembuatan tindak lanjut dan input SIPT dapat diselesaikan tepat waktu	Juni	T	-	-
Juni	Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan bulan juni	Lakukan perencanaan pemeriksaan mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO.	Melakukan perencanaan pemeriksaan bulan Juli mengacu pada renlak bulanan hasil revisi penyesuaian target RO	Juli	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan terfokus. Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) membantu proses pelaporan dan tindak lanjut secara cepat dan akurat. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor memperkuat efektivitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi berkala menggunakan inovasi dari Balai Besar POM di Pangkal Pinang yaitu AMOI CAKEP juga dioptimalkan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.51 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99	90.069.166	91.464.965	101,55	1,04	0,04	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 101,55% terhadap target RPD TW II, sedangkan realisasi output sebesar 98,83, target output sebesar 93,25 sehingga persentase capaian output adalah 105,99% dengan tingkat efisiensi 0,04. Dengan kata lain penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan capaiannya sebesar 101,55% dan termasuk dalam kategori capaian Efisien. Hal ini disebabkan karena biaya operasional yang dibutuhkan dalam mencapai target pada Triwulan II proporsional dengan capaian outputnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dilakukan upaya optimalisasi perencanaan kegiatan berbasis prioritas dan risiko, sehingga pemeriksaan difokuskan pada sarana dengan potensi ketidaksesuaian yang tinggi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan sejenis guna menghemat biaya operasional, serta didukung pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan dokumentasi hasil pengawasan. Pengendalian dan pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah ditetapkan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian target IKU ini. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggabungan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan dengan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sehingga kegiatan dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, dilakukan perencanaan lebih awal agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal untuk mempercepat capaian indikator. Penambahan petugas lapangan dengan melibatkan petugas dari fungsi lain secara temporer juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan di wilayah yang memiliki cakupan sarana distribusi cukup tinggi.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian anggaran dilakukan melalui revisi internal pada pos perjalanan dinas. Sebagian anggaran dari kegiatan lain yang tidak berjalan maksimal seperti kegiatan terpadu dengan pusat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut. Efisiensi anggaran juga diperoleh melalui integrasi kegiatan pengawasan lintas program, sehingga beberapa kali kunjungan dapat mencakup lebih dari satu kegiatan pengawasan, termasuk pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini mendukung pencapaian target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih terarah dan terukur

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan melalui aplikasi MADU PELAWAN menunjukkan progres capaian yang konsisten dan positif. Capaian pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 105,45% dan telah melampaui target yang ditetapkan (93,25). Rekomendasi untuk menjaga kesinambungan tindak lanjut pemeriksaan telah dijalankan dengan baik, termasuk peningkatan koordinasi antar fungsi dan pemanfaatan data pengawasan tahun sebelumnya untuk menentukan prioritas pemeriksaan

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Mengacu pada hasil evaluasi capaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, perencanaan TW II tahun 2026 difokuskan pada penguatan tindak lanjut hasil pengawasan, terutama pada sarana yang belum memenuhi ketentuan dan belum memberikan respon (CAPA) terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian kembali target pemeriksaan untuk menyeimbangkan proporsi pengawasan antar wilayah dan menghindari potensi penumpukan pada akhir tahun. Pelaporan hasil tindak lanjut akan dioptimalkan dengan pelaksanaan monitoring menggunakan inovasi AMOI CAKEP.

11. **Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan**

Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Yang dimaksud Iklan sediaan farmasi disini mencakup Iklan Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Sedangkan yang dimaksud dari Iklan sendiri adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Kemudian yang dimaksud diawasi sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Adapun untuk perhitungan persentase capaian pada indikator ini dengan cara menghitung rata-rata capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= \frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \times 100\%$$

B.. Persentase iklan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

– Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.52 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53%	Sangat Baik

Pada Triwulan II, realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang mencapai 96,20%. Persentase tersebut telah memenuhi target triwulan dengan capaian terhadap target triwulan II tahun 2026 sebesar 102,53%, yang dikategorikan dalam kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.53 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48	93,83	96,20	102,53

Pada Triwulan II, realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang mencapai 96,20% dengan persentase capaian sebesar 102,53%. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I, dengan realisasi sebesar 93,34% dan persentase capaian 99,48%. Peningkatan ini menunjukkan adanya adanya perbaikan kinerja untuk indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II baik dari sisi realisasi maupun capaian terhadap target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53 ▲	Tercapai/ Melampaui

Pada Triwulan II, realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang mencapai 96,20% dengan capaian terhadap target tahunan 102,53%. Persentase tersebut diatas target tahun 2026 yang dikategorikan "Tercapai/Melampaui".

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 96,20% atau 102,53% terhadap target tahunan 93,83% menunjukkan bahwa kinerja telah

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sehingga melampai target. Peningkatan kinerja ini didukung oleh komitmen petugas dan pimpinan dalam memastikan pelaporan iklan dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, koordinasi internal dalam pelaporan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan perlu terus dilakukan guna menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas capaian kinerja pada periode berikutnya agar tetap optimal dan berkelanjutan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada peningkatan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan, antara lain melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaporan secara berkala, penerapan mekanisme pengingat (reminder) dan batas waktu yang lebih tegas, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan yang diinput secara tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi internal antara petugas, verifikator dan Kepala Balai untuk memastikan alur pelaporan iklan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keterlambatan pelaporan tidak terulang dan capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat tercatat secara optimal serta target tahunan dapat tercapai.

Tabel 3.55 Matriks Rekomendasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan April telah dilaksanakan dengan realisasi 94,70 % Kendala: Untuk pengawasan iklan kosmetik terkendala pengawasan media cetak yang terbatas, untuk capaian iklan OBA dan SK dipengaruhi oleh capaian akumulasi bulan sebelumnya.	- Melakukan verifikasi data iklan yang telah dientry agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisor ke Kepala Balai	Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah meneruskan data Iklan di setiap bulannya	Mei	ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak terlaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
Mei	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan	- Segera meneruskan laporan penandaan iklan	Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah	Juni		O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	bulan Mei telah dilaksanakan dengan realisasi 95,63% Tidak terdapat kendala dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di bulan Mei	dari supervisor ke Kepala Balai	meneruskan data Iklan di setiap bulannya				SIPT tidak terlaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
Juni	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Juni telah dilaksanakan dengan realisasi 96,20% Tidak terdapat kendala dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di bulan Juni	- Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisor ke Kepala Balai	Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah meneruskan data Iklan di setiap bulannya	Juli		O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak terlaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan tabel kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan periode April- Juni 2026, dapat dianalisis bahwa program/kegiatan pengawasan iklan secara umum telah mendukung ketercapaian kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja adalah pelaksanaan pengawasan rutin yang disertai dengan tindak lanjut berupa verifikasi data di sistem pelaporan (SIPT) serta penarikan dan perbaikan data secara berkala di setiap bulan sehingga mampu meningkatkan realisasi capaian jika dibandingkan dengan triwulan I.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.56 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53	0	0	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi tidak dapat dihitung karena untuk memenuhi indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan tidak membutuhkan anggaran

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran diupayakan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, khususnya dengan mengintegrasikan jadwal pengawasan lintas program untuk menekan biaya operasional melalui pengawasan iklan bersamaan dengan saat pemeriksaan sarana maupun saat sampling produk obat dan makanan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mengurangi penggunaan sumber daya manual. Selain itu, pendekatan pengawasan berbasis risiko memungkinkan fokus pada sasaran prioritas dan sinergi lintas sektor membantu memperluas cakupan tanpa menambah beban anggaran. Ke depan, diperlukan penyesuaian antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran agar lebih proporsional, sehingga tingkat efisiensi dapat ditingkatkan dan penggunaan anggaran menjadi lebih optimal.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan untuk meningkatkan capaian indikator pada triwulan II antara lain:

- Penggabungan kegiatan pengawasan iklan secara digital dan manual ke satu kegiatan terintegrasi agar lebih efisien dalam penggunaan sumber daya
- Penambahan frekuensi pemantauan terhadap media sosial dan platform e-commerce yang berisiko tinggi terhadap penyebaran iklan yang tidak sesuai ketentuan
- Pemanfaatan intensifikasi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan iklan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja indikator ini dilakukan penyesuaian anggaran. Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain:

- Penguatan anggaran operasional pemantauan iklan dilakukan melalui revisi anggaran pada perjalanan dinas , sehingga kegiatan pengawasan iklan dapat dilaksanakan secara terpadu bersama pengawasan rutin

- Pengalihan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk mendukung kegiatan pengawasan dan peningkatan kapasitas petugas dalam menilai kepatuhan iklan

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II menunjukkan adanya peningkatan capaian dibandingkan dengan Triwulan I. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara lebih efektif. Selanjutnya, kegiatan pengawasan akan terus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan guna menjaga keberlanjutan kinerja yang optimal.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dilakukan pada triwulan III untuk menjaga keberlanjutan kinerja antara lain:

- Penyesuaian target bulanan, agar pelaksanaan lebih terukur dan progres capaian lebih mudah dikendalikan
- Perluasan cakupan iklan yang diawasi terutama pada media yang memiliki keterbatasan jumlah.

12. **Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar**

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan

pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:

a.rokok;

b.cerutu;

c.rokok daun;

d.tembakau iris;

e. tembakau padat dan cair dan;

f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula:

% Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = (A+B)/2

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.57 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan II oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar 95,83 % dengan capaian terhadap target 114,03 %. Capaian ini melebihi 110 % sehingga dikategorikan Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.58 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100,00	118,99	84,04	95,83	114,03

Capaian indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan II menunjukkan kinerja yang tetap optimal meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan Triwulan I. Pada Triwulan I, realisasi mencapai 100,00% atau 118,99% terhadap target 84,04%, sedangkan pada Triwulan II realisasi sebesar 95,83% atau 114,03% terhadap target

yang sama. Meskipun demikian capaian untuk indikator ini pada triwulan II masih diatas 110 %

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03 ▲	Tercapai/ Melampaui

Pada Triwulan II, realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang mencapai 114,03%. Persentase tersebut telah melampaui target tahunan, dengan capaian terhadap target tahun 2026 sebesar 84,04 %, yang dikategorikan dalam kriteria Tercapai/Melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2026 oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan realisasi sebesar 114,03% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat sedikit penurunan capaian dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja secara keseluruhan terhadap indikator ini. Capaian indikator yang melampaui target merupakan hasil dari optimalisasi pemenuhan target output kegiatan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja indikator.

Selain itu kinerja yang tetap optimal ini didorong oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta didukung oleh komitmen dalam pelaporan hasil pengawasan label yang dilakukan secara tepat waktu. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini tetap terjaga pada kategori sangat baik. Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan sistem pelaporan melalui SIPT yang telah berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan akurat, sehingga memudahkan proses pemantauan, pelaporan, serta validasi data hasil pengawasan. Sinergi antara pelaksanaan pengawasan yang terstruktur,

peningkatan kompetensi petugas, dan optimalisasi sistem pelaporan menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik difokuskan pada penguatan strategi dan efektivitas kegiatan pengawasan. Ke depan, Balai Besar POM di Pangkal Pinang perlu melakukan perencanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan sebaran produk di wilayah pengawasan agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas akan terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala, khususnya terkait dengan ketentuan terbaru mengenai pelabelan produk tembakau dan rokok elektronik.

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) juga menjadi fokus utama perbaikan, dengan memastikan ketertiban, akurasi, dan validitas data yang diinput melalui mekanisme monitoring dan evaluasi rutin. Dalam mendukung hal tersebut, koordinasi dan sinergi antar unit terkait, baik di tingkat pusat maupun UPT Badan POM, akan terus diperkuat untuk memastikan keseragaman interpretasi standar pelabelan dan peningkatan efektivitas pengawasan di lapangan. Selain itu, penyusunan dan pemutakhiran database pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menyediakan data yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan berikutnya.

Selain itu dalam upaya perbaikan kinerja perlu diperhatikan faktor perencanaan dalam penetapan target sehingga proyeksi capaian terhadap target tidak terlalu tinggi.

Tabel 3.60 Matriks Rekomendasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	- Penentuan target kinerja mengacu pada capaian realisasi tahun 2025 sebesar 84,03% sebagai baseline perencanaan. - Dalam pelaksanaannya hingga bulan April realisasi kinerja mencapai lebih dari 110% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dikarenakan adanya pemenuhan terhadap target output yang berpengaruh terhadap target indikator	- Meneruskan data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Perlu dilakukan penyesuaian jumlah produk tembakau yang diawasi di setiap bulan agar capaian tidak melebihi 110 %	- Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan di setiap bulan - Dilakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %	Mei	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
Mei	- Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar 92,5 % - Telah dilakukan penyesuaian label rokok yang dilaporkan semula 12 menjadi 6 label sehingga menurunkan realisasi indikator dengan capaian 110,07 %	- Meneruskan data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Untuk label tembakau yang belum dilaporkan pada bulan Mei akan tetap dilaporkan pada bulan Juni - Perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %	- Melakukan monitoring data produk tembakau yang telah dientry di SIPT dan perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan - Melaporkan label tembakau bulan Mei pada bulan Juni - Melakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %	Juni	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
Juni	- Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar 95,83 %. - Capaian indikator melebihi 110 % dikarenakan adanya pemenuhan terhadap target output yang berpengaruh terhadap target indikator	- Meneruskan data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Perlu dilakukan perhitungan kembali jika dilakukan penyesuaian label tembakau yang diawasi sehingga capaian tidak melebihi 110%	- Melakukan monitoring data produk tembakau yang telah dientry di SIPT dan perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan - Dilakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %	Juli	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan efektivitas pengawasan di lapangan.

Salah satu kegiatan utama yang memberikan kontribusi signifikan adalah pelaksanaan pengawasan rutin dan terjadwal terhadap produk tembakau dan rokok elektronik yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Selain itu, penguatan koordinasi internal serta peningkatan ketepatan dalam pelaporan hasil pengawasan turut mendukung optimalisasi capaian indikator ini. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja secara keseluruhan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.61 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03	4.688.100	3.666.900	78,22	1,46	0,46	92% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 78,22 %, jika dibandingkan antara target RPD dan realisasi anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,46 dengan capaian 92 % (efisien). Hal ini didukung oleh perencanaa kegiatan berbasis risiko yang tepat sasaran, pemanfaatan SIPT untuk pelaporan

digital, serta pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi dan optimalisasi dalam penggunaan anggaran. Pencapaian ini akan terus dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Balai Besar POM di Pangkal Pinang menerapkan strategi pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan objek pengawasan yang memiliki potensi ketidaksesuaian tinggi. Pendekatan ini memastikan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal terhadap capaian kinerja.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan lain di bidang pengawasan obat dan makanan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta menekan biaya operasional. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi melalui mekanisme pelaporan elektronik yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya administrasi. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya efisien, tetapi juga tetap mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan sebagai strategi untuk mencapai target kinerja melalui integrasi pelaksanaan pengawasan produk tembakau dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta memperluas cakupan pengawasan dalam satu waktu pelaksanaan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, melalui integrasi pelaksanaan pengawasan produk tembakau dengan kegiatan pengawasan obat

dan makanan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi pembiayaan, waktu, maupun tenaga, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dan efektivitas pengawasan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Pencapaian keberhasilan kinerja didukung oleh komitmen petugas dalam melaksanakan pengawasan produk tembakau secara konsisten dan sesuai ketentuan, serta didukung oleh kedisiplinan dalam penyampaian laporan secara tepat waktu

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh pemenuhan target output terhadap capaian indikator dan melakukan evaluasi perencanaan target pada akhir periode agar perencanaan kinerja selanjutnya menjadi lebih realistis, terukur dan adaptif terhadap ketersediaan sumber daya dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan.

13. **Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT**

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)

2) Pelaksanaan Bimtek (B)

3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan

4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.62 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan II.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.63 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT BBPOM di Pangkal Pinang merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	-	-	

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT Balai Besar POM di Pangkal Pinang merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dilakukan perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan II dan target tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada periode pelaporan dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba (AMR) di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT). Secara umum, keberhasilan atau peningkatan kinerja dicapai oleh UPT yang mampu melaksanakan keempat komponen utama pengendalian AMR secara konsisten, yaitu penggunaan tools pengawasan antibiotik, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, dan publikasi hasil pengawasan. Keberhasilan ini didukung oleh adanya perencanaan kegiatan yang matang, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik antara UPT dan Pusat. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan serta penerapan tools pengawasan antibiotik secara rutin dan akurat turut memperkuat capaian indikator ini.

Capaian indikator ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan empat komponen utama kegiatan, dukungan sumber daya, dan efektivitas koordinasi antara pusat dan daerah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi AMR di tingkat UPT serta peningkatan pendampingan teknis dalam penerapan tools pengawasan antibiotik secara berkesinambungan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba (AMR) difokuskan pada peningkatan konsistensi pelaksanaan keempat komponen kegiatan, yaitu penggunaan tools pengawasan antibiotik, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, dan publikasi hasil pengawasan. Untuk mendukung hal tersebut, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan memperkuat mekanisme monitoring dan supervisi berkala terhadap pelaksanaan penggunaan tools pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian guna memastikan ketepatan pengisian dan keseragaman penerapan antar petugas.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi prioritas melalui penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis lanjutan terkait pengendalian AMR, baik secara internal maupun melalui kolaborasi dengan unit

teknis pusat. Dalam rangka memperluas cakupan dan efektivitas advokasi lintas sektor, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan dinas kesehatan, organisasi profesi, dan instansi terkait guna mendorong sinergi kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.

Tabel 3.65 Matriks Rekomendasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Merupakan target tahunan. 1. Hingga bulan April telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 14 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada bulan April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka selama tahun 2025 (TW I) pada tanggal 13 Maret 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Terdapat 2 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan Surat Edaran Pelarangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 5. Bimtek AMR akan dijadwalkan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah dan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Tengah terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah dan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya 3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Mei	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Mei	Merupakan target tahunan. 1. Hingga bulan Mei telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 16 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada bulan April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka selama tahun 2025 (TW I) pada tanggal 13 Maret 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Mei, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR akan dijadwalkan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah (Konfirmasi terakhir pada 4 Juni, bahwa pelaksanaan Bimtek akan dilaksanakan pada 18 Juni 2026) dan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah terkait rencana pelaksanaan Bimtek pada 18 Juni 2026 3. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya 4. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Juni	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juni	Merupakan target tahunan. Telah dilakukan pelaporan Monev AMR TW II pada 2 Juli 2026 1. Hingga bulan Juni telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 19 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Juni, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026. Disisipkan pada Materi KIE Tim Kerja Infokom dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya" Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter (Bersurat secara resmi)	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya 3. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Infokom mengenai penyisipan materi AMR pada KIE selanjutnya 4. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Juli	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan advokasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, organisasi profesi, serta instansi terkait turut memperkuat komitmen bersama dalam implementasi strategi pengendalian AMR di tingkat daerah. Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan tools pengawasan antibiotik yang telah diintegrasikan dalam kegiatan pemeriksaan rutin di apotek, sehingga pengawasan terhadap penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Kegiatan publikasi hasil pengawasan juga menjadi salah satu bentuk transparansi dan upaya edukatif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran publik serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peresepan antibiotik.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.66 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	7.155.230	7.922.385	110,72	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran pada triwulan II tahun 2026 belum dapat dihitung karena capaian indikator output belum tersedia.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dilakukan melalui integrasi kegiatan pengawasan AMR dengan pengawasan rutin di sarana pelayanan kefarmasian, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya operasional.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi lintas sektor juga dilakukan secara terpadu dengan program lain yang relevan untuk menghemat sumber daya. Selain itu, pemanfaatan media daring dalam koordinasi dan publikasi hasil pengawasan turut menekan biaya perjalanan dinas dan logistik, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap efektif dengan penggunaan anggaran yang efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja penggunaan sumber daya pada indikator pemenuhan target pengendalian AMR (Antimicrobial Resistance), dengan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara lebih terintegrasi dan berbasis prioritas risiko. Strategi ini dilaksanakan melalui penggabungan kegiatan yang sejenis, pemanfaatan data pengawasan yang telah tersedia, serta penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang efisien dilaksanakan melalui rasionalisasi kegiatan, penggabungan aktivitas yang sejenis, serta penyesuaian prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap indikator kinerja. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Selain itu, optimalisasi sumber pendanaan juga dilakukan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kabupaten/kota yang memperoleh alokasi tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan secara lebih luas tanpa membebani anggaran utama. Sinergi antara sumber anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperluas cakupan kegiatan, serta tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Target pada indikator ini merupakan indikator kinerja yang diukur secara tahunan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penyesuaian perencanaan kinerja dapat dilakukan apabila diperlukan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian target secara optimal. Penyesuaian tersebut difokuskan pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator pemenuhan target pengendalian AMR (Antimicrobial Resistance). Melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih terintegrasi serta berbasis pada prioritas risiko, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menyasar area dengan dampak paling signifikan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan terarah, serta tetap mampu mendukung pencapaian target kinerja pengendalian AMR secara optimal.

14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan seperangkat standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bagian dari kebijakan strategis dalam meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta mutu kinerja laboratorium pengujian di lingkungan BPOM. Penyusunan SKL didasarkan pada rencana pengembangan laboratorium yang terstruktur dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan sumber daya manusia, peralatan, metode analisis, serta ruang lingkup pengujian. Secara konseptual, SKL merupakan agregasi dari empat tingkatan kemampuan laboratorium, yaitu tingkat 1 hingga tingkat 4, yang masing-masing mencerminkan kompleksitas dan kedalaman kemampuan pengujian yang dimiliki.

Dalam kerangka tersebut, BBPOM Pangkal Pinang diklasifikasikan sebagai laboratorium tingkat 3 (tier 3). Laboratorium pada tingkat ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi, termasuk pengujian terhadap parameter-parameter non-unggulan. Selain itu, laboratorium tingkat 3 juga berfungsi sebagai unit verifikasi dengan melakukan pengujian konfirmasi terhadap hasil pengujian yang berasal dari laboratorium pada tingkat di bawahnya. Dengan demikian, keberadaan laboratorium tingkat 3 tidak hanya berperan sebagai pelaksana pengujian, tetapi juga sebagai pengendali mutu internal dalam sistem laboratorium berjenjang.

Penilaian terhadap pemenuhan SKL pada laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup

empat komponen utama. Keempat komponen tersebut dirancang untuk menggambarkan secara komprehensif tingkat kesiapan dan kemampuan laboratorium, baik dari aspek teknis maupun operasional. Penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja laboratorium, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dan perencanaan dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Selain itu, hasil penilaian SKL menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan laboratorium guna mendukung perlindungan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan khasiat produk farmasi serta pangan olahan.

Adapun empat komponen utama dalam SKL untuk laboratorium tingkat 3 meliputi:

1. Standar Ruang Lingkup (SRL)
2. Standar Peralatan
3. Standar Kompetensi Laboratorium
4. Standar Metode Analisis (MA) Terverifikasi

Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi dalam merepresentasikan kapasitas laboratorium secara menyeluruh. Nilai akhir pemenuhan SKL dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing komponen sesuai dengan formula yang telah ditetapkan oleh BPOM, sehingga menghasilkan suatu nilai komposit yang mencerminkan tingkat pemenuhan standar oleh laboratorium yang bersangkutan.

Standar Ruang Lingkup (SRL) didefinisikan sebagai himpunan parameter uji atau metode analisis (MA) yang telah mampu dilaksanakan oleh suatu laboratorium. SRL mencerminkan cakupan kemampuan teknis laboratorium dalam melakukan berbagai jenis pengujian. Dalam konteks penilaian Standar Kompetensi Laboratorium, SRL diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu: (1) Aspek 1, yang mencakup SRL yang dapat diuji oleh minimal satu orang penguji; dan (2) Aspek 2, yang mencakup SRL yang dapat diuji oleh minimal dua orang penguji. Pembagian ini bertujuan untuk menilai tidak hanya ketersediaan kemampuan pengujian, tetapi juga tingkat redundansi dan keberlanjutan kompetensi sumber daya manusia dalam laboratorium.

Apabila jumlah SRL yang dimiliki laboratorium sama dengan jumlah SRL pada Aspek 1, maka laboratorium tersebut memperoleh nilai maksimal sebesar 10 untuk Aspek 1. Demikian pula, apabila jumlah SRL yang dimiliki sebanding dengan jumlah SRL pada Aspek 2, maka laboratorium memperoleh nilai maksimal sebesar 10 untuk Aspek 2.

Dengan demikian, total nilai maksimal yang dapat diperoleh pada komponen Standar Kompetensi Laboratorium adalah sebesar 20. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kompetensi laboratorium tidak hanya diukur dari kemampuan individu, tetapi juga dari distribusi dan keberlanjutan kompetensi di antara personel laboratorium.

Standar Peralatan merupakan komponen yang menilai ketersediaan serta kesesuaian jenis dan jumlah peralatan laboratorium dengan kebutuhan pengujian berdasarkan klasifikasi tingkat (tier) laboratorium. Pemenuhan standar peralatan menjadi faktor krusial dalam menjamin keakuratan, ketepatan, dan keandalan hasil pengujian. Oleh karena itu, setiap laboratorium diwajibkan untuk memiliki peralatan yang memadai, terkalibrasi, serta terpelihara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Standar Metode Analisis (MA) Terverifikasi merujuk pada metode analisis yang telah melalui proses verifikasi oleh laboratorium untuk memastikan kesesuaian, validitas, dan kinerjanya dalam kondisi operasional setempat. Proses verifikasi ini penting untuk menjamin bahwa metode yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam implementasinya, terdapat perubahan kebijakan terkait pembuktian penambahan SRL. Sebelum tahun 2025, penambahan SRL dapat dibuktikan melalui Lampiran Catatan Pengujian (LCP) yang disusun oleh analis sebagai dokumentasi pelaksanaan pengujian. Namun, sejak tahun 2025, kebijakan tersebut mengalami penyesuaian, di mana penambahan SRL harus didukung oleh laporan hasil verifikasi metode analisis (MA). Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan standar pembuktian yang lebih menekankan pada validitas metode secara ilmiah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara SRL dan daftar MA terverifikasi, di mana tidak seluruh metode analisis yang tercantum dalam SRL telah termasuk dalam daftar metode analisis yang terverifikasi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam proses harmonisasi antara cakupan pengujian dan pemenuhan persyaratan verifikasi metode, yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan mutu laboratorium ke depan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.67 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,4	78,5	100,13%	Sangat Baik

Tabel di atas menyajikan capaian indikator kinerja nilai pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menjamin mutu layanan pengujian produk farmasi dan pangan olahan. Pada triwulan II, target yang ditetapkan sebesar 78,4 dan realisasi capaian hingga akhir periode pelaporan juga tercatat sebesar 78,5. Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini mencapai 100,13% dan dikategorikan dalam klasifikasi "Sangat Baik".

Pada periode pelaporan ini, terdapat penambahan kegiatan yang mencerminkan peningkatan cakupan layanan laboratorium, yaitu penambahan 2 SRL di Laboratorium Kosmetik yang juga menambah jumlah standar kompetensi masing-masing 2 pada Aspek 1 dan 2, penambahan 1 peralatan AAS (*Atomic Absorption Spectrophotometer*) di Laboratorium Kosmetik, penambahan 1 MA Terverifikasi pada Laboratorium Obat & Nappza dan 3 MA Terverifikasi pada Laboratorium Kosmetik (dua diantaranya adalah MA yang sama dengan SRL).

Sementara itu sejumlah peningkatan kompetensi personel yang dilakukan di Laboratorium Kosmetik menaikkan jumlah Aspek 1 menjadi 115 dan Aspek 2 menjadi 108, peningkatan kompetensi personel di Laboratorium OTOKSK menaikkan jumlah Aspek 2 menjadi 120. Namun penambahan aspek-aspek ini belum meningkatkan nilai Standar Kompetensi Laboratorium.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa laboratorium mampu mempertahankan kinerja sesuai target di tengah adanya penambahan kegiatan dan penyesuaian standar. Ke depan, diperlukan upaya optimalisasi agar peningkatan aktivitas yang telah dilakukan dapat semakin berkontribusi terhadap peningkatan nilai capaian SKL pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.68 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,2	78,2	100,00	78,4	78,5	100,13

Tabel di atas menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan I dan triwulan II nilai pemenuhan SKL. Target triwulan II naik 0,2 dari triwulan I, sementara realisasi meningkat dari 78,2 menjadi 78,5. Persentase capaian juga mengalami kenaikan dari 100,00% pada triwulan I menjadi 100,13% pada triwulan II. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem kerja laboratorium serta optimalisasi sumber daya dan proses.

Secara keseluruhan, tren capaian pada tiga triwulan pertama tahun ini menunjukkan kinerja laboratorium yang stabil dan progresif. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh tim laboratorium dalam menjaga standar mutu serta responsivitas terhadap target-target strategis yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	78,5	99,87 ▲	Akan Tercapai

Tabel di atas menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II dengan target tahunan 2026 untuk indikator nilai pemenuhan SKL. Target tahun 2026 ditetapkan sebesar 78,6, sementara hingga triwulan II realisasi yang dicapai adalah sebesar 78,5 dengan persentase capaian sebesar 99,87% terhadap target tahunan.

Dengan capaian sebesar 99,87% tersebut, indikator ini dikategorikan sebagai "Akan Tercapai". Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada triwulan II terus

mendekati target tahunan, sehingga memberikan gambaran awal yang positif terhadap pencapaian indikator pada akhir tahun.

Capaian ini juga mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengujian telah berjalan secara efektif dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Konsistensi kinerja pada awal tahun ini menjadi modal penting dalam menjaga tren pencapaian, sehingga target tahunan berpeluang besar untuk dapat direalisasikan secara optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada bulan Mei, dilakukan pencatatan 1 peralatan rusak berat pada aplikasi DIKOLABORASI, yaitu HPLC Perkin Elmer di Laboratorium Pangan sehingga jumlah HPLC *existing* berkurang menjadi 8 dan standar peralatan kimia yang harusnya mencapai 93,3 turun menjadi 92,9. Untuk kegiatan lainnya terlaksana sesuai perencanaan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan SKL telah dituangkan dalam rencana aksi SKP tahunan setiap anggota tim. Perencanaan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kegiatan yang pada triwulan I dilakukan setiap akhir triwulan, mulai triwulan II ini dilakukan setiap bulan guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan data dukung telah atau akan terselesaikan pada saat penilaian SKL oleh PPPOMN, yang dilaksanakan setiap tanggal 20 pada bulan ketiga tiap triwulan.

Tabel 3.70 Matriks Rekomendasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	1.Telah dilakukan perhitungan perencanaan pemenuhan SKL TW 2, yaitu 78,6. 2.SRL : 2 MA peningkatan SRL di Lab Kosmetik (termasuk juga bagian dari komponen SKL Verif MA) belum terlaksana karena laboratorium masih menyelesaikan pelaporan	Memastikan pelaksanaan pemenuhan SKL dilaksanakan sesuai rencana.	Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di bulan Mei.	Mei 2026	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sampel dengan ketentuan terbaru dari PPPOMN. Peningkatan SRL direncanakan kembali di bulan Mei-Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2. 3.Peningkatan kompetensi : Telah dilakukan peningkatan kompetensi di Lab Obat tapi tidak mengubah capaian; telah dilakukan peningkatan kompetensi di Lab OTSKOK tapi belum dilaporkan dan tidak mengubah capaian. 4.Peralatan : Pengadaan instrumen AAS sudah datang di bulan April, dilakukan instalasi April-Mei dan pembayaran direncanakan di bulan Juni. 5.Verif MA : 3 MA yang direncanakan diverifikasi di Lab Kosmetik belum terlaksana karena laboratorium masih menyelesaikan pelaporan sampel dengan ketentuan terbaru dari PPPOMN. Verif MA direncanakan kembali di bulan Mei-Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2. 6.Verifikasi peralatan : Secara keseluruhan, laboratorium belum melaporkan verifikasi peralatan secara tepat waktu dan masih ada verifikasi peralatan yang belum dilaksanakan secara tepat waktu.						
Mei	1.SRL : Belum ada peningkatan SRL. Peningkatan 2 SRL Kosmetik direncanakan di bulan Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2. 2.Peningkatan kompetensi : Peningkatan kompetensi di Lab OTOKSK di bulan April sudah dilaporkan di bulan	1. Pengisian kertas kerja monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL agar lebih dioptimalkan dan seluruh laporan dilaporkan tepat waktu. 2. Lakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2 secara tepat waktu.	1. Follow up pelaporan verifikasi peralatan di bulan Mei. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2.	Juni 2026	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Mei dan tidak mengubah capaian. 3.Peralatan : Sudah dilakukan pelatihan AAS dari akhir Mei dan direncanakan hingga awal Juni 2026. 4.Verif MA : Lab Obat dan Lab Kosmetik masing-masing memverifikasi 1 MA dan telah dilaporkan. Verif 2 MA lainnya di Lab Kos direncanakan di bulan Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2. 5.Realisasi SKL s/d Mei : 78,4. 6.Verifikasi peralatan : Lab Obat, Kos, Pangan dan Mikro telah melaporkan seluruh verifikasi peralatan di bulan Mei. Sementara Lab OT baru melaporkan 4 dari 5 verifikasi peralatan; dan satu verifikasi mikropipet bulan April belum dilaporkan (ada kesalahan item yang diverifikasi di bulan April). 7.Pengisian kertas kerja monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL bulan Mei masih belum optimal, terutama di Lab Kos dan OTOKSK.						
Juni	1.Pelaporan verifikasi peralatan di bulan Mei telah difollow up. 2.Monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2 telah dilakukan dengan realisasi IKU sebesar 78,5 atau 100,2% (hasil laporan PPPOMN) dengan rincian : penambahan 2 SRL di Lab Kos, 1 MA Terverifikasi di Lab Obat dan 3 MA Terverifikasi di Lab Kos. 3.Hasil monitoring rencana aksi SKL bulan Juni : peningkatan 3 PU kompetensi di Lab Kosmetik belum terlaksana dengan justifikasi : sampel yang dibutuhkan untuk pengujian	Ketepatan waktu pelaporan rencana aksi SKL agar lebih dioptimalkan lagi.	Menyeragamkan batas waktu pelaporan rencana aksi bulanan, yaitu setiap tanggal 2 di bulan berikutnya.	Juli 2026	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	2 PU kompetensi adalah sampel bulan Juni dan pengujian baru dijadwalkan minggu I bulan Juli karena banyaknya PUK yang harus diuji, sementara 1 PU lainnya masih menunggu sampel masuk/ dibeli (Lab Kosmetik : Agar perencanaan lebih dioptimalkan). 4.Ada peningkatan ketepatan waktu pelaporan rencana aksi SKL setiap bulannya.						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai pemenuhan SKL dicapai melalui sejumlah langkah :

1. Koordinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk menyampling sampel yang dibutuhkan dalam pengujian SRL, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar MA Terverifikasi.
2. Koordinasi perencanaan jadwal sampling masuk dengan fungsi Pemeriksaan sehingga memberikan waktu bagi laboratorium untuk melaksanakan verifikasi MA setelah pengujian sampel.
3. Perencanaan pengadaan reagensia dan pendukung pengujian yang menjamin ketersediaan bahan yang dibutuhkan untuk pengujian SRL, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar MA Terverifikasi.
4. Pelaksanaan kalibrasi dan verifikasi instrumen serta pemeliharaan peralatan untuk memonitoring dan memelihara fungsi peralatan labororium.
5. Pengadaan peralatan laboratorium yang dilaksanakan tepat waktu.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.71 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,4	78,5	100,13	2.600.275.936	2.725.589.823	104,82	**0,96**	**-0,04**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

(Berdasarkan ketentuan matriks kinerja dan pendanaan BPOM tahun 2025-2009, Indikator ini mempunyai mapping/tagging anggaran dari RO Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (RAB) dan RO Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (PDD). Untuk RO PDD tidak seluruhnya secara langsung berpengaruh dalam pencapaian target output indikator ini. RPD untuk anggaran yang telah dipetakan pada indikator ini dapat tercapai sebesar 104,82% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dikategorikan "Tidak Efisien".

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian SKL dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap langkah pelaksanaan dirancang untuk memastikan ketercapaian target strategis, baik dari sisi substansi kegiatan maupun efisiensi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan berjalan secara sistematis dan telah mempertimbangkan kesinambungan antarperiode anggaran.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Target ini dikawal dalam rencana aksi nilai pemenuhan SKL melalui SKP.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.

Dilakukan pengadaan bahan pendukung pengujian sesuai kebutuhan, dan adanya alokasi rutin pembelian sampel baik untuk peningkatan kompetensi ataupun verifikasi MA.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Sebagian mikropipet yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi atau digunakan dalam Penetapan Kadar telah dikirim untuk dilakukan kalibrasi.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

   Pada triwulan selanjutnya akan dilakukan monitoring realisasi kegiatan yang sudah direncanakan untuk menjaga capaian tidak kurang dari 100%.

15. **Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman**

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah program yang melibatkan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh UPT dilakukan pada kegiatan/Tahapan Penilaian Mandiri dan pengumpulan data dukung Pemerintah Daerah Kab/Kota. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Advokasi ke Seluruh Kabupaten/Kota, UPT BPOM melakukan advokasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang masuk kedalam wilayah kerjanya agar melakukan penilaian mandiri program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dalam kegiatan tersebut disampaikan manfaat dari penilaian mandiri yang dilakukan dan melihat komitmen Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan tahapan seleksi untuk Kabupaten/Kota yang akan didampingi.
2. Seleksi Kabupaten/Kota yang akan didampingi, Kabupaten/Kota terpilih akan diberikan pendampingan dalam melakukan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman agar data dukung yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
3. Pendampingan, Pendampingan dilakukan dengan memantau pelaksanaan pengisian tools penilaian mandiri agar terisi dengan baik dan benar, menjawab pertanyaan Kabupaten/Kota, dan menilai kesesuaian data dukung yang diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu dilakukan monitoring agar seluruh pengisian data dukung selesai sesuai batas waktu pengisian, sehingga persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dapat tercapai.
4. Pelaporan, Pelaporan dalam kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program

keamanan pangan di daerah serta menjadi point penilaian atas keberhasilan UPT dalam melakukan advokasi di daerah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.72 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	

Indikator Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman merupakan Indikator dengan Target Tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat target maupun realisasi yang dapat diukur.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan pada akhir periode pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, capaian indikator ini baru dapat dihitung pada Triwulan IV Tahun 2026.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.73 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pada Triwulan I maupun Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi indikator kinerja yang dapat diukur. Pengukuran capaian indikator baru akan dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh tahapan pendampingan dan penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman selesai dilaksanakan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40,00	-	-	

Hasil pengukuran Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan target tahunan sehingga perbandingannya akan dilakukan pada Lapkin Tahunan

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat diukur karena merupakan indikator dengan target tahunan yang pengukurannya dilakukan setelah seluruh tahapan pendampingan dan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman selesai dilaksanakan pada akhir tahun.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, meliputi pelaksanaan Rapat Advokasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman, penyampaian surat permintaan penetapan Person in Charge (PIC) kepada pemerintah daerah, koordinasi dengan Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan pendampingan teknis pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman kepada pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan pengisian tools Penilaian Mandiri dan belum melengkapi data dukung secara optimal karena masih berada pada tahap koordinasi internal dan pengumpulan dokumen pada masing-masing perangkat daerah. Kondisi tersebut belum mempengaruhi capaian indikator kinerja karena batas waktu pengisian dan penilaian mandiri masih berlangsung hingga 31 Juli 2026. Oleh karena itu, kegiatan koordinasi, pendampingan, serta monitoring akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh Kabupaten/Kota dapat memenuhi target penilaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi, pendampingan, serta monitoring kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar proses pengisian tools Penilaian Mandiri dan pemenuhan data dukung dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres masing-masing Kabupaten/Kota serta penyampaian hasil monitoring sebagai bahan evaluasi dan percepatan penyelesaian pemenuhan data dukung.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman sehingga target indikator kinerja pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Dengan upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Tabel 3.75 Matriks Rekomendasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Telah dilaksanakan Rapat Advokasi Program Kabupaten Kota Pangan Aman pada tanggal 30 April 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah se-wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang, meliputi Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Bangka Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait antara lain Bappeda,	Perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui penyampaian surat permintaan penetapan *Person in Charge* (PIC) pada masing-masing instansi terkait guna mendukung akses pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/ Kota Pangan Aman.	1. Menyusun dan menyampaikan surat permintaan penetapan *Person in Charge* (PIC) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 2. Melaksanakan Pendampingan dalam pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/ Kota Pangan Aman guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dukung yang diinput oleh	Mei	Ya	S-07	Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKP

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, serta instansi terkait lainnya. **Kendala** : Pemerintah Kabupaten/ Kota belum menginput nama *Person in Charge* (PIC) sebagai penanggung jawab untuk memperoleh akses pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman		Pemerintah Kabupaten/Kota.				
Mei	Telah disampaikan Surat Permintaan Penetapan Person In Charge (PIC) kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten/Kota wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang guna mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Sampai dengan akhir bulan Mei 2026, Kabupaten Bangka Barat telah mulai melakukan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. **Kendala** : Sampai dengan akhir bulan Mei 2026, sebagian besar	Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai target yang telah ditetapkan.	1. Melaksanakan pendampingan teknis kepada PIC Kabupaten/Kota dalam proses pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pengisian tools dan kelengkapan data dukung pada masing-masing Kabupaten/Kota.	Juni	Ya	S-07	Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKP

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Kabupaten/Kota masih dalam tahap koordinasi internal dan pengumpulan data dukung sehingga progres pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman belum berjalan optimal.						
Juni	Telah dilaksanakan Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri kepada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Pangkal Pinang (17 Juni 2026), Kabupaten Bangka Tengah (18 Juni 2026) dan Kabupaten Bangka Selatan (15 Juni 2026). Kegiatan pendampingan berjalan dengan baik dan pemerintah daerah telah memperoleh penjelasan mengenai tata cara pengisian tools serta pengumpulan data dukung. Kendala : Sampai dengan akhir bulan Juni 2026, sebagian besar Kabupaten / Kota belum melakukan pengisian tools penilaian mandiri dan belum melengkapi data dukung secara optimal sehingga capaian pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan.	Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai target yang telah ditetapkan.	1. Melaksanakan pendampingan teknis lanjutan kepada PIC Kabupaten/Kota dalam proses pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pengisian tools dan kelengkapan data dukung pada masing-masing Kabupaten/Kota. 3. Menyampaikan hasil monitoring kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi dan percepatan pemenuhan target indikator Program Kabupaten/Kota Pangan Aman	Juli	Ya	S-07	Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKP

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman didukung oleh Pelaksanaan Program Kabupaten/ Kota Pangan Aman melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu pelaksanaan Rapat Advokasi kepada Pemerintah Daerah, Penyampaian Surat Permintaan Penetapan Person In Charger (PIC), Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Pendampingan teknis Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/ Kota Pangan Aman. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri serta memenuhi data dukung yang dipersyaratkan.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kegiatan masih dipengaruhi oleh proses koordinasi internal pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga progres pengisian tools dan pemenuhan data dukung belum berjalan secara optimal pada sebagian daerah. Oleh karena itu, kegiatan monitoring, evaluasi, dan pendampingan secara berkelanjutan masih diperlukan untuk memastikan seluruh Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan tahapan penilaian sesuai jadwal sehingga target indikator kinerja tahunan dapat tercapai.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.76 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	4.320.000	4.704.000	108,89	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran pada indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman mencapai 108,89% dari Rencana Penarikan Dana (RPD). Realisasi tersebut melebihi target RPD Triwulan II karena adanya penyesuaian kebutuhan riil dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan, khususnya untuk mendukung

koordinasi dan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Meskipun realisasi anggaran melebihi RPD, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai tahapan yang direncanakan dan mendukung pencapaian target indikator kinerja tahunan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada periode selanjutnya, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan penyesuaian perencanaan penarikan dana dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih akurat, mengoptimalkan koordinasi dan pendampingan secara terintegrasi serta melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala agar penggunaan anggaran tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026, dilakukan penyesuaian aktivitas melalui Rapat Advokasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyampaian surat permintaan penetapan *Person in Charge* (PIC), serta pelaksanaan pendampingan teknis pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Selain itu, dilakukan monitoring terhadap progres pengisian tools dan pemenuhan data dukung sebagai upaya percepatan pencapaian target indikator pada akhir tahun.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas pendampingan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tahunan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi Triwulan I menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada Triwulan II telah dilaksanakan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan, serta monitoring terhadap progres pengisian tools dan kelengkapan data dukung. Upaya tersebut akan terus dilanjutkan hingga seluruh Kabupaten/Kota menyelesaikan tahapan penilaian mandiri sesuai jadwal.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pada Triwulan III akan dilakukan pendampingan teknis lanjutan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman, serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan pengisian tools dan pemenuhan data dukung. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada akhir Tahun 2026.

SK 2 : Meningkatnya Efektivitas KIE

Capaian Sasaran Kegiatan **Meningkatnya efektivitas KIE** diukur dengan 4 indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut.

1. **Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks Efektivitas KIE terdiri atas 4 Indikator/ Kriteria yaitu:

1) Sumber atau Narasumber KIE
2) Konten atau Informasi KIE
3) Pemahaman Audiens KIE
4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Adapun Kategori Hasil Penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi efektivitas
< 65,00	Tidak Efektif
65,01 - 75,00	Kurang Efektif
75,01 - 85,00	Cukup Efektif
85,01 - 95,00	Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BBPOM di Pangkal Pinang atau responden

yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 3 bulan terakhir.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2025-2029.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.77 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	100,67%	Sangat Baik

Pada Triwulan II telah dilakukan survei kepada peserta yang telah mengikuti Kegiatan KIE Langsung maupun KIE melalui Media oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada bulan April – Juni 2026. Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Triwulan II sebesar 86,85 dan realisasi efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II sebesar 87,43. Realisasi telah melampaui target dan diperoleh capaian sebesar 100,67% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.78 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,79	102,23	86,85	87,43	100,67

Berdasarkan hasil pengukuran, target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I dan Triwulan II sama, yaitu sebesar 86,85.

Pada Triwulan I, realisasi yang dicapai sebesar 88,79 dengan capaian 102,23%, sedangkan pada Triwulan II realisasi sebesar 87,43 dengan capaian 100,67%.

Meskipun terjadi penurunan realisasi sebesar 1,36 poin dibandingkan Triwulan I, capaian pada Triwulan II tetap melampaui target yang ditetapkan dan masih berada pada kategori Sangat Baik. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik peserta dan lokasi pelaksanaan kegiatan KIE pada Triwulan II. Namun demikian, materi yang disampaikan, kompetensi narasumber, serta manfaat kegiatan KIE masih dinilai baik oleh peserta sehingga tingkat efektivitas KIE tetap berada di atas target yang ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan KIE pada Triwulan II tetap mampu mempertahankan tingkat efektivitas yang tinggi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	100,67 ▲	Tercapai/ Melampaui

Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target tahun 2026 sebesar 86,85. Pada triwulan II, realisasi yang dicapai sebesar 87,43 sehingga persentase capaian terhadap target tahunan adalah sebesar 100,67%. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II di Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melebihi target tahunan dengan kategori tercapai/ melampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,43 (Efektif) dari Target 86,85 dengan capaian 100,67 % (Sangat Baik). Hasil Penilaian ini terdiri dari KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara langsung dengan hasil sebesar

87,45 dan KIE melalui Media (Media Sosial, Media Cetak, Media Elektronik, Media Digital dan Media Luar Ruang) dengan hasil sebesar 87,41. Pada saat pelaksanaan survei, Balai Besar POM di Pangkal Pinang juga menyediakan Survei dalam bentuk Hard Copy dikarenakan tidak semua peserta KIE mempunyai Handphone dan Paket Data. Secara keseluruhan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melebihi target dengan kategori Tercapai/ Melampaui.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian efektifitas KIE adalah:

- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan.
- Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam strata.
- Memperluas jangkauan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non milenial.
- Memberikan materi berupa leaflet dan pemutaran video Obat dan Makanan pada saat KIE.

Tabel 3.80 Matriks Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 60 orang siswa SMA Negeri 3 Toboali Kabupaten Bangka Selatan serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Mei	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.
Mei	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 50 orang masyarakat di Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Juni	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.
Juni	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 63 orang siswa SMA Negeri 1 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka Barat serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Juli	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai Indeks efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung (Tatap Muka) dengan tema "Cerdas Memilih Pangan, Wujudkan Remaja Sehat Tanpa Stunting" di SMA Negeri 3 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan pada bulan April 2026.

2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung (Tatap Muka) dengan tema "Cerdas Memilih Obat dan Obat Bahan Alam yang Aman" di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka pada bulan Mei 2026.
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung (Tatap Muka) dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya" di SMA Negeri 1 Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Juni 2026.
4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media luar ruangan (baliho) mengenai Cek KLIK dan aplikasi BPOM Mobile di Kota Pangkal Pinang pada bulan Mei 2026.

Selain itu, Balai Besar POM di Pangkal Pinang juga aktif melakukan KIE melalui media sosial Instagram, Facebook dan X, pemutaran video pada saat KIE serta melalui Leaflet dan Banner.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.81 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	100,67	56.503.000	62.079.000	109,87	**0,92**	**-0,08**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Realisasi anggaran pada indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 109,87% dari Rencana Penarikan Dana (RPD), sehingga berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya termasuk kategori tidak efisien. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, antara lain kunjungan sekolah ke Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang memerlukan penyediaan konsumsi peserta serta pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Publik yang didukung melalui anggaran kegiatan KIE. Meskipun realisasi anggaran melebihi RPD, target kinerja tetap terlampaui dengan capaian efektivitas sebesar 87,43 atau 100,67% dari target yang ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada periode berikutnya, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan meningkatkan ketepatan

perencanaan kebutuhan anggaran sesuai jadwal dan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pada setiap kegiatan KIE agar penggunaan anggaran lebih efektif dan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2026, pada Triwulan II telah dilakukan penyesuaian aktivitas melalui pelaksanaan kegiatan KIE secara langsung di SMA Negeri 3 Toboali, Kecamatan Riau Silip, dan SMA Negeri 1 Simpang Katis. Materi KIE disesuaikan dengan karakteristik peserta, disampaikan secara interaktif melalui diskusi, *ice breaking*, dan kuis, serta tetap dilakukan pengukuran pengetahuan peserta melalui *pre-test* dan *post-test* sebagai bahan evaluasi efektivitas kegiatan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penggunaan anggaran pada Triwulan II disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan KIE, termasuk pelaksanaan KIE di berbagai wilayah di Pulau Bangka, penerimaan kunjungan edukasi dari sekolah ke Balai Besar POM di Pangkal Pinang, serta pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Publik. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan media elektronik tetap dioptimalkan sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II mencapai 87,43 atau 100,67% dari target yang ditetapkan. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan Triwulan I, capaian tersebut masih berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi Triwulan I, berupa penyesuaian materi sesuai karakteristik peserta, penyampaian materi secara interaktif, serta evaluasi

melalui *pre-test* dan *post-test*, tetap mampu mempertahankan efektivitas pelaksanaan kegiatan KIE.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya antara lain :

a) Melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada triwulan selanjutnya.

b) Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan BPOM

c) Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam strata.

2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

a) Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

b) Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

c) Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

a. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
b. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
c. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Adapun Tahapan Kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.82 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00%	Baik

Pada Triwulan II Tahun 2026, target kumulatif indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebesar 25% dan telah terealisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut merupakan akumulasi dari tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II, meliputi:

1. Perencanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan bobot 5%
2. Koordinasi dan survei terhadap sekolah sasaran program dengan bobot 5%
3. Pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor dengan bobot 15%;

Dengan demikian, seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana sesuai target sehingga indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan memperoleh capaian sebesar 100,00%.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.83 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00	25	25	100,00

Target kumulatif indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan meningkat dari 10% pada Triwulan I menjadi 25% pada Triwulan II. Realisasi kinerja pada kedua triwulan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja masing-masing mencapai 100,00%.

Peningkatan target kumulatif dari Triwulan I ke Triwulan II merupakan hasil pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu perencanaan program, koordinasi dan survei sekolah sasaran, serta pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II berjalan sesuai rencana dan mampu mempertahankan capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	25,00	25,00	▼	Perlu Upaya Keras

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan memiliki target tahunan sebesar 100% dengan realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 25,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan baru mencapai 25,00% dan berada pada kategori Perlu Upaya Keras.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa progres pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II masih relatif rendah terhadap target tahunan, namun kondisi ini masih

wajar mengingat pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan distribusi capaian belum merata di setiap triwulan.

Jika dibandingkan dengan target kumulatif Triwulan II sebesar 25,00%, realisasi yang dicapai telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun terhadap target tahunan terlihat masih rendah, secara progres triwulanan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan (100%). Keberhasilan tersebut didukung oleh terlaksananya seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan rencana, meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei sekolah sasaran serta Rapat Advokasi Lintas Sektor yang memperoleh dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan Pemerintah Daerah, Dinas Terkait dan Pihak Sekolah sasaran mendukung sinkronisasi pelaksanaan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Upaya yang akan dilakukan antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pengampu dan Dinas terkait guna memastikan dukungan dalam penentuan dan kesiapan sekolah sasaran pada triwulan berikutnya. Selain itu juga setiap akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan disesuaikan dengan target bulanan yang telah ditetapkan. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

Tabel 3.85 Matriks Rekomendasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Telah dilaksanakan Rapat Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 April 2026 sebagai tahapan awal pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah.	Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Advokasi Lintas Sektor sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan pelaporan melalui aplikasi Sapa Sekolah (sapasekolah.pom.go.id)	Mei	Tidak	-	-
Mei	Belum terdapat pelaksanaan kegiatan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan karena tahapan selanjutnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2026. Meskipun demikian, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program, telah dilakukan penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi dasar koordinasi dan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan pembudayaan keamanan pangan di sekolah. Adapun progres pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Mei 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Mei 2026 capaian progres Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai 25% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan	Perlu dilakukan koordinasi dan persiapan teknis pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan guna memastikan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan Juli 2026.	1. Menyiapkan materi serta kebutuhan administrasi dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan Pendampingan Sekolah yang telah diintervensi Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah pada bulan Juli 2026.	Juni	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Juni	Sampai dengan bulan Juni 2026, Tahapan Intervensi Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan belum dilaksanakan karena sesuai jadwal, pelaksanaan intervensi kepada sekolah sasaran baru akan dimulai pada bulan Juli 2026. Meskipun demikian, sebagai bagian dari upaya pembinaan dan keberlanjutan program, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan kepada 7 (tujuh) Sekolah di Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan sekolah yang telah diintervensi Tahun 2025. Adapun progres pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Juni 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Juni 2026 capaian progres Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai 25% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.	Perlu dilakukan koordinasi dan persiapan teknis pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan guna memastikan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan Juli 2026.	1. Menyiapkan materi serta kebutuhan administrasi dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah pada bulan Juli 2026.	Juli	Tidak	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan melalui tahapan perencanaan kegiatan, koordinasi dan survei sekolah sasaran, serta pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor. Kegiatan advokasi menjadi tahapan yang paling mendukung pencapaian kinerja karena berhasil membangun komitmen dan sinergi antara Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta pihak sekolah dalam pelaksanaan program.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.86 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100	10.300.000	13.972.000	135,65	0,74	-0,26	Tidak Efisien

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Realisasi anggaran pada Triwulan II mencapai 135,65% dari Rencana Penarikan Dana (RPD), sehingga tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada kategori Tidak Efisien. Kondisi tersebut disebabkan oleh percepatan pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2025 sebagai bagian dari pembinaan keberlanjutan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Percepatan pelaksanaan kegiatan tersebut mengakibatkan realisasi anggaran lebih besar dibandingkan RPD yang telah direncanakan. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mempengaruhi pencapaian target output, dimana capaian Triwulan II tetap mencapai 100,00% sesuai target yang telah ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada periode berikutnya, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang lebih mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan

kegiatan, khususnya kegiatan pembinaan keberlanjutan terhadap sekolah yang telah diintervensi. Selain itu, pengendalian realisasi anggaran akan dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan kegiatan agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan jadwal dan target kinerja yang telah ditetapkan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I, pada Triwulan II dilakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta sekolah sasaran melalui pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor. Selain itu, dilaksanakan koordinasi lanjutan untuk memastikan kesiapan sekolah dalam mengikuti Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Penyesuaian aktivitas tersebut dilakukan agar pelaksanaan tahapan intervensi pada Triwulan III dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penggunaan anggaran pada Triwulan II difokuskan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, Rapat Advokasi Lintas Sektor, serta pendampingan terhadap sekolah yang telah diintervensi pada Tahun 2025 sebagai bagian dari pembinaan keberlanjutan program. Penyesuaian penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana sesuai target. Rekomendasi pada Triwulan I berupa penguatan koordinasi lintas sektor telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan sekolah sasaran. Tindak lanjut tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, serta Pengawalan sekolah pada Triwulan III.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Perencanaan pada periode berikutnya difokuskan pada pelaksanaan tahapan intervensi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, meliputi Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah. Selain itu, monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga target tahunan dapat tercapai.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada Program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.87 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00%	Baik

Pada Triwulan II Tahun 2026, target kumulatif indikator Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 25% dan telah terealisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut merupakan akumulasi dari tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II, meliputi:

1. Perencanaan Program Desa Pangan Aman dengan bobot 5%
2. Koordinasi dan survei terhadap desa sasaran program dengan bobot 5%
3. Pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor dengan bobot 15%;

Dengan demikian, seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana sesuai target sehingga indikator Jumlah Desa Pangan Aman memperoleh capaian sebesar 100,00%.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.88 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah desa pangan aman	10	10	100,00	25	25	100,00

Target kumulatif indikator Jumlah Desa Pangan Aman meningkat dari 10% pada Triwulan I menjadi 25% pada Triwulan II. Realisasi kinerja pada kedua triwulan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja masing-masing mencapai 100,00%.

Peningkatan target kumulatif dari Triwulan I ke Triwulan II merupakan hasil pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu perencanaan program, koordinasi dan survei desa sasaran, serta pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II berjalan sesuai rencana dan mampu mempertahankan capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Jumlah desa pangan aman	3	25,00	25,00	▼	Perlu Upaya Keras

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman memiliki target tahunan sebesar 100% dengan realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 25,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai 25,00% dan berada pada kategori Perlu Upaya Keras.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa progres pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II masih relatif rendah terhadap target tahunan, namun kondisi ini masih

wajar mengingat pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan distribusi capaian belum merata di setiap triwulan.

Jika dibandingkan dengan target kumulatif Triwulan II sebesar 25,00%, realisasi yang dicapai telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun terhadap target tahunan terlihat masih rendah, secara progres triwulanan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Desa Pangan Aman pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan (100%). Keberhasilan tersebut didukung oleh terlaksananya seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan rencana, meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei desa sasaran serta Rapat Advokasi Lintas Sektor yang memperoleh dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan Pemerintah Daerah, Dinas Terkait dan Desa sasaran mendukung sinkronisasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman agar target tahunan dapat tercapai secara optimal, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Upaya yang akan dilakukan antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pengampu dan Dinas terkait guna memastikan dukungan dalam penentuan dan kesiapan desa sasaran pada triwulan berikutnya. Selain itu juga setiap akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan disesuaikan dengan target bulanan yang telah ditetapkan. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

Tabel 3.90 Matriks Rekomendasi Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Telah dilaksanakan Rapat Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 April 2026 sebagai tahapan awal pelaksanaan program Desa Pangan Aman.	Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Advokasi Lintas Sektor sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan Program Desa Pangan Aman	Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah aplikasi GKPD Online (gkpdonline.pom.go.id).	Mei	Tidak	-	-
Mei	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pada desa yang telah diintervensi Program Desa Pangan Aman sebagai upaya pembinaan dan pemantauan keberlanjutan program. Selain itu, telah dilakukan penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi dasar koordinasi dan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Program Desa Pangan Aman Tahun 2026 Adapun progres pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sampai dengan bulan Mei 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Mei 2026 capaian progres Program Desa Pangan Aman telah mencapai 25% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan.	Perlu dilakukan koordinasi dan persiapan teknis pelaksanaan Program Desa Pangan Aman guna memastikan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan Juli 2026.	1. Menyiapkan materi serta kebutuhan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa pada bulan Juli 2026.	Juni	Tidak	-	-
Juni	Sampai dengan bulan Juni 2026, tahapan Intervensi Program Desa Pangan Aman belum dilaksanakan karena sesuai dengan jadwal, pelaksanaan intervensi kepada desa sasaran baru akan dimulai pada bulan Juli 2026. Adapun progres pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sampai	Perlu dilakukan koordinasi dan persiapan teknis pelaksanaan Program Desa Pangan Aman guna memastikan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan Juli 2026.	1. Menyiapkan materi serta kebutuhan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa pada bulan Juli 2026.	Juli	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dengan bulan Mei 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Juni 2026 capaian progres Program Desa Pangan Aman telah mencapai 25% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan dan masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan Program Desa Pangan Aman melalui tahapan perencanaan program, koordinasi dan survei desa sasaran, serta pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor. Kegiatan advokasi menjadi tahapan yang paling mendukung pencapaian kinerja karena berhasil membangun komitmen dan sinergi antara Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan Program Desa Pangan Aman.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.91 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Jumlah desa pangan aman	25	25	100	15.660.000	19.271.000	123,06	**0,81**	**-0,19**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Realisasi anggaran pada Triwulan II mencapai 123,06% dari Rencana Penarikan Dana (RPD), sehingga tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada kategori Tidak Efisien. Kondisi tersebut disebabkan oleh percepatan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawalan terhadap desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari pembinaan keberlanjutan Program Desa Pangan Aman. Percepatan pelaksanaan kegiatan tersebut mengakibatkan realisasi anggaran lebih besar dibandingkan RPD yang telah direncanakan. Meskipun demikian, penggunaan anggaran tersebut tidak mempengaruhi pencapaian target output, dimana capaian Triwulan II tetap mencapai 100,00% sesuai target yang telah ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada periode berikutnya, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang lebih memperhatikan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan pembinaan dan pengawalan desa yang telah diintervensi. Selain itu, monitoring realisasi anggaran akan dilakukan secara berkala serta penjadwalan kegiatan akan disesuaikan dengan target bulanan agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I, pada Triwulan II dilakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta pemerintah desa melalui pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor. Selain itu, dilaksanakan koordinasi lanjutan terhadap desa sasaran untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Program Desa Pangan Aman. Penyesuaian aktivitas tersebut dilakukan agar tahapan intervensi pada Triwulan III dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan II, penggunaan anggaran difokuskan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, survei desa sasaran, Rapat Advokasi Lintas Sektor, serta kegiatan pembinaan dan pengawalan terhadap desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari keberlanjutan Program Desa Pangan Aman. Penyesuaian penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana sesuai target. Rekomendasi pada Triwulan I berupa penguatan koordinasi lintas sektor telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan desa sasaran. Tindak lanjut tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa pada Triwulan III.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Perencanaan pada periode berikutnya difokuskan pada pelaksanaan tahapan intervensi Program Desa Pangan Aman, meliputi Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa. Selain itu, monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga target tahunan dapat tercapai.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi Supply (Pengelola Pasar, Pedagang Pasar, Asosiasi Pasar, Pemasok) dan dari sisi Demand (Pengunjung Pasar).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.92 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00%	Baik

Pada Triwulan II Tahun 2026, target kumulatif indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebesar 70% dan telah terealisasi sebesar 70%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut merupakan akumulasi dari tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II, meliputi:

1. Perencanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan bobot 5%.
2. Koordinasi dan survei terhadap pasar sasaran program dengan bobot 5%.
3. Pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor dengan bobot 15%.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar dengan bobot 25%
5. Kegiatan Sosialisasi Kemanan Pangan kepada Komunitas Pasar dengan bobot 20%

Dengan demikian, seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan sehingga indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas memperoleh capaian sebesar 100,00%.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.93 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00	70	70	100,00

Target kumulatif indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas meningkat dari 10% pada Triwulan I menjadi 70% pada Triwulan II. Realisasi kinerja pada kedua triwulan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja masing-masing mencapai 100,00%.

Peningkatan target kumulatif dari Triwulan I ke Triwulan II merupakan hasil pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu perencanaan program, koordinasi dan survei desa sasaran, Pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II berjalan sesuai rencana dan mampu mempertahankan capaian kinerja sebesar 100,00%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.94 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70,00	70,00	▲	Akan Tercapai

Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas memiliki target tahunan sebesar 100% dengan realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 70,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai 70,00% dan berada pada kategori Akan Tercapai.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja. Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan perencanaan program, koordinasi dan survei pasar sasaran, Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar.

Jika dibandingkan dengan target kumulatif Triwulan II sebesar 70,00%, realisasi yang dicapai telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II telah berjalan sesuai perencanaan dan menunjukkan progres yang baik, sehingga target tahunan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berpotensi tercapai pada akhir Tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan (100,00%). Keberhasilan tersebut didukung oleh terlaksananya tahapan kegiatan sesuai dengan rencana, meliputi perencanaan program, koordinasi dan survei pasar sasaran, Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, serta Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar.

Selain itu, keberhasilan pencapaian indikator juga didukung oleh koordinasi yang baik antara Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, serta instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan tersebut memungkinkan setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas agar target tahunan dapat tercapai secara optimal, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Upaya yang akan dilakukan antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pengampu, Pengelola Pasar, Pemerintah Daerah dan Dinas terkait guna memastikan keberlanjutan pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Selain itu juga setiap akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan disesuaikan dengan target bulanan yang telah ditetapkan. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

Tabel 3.95 Matriks Rekomendasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Telah dilaksanakan Rapat Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 April 2026 sebagai tahapan awal pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	1. Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Advokasi Lintas Sektor sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. 2. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan dinas terkait tentang Pembentukan Tim Keamanan Pangan pada Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. 3. Melaksanakan kegiatan selanjutnya	1. Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah serta pelaporan melalui aplikasi SIPAMAN (sipaman.pom.go.id). 2. Menyusun dan menyampaikan Surat Pembentukan Tim Keamanan Pangan kepada Dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka Pembentukan Tim Keamanan Pangan pada Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. 3. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I	Mei	Tidak	-	-
Mei	Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 12–13 Mei 2026. Berdasarkan hasil Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I, ditemukan 2 (dua) sampel terasi yang mengandung Rhodamin B, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa pembinaan dan pengawasan lanjutan untuk mencegah peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya. Adapun progres pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan bulan Mei 2026	1. Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I sebagai dasar pembinaan dan perbaikan penerapan keamanan pangan di Pasar Simpang Katis. 2. Perlu dilakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas terkait guna mendukung pelaksanaan tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas selanjutnya.	1. Menyusun Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I 2. Melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Pasar	Juni	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. 2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Mei 2026 capaian progres Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan.						
Juni	Pada bulan Juni 2026 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah sebagai salah satu tahapan pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Adapun progres pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan bulan Juni 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. 2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 13 Mei 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar pada tanggal 26 Juni 2026 dengan bobot capaian sebesar 20%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Juni 2026 capaian progres Program Pasar Pangan Aman	Meningkatkan koordinasi dengan pengelola pasar dan pemerintah daerah guna memperkuat komitmen dalam penerapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Melaksanakan kegiatan Pengawalan terhadap Pasar yang telah diintervensi pada tahun 2025 sebagai upaya pemantauan keberlanjutan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Juli	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Berbasis Komunitas telah mencapai 70% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan.						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam Petunjuk Teknis.

Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian indikator pada Triwulan II adalah Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan kepada Komunitas Pasar, serta Sosialisasi Keamanan Pangan. Kegiatan tersebut berperan penting dalam membangun komitmen pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.96 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100	26.056.000	23.989.000	92,07	1,09	0,09	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dinilai efisien. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian output sebesar 100,00%, sedangkan realisasi anggaran hanya mencapai 92,07% dari target Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II. Dengan demikian, pelaksanaan

kegiatan mampu mencapai seluruh target kinerja tanpa menggunakan seluruh anggaran yang telah direncanakan.

Efisiensi tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal, koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, beberapa kebutuhan belanja dapat disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas maupun target output yang telah ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran antara lain:

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan mengurangi biaya operasional.
- Melakukan pengendalian dan monitoring terhadap realisasi anggaran secara berkala agar penggunaan anggaran tetap sesuai kebutuhan dan target kinerja.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan I, pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan II diarahkan pada percepatan pelaksanaan tahapan intervensi sesuai Petunjuk Teknis. Penyesuaian dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, dan instansi terkait, serta pelaksanaan Rapat Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis, Penyuluhan Komunitas Pasar, dan Sosialisasi Keamanan Pangan.

Penyesuaian aktivitas tersebut bertujuan agar setiap tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal, sehingga target kumulatif Triwulan II dapat dicapai secara optimal.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan II, penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tahapan kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung

pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sosialisasi kepada komunitas pasar.

Pengendalian penggunaan anggaran dilakukan secara berkala sehingga realisasi anggaran tetap efisien dan seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II telah berjalan sesuai rencana dan mampu mencapai target kumulatif sebesar 70,00%. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Sebagai tindak lanjut, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu Pengawalan dan Pengawasan Pasar agar seluruh tahapan kegiatan pada Triwulan III dapat diselesaikan sesuai target tahunan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pada periode berikutnya akan dilaksanakan tahapan lanjutan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, meliputi pengawalan dan pengawasan pasar serta penguatan implementasi keamanan pangan di pasar sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar akan terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program serta mendukung pencapaian target indikator kinerja pada akhir Tahun 2026.

SK 3 : Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu** diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. **Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan**

   UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK. Sedangkan untuk UMKM OBA (Obat Bahan Alam) yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3). Sedangkan untuk UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.97 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	62,88	68,32	108,65%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan, capaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat cara pembuatan OBA,Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 108,65 %dengan realisasi sebesar 68,32 % dari target pada triwulan II yaitu 62,88 %. Sehingga capaian untuk indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.98 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,9	12,49	96,82	62,88	68,32	108,65

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan menunjukkan tren peningkatan.. Pada Triwulan I, realisasi capaian sebesar 96,82% masih berada sedikit di bawah target yang ditetapkan (12,49% dari target 12,9%). Sementara itu, pada Triwulan II terjadi peningkatan kinerja dengan realisasi mencapai 108,65% (68,32% dari target 62,88%), sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Triwulan II terdapat perubahan realisasi untuk indikator ini yaitu pada bulan April semula 47,49 % menjadi 59,32 % dan pada bulan Mei semula 31,38 % menjadi 50,32 %. Perubahan ini dilakukan karena adanya penyesuaian jumlah target pendampingan dari 9 UMKM menjadi 5 UMKM sehingga ada penyesuaian perhitungan tahapan pendampingan yang telah dilaksanakan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.99 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	68,32	-	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap data pada Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026, dapat disampaikan bahwa capaian dan realisasi indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Industri Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan (IP CPPOB) belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan.

Pada target bulanan, capaian realisasi dihitung berdasarkan progres tahapan pendampingan yang telah dilaksanakan kepada UMKM selama tahun berjalan. Sementara itu, target tahunan dihitung berdasarkan persentase jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan terhadap target kumulatif pendampingan UMKM dalam periode lima tahun. Perbedaan pendekatan ini menyebabkan capaian pada triwulan berjalan belum sepenuhnya merepresentasikan tingkat pencapaian terhadap target tahunan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan tahapan pendampingan yang sedang dilaksanakan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 68,32 % dari target triwulan II sebesar 62,88 % dan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya penyesuaian target pendampingan dari sebelumnya 9 menjadi 5 UMKM sehingga terdapat penyesuaian realisasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan tahapan pendampingan yang telah diselesaikan.

Selain itu komitmen pelaku usaha dalam menyelesaikan tahapan pendampingan turut berperan dalam realisasi pendampingan pada triwulan II.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian indikator ini adalah:

1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi inovasi UMKM PACAK melalui berbagai kanal media sosial resmi BBPOM di Pangkal Pinang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal

pemenuhan sarana produksi terhadap persyaratan IP CPPOB, dan registrasi produk sehingga dapat meningkatkan saing produk pangan olahan.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan pendampingan.

Tabel 3.100 Matriks Rekomendasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	UMKM Pangan Olahan: Telah dilakukan Bimtek IP CPPOB kepada UMKM pangan olahan dengan jumlah peserta sebanyak 6 sarana. Berdasarkan Nota dinas Sestama No PR.04.02.2.04.26.321 tanggal 29 April 2026 tentang penyampaian rekapitulasi penyesuaian target RO maka akan dilakukan penyesuaian target pendampingan pangan olahan yang sebelumnya 8 menjadi 4 sarana. Kendala UMKM OBA Belum adanya penanggung jawab teknis pada UMKM OBA menyebabkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang direncanakan pada bulan April tidak dapat dilaksanakan. Realisasi melebihi 110 % dikarenakan perhitungan target masih berdasarkan perhitungan target RO yang lama sehingga diperlukan revisi target RAPK dengan target yang telah disesuaikan	UMKM Pangan Olahan: Penyesuaian target pendampingan pangan olahan UMKM OBA: Perlu dilakukan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM OBA yang sebelumnya dijadwalkan di bulan April. Penyesuaian ulang RAPK bulanan dengan target RO yang telah dikurangi	- Revisi SK target pendampingan pangan olahan - Melaksanakan Bimtek bagi pelaku UMKM OBA - Melakukan exercise perhitungan ulang target RAPK	Mei	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar
Mei	UMKM Pangan Olahan: - Telah diterbitkan IP CPPOB kepada 1 UMK pangan olahan di bulan Mei. - Telah dilakukan revisi SK target Pendampingan UMK Pangan Olahan UMK Obat Bahan Alam: -Telah dilakukan pendampingan awal untuk UMK OBA untuk persiapan sarana Target tidak tercapai karena pada UMKM OBA yang sudah dijadikan target dikarenakan belum adanya penanggung	- UMK Pangan Olahan : Melanjutkan tahapan pendampingan ke pelaku usaha UMK OBA: Perlu dilakukan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM OBA yang sebelumnya dijadwalkan di bulan April - Penyesuaian ulang RAPK bulanan dengan target RO yang telah dikurangi	- UMK Pangan : Melanjutkan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan UMKM OBA: Melaksanakan Bimtek bagi pelaku UMK OBA -Melakukan exercise perhitungan ulang target RAPK	Juni	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	jawab teknis pada UMKM OBA menyebabkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang direncanakan belum dapat dilaksanakan. Realisasi melebihi 110 % dikarenakan perhitungan target masih berdasarkan perhitungan target RO yang lama sehingga diperlukan revisi target RAPK dengan target yang telah disesuaikan						
Juni	UMK Pangan Olahan: - Sampai dengan bulan Juni telah dilakukan pendampingan penyusunan dokumen kepada 3 pelaku usaha pangan UMK Obat Bahan Alam: belum terdapat progress pendampingan Obat Bahan Alam	UMK Pangan Olahan: Terdapat kendala pendaftaran akun e sertifikasi yang disebabkan oleh status KSWP pelaku usaha UMK OBA: Perlu dilakukan follow up terkait kendala penanggungjawab teknis sarana	UMKM Pangan : Melanjutkan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan dan follow up akun oss yang akan dilakukan pendaftaran e sertifikasi UMKM OBA: Melaksanakan Bimtek bagi pelaku usaha jika telah terdapat penanggung jawab teknis. -Melakukan exercise perhitungan ulang target RAPK untuk dilakukan revisi	Juli	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Respon positif dari pelaku usaha pada Triwulan II terhadap tahapan pendampingan turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian kinerja. Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik dengan pelaku usaha maupun lintas sektor terkait, guna memastikan setiap tahapan pendampingan dapat dilaksanakan secara optimal dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.101 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	62,88	68,32	108,65	10.737.000	10.495.000	97,75	1,11	0,11	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau Izin Penerapan IP CPPOB Pangan Olahan adalah sebesar 0,11 , yang menunjukkan kondisi efisien.

Perhitungan tingkat efisiensi ini diperoleh melalui perbandingan antara persentase capaian output dengan persentase capaian input (anggaran), di mana capaian output sebesar 108,65% dan capaian input sebesar 97,75%.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumberdaya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Untuk itu selanjutnya akan dilakukan penyesuaian realisasi anggaran dan juga target output pada triwulan berikutnya sehingga capaian terhadap indikator ini dapat lebih efektif dan optimal.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada triwulan II diantaranya Melakukan penyesuaian target pendampingan sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama Nota dinas Sestama No PR.04.02.2.04.26.321 tanggal 29 April 2026 tentang penyampaian rekapitulasi penyesuaian target RO

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja peningkatan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, telah dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran guna mendukung pelaksanaan fasilitasi pendampingan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pendampingan agar berjalan secara efektif, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Capaian indikator terhadap persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan I memberikan capaian yang baik. Hal ini disebabkan antara lain karena respon yang baik dari pelaku usaha dalam pelaksanaan tahapan pendampingan.

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja yang telah dicapai pada triwulan II, hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencapaian target:

- Melaksanakan tahapan pendampingan sesuai dengan petunjuk teknis pendampingan UMKM
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait di pemerintah daerah untuk memperoleh rekomendasi pelaku usaha UMKM yang akan dijadikan target tambahan pendampingan pada tahun 2026

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya antara lain:

- Melanjutkan tahapan fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB pada UMK yang menjadi target.
- Mengusulkan revisi rencana penarikan dana anggaran agar kegiatan pendampingan dapat berjalan sesuai dengan target output kegiatan.

SK 4 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 26 tahun 2017, Deputi Bidang Penindakan bertugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pencegahan, pelaksanaan inspeksi rutin dan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan mencerdaskan masyarakat dalam rangkaian proses produksi, distribusi dan penggunaan produk obat dan makanan.

a. Penilaian Persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
   1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
   2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
   3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
   4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
b. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
   = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%
c. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot

perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut

d. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

1. **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.102 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38,33	57,50	150,01%	Tidak Dapat Disimpulkan

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.103 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33,30	33,33	100,09	38,33	57,50	150,01

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per-UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

   Tahapan Penindakan antara lain:

   a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dim'ulainya Penyidikan)

   b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

   c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d)Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Presentasi keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 38,33 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 57,50. Capaian terhadap target sebesar 150,01% dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	57,50	62,16 ▼	Perlu Upaya Keras

Perbandingan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan II dengan target 2026 menghasilkan capaian sebesar 62,16%. Hasil ini diperoleh dari realisasi kinerja Triwulan II sebesar 57,50 terhadap target 2026 sebesar 92,5. Hasil ini menunjukkan adanya progres untuk pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2026 namun memerlukan upaya yang keras untuk pencapai target tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Pada triwulan II tahun 2026, ada 1 (satu) realisasi perkara sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan penyidikan oleh Tim Kerja Penindakan Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan SPDP nomor SPDP/01-26/BPON-PPNS.20B/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026.

2. Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Kep. Bangka Belitung dan Kejaksaan Kep. Bangka Belitung dalam rangka penyelesaian pemberkasan kedepannya, antara lain terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Dalam rangka penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan dilakukan proses Pemberkasan yang beriringan dengan selalu berkoordinasi dengan ICJS dalam hal ini Korwas PPNS dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
2. Selalu berkonsultasi dengan Korwas PPNS dan JPU peneliti berkas dalam proses tahapan penyidikan hingga penyelesaian berkas perkara, agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tidak menyalahi aturan.
3. Melaksanakan kegiatan intelijen yang berfokus pada target potensial untuk dinaikkan ke proses penyidikan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan *Criminal Justice System* dalam hal penyelidikan, penyidikan hingga ke pemberkasan.
5. Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber dan *on site* di lapangan.
6. Memperkuat jejaring intelijen dan pertukaran informasi terkait adanya pelanggaran maupun tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait seperti BNN, Bea Cukai dan Asperindo.

Tabel 3.105 Matriks Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	1. Pada bulan Maret Pemantauan jalannya persidangan Tersangka a.n H yaitu pada tanggal 12 Maret dibacakan putusan perkara dengan Vonis denda sebesar Rp. 2.000.000 2. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 3 Maret 2026 Kendala : Sebagai efek anggaran AEA sangat terbatas yaitu sebesar Rp. 5.230.000 yang seharusnya di dalamnya ada anggaran Kegiatan Terpadu sehingga Kegiatan Terpadu diakomodasikan ke anggaran QCD yaitu Forkom PPNS dan Diklat Pembentukan PPNS"	dalam penggunaan anggaran supaya efektif dan efisien maka dilakukan pendalaman informasi terhadap target-target potensial untuk dijadikan target perkara	melakukan kegiatan intelijen terhadap target-target potensial	Juni	Ya	K3-02 O-30 O-57	Keselamatan Petugas terancam saat melakukan Kegiatan dan Operasi Intelijn Bocornya Informasi Kejahatan Obat dan Makanan Informasi pada kegiatan atau operasi intelijen tidak bisa dijadikan sumber informasi awal
Mei	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan : 1. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 1,2,22,23,29 April 2026 dengan menghasilkan 1 Laporan Informasi. dari 1 Laporan Infomasi tersebut masih dibutuhkan pendalaman untuk bisa dinaikkan ke Proses Pro Justicia 2. Dilakukan koordinasi secara informal dengan BNNP dan Bea Cukai terkait profil penyebaran OOT di Pulau Bangka Kendala : Terbatasnya Anggaran dalam kegiatan Intelijen sehingga dalam pendalaman informasi agak terbatas	Penyesuaian SDM yang ditugaskan dalam kegiatan intelijen dalam pendalaman informasi	Pendalaman Informasi kepada Target Potensial sehingga bisa dilakukan Operasi sesuai Target yaitu di bulan Juni	Juni	Tidak	-	-
Juni	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan : 1. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 19 dan 21 Mei 2026 dengan	Mengkoordinasikan dengan fungsi lain untuk bisa sharing anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penindakan	Dalam pelaksanaan Kegiatan Forkom PPNS dan Perjadin Diklat PPNS yang telah dianggarkan sebelumnya, akan dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Kerja Pemeriksaan terkait	Juli	Ya	SDM-05 O-29 H-01 F-18	Jumlah Fisik Barang Bukti berbeda jumlah dengan Jumlah Barang Bukti di Berita Acara Penyitaan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	menghasilkan 4 Laporan Informasi. dari 4 Laporan Infomasi tersebut masih dibutuhkan pendalaman untuk bisa dinaikkan ke Proses Pro Justicia 2. Dilakukan Revisi Anggaran DJA sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3. Nota Dinas ini berisi untuk mengusulkan perubahan target perkara dari 2 (dua) menjadi 1 (satu) dengan rincian anggaran semula Rp. 142.830.000 menjadi Rp. 120.822.000 (-Rp. 22.008.000) Kendala : Dengan berkurangnya anggaran sebesar Rp. 22.008.000 adanya penyesuaian anggaran akun QCD di kegiatan Forkom PPNS dan Anggaran Perjadin Diklat PPNS		kemungkinan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran Pemeriksaan				Adanya celah perbedaan pemahaman terkait unsur tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar oleh Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Pra Peradilan dan kalah di pengadilan Suap dari Pihak Terlapor/ calon Tersangka

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2026 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan intelijen dilakukan secara tersistem dari pengumpulan bahan awal, pendalaman informasi dan kegiatan intelijen berdasarkan pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya. Penelusuran secara terselubung dari sarana eceran atau toko kelontong memberikan informasi penting mengenai sumber pasokan obat-obatan yang dijual tanpa kewenangan.

Informasi atau data potensi kerawanan kejahatan yang diperoleh melalui rekomendasi fungsi pemeriksaan, hasil profiling atau patroli siber menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan penindakan dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pengan olahan di wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu komunikasi dan kerja sama antara fungsi penindakan dan pemeriksaan juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik. Kegiatan rutin operasi intelijen dan verifikasi data patrol siber dilaksanakan secara sinergis menghasilkan data atau informasi yang dapat menjadi acuan bagi Tim Kerja Pemeriksaan maupun Tim Kerja Penindakan.

Dalam penyelesaian target perkara, fungsi penindakan aktif melakukan koordinasi dan menjalin hubungan lintas sektor dalam hal ini CJS (Criminal Justice System) atau melakukan fungsi respon kepada lintas sektor terkait dengan "INOVASI PULAU BANGKA" (Penggalangan Lintas Sektor untuk Bersinergi melawan Kejahatan Obat dan Makanan).

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.106 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38,33	57,5	150,01	38.693.000	38.066.612	98,38	1,52	0,52	92% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT "Efisien". Hal ini dikarenakan capaian Target IKU di angka 38,33 dengan realisasi sebesar 57,5, sehingga Persentase Capaian Output adalah 150,01% dengan Persentase Capaian Anggaran 98,38%. Adanya bergeseran modus Operandi kejahatan obat dan makanan menyebabkan Anggaran yang dikeluarkan lebih banyak dalam kegiatan intelijen guna mengungkap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Pulau Bangka.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi pada Triwulan II tahun 2026 yaitu dilakukannya proses kegiatan intelijen, kegiatan pengawasan pengamatan penelitian pemeriksaan dan operasi intelijen dilakukan secara tersistem dari pengumpulan bahan awal, pendalaman informasi dan kegiatan intelijen

berdasarkan pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya. Penelusuran disasar untuk mendapatkan informasi mengenai sumber pasokan obat-obatan yang dijual tanpa kewenangan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   a. Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui infokom/ masyarakat dan diteruskan ke fungsi penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
   b. Memaksimalkan Data Patroli Siber sehingga bisa dilakukan Profiling terhadap akun tersebut dapat dihasilkan output berupa perkara.
   c. Melakukan Investigasi Lanjutan terhadap sarana-sarana sebelumnya yang telah dilakukan target namun belum bisa dilakukan Operasi Penindakan dikarenakan belum cukup alat bukti.
2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   a. Terjadi penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2025, sehingga dilakukan permohonan Revisi Anggaran DJA sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3. Nota Dinas ini berisi untuk mengusulkan perubahan target perkara dari 2 (dua) menjadi 1 (satu) dengan rincian anggaran semula Rp. 142.830.000 menjadi Rp. 120.822.000 (-Rp. 22.008.000).
3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
   i. Berdasarkan rekomendasi pada Laporan Kinerja tahun 2025 dengan rekomendasi memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan intelijen yang berfokus pada target sasaran yang akan dilakukan penyidikan pada triwulan selanjutnya. Telah dilakukan beberapa kegiatan intelijen yang menargetkan informasi yang bernilai A1 untuk target operasi penindakan.

ii. Melakukan evaluasi masalah/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun sebelumnya dan menentukan langka-langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan

iii. Secara terus menerus melakukan Koordinasi dan Kerja sama dengan *Criminal Justice System* untuk mendukung capaian target 2026.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

i. Melaksanakan proses pemberkasan penyidikan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan ICJS dalam hal ini Korwas PPNS dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung terkhusus terkait penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SK 5 : Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Kegiatan deteksi dini kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan usaha, kegiatan atau tindakan mengetahui, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah dugaan dan potensi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi dan dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Deteksi dini dilakukan dengan menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT.

1. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar**

   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.107 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling).
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12

Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 50 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 50. Capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori "Baik".

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.108 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	50	50	100,00

Realisasi kinerja Triwulan I dan Triwulan II berada pada nilai yang sama sebesar 50 yang dengan target 50, sehingga capaiannya sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.109 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19 ▼	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja Triwulan II sebesar 50 yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 94 menghasilkan persentase capaian sebesar 53,19%

dengan kategori "Perlu Upaya Keras". Capaian ini masih dinilai on the track dikarenakan s.d TW II Kinerja yang dinilai adalah Analisis Penelusuran Siber yang terdiri Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (bobot 50%) dimana Pelaporan BBPOM di Pangkal Pinang selalu tepat waktu. Sementara target lainnya yaitu Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (bobot 25%) dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (bobot 25%) dinilai di B12.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
   1. Melakukan Kegiatan Patroli Siber secara komprehensif dan dilaporkan secara tepat waktu.
   2. Walaupun anggaran dilakukan pemblokiran namun masih bisa melaporkan Laporan Profiling Siber dengan tidak melakukan Kegiatan Verifikasi Hasil Patroli Siber ke sarana hanya melalui akun yang bersangkutan ataupun memanfaatkan Anggaran QCD untuk melakukan kegiatan Verifikasi Hasil Patroli Siber ke sarana target profiling.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

   1. Memperkuat Komunikasi antar fungsi seperti Infokom, pemeriksaan, dan Pengujian guna menindaklanjuti Rekomendasi Tindak Lanjut yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal
   2. Mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polri, maupun UPT lainnya di lingkungan Badan POM.
   3. Akan dilakukan kegiatan pengumpulan data bahan keterangan dari Hasil Kegiatan Intelijen dan Kegiatan Pengawasan dalam rangka penyusunan Analisis Kejahatan pada dengan tema yang dinilai menjadi permasalahan utama dalam sektor pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Bangka. Untuk saat ini hasil Kerawanan Kejahatan di Pulau Bangka dengan kasus dengan jumlah terbanyak yaitu komoditi obat.
   4. Koordinasi dengan Tim Kerja Pemeriksaan dan melakukan perencanaan kedepannya terkait pengumpulan Peserta dari Asosiasi atau yang lainnya sehingga tim kerja penindakan bisa ikut serta untuk pemaparan kegiatan penggalangan.

Tabel 3.110 Matriks Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Maret secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 17 (tujuh belas) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling bulan Maret telah dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan secara tepat waktu pada tanggal 16 Maret 2026 (c) Hasil MOnitoring Rekomendasi takedown s.d Februari, sebanyak 23 link dari 39 link telah ditakedown (58,97%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Maret telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum tersedia di TW I 3. Analisis Kerawanan Kejahatan Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Maret melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data Kendala : Anggaran AEA yang sangat terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan"	Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform	Laporan Profiing Siber memanfaatkan Open Source Intelligence Platform atau melaporkan NIHIL apabila informasi terbatas	Mei	Ya	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti
Mei	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan April secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 35 (tiga puluh lima) link	Data Kerawanan ini bisa dimanfaatkan untuk a. Mendukung kegiatan teknis pengawasan b. Mendukung kegiatan penindakan c. Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat d. Mendukung kegiatan bimbingan teknis kepada	Dilakukan Monitoring Pemanfaatan Data Kerawanan oleh Tim Kerja Penindakan	Juni	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling bulan April telah dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan secara tepat waktu pada tanggal 23 April 2026. Di dalam mendukung pelaporan Profiling bulan April ini dilakukan Verifikasi Lapangan dengan menggunakan Anggaran QCD (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Maret, sebanyak 50 link dari 57 link telah ditakedown (87,72%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d April telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum tersedia di TW I 3. Analisis Kerawanan Kejahatan Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan April melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data. Kendala : pemanfaatan data kerawanan sudah mulai dilakukan monev oleh Dit CT sebagai TL Rekomendasi BPK	pelaku usaha e. Mendukung sinergisme kegiatan dengan pemangku kepentingan f. Mendukung penyusunan strategi pengawasan BPOM					
Juni	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Mei secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 28 (dua puluh delapan link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling NIHIL telah dilaporkan telah	Untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran penyerapan Anggaran AEA dilakukan sesuai RPD yang telah direncanakan	Penyerapan Anggaran sesuai RPD	Juli	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dilaporkan melalui Srikandi secara tepat waktu pada tanggal 18 Mei 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d April, sebanyak 97 link dari 68 link telah ditakedown (70,1%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Mei telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum tersedia di TW I 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 10 (sepuluh) data dengan 11 data kerawanan Kendala : Belum dilakukan penyerapan anggaran AEA dikarenakan anggaran AEA hanya bisa dimanfaatkan 2 OK Perjalanan Dinas sehingga perlu diatur untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran Balai						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2026 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Secara rutin telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan. Kegiatan penelusuran siber yang dilaksanakan mengacu pada data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya dan hasil kegiatan intelijen menggunakan berbagai platform media sosial, platform e-commerce dan hasil penelusuran pada open source lainnya. Selanjutnya dalam

melakukan kegiatan deteksi dini dibutuhkan jejaring intelijen dan pertukaran informasi utuk mengidentifikasi masalah dugaan, potensi kejahatan dan tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan lintas sektor terkait melalui kegiatan penggalangan lintas sektor seperti BINDA, BNN, Bea Cukai, Polri, Asperindo serta lintas sektor lainnya dengan Inovasi Pulau Bangka.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.111 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	4.350.000	4.482.000	103,03	**0,97**	**-0,03**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada Triwulan II dinilai Tidak Efisien dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,97 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,03. Kondisi tidak efisien ini secara administratif disebabkan oleh realisasi anggaran yang sedikit melebihi target Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II, di mana realisasi anggaran mencapai 103,03% atau sebesar Rp4.482.000 dari rencana Rp4.350.000. Meskipun demikian, target kinerja berhasil dicapai secara optimal dengan realisasi output sebesar 100% (50 dari target 50). Deviasi anggaran tersebut terjadi karena adanya kebutuhan operasional dalam proses penyelesaian kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada saat penyusunan RPD. Akibatnya, meskipun capaian kinerja telah memenuhi target, realisasi belanja yang sedikit melampaui rencana menyebabkan nilai efisiensi penggunaan sumber daya masuk dalam kategori Tidak Efisien berdasarkan metode perhitungan Indeks Efisiensi.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Adanya penurunan anggaran dari tahun sebelumnya 2025 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2026 dengan jumlah target yang sama. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian anggaran dan kegiatan di dalam Indikator Kinerja ini.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga ada penyesuaian berupa dalam kegiatan pembuatan laporan Penjejakan Digital (Profiling Siber). Tim kerja kegiatan penindakan melaksanakan penjejakan hanya secara siber dengan memanfaatkan informasi yang didapatkan dari *Open Source* dengan malaksanakan *Open Source Intelligence* (OSINT) tanpa adanya kegiatan verifikasi lapangan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada tahun 2026 dilakukan penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut terhadap Hasil Identifikasi Kementerian Keuangan pada Lampiran Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor: PR.04.02.2.12.25.771 tanggal 22 Desember 2025.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

- Melaksanakan monitoring evaluasi secara periodik untuk memastikan realisasi tercapai sesuai dengan target.
- Dalam upaya bentuk perkuatan jejaring dan pertukaran informasi dengan lintas sektor dilaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus POLDA Bangka Belitung.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

- Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Inovasi PULAU BANGKA dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk perkuatan jejaring dan pertukaran informasi dengan lintas sektor seperti Korwas PPNS, BNN, ASPERINDO dan lintas sektor lainnya terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Dibutuhkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan dari Hasil Kegiatan Intelijen dan Kegiatan Pengawasan dalam rangka penyusunan Analisis Kejahatan pada dengan tema yang dinilai menjadi permasalahan utama dalam sektor pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Bangka. Untuk saat ini hasil Kerawanan Kejahatan di Pulau Bangka dengan kasus dengan jumlah terbanyak yaitu komoditi obat.

SK 6 : Layanan Publik UPT yang prima

Capaian Sasaran Kegiatan **Layanan Publik Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang Prima** diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) berikut:

1. **Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
b. Profesionalitas SDM (25%);
c. Sarana Prasarana (18%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
f. Inovasi (12%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM

Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 3.112 Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		

Merupakan Target Tahunan dan Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik diberikan oleh Tim Penilai Unit Pelayanan Publik (Tim UPP) BPOM setelah Desk Penilaian Pelayanan Publik pada tahun 2026.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.113 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-

Indikator Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pada Triwulan I maupun Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi indikator kinerja yang dapat diukur. Pengukuran capaian indikator akan dilakukan pada Laporan Kinerja Tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.114 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-	

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 sebesar 4,85. Hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik merupakan target tahunan sehingga perbandingannya akan dilakukan pada Lapkin Tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Pangkal Pinang untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan Badan POM. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan Badan POM untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM di Pangkal Pinang, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM di Pangkal Pinang misalnya timeline untuk pengujian sampel pihak ketiga Narkotika, Psikotropika dan Prekusor. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM

pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

BBPOM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sebagai berikut :

- Melakukan Penetapan Standar Pelayanan Publik melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan beberapa unsur (Masyarakat Pengguna Layanan, Ahli/ Praktisi/ Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, Instansi Terkait dan Media).
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pelatihan Pelayanan Publik.
- Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan.
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

Tabel 3.115 Matriks Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan Indikator dengan target tahunan. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan April telah dilakukan beberapa upaya, antara lain: 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan publik	1. Perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap sarana dan prasarana layanan publik termasuk perangkat pendukung penyampaian informasi, guna memastikan fasilitas pelayanan berfungsi optimal dan memberikan kenyamanan kepada	1. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana layanan publik, termasuk perbaikan Televisi pada ruang pelayanan. 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengampu dalam rangka Penetapan	Mei	Ya	O-33	Tidak terpenuhinya data dukung sesuai dengan tools penilaian

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	guna memastikan fasilitas pelayanan tetap berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat secara optimal 2. Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. **Kendala** : 1. Terdapat kerusakan pada perangkat TV di ruang pelayanan publik yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan penyampaian informasi kepada pengguna layanan. 2. Belum dilantiknya Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang, sehingga penetapan Standar Pelayanan Publik belum dapat dilakukan.	masyarakat. 2. Perlu dilakukan koordinasi dengan unit pengampu terkait dalam Penetapan Standar Pelayanan Publik sebagai bagian dari pemenuhan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). 3. Perlu dilakukan persiapan yang optimal dalam rangka pelaksanaan pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP), termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta kelengkapan dokumen pendukung.	Standar Pelayanan Publik 3. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana serta dokumen lainnya dalam rangka menghadapi pelaksanaan pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP)				
Mei	Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan Indikator dengan target tahunan. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan Mei telah dilakukan tahapan Penilaian Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), meliputi pengisian Formulir F-01 pada aplikasi EVORTALA, pelaksanaan wawancara dan verifikasi data dukung oleh tim evaluator pada tanggal 29 Mei 2026.	1. Perlu dilakukan tindak lanjut atas hasil verifikasi dan evaluasi PEKPPP Tahun 2026 melalui penyempurnaan data dukung dan pemenuhan dokumen yang masih diperlukan. 2. Perlu dilakukan penguatan pelaksanaan survei pelayanan publik sebagai bagian dari pemenuhan komponen penilaian PEKPPP	1. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan data dukung PEKPPP sesuai hasil wawancara dan verifikasi yang telah dilakukan oleh tim evaluator. 2. Melaksanakan pengisian Formulir F-03 melalui survei kepada 10 (sepuluh) pengguna layanan sebagai bagian dari proses penilaian PEKPPP Tahun 2026. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan komponen penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mendukung pencapaian target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2026.	Juni	Ya	O-33	Tidak terpenuhinya data dukung sesuai dengan tools penilaian
Juni	Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan Indikator dengan target tahunan. Sampai dengan bulan Juni 2026, seluruh tahapan Penilaian Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) telah selesai dilaksanakan, termasuk penyempurnaan data dukung pada aplikasi Evortala sesuai	1. Menunggu Hasil Penilaian Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 dari Biro Hukum dan Organisasi sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	1. Melakukan Koordinasi dan Monitoring terhadap penyampaian Hasil Penilaian PEKPPP dari Biro Hukum dan Organisasi 2. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik secara berkala untuk memastikan fasilitas pelayanan publik tetap dalam kondisi baik.	-	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	hasil verifikasi tim evaluator. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Balai Besar POM di Pangkal Pinang juga telah melaksanakan Pelatihan Pelayanan Publik pada bulan Juni 2026 untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selanjutnya, Balai Besar POM di Pangkal Pinang menunggu hasil penilaian PEKPPP Tahun 2026 dari Biro Hukum dan Organisasi.						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM di Pangkal Pinang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastian kepada pelanggan. Adapun terdapat beberapa Inovasi yaitu :

1. Silasmi-24 (Sistem Layanan Informasi dan Pengaduan Setiap Hari Melalui Online 24 Jam)
2. Telah terdapat tracking system untuk layanan pengujian pihak ketiga sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium melalui SIPT
3. Lada Bangka 48 (Layanan Handal Analisis Barang Bukti Narkotika 48 Jam)
4. UMKM Pacak untuk membantu mempermudah UMKM mendapatkan Izin Edar
5. Terasi Bangka (Literasi Asik Bareng Kami) membantu masyarakat dalam memperoleh materi/informasi terkait Obat dan Makanan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.116 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	2.200.000	510.000	23,18	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Merupakan target tahunan sehingga pada Triwulan II belum ada target output yang direncanakan sehingga belum ada hasil efisiensi atas penggunaan sumber daya. Sampai dengan Triwulan II, realisasi anggaran sebesar Rp510.000 atau 23,18% dari target Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp2.200.000. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan belum dilaksanakannya kegiatan sertifikasi, yang dijadwalkan pada periode berikutnya sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran antara lain:

- Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran apabila diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.
- Melakukan monitoring terhadap realisasi anggaran secara berkala agar penggunaan anggaran tetap sesuai rencana dan mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan I dan Laporan Kinerja Tahun 2025, Balai Besar POM di Pangkal Pinang terus melakukan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai upaya, antara lain:

- Melakukan reviu dan pemutakhiran Standar Pelayanan Publik serta memastikan seluruh informasi layanan dipublikasikan melalui berbagai media elektronik maupun non-elektronik.

- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan.
- Melakukan pemutakhiran data dukung Indeks Pelayanan Publik (IPP) sesuai indikator penilaian PEKPPP.
- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan, termasuk SP4N-LAPOR! dan kanal pengaduan internal.
- Memastikan sarana dan prasarana pelayanan publik tetap dalam kondisi baik, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan.
- Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan reward dan punishment bagi petugas pelayanan publik sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penggunaan anggaran pada Triwulan II difokuskan pada kegiatan sertifikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi akan direalisasikan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik serta didukung oleh pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, pemutakhiran informasi pelayanan, dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala. Tindak lanjut yang dilakukan adalah melengkapi seluruh eviden penilaian Indeks Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas pelayanan pada aspek yang masih memerlukan penyempurnaan, serta memastikan seluruh komponen penilaian telah sesuai dengan ketentuan PEKPPP.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pelaksanaan Penilaian PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) telah selesai dilaksanakan. Setelah penandatanganan Berita Acara Hasil PEKPPP, Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik pada Tahun 2027. Adapun hasil

nilai PEKPPP masih menunggu pengumuman resmi dari Biro Hukum dan Organisasi Badan POM.

SK 7 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian Sasaran Kegiatan **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal** diukur dengan 4 (empat) indikator berikut:

1. **Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM**

   Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 119 tahun 2026 tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) yang akan melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM menerangkan hal-hal berikut :

   1) Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
   2) Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
   3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit:

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Rincian bobot komponen penilaian hasil

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel: 22,5%
2. Pelayanan Publik yang Prima: 17,5%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.117 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		

Merupakan target tahunan berdasarkan hasil penilaian oleh inspektorat, sehingga belum dapat dihitung realisasi maupiun capaian pada TW II.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.118 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Merupakan indikator kinerja dengan target tahunan, sehingga targetm, realisasi dan capaian tidak dapat dibandingkan antara triwulan I dan triwulan II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.119 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,40	-	-	

Belum dapat dihitung realisasi maupun capaian dari indikator pembangunan ZI UPT BPOM, masih proses menunggu hasil review dari tim inspektorat

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian indikator kinerja ini. Namun, terus dilakukan upaya untuk mendukung pencapaian target.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Menyampaikan hasil reviu auditor Internal atas kelengkapan LKE dan data dukung PM-PZI pada media yang disediakan TPI tepat waktu.
- Melaksanakan rencana kerja pembangunan ZI sesuai dengan perencanaan dan mengunggah data dukung secara rutin setiap bulannya.
- Melaksanakan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat
- Meningkatkan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.
- Meningkatkan publikasi kinerja kepada masyarakat.
- Menerapkan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepuasaan masyarakat.
- Meningkatkan kebersamaan antar pegawai melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh personil sehingga dapat bekerjasama dengan lebih baik.
- Melaksanakan rencana kerja yang telah disusun secara konsisten untuk mendukung penerapan pembangunan ZI di lingkungan Balai Besar POM di Pangkal Pinang.

Tabel 3.120 Matriks Rekomendasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Belum ada kendala dalam pelaksanaan	- Melaksanakan rencana kerja secara konsisten sesuai dengan perencanaan - Melakukan evaluasi terkait saran dan masukan pada hasil survei BerAKHLAK internal - Untuk pelaksanaan inovasi CFD dapat dialihkan menjadi kegiatan daring	- Melakukan monitoring dan evaluasi RENJA dalam rapat monev RENJA TW 2 - Menindaklanjuti saran dan masukan pada survei BerAKHLAK internal sebagai upaya perbaikan	Juli	Y	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BBPOM Pangkal Pinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM
Mei	Belum ada kendala dalam pelaksanaan	Agar dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana kerja tim RB	1. Mengingatkan kepada Ketua tim RB dan AOC untuk dilakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja.dan POA. 2. Akan dilakukan rapat tim AOC pada jumat 12 Juni 2026	Juni	Y	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BBPOM Pangkal Pinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM
Juni	Berdasarkan nota dinas inspektrur utama perihal Penyampaian Hasil Penilaian Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2026,total nilai pembangunan ZI BBPOM di Pangkal Pinang sebesar 89,06 (di bawah target tahun 2026 yaitu 90,40)	1. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja 2. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian nilai LKE	1. Akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja di bulan juli 2026 2. Akan dilakukan evaluasi hal-hal yang masih belum optimal (jika surat telah evaluasi resmi telah terbit)	Juli Desember	Y	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BBPOM Pangkal Pinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan rencana kerja secara konsisten baik dari Tim AOC maupun Tim ZI BBPOM di Pangkal Pinang.Diperlukan komitmen dari semua pihak agar pelaksanaan rencana kerja tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Semua pelaksanaan didokumentasikan secara tertib agar lebih mudah dilakukan monitoring dan evaluasi.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.121 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	415.514.304	437.985.681	105,41	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Belum dapat disimpulkan karena nilai output merupakan target tahunan,sehingga sampai saat ini belum ada realisasi maupun capaian terhadap output.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu optimalisasi terhadap anggaran yang ada untuk kegiatan yang bersifat kebersamaan dan mendukung pencapaian program.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 dan/atau Laporan Kinerja tahun 2025 diperoleh informasi:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan hasil capaian pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian strategi terhadap pencapaian target yaitu pemilihan program AOC yang lebih spesifik dan berdampak baik internal maupun eksternal.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Anggaran yang telah tersedia juga dialokasikan secara bijaksana agar dapat menunjang program/kegiatan.Misalnya untuk perbaikan sarana/prasarana kantor dan peningkatan kompetensi petugas layanan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Pada tahun 2025 kinerja pembangunan ZI telah tercapai, tetapi ada beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan untuk optimalisasi kinerja di tahun 2026 hal ini tertuang pada laporan kinerja tahun 2025.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Pada periode selanjutnya perlu dilakukan review target,agar lebih achievable dan reliable.

2. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Bobot 5 (lima) komponen penilaian AKIP, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.122 Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		

Penilaian indikator nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan dilakukan oleh Inspektorat Utama pada akhir tahun 2026 sehingga tidak ada capaian pada triwulan II.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.123 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I dan II belum ada karena penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.124 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	80,10	-	-	

Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang merupakan indikator tahunan dengan target tahun 2026 sebesar 80,1. Penilaian AKIP akan dilakukan pada Triwulan IV sehingga belum bisa dilakukan perbandingan realisasi Triwulan II dengan target tahunannya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pada Triwulan. Namun berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun

2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan/penurunan kinerja diantaranya :

1. Rancangan Renstra belum memuat matriks pemetaan kebijakan dan strategi.
2. Hasil pengukuran data capaian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan data sumber dan/atau kertas kerja perhitungan realisasi/capaian kinerja seperti pada indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
3. Terdapat perubahan/kesalahan data pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan namun belum disertai dokumentasi kertas kerja sebelum dan setelah perubahan serta informasi data yang berubah dan justifikasinya.
4. Efisiensi penggunaan anggaran telah disajikan dalam Lapkin Interim dan Lapkin Tahunan, namun belum terdapat pembahasan efisiensi anggaran masing-masing indikator kinerja seperti belum menjelaskan upaya yang telah dilaksanakan jika disimpulkan hasilnya efisien dan kendala/hambatan maupun justifikasi jika disimpulkan hasilnya adalah adanya ketidakefisienan penggunaan sumber daya.
5. Hasil evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja. Evaluasi kinerja belum berdampak pada capaian kinerja, serta belum terdapat upaya perbaikan maupun penjelasan dalam proses monitoring kinerja seperti pada indikator yang targetnya belum tercapai, namun belum terdapat upaya nyata yang akan dilakukan (rencana aksi) untuk mencapai kinerja.
6. Pembahasan hasil evaluasi internal yang tertuang pada notulen rapat belum menginformasikan arahan/keputusan yang jelas dari pimpinan terutama terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110%.
7. Capaian output tahun 2024 dengan capaian tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 35%.
8. Indikator kinerja tahun 2024 yang tidak mencapai target sebanyak 11,76% dan Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 57,14%.

Oleh karena itu, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target. Upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 antara lain:

1. Penetapan tim SAKIP tahun 2025 (penunjukkan ketua tim kerja, tim monitoring dan evaluasi, tim laporan kinerja dan tim penyusun rencana strategis).
2. Menetapkan Rencana Strategi Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029.
3. Menyusun PoA kegiatan dan anggaran tahun 2026.
4. Menyampaikan surat usulan terkait komponen penilaian SAKIP ke Inspektorat Utama.
5. Menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disertai dengan kertas kerja penetapan target.
6. Menyusun MPH dan SKP Tahun 2026.
7. Mempublikasikan dokumen Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Laporan kinerja tahun 2025 di esr.menpan, subsite BBPOM Pangkal Pinang dan website BPOM.
8. Membuat Sertifikat dan Memo Teguran sebagai pemberian reward punishment atas capaian kinerja Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026
9. Publikasi capaian kinerja Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 melalui Instagram dan whatsapp group Balai.
10. Melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) Triwulan 4 tahun 2025, SKP tahunan 2025 dan SKP Triwulan I 2026.
11. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 secara tepat waktu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP.
12. Melaporkan data monev bulan Desember 2025 - Juni 2026 pada aplikasi Simetris E-Performance dan e-monev Bappenas.
13. Melaksanakan Rapat Evaluasi kinerja Desember 2025 - Juni 2026.
14. Menyusun dan menyampaikan Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025 dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2026 secara tepat waktu.

15. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2027 yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2026 dengan mengacu pada target Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja 2026.

Pada bulan April 2026 ditemukan adanya kesalahan rumus pada RHPK yang berakibat terjadinya perbedaan data capaian kinerja sampai dengan Maret 2026 dengan yang telah dirapatkan pada periode sebelumnya. Namun hal ini telah dilakukan penyesuaian baik pada data monitoring dan evaluasi pada aplikasi Simetris E-Performance maupun pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pelaksanaan penyelengaraan SAKIP perlu terus dilakukan secara berkesinambungan sesuai pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM. Beberapa upaya yang akan terus dilakukan untuk mencapai target nilai AKIP di akhir tahun 2026:

1. Secara konsisten melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025.
2. Melakukan pengumpulan data kinerja setiap bulannya dan melaporkan pada aplikasi dan link yang tersedia secara tepat waktu.
3. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan secara konsisten untuk mengevaluasi capaian kinerja dan anggaran setiap bulannya.
4. Menyusun laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan dengan mengacu pada pedoman SAKIP, serta melaporkan pada link yang tersedia secara tepat waktu.
5. Meningkatkan kompetensi pegawai pengelola AKIP secara berkala.
6. Memastikan akurasi data kinerja yang dilaporkan setiap bulannya.
7. Melakukan pengumpulan sumber data (raw data) kinerja satu pintu pada MADU PELAWAN.
8. Melakukan monitoring kertas kerja pencapaian kinerja lebih baik dari periode sebelumnya.

Tabel 3.125 Matriks Rekomendasi Nilai AKIP UPT BPOM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam upaya mencapai Nilai AKIP, pada bulan April telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan AKIP berupa : 1. Penyampaian laporan monev di e-performance 2. Penyusunan dan penyampaian laporan evalusi internal 3. Penyusunan dan penyampaian laporan interim triwulan 1 4. Pelaporan monev melalui e-bappenas 5. Menyusun data dukung RATL Evaluasi AKIP dan update data dukung di SAPAAPIP Pada bulan April ditemukan adanya kesalahan rumus pada RHPK yang berakibat terjadinya perbedaan data capaian kinerja sampai dengan Maret 2026 dengan yang telah dirapatkan pada periode sebelumnya. Namun hal ini telah dilakukan penyesuaian baik itu pada laporan monev maupun pada laporan evaluasi internal dan Laporan Interim triwulan 1. Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BBPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	- Agar masing-masing penanggungjawab, memastikan kembali rumus RHPK telah sesuai dengan DO indikator kinerjanya. - Agar lakukan monitoring RATL Evaluasi SAKIP dan lakukan tindaklanjut sesuai rencana yang telah disusun. - Lakukan penyesuaian yang dibutuhkan pada perencanaan Kinerja dengan adanya perubahan target output (RO) - Pastikan pengelolaan SAKIP sesuai dengan pedoman pengelolaan SAKIP terbaru	1. Kroscek kesesuaian rumus RHPK pada saat penginputan data kinerja april sebelum dilaporkan. 2. Melakukan tindak lanjut RATL Evaluasi AKIP 2025 berupa sharing pengelolaan AKIP dari UPT Lain 3. Melakukan identifikasi perubahan PK dan RAPK akibat perubahan target output 4. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman	Mei	Ya	SDM-14	Terdapat perubahan data kinerja pada RHPK dari data yang telah dilaporkan
Mei	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam upaya mencapai Nilai AKIP, pada bulan Mei telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan AKIP berupa : 1. Penyampaian laporan monev di e-performance 2. Pelaporan monev melalui e-bappenas 3. Menyusun data dukung RATL Evaluasi AKIP dan update data dukung di SAPAAPIP Rencana Sharing AKIP dengan BBPOM Mataram yang semula	- Agar lakukan koordinasi lebih lanjut terkait penjadwalan ulang kegiatan Sharing AKIP dengan BBPOM di Mataram - Pastikan pengelolaan SAKIP sesuai dengan pedoman pengelolaan SAKIP terbaru	1. Koordinasi dengan BBPOM Mataram untuk pelaksanaan Sharing AKIP di bulan Juni. 2. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman	Juni	Ya	SDM-06	Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dijadwalkan pada tanggal 22 Mei 2026, belum dapat dilaksanakan karena permintaan dari BBPOM Mataram. Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.						
Juni	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam upaya mencapai Nilai AKIP, pada bulan Juni telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan AKIP berupa : 1. Penyampaian laporan monev di e-performance 2. Pelaporan monev melalui e-bappenas 3. Sharing SAKIP dengan BBPOM di Mataram pada tanggal 11 Juni 2026 Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BBPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	Hasil evaluasi pelaksanaan pelaporan Monev BBPOM di Pangkal Pinang telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan, agar terus dipertahankan pada periode-periode berikutnya. Agar dipastikan rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai perencanaan yang dibuat	1. Melakukan penyusunan Laporan Monev paling lama tanggal 10 Juli 2026 2. Melakukan penyusunan Laporan Evaluasi Internal triwulan II paling lama 15 Juli 2026 3. Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan II paling lama tanggal 20 Juli 2026 4. Melakukan penyampaian TL rekomendasi Evaluasi AKIP tahun 2025 di SAPA APIP	Juli	Ya	SDM-06	Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Pemanfaatan website Madu Pelawan untuk pengumpulan dan monitoring data kinerja BBPOM di Pangkal Pinang (madupelawan.bpompp.info)
2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja menggunakan teknologi informasi melalui monev online (aplikasi simetris e-performance, e-monev bappenas dan sakti kemenkeu)
3. Program peningkatan pemahaman personil SAKIP dalam pengelolaan SAKIP di lingkungan BBPOM di Pangkal Pinang
4. Program Sharing Implementasi SAKIP dengan mengundang BBPOM di Mataram sebagai narasumber

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.126 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	59.946.042	58.983.192	98,39	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, target anggaran rencana penarikan dana (target anggaran) sampai dengan Triwulan II yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pada indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 59.946.042. Realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan pada indikator Nilai AKIP sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 58.983.192. Namun indikator Nilai AKIP merupakan indikator tahunan sehingga target dan realisasinya baru ada pada akhir tahun. Maka dari itu, belum bisa dilakukan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian nilai AKIP BBPOM di Pangkal Pinang selama setahun pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 yaitu sebesar Rp 156.999.000. Pada Bulan Mei 2026 dilakukan revisi anggaran sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini menjadi Rp 157.270.000. Anggaran ini akan digunakan untuk operasional pelaporan, perjalanan koordinasi/konsultasi pimpinan, peningkatan kompetensi petugas. Sedangkan beberapa kegiatan lainnya yang menunjang pencapaian nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang tidak menggunakan anggaran.

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan upaya sebagai berikut:

- Menyusun rencana tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun 2025.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator dan capaian output setiap bulannya.
- Melakukan pengawalan dalam implementasi AKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang untuk mencapai target nilai AKIP tahun 2025.
- Melakukan penyesuaian anggaran yang dipetakan (jika diperlukan) untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut diantaranya :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan penyesuaian format laporan evaluasi internal dan monitoring evaluasi bulanan dengan melakukan identifikasi poin-poin yang ada pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan menyesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025.
   - Menyusun kertas kerja penetapan target Renstra maupun Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan dengan manual iku yang terbaru.
   - Melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan realisasi tahun 2025.
   - Mengidentifikasi kesesuaian nomenklatur Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan antar dokumen perencanaan.
   - Melakukan penyesuaian pada laporan kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 dan pedoman SAKIP 2026.
   - Mengajukan usulan perubahan target output dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
   - Melakukan penyesuaian pada notulen dan laporan evaluasi internal sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025.
2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan mapping anggaran yang menunjang pencapaian target indikator kinerja nilai AKIP
   - Melaksanakan beberapa kegiatan secara daring karena pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja nilai AKIP terbatas
   - Melakukan penyesuaian mapping anggaran karena adanya revisi anggaran
3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Dari laporan kinerja Tahun 2025, diperoleh informasi bahwa target indikator Nilai SAKIP BBPOM di Pangkal Pinang tahun 2025 belum tercapai, hal ini

disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi pada tahun 2025 sehingga capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya serta pelaksanaan pengelolaan AKIP yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut sampai dengan triwulan II telah dilakukan :

- Pengusulan target AKIP periode renstra 2025-2029 yang dilengkapi dengan kertas kerja penetapan target.
- Menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025.

Dari laporan laporan kinerja tahun 2025 dan kinerja interim triwulan I Tahun 2026 juga diperoleh informasi terdapat beberapa rekomendasi dari Inspektorat untuk meningkatkan nilai AKIP BBPOM di Pangkal Pinang. Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut antara lain :

- Melakukan revisi SK Tim Monitoring dan Evaluasi Internal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang
- Membuat matriks kesesuaian Renstra BBPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM
- Mengadakan sharing Pengelolaan AKIP dengan BBPOM di Mataram
- Mengirim ke Biro SDM agar SKP Kepala Balai yang telah ditetapkan dapat diakomodir untuk ditandatangani oleh atasan pada aplikasi simakin
- Melakukan evaluasi pada rapat evaluasi internal terkait IKU yang tidak dapat mencapai target (capaian < 100%) atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% yang dituangkan pada notulen rapat evaluasi dan laporan evaluasi internal
- Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive dan melakukan sosialisasi media pengumpulan sumber data

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk triwulan berikutnya antara lain :

- Melakukan penyesuaian kertas kerja penetapan target kinerja sesuai dengan target dan manual iku terbaru.
- Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan mengikuti hasil revisi target output (RO) tahun 2026.

- Melakukan penyesuaian dokumen perjanjian kinerja tahun 2026 karena adanya pergantian Kepala Balai.

3. **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM**

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan dan Formula:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.127 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan nilai EKA dan nilai IKPA yang didapatkan pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga tidak ada target dan realisasi yang dapat dibandingkan pada triwulan II tahun 2026.

b. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan II

Tabel 3.128 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan nilai EKA dan nilai IKPA yang didapatkan pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga tidak ada target dan realisasi yang dapat dibandingkan antara triwulan I dan triwulan II tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.129 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	-	-		

Target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 sebesar 5,00. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada Triwulan II belum ada karena penilaian Kinerja Anggaran didapat pada Triwulan IV tahun 2026.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai kinerja anggaran baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja sampai dengan Triwulan II. Namun berdasarkan evaluasi atas realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan kinerja pada Tahun 2026, diantaranya:

1. Belanja kontraktual : Melakukan Kontrak Pra-DIPA dan percepatan pelaksanaan kontrak utamanya pada triwulan I.
2. Penyerapan anggaran : Melakukan perencanaan dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kemenkeu setiap triwulan.
3. Nilai efisiensi pada parameter EKA : melakukan pengawalan efisiensi penggunaan anggaran SBKK dan SBKU.
4. Melakukan revisi POK untuk menyesuaikan anggaran kegiatan yang di prioritaskan dilaksanakan triwulan II
5. Melakukan penyelesaian tagihan dibawah tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Pada Triwulan II tahun 2026 terdapat satu (1) komponen penilaian IKPA yang tidak mendapatkan nilai 100 yaitu pada komponen Penyerapan Anggaran dengan nilai 89,61 sehingga nilai total IKPA sampai dengan bulan Juni sebesar 97,92. Penyebab tidak tercapainya komponen penyerapan anggaran dikarenakan terdapat satu (1) jenis belanja yang tidak mencapai target penyerapan untuk Triwulan II yaitu pada Belanja Barang dan nilai Penyerapan Anggaran Triwulan I yang juga tidak mencapai 100 menjadi akumulasi pada penilaian Penyerapan Anggaran untuk

Triwulan II. Hal ini disebabkan kegiatan belum bisa direncanakan secara optimal karena adanya rencana penyesuaian target dari unit pengampu sehubungan dengan telah dilakukannya pemotongan anggaran DIPA 2026 pada bulan Desember 2025 lalu. Hal ini juga berpengaruh terhadap rencana pengadaan diantaranya pengadaan reagen yang masih menunggu jumlah target sampel final yang berpengaruh pada perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis reagennya.

Untuk mencapai Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026, sampai dengan Triwulan II terdapat beberapa hal yang telah dilakukan yaitu :

1. Penetapan Tim Pengelola Keuangan tahun 2026
2. Melakukan pengajuan UP tahun 2026 dan melaksanakan revolving UP tepat waktu
3. Menyusun PoA kegiatan dan anggaran
4. Melaksanakan revisi POK untuk penyesuaian kegiatan
5. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026
6. Melakukan penyusunan RPD/Revisi Halaman III DIPA
7. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa serta pencairan tagihan kontraktual dan non kontraktual sesuai ketentuan
8. Mengikutin Revisi Kewenangan DJA untuk penyesuaian target output dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada Desember 2025 untuk DIPA 2026

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya untuk pencapaian target kinerja kedepannya :

1. Melakukan revisi Hal III DIPA triwulan II dengan melakukan penyesuaian dengan realisasi sd triwulan I.
2. Mempertahankan pelaksanaan Revisi DIPA yang masuk ke jenis revisi perhitungan IKPA hanya sebanyak 2 kali setiap semester.
3. Pemenuhan target serapan anggaran yang telah ditetapkan kemenkeu setiap triwulannya.
4. Penyelesaian tagihan belanja tepat waktu.
5. Pertanggungjawaban uang persedian (UP) secara tepat waktu dan optimalisasi penggunaannya sesuai target minimal *revolving*.

6. Pencapaian target RPD (rencana penarikan dana) per jenis belanja dengan deviasi tidak lebih dari 5% setiap bulannya.
7. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

   Penyusunan target output bulanan dan pencapaian target output sesuai dengan target yang telah diinput pada aplikasi.

Tabel 3.130 Matriks Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
April	"Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan April telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan monitoring anggaran dan RPD April 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. melakukan penginputan target output 2026 dan realisasi output sd maret pada aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan April masih belum optimal, karena nilai Caput belum ada. Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan anggaran mendapat nilai 66,65. Penyerapan anggaran nilainya akan optimal pada bulan di akhir triwulan. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA"	"1. Pastikan agar target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai 2. Lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan sehingga dapat mendukung pencapaian target serapan anggaran triwulan 2 "	"1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab output. 2. Monitoring pencapaian RPD bulan Mei "	Mei	Ya	SDM-07, SDM-09, O-36	"-Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. -Lambatnya proses pencairan tagihan -Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan"
Mei	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Mei telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual	"1. Pastikan agar target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai 2. Lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan sehingga dapat mendukung pencapaian	"1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab output. 2. Monitoring pencapaian RPD bulan Juni "	Juni	Ya	SDM-07, SDM-09, O-36	"-Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap.

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan monitoring anggaran dan RPD Mei 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. melakukan penginputan target output 2026 dan realisasi output sd April pada aplikasi SAKTI 5. Revisi RPD triwulan II (hal III DIPA) Nilai IKPA sd bulan Mei masih belum optimal, karena nilai Caput belum ada (penginputan paling lama 10 Juni 2026). Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan anggaran mendapat nilai 74,97. Penyerapan anggaran nilainya akan optimal pada bulan di akhir triwulan. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA	target serapan anggaran triwulan 2 "					-Lambatnya proses pencairan tagihan -Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan"
Juni	Merupakan indikator dengan target tahunan. Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Juni telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan monitoring anggaran dan RPD Juni 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. melakukan penginputan realisasi output sd Mei pada aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan Juni sebesar 97,92. Komponen Capaian Output Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan anggaran	"1. Target serapan anggaran triwulan II tidak tercapai, agar direviu dan disusun kembali perencanaan kegiatan untuk mencapai target serapan triwulan III. 2. Lakukan penyesuaian target output dan pastikan target yang disusun dapat tercapai setiap bulannya"	"1. Menyusun RPD triwulan III dengan pendekatan target serapan anggaran triwulan III 2. Melakukan revisi target output triwulan II 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab output."	Juli	Ya	SDM-07, SDM-09, O-36	"-Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. -Lambatnya proses pencairan tagihan -Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan"

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	mendapat nilai 89,61. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Menyusun POA Fisik dan POA Anggaran secara tepat.
2. Menyusun kertas kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap komponen komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran pada nilai IKPA Balai secara rutin.
3. Menyusun kertas kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap KRO SBKU dan SBKK untuk mengoptimalkan nilai EKA (NK Perencanaan Anggaran).
4. Melakukan rapat evaluasi secara rutin untuk membahas pelaksanaan kinerja anggaran.
5. Reminder berkala setiap minggunya untuk mengingatkan masing-masing ketua tim kerja agar melakukan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan IKPA.
6. Penggunaan aplikasi ASIKKEKKU versi 2 dalam proses pencairan tagihan.
7. Penggunaan google sites Madu Pelawan sebagai monitoring dan pelaporan kinerja, anggaran, dan target output secara tepat waktu.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.131 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	2.649.821.222	2.663.344.023	100,51	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan sampai dengan Triwulan II untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar Rp 2.649.821.222 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 2.663.344.023 sehingga persentase capaian realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 100,51%. Namun pada Triwulan II ini belum ada target dan realisasi output karena indikator ini merupakan indikator yang nilainya diperoleh pada akhir tahun. Maka dari itu, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini belum bisa dihitung.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Anggaran yang dipetakan untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran pada RAPK tahun 2026 adalah sebesar Rp 5.454.781.000. Anggaran ini akan digunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai, Langganan Daya Dan Jasa, Administrasi Kegiatan, Honorarium Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi, Pengadaan Jasa Tenaga Outsourcing.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini adalah dengan melakukan pencairan anggaran yang tepat sesuai dengan rencana penarikan dana yang sudah di susun disetiap awal triwulan dan selalu menjaga nilai pada indikator-indikator yang mempengaruhi nilai IKPA dan EKA sehingga target Output Nilai Kinerja Anggaran dapat tercapai. Kemudian melakukan revisi kewenangan DJA untuk pergeseran belanja pegawai ke belanja lainnya yang lebih membutuhkan jika terdapat kelebihan kebutuhan belanja pegawai dikarenakan pada 2026 sebanyak 5 orang pegawai Balai Besar POM di Pangkal Pinang mutasi ke UPT BPOM lainnya sehingga terdapat kelebihan kebutuhan setelah dilakukan monev belanja pegawai.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam laporan kinerja periode sebelumnya, telah dilakukan pemanfaatan informasi tersebut berupa :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian aktivitas/kegiatan yang dilakukan pada triwulan II yaitu :

- Menyusun strategi ulang dalam pencapaian IKPA dengan memprioritaskan pencapaian komponen Halaman III DIPA sampai dengan bulan Juni,

dikarenakan komponen penyerapan anggaran sudah dipastikan tidak dapat mencapai angka maksimal 100,00.

- Monitoring penyerapan KRO SBKK.
- Melakukan revolving UP setiap 2 minggu, untuk menunjang pencapaian RPD yang telah ditetapkan, sehingga deviasi maksimal 5% masih dapat terpenuhi.
- Mempertahankan penggunaan inovasi ASIKKEKKU V.2 untuk menunjang percepatan pencairan tagihan sehingga menunjang pencapaian RPD dan serapan anggaran.
- Mengikuti Revisi Kewenangan DJA yang dibuka oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan revisi optimalisasi anggaran untuk memenuhi anggaran dan target output yang akan dicapai.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Mapping anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran berasal dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai, Langganan Daya Dan Jasa, Administrasi Kegiatan, Honorarium Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi, Pengadaan Jasa Tenaga Outsourcing.

Dalam upaya pencapaian target kinerja indikator NKA yang meliputi pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk seluruh indikator dan output (RO) pada Balai Besar POM di Pangkal Pinang, pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan beberapa penyesuaian penggunaan anggaran melalui revisi anggaran sebanyak 2 kali revisi kewenangn DJA, 2 kali revisi Kanwil dan 1 kali revisi POK yang bertujuan untuk :

- Penyesuaian kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga RPD masih dapat terpenuhi.
- Penambahan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target output dan RPD.
- Optimalisasi anggaran untuk pengadaan barang/peralatan yang dibutuhkan dalam pencapaian output.
- Penyesuian target output dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada bulan Desember 2025 untuk DIPA 2026.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas Evaluasi sebelumnya.

Pada triwulan II tahun 2026 telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya berupa:

- Melakukan revisi DIPA untuk indikator Revisi yang masuk perhitungan IKPA hanya 1-2 kali tiap semester, sesuai ketentuan penilaian IKPA untuk bisa mendapatkan nilai komponen revisi anggaran pada IKPA secara optimal
- Menyusun kertas kerja perhitungan efisiensi SBK tahun 2026
- Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026
- Monitoring RPD dan serapan anggaran setiap bulannya

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Adapun penyesuaian perencanaan yang akan dilakukan pada periode berikutnya, berupa:

- Melakukan Revisi Pemutakhiran Halaman III DIPA (penyesuaian Rencana Penarikan Dana triwulan III sd IV)
- Melakukan pelaporan rencana target output setiap awal triwulan dan realisasi output bulanan.
- Melaksanakan revisi DIPA/ DJA untuk mengalihan anggaran ke RO yang membutuhkan sebanyak 2 kali setiap semester ke KRO yang membutuhkan.
- Melaksanakan revisi anggaran (POK) untuk penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026.
- Melakukan revisi Belanja Pegawai ke output yang membutuhkan karena pada tahun 2026 sebanyak 5 orang pegawai Balai Besar POM di Pangkal Pinang mutasi ke UPT BPOM lainnya sehingga terdapat kelebihan kebutuhan setelah dilakukan monev belanja pegawai.
- Melakukan revisi DJA pada KRO SBKK yaitu pergeseran ke KRO lainnya yang membutuhkan agar nilai efisiensi SBK dan penyerapan anggaran bisa maksimal.

4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan

pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{Skor\ Total}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama
- Angka 16 merupakan jumlah karakteristik kunci penilaian

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.132 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		

Penilaian indikator Indeks Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai indeks akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga pada Triwulan II tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi yang dapat dilakukan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.133 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan I dan Triwulan II Indeks Manajemen Risiko

Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-

Indikator Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pada Triwulan I maupun Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi indikator kinerja yang dapat diukur.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026 Indeks Manajemen Risiko

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	-	-	

Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2026 sebesar 2,94. Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun diukur pada akhir tahun sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi Triwulan II dengan target tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks Manajemen Risiko baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja hingga triwulan II. Namun berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan kinerja diantaranya :

1. Belum terdapat kertas kerja/ justifikasi penentuan skor risiko untuk seluruh level risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak dalam risk register.

2. Telah dilakukan reviu risiko secara berkala sesuai dengan pedoman, namun belum dilakukan reviu oleh Auditor Internal (AI) sebelum dilakukan pelaporan manajemen risiko semester II tahun 2025 pada aplikasi SAPAAPIP.
3. Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, baik melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal.
4. Telah dilakukan tagging risiko melalui RHK pegawai pada aplikasi SIASN namun belum sepenuhnya diterapkan pada seluruh risiko, seperti risiko yang diperlukan tindakan mitigasi kode risiko O-47.
5. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:

   - Terdapat risk event yang merupakan negasi dari proses/kegiatan bisnis, misalnya pada kode risiko O-20, O-21, dan O-22.
   - Terdapat risk event yang belum spesifik dan masih menggunakan narasi umum seperti "tidak optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal misalnya pada kode risiko O-57, O-34, O-47, O-31 dan O-60.
   - Narasi pada akibat/potensi kerugian risiko sama dengan narasi pada risk event, misalnya pada kode risiko SDM-11.
   - Telah dilakukan pengujian aktivitas pengendalian (existing control) terhadap risiko dengan level risiko inheren diatas selera risiko (≥16), namun metode yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatur pada juklak manajemen risiko, misalnya pada kode risiko K3-03.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian indeks manajemen risiko tahun 2026 yaitu :

1. Melakukan Reviu Risiko Semester 2 tahun 2025
2. Menyusun Daftar Risiko Semester 1 dan 2 tahun 2026
3. Melaporkan pengelolaan risiko pada SAPAAPIP secara tepat waktu
4. Melakukan Reviu SK level Kemungkinan dan Dampak dan melakukan perbaikan yang diperlukan
5. Menyusun Kertas Kerja Penentuan Skor Risiko
6. Melakukan Reviu dan Perbaikan Risiko semester 1 tahun 2026
7. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP

8. Melakukan internalisasi terkait risiko di *Instagram* dan *WhatsApp* group Balai Besar (oleh tim kerja penguatan Pengawasan dan program dari tim AoC)

9. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait Manajemen Risiko dengan *Refreshment* dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil maturitas risiko tahun 2025 serta menyusun rencana tindak lanjutnya
2. Menyusun rencana aksi/ tindak lanjut evaluasi maturitas risiko tahun 2026
3. Melakukan sosialisasi Risiko semester 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai
4. Melakukan update dan penyesuaian daftar risiko di SAPAAPIP hingga Triwulan II
5. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko
6. Melakukan perbaikan identifikasi risiko pada program kerja baru AoC
7. Membuat surat permohonan *refreshment* atau penyegaran ulang dalam pengelolaan manajemen risiko kepada Inspektorat II
8. Melakukan penyesuaian daftar risiko Semester I tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan masukan dari Inspektorat II
9. Melakukan reviu atas RTP semester I tahun 2026
10. Menyusun daftar risiko semester II tahun 2026

Tabel 3.135 Matriks Rekomendasi Indeks Manajemen Risiko

Bulan	**Kendala/Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Rencana Tindak Lanjut**	**Timeline**	**Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)**	**Kode Risiko**	**Peristiwa Risiko**
Apr	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam rangka upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan April telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Melakukan perbaikan identifikasi risiko program kerja baru AoC 2. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP 3. Melakukan sosialisasi Risiko	Agar berkoordinasi dengan Inspektorat terkait peningkatan kompetensi mengenai Manajemen Risiko melalui pelaksanaan refreshment materi manrisk bagi seluruh pegawai	Membuat surat permohonan untuk refreshment penerapan manajemen risiko ke Inspektorat II	Mei	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai Kendala : Pelaksanaan peningkatan Kompetensi pegawai terkait Manrisk tahun 2026 belum dapat dilaksanakan karena pada aplikasi IDEAS belum tersedia materi terbaru yang dapat diikuti pegawai. Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026						
Mei	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam rangka upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan Mei telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai terkait Manajemen Risiko dengan mengundang Inspektorat sebagai Narasumber pada tanggal 26 Mei 2026. Dari hasil kegiatan Refreshment Manajemen Risiko tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan pada daftar risiko sem I tahun 2026 Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026	Agar dilakukan reviu kembali terhadap daftar risiko Semester I tahun 2026 yang telah disusun sesuai masukkan dari inspektorat.	1. Melakukan penyesuaian daftar risiko Sem I tahun 2026 yang telah disusun. 2. Melakukan penyesuaian Daftar risiko pada aplikasi SAPAAPIP	Juni	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman
Juni	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam rangka upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan Juni telah dilakukan tindak lanjut atas hasil reviu daftar risiko semester I tahun 2026 oleh inspektorat II pada pelaksanaan Bimtek Manrisk bulan Mei yang lalu	Hasil reviu oleh inspektorat II dalam Bimtek Manrisk agar dijadikan pedoman dalam penyusunan daftar risiko semester 2 tahun 2026, sehingga tidak terjadi kesalahan berulang.	Melakukan reviu atas RTP sem 1 tahun 2026 serta Menyusun daftar Semester 2 tahun 2026 dan menyampaikan pada aplikasi SAPAAPIP sebelum 20 Juli 2026	Juli	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dan melakukan penyesuaian pada aplikasi SAPAAPIP Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

1. Peningkatan kompetensi pegawai terkait Manajemen risiko melalui IDEAS.
2. Peningkatan pemahaman dan *awareness* pegawai terkait manajemen risiko dengan sosialisasi berkala melalui infografis dan informasi lainnya di media sosial dan *WhatsApp Group* Balai yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan dan Program AoC GERASAK (Gerakan Sadar Risiko).
3. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan pedoman.
4. Mengadakan *refreshment* atau penyegaran kembali tentang pengelolaan Manajemen Risiko dengan mengundang Inspektorat II Badan POM sebagai narasumber.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.136 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Manajemen Risiko

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%			
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	147.106.851	166.919.337	113,47	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan sampai dengan Triwulan II untuk indikator Indeks Manajemen Risiko sebesar Rp 147.106.851 dan

realisasi anggarannya sebesar Rp 166.919.337 sehingga persentase capaian realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 113,47%. Hingga Triwulan II ini belum ada target dan realisasi output karena indikator ini merupakan indikator yang nilainya diperoleh pada akhir tahun. Maka dari itu, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini belum bisa dihitung.

Anggaran yang dipetakan untuk indikator Indeks Manajemen Risiko pada RAPK tahun 2026 adalah sebesar Rp 315,112,000. Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta sewa rumah dinas. Hingga Triwulan II, penggunaan anggaran yang dapat di realisasikan sampai dengan Triwulan II difokuskan pada sewa rumah dinas dan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor beserta honor pejabat pengadaan. Pada Triwulan II terjadi 2 kali penyesuaian anggaran, penyesuaian anggaran pertama pada bulan April menjadi Rp Rp 313.222.000 dan penyesuaian terakhir pada bulan Mei sebesar Rp 312.707.000.

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pangkal Pinang akan melakukan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman dan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko dengan memanfaatkan IDEAS.
- Melakukan pengelolaan risiko sesuai pedoman dan dilaporkan secara tepat waktu setiap semester.
- Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi auditor internal maupun APIP atas implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan.
- Memanfaatkan anggaran yang telah dipetakan secara efisien dalam mencapai kinerja.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim hingga Triwulan I, pemanfaatan informasi kinerja tersebut diantaranya:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan Reviu Risiko Semester 2 tahun 2025
   - Menyusun Risiko Semester 1 tahun 2026

- Melaporkan pengelolaan risiko pada SAPAAPIP secara tepat waktu
- Melakukan Reviu SK level Kemungkinan dan Dampak dan melakukan perbaikan yang diperlukan
- Menyusun Kertas Kerja Penentuan Skor Risiko
- Melakukan Reviu dan Perbaikan Risiko semester 1 tahun 2026
- Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP
- Melakukan internalisasi terkait risiko di Instagram (oleh tim kerja penguatan Pengawasan dan program dari tim AoC)
- Membuat surat permohonan *refreshment* penerapan manajemen risiko ke Inspektorat II untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko ASN BBPOM di Pangkal Pinang
- Melakukan reviu atas RTP Semester 1 Tahun 2026
- Menyusun daftar risiko Semester 2 tahun 2026 dan menyampaikan pada aplikasi SAPAAPIP

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Hingga triwulan II, terdapat 2 kali penyesuaian anggaran untuk indikator kinerja indeks manajemen risiko dari awal pemetaan anggaran pada RAPK. Penyelenggaraan Manajemen risiko akan dilaksanakan seoptimal mungkin dengan dukungan anggaran yang tersedia.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Dari hasil evaluasi penilaian maturitas risiko tahun 2025 yang dilakukan inspektorat terdapat beberapa hal yang telah ditindaklanjuti sampai dengan triwulan II tahun 2026 diantaranya :

- Telah dilakukan eskalasi risiko ke deputi pembina dengan memberikan tanda centang pada laporan risiko di SAPAAPIP
- Auditor Internal telah melakukan reviu risk register semester 1 tahun 2026
- Menetapkan SK Level Kemungkinan dan Dampak Risiko sebagai panduan dalam penentuan penilaian risiko pada Balai Besar POM di Pangkal Pinang
- Menyusun rencana aksi/tindak lanjut evaluasi maturitas risiko tahun 2025
- Melakukan penyesuaian risiko di SAPAAPIP
- Melakukan internalisasi terkait manajemen risiko

- Melakukan penyesuaian daftar risiko Semester I tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan masukan dari Inspektorat II pada kegiatan *refreshment* dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Kedepannya hal-hal yang dapat dilakukan penyesuaian diantaranya :

- Melakukan perbaikan identifikasi risiko program kerja baru AoC
- Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP
- Melakukan sosialisasi Risiko semester 2 tahun 2026 kepada seluruh pegawai

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2026

Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja utama setiap bulannya. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh rekomendasi perbaikan atas capaian kinerja disertai dengan timeline penyelesaiannya. Berikut progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi Bulan Maret 2026 – Mei 2026 yang ditindaklanjuti pada Bulan April – Juni 2026.

Tabel 3.137 Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	Pada Bulan Maret telah dilakukan sampling terhadap semua komoditi sediaan farmasi dengan rincian sebagai berikut : 12 sampel Obat, 7 sampel OBA, 1 sampel SK dan 17 sampel Kosmetik. Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling awal (sebelum adanya revisi target rincian output) Kendala : Terdapat kendala dalam memenuhi target sampel kosmetik bulan maret (4 sampel) kategori Kosmetik Risiko Tinggi - Day Cream / Night Cream. Kategori ini cukup sulit ditemukan di lapangan dikarenakan adanya pergeseran tren pasar sediaan kosmetik dari Day Cream / Night Cream menjadi Moisturizer. Target bulan Maret	1. Lakukan pemetaan ketersediaan merk dagang untuk kategori sampel Day Cream / Night Cream di pasaran 2. Jika tidak dapat ditemukan d lapangan, agar dapat diusulkar ke unit pengampu teknis untuk perubahan jenis sediaan Day / Night Cream menjadi sediaan lain	Menginformasikan kepada PJ sampling kosmetik untuk mendata merk dagang yang mengeluarkan jenis kosmetik Day / Night Cream dengan memanfaatkan data pada https://app-registrasi.pom.go.id/	Belum Selesai	Masih dalam proses pemetaan ketersediaan kategori sampel Day Cream / Night Cream di pasaran. Belum dapat dilakukan pengusulan perubahan kategori sampel	Mei	Ya	O-01	1. Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		masih dapat dicapai, namun masih terdapat target Kosmetik kategori Day Cream / Night Cream hingga akhir tahun sebanyak 17 sampel								
		Realisasi : Pengujian Obat : 3 (sampel balai regional) OBA : 7 (5 sampel balai, 2 sampel loka) SK : 2 (1 sampel balai, 1 sampel loka) Kosmetik : 20 (17 sampel balai,3 sampel loka) Kendala : Masih terkendala untuk melakukan pengujian parameter cemaran logam Pb,Cd,As	Agar dilakukan koordinasi ke bagian sampling sehingga tidak dilakukan sampling terhadap sampel yg parameter uji cemaran logam Pb, Cd, As.	Melakukan koordinasi dengan petugas sampling untuk tidak melakukan sampling sampel dengan parameter cemaran logam Pb, Cd, dan As.	Selesai	-	-	Ya	O-50	Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline
	Mei	Realisasi : Pada Bulan April telah dilakukan sampling terhadap semua komoditi sediaan farmasi dengan rincian sebagai berikut : 11 sampel Obat, 14 sampel OBA, 3 sampel SK, 1 sampel Kuasi dan 22 sampel Kosmetik. Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling awal (sebelum adanya revisi target rincian output) Kendala : Masih sulit ditemukan sampel kategori Kosmetik Risiko Tinggi - Day Cream / Night Cream. Kategori ini cukup sulit ditemukan di lapangan dikarenakan adanya pergeseran tren pasar sediaan kosmetik dari Day Cream / Night Cream menjadi Moisturizer. Target bulan April masih dapat dicapai, namun masih terdapat target Kosmetik kategori Day Cream / Night Cream hingga akhir tahun	1. Lakukan pemetaan ketersediaan merk dagang untuk kategori sampel Day Cream / Night Cream di pasaran 2. Jika tidak dapat ditemukan di lapangan, agar dapat diusulkan ke unit pengampu teknis untuk perubahan jenis sediaan Day / Night Cream menjadi sediaan lain 3. Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait Nota Dinas Penyesuaian Target RO 2026, apakah dapat dilakukan pengurangan di kategori sampel Day Cream / Night Cream	1. Menginformasikan kepada PJ sampling kosmetik untuk mendata merk dagang yang mengeluarkan jenis kosmetik Day / Night Cream dengan memanfaatkan data pada https://app-registrasi.pom.go.id/ 2. Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait pelaksanaan sampling sediaan farmasi bulan Mei hingga Desember 2026 sesuai Nota Dinas dari Sekretaris Utama BPOM Nomor PR.04.02.2.04.26.321 mengenai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026	Selesai	-	-	Ya	O-01	Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling
		Realisasi : Pada bulan April telah dilakukan pengujian terhadap : 1. 16 sampel obat (sampel regionalisasi) 2. 3 sampel OBA (sampel Balai) 3. 6 sampel SK (4 sampel balai,2 sampel loka) 4. 10 sampel kosmetik (9 sampel balai, 1 sampel loka)	1. Agar dilakukan koordinasi ke bagian sampling sehingga tidak dilakukan sampling terhadap sampel yg parameter uji cemaran logam Pb, Cd, As. 2. Dilakukan koordinasi dengan region Pekanbaru terkait pemenuhan timeline pengujian	1. Melakukan koordinasi dengan petugas sampling untuk tidak melakukan sampling sampel dengan parameter cemaran logam Pb, Cd, dan As. 2. Melakukan koordinasi dengan Region Pekanbaru	Belum Selesai	Belum disampaikan kepada BBPOM di Pekanbaru terkait mekanisme pembahasan yang efektif	June 2026	Ya	O-50	Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Kendala : Saat ini masih dalam proses instalasi alat AAS yang baru sehingga pada bulan Mei belum bisa melakukan pengujian sampel dengan parameter logam Pb, Cd, dan As Upaya : Mengusulkan perbaikan UPS sebanyak 4 unit(dalam proses perbaikan), kalibrasi KCKT waters, perbaikan KCKT Shimadzu.		untuk melakukan pembahasan terkait pemenuhan timeline.						
	Juni	Realisasi : Pada Bulan Mei telah dilakukan sampling terhadap semua komoditi sediaan farmasi dengan rincian sebagai berikut : 19 sampel Obat, 13 sampel OBA, 9 sampel SK, 1 sampel Kuasi dan 29 sampel Kosmetik. Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling hasil revisi penyesuaian target RO Kendala : Terdapat tambahan sampel bulan mei diantaranya yaitu 1 sampel Obat (Dikarenakan dalam 1 kemasan terdapat 1 NIE dengan 2 nomor bets sehingga sampel terhitung 2 sampel), 3 sampel INWAS KOS dan 6 sampel INWAS SK. Terdapat kendala dalam mencari sampel INWAS KOS dan INWAS SK secara online di marketplace. Sulit melakukan pembelian sampel dengan nomor bets yang sama dan jumlah yang cukup banyak	1.Lakukan penyesuaian untuk pelaksanaan sampling bulan selanjutnya ; 2. Lakukan pendataan lebih banyak akun marketplace online sebagai cadangan apabila sampel sulit ditemukan.	Menginformasikan kepada PJ sampling kosmetik dan suplemen kesehatan untuk mendata lebih banyak lagi akun marketplace online sebagai cadangan tempat sampling apabila sampel sulit ditemukan pada perencanaan sampling online selanjutnya	Selesai	-	-	Ya	O-01	Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling
		Realisasi : Pada bulan Mei telah dilakukan pengujian terhadap sampel berikut: 1. 2 sampel obat (sampel regionalisasi) 2. 11 sampel OBA (sampel Balai), 2 sampel loka 3. 16 sampel kosmetik, (13 sampel balai, 3 sampel loka) 4. 1 sampel kuasi (balai) Kendala : 1. Adanya reagen yang masih proses pengadaan untuk melakukan uji endotoksin pada sediaan obat,sehingga	1. Agar melakukan perencanaan pelatihan penggunaan AAS yang baru agar analis lebih siap melakukan pengujian dengan alat yang baru pada bulan juni. 2. Agar melakukan monitoring pemenuhan timeline sesuai pedoman 3. Agar melakukan koordinasi dengan bagian pengadaan untuk memastikan reagen untuk	1. Berkoordinasi dengan PPK untuk menghubungi vendor penyedia guna pelaksanaan pelatihan penggunaan alat AAS yang baru 2. Melakukan monitoring pemenuhan timeline sesuai pedoman 3. Akan dilakukan koordinasi dengan bagian pengadaan untuk memastikan reagen untuk pengujian endotoksin telah dipesan.	Selesai	- Sudah dilakukan pembahasan secara daring dengan regional pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2026 - Sudah dilakukan pelatihan ulang terkait pemakaian alat AAS yang baru - Sudah dilakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan reagen endotoksin sudah dipesan dalam proses pengiriman	-	Ya	O-50	Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		rencana pengujian endotoksin diundur ke bulan september 2. Banyaknya hari libur di bulan mei menyebabkan tertundanya proses pengujian sehingga laporan mei terkesan sedikit.	pengujian endotoksin telah dipesan.							
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	April	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, belum terdapat sarana yang melaporkan KTD/ESO selama bulan maret Kendala : Sarana lupa mengenai teknis pelaporan menggunakan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan April 2. Memberikan link materi yang berisi materi dan buku saku petunjuk pelaporan KTD/ESO melalui e-meso	Melakukan follow up melalui whatsapp / saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan April	Selesai	-	-	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
	Mei	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 1 sarana yang melaporkan KTD/ESO selama bulan April Kendala : Sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan dan lupa mengenai teknis pelaporan menggunakan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Mei 2. Melakukan follow up sarana target dan memberikan link materi yang berisi materi dan buku saku petunjuk pelaporan KTD/ESO melalui e-meso	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM 2. Melakukan follow up saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Mei	Selesai	-	-	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
	Juni	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 3 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO hingga bulan Mei yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang dan PKM Air Itam. Realisasi hingga bulan Mei yaitu 6.66% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juni 2. Melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO	1. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM (Pada bulan juni telah diperoleh info rencana pelaporan dari PIC sarana RSUD Drs. H. Abu Hanifah dan RSUD Kriopanting) 2. Melakukan follow up saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juni	Selesai	-	-	Ya	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	Terdapat 1 sampel kasus pangan olahan bulan Maret 2026 berupa Mie Basah dari hasil pengawasan pemeriksaan Takjil di Kab. Bangka Tengah. Capaian sampel pangan olahan sampai dengan maret sebanyak 30 sampel Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Maret	-	-	Selesai	-	-	Ya	-	-
		Realisasi : - Sampai dengan bulan Maret jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 30 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 29 sampel - Terdapat 1 sampel yang tidak sesuai dengan renlak - Telah terbit Kepka BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian serta Kepka BPOM tentang Regionalisasi Laboratorium yang berlaku mulai bulan Maret 2026 untuk sampel pangan Kendala : Pada bulan Maret tidak terdapat kendala yang menggangu proses pengujian di laboratorium kimia pangan dan mikrobiologi Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,46% Upaya yang telah dilakukan : Telah dilakukan perbaikan ICP pada awal Maret sehingga seluruh sampel telah selesai dilakukan pengujian dan dilaporkan	1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan dan balai penguji di regional Pekanbaru terkait renlak yang telah disusun 2. Melakukan pengaturan waktu pengujian agar dapat menyelesaikan temuan KAN dengan segera 3. Melakukan penyesuaian terhadap Kepka BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian serta kepka BPOM tentang Regionalisasi Laboratorium	1. Meningkatkan komunikasi dengan penanggung jawab sampling agar renlak dapat terlaksana 2. Membuat skala prioritas untuk melakukan pengujian dan verifikasi metode dalam rangka menyelesaikan temuan KAN 3. Melakukan perubahan terkait perhitungan timeline pengujian mulaibulan Maret 2026	Selesai	-	-	Ya	O-05 O-53 O-06 O-54 O-55 O-70 SDM-17 K3-04	1. Kondisi sampel frozen dari loka yang diserahkan ke pihak Laboratorium dalam kondisi rusak/kurang baik 2. Terjadi ketidaksesuaian sampel balai (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 3. Terjadi ketidaksesuaian sampel loka (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 4. Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji 5. Pemenuhan parameter uji tidak lengkap 6. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 7. Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel 8. Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
										pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium
	Mei	Terdapat Nota Dinas dari Sekretaris Utama BPOM Nomor PR.04.02.2.04.26.321 mengenai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target sampel pangan olahan bulan Mei hingga Desember 2026. Total target tahunan awal yaitu 192 sampel, direvisi menjadi 169 sampel Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan April	Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait perhitungan persentase setiap Kategori dan Sub Kategori sampel pangan olahan sesuai Nota Dinas Penyesuaian Target RO 2026	Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait pelaksanaan sampling pangan olahan bulan Mei hingga Desember 2026 sesuai Nota Dinas dari Sekretaris Utama BPOM Nomor PR.04.02.2.04.26.321 mengenai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026	Selesai	-	-	Ya	-	-
		Realisasi : - Sampai dengan bulan April jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 40 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 40 sampel, masih menggunakan target sesuai dengan renlak awal Kendala : Pada bulan April tidak terdapat kendala yang menggangu proses pengujian di laboratorium kimia pangan dan mikrobiologi. Personel lab fokus pada pengerjaan verifikasi metode temuan KAN sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pengujian sampel. Personel memiliki kompetensi yang berbeda dalam melakukan verifikasi metode sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan :	Melakukan bimtek/pelatihan untuk pengembangan kompetensi analis. Melakukan koordinasi dengan pemeriksaan terkait perubahan target sampel pangan olahan.	Mengajukan usulan judul untuk pengembangan komptensi terkait verifikasi metode dan perhitungan ketidakpastian. Melakukan koordinasi untuk menyusun renlak baru sesuai target baru.	Selesai	-	-	Ya	O-54	Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Telah dilakukan perbaikan UPS untuk destilasi unit								
	Juni	Realisasi : Pada Bulan Mei telah dilakukan sampling 23 sampel pangan olahan (Target mei 22 sampel, Lebih 1 dari sampel kasus infokom). Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling hasil revisi penyesuaian target RO Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Mei	Berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya sampel tambahan yang melebihi target bulanan	PIC sampel akan selalu berkoordinasi dengan tim pengujian terhadap setiap adanya sampel tambahan yang melebihi target bulanan	Selesai	-	-	Ya	-	-
		Realisasi : - Sampai dengan bulan Mei jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 63 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 63 sampel, terdapat penyesuaian dan revisi terhadap renlak untuk menindaklanjuti perubahan target RO sampel pangan Kendala : Pada bulan Mei kendala yang dihadapi pada pengujian logam. Kendala yang dihadapi adalah analis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pengujian karena masih dalam tahap penyesuaian menggunakan alat baru. Perubahan LCP pengujian dan konsep pengambilan keputusan yang ditetapkan PPPOMN masih dalam proses penyesuaiann sehingga terdapat beberapa perhitungan yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama, salah satunya perhitungan untuk ketidakpastian pengujian. Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11%	Perlunya segera dilakukan bimtek untuk pengembangan kompentensi analis khususnya tentang verifikasi metode dan perhitungan ketidakpastian pengujian	Bimtek internal pengujian	Selesai	-	-	Ya	O-54	Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Upaya yang telah dilakukan : Diskusi dan sharing knowledge antar penguji di laboratorium pangan dan mikro terkait permasalahan dalam pengisian LCP								
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	April	Terdapat 1 kasus keracunan pangan yang terdiri dari 2 sampel burger yang berasal dari MBG di Kabupaten Bangka Kendala: Informasi yang diperoleh terkait kejadian keracunan pangan terbatas dikarenakan sampel disampaikan langsung oleh pihak eksternal	Meningkatkan koordinasi antar fungsi dalam penanganan keracunan pangan dengan mengusulkan pembentukan TGC dengan melibatkan seluruh fungsi yang terkait	Sarana SPPG yang menyediakan MBG akan dijadikan prioritas target pemeriksaan jika sarana kembali beroperasional	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Realisasi : Terdapat 1 kejadian keracunan pangan (tidak ada penetapan KLB) di SMK N 1 Sungaliat yang berasal dari menu MBG (SPPG Imam Bonjol) Jumlah sampel diterima lab : 2 sampel burger Parameter uji terkonfirmasi : AKK dan Salmonella Kendala : Tidak terdapat laporan/dokumen kronologi kejadian dan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Informasi dan sampel yang diterima terbatas sehingga laboratorium mengalami kendala dalam menentukan parameter uji, sedangkan permintaan parameter uji yang disampaikan Puskesmas tidak memiliki dasar epidemiologi yang jelas Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan wawancara dan penggalian informasi kronologi kejadian keracunan pangan kepada petugas Puskesmas yang mengantar sampel	1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 2. Melakukan pelaporan pada SPIMKER KLB KP 3. Usulan untuk pembentukan TGC KLB KP	1. Koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota 2. Input data keracunan pangan dalam aplikasi SPIMKER (admin SPIMKER dari infokom) 3. Pembentukan tim TGC KLB KP yang melibatkan fungsi terkait	Selesai	-	-	Ya	S-03 O-09 F-03 O-64 O-71	1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar 3. Analis menerima gratifikasi 4. Sampel KLB keracunan pangan tidak diuji sesuai dengan tools penilaian RHPK 5. Agen penyebab KLB tidak dapat dikonfirmasi

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Mei	Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan April	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Realisasi : Terdapat 1 kejadian keracunan pangan (tidak ada penetapan KLB) di SMK N 1 Sungailiat yang berasal dari menu MBG (SPPG Imam Bonjol) pada bulan Maret. Jumlah sampel diterima lab : 2 sampel burger Parameter uji terkonfirmasi : AKK dan Salmonella Pada bulan April tidak ada sampel KLB KP Kendala : Tidak terdapat laporan/dokumen kronologi kejadian dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga pelaporan pada SPIMKER perlu perbaikan Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dan pembentukan Tim Gerak Cepat UPT	Agar dilakukan koordinasi dan pemantauan dengan TGC UPT	Melaksanakan koordinasi dan pemantauan dengan TGC UPT	Selesai	-	-	Ya	S-03 O-09	1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar
	Juni	Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan Mei	2. Forum koordinasi dengan linsek terkait KLB	Penyusunan rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan	Selesai	-	-	Ya	-	-
		Realisasi : Pada bulan Mei tidak terdapat KLB keracunan pangan di wilayah pengawasan BBPOM di Pangkal Pinang. Laboratorium menerima sampel KLB KP karena MBG dari BPOM di Belitung berjumlah 8 sampel dan seluruhnya telah dilakukan pengujian sesuai dengan standar. Kendala : Laboratorium hanya menerima sampel tanpa penjelasan kronologi dari pengirim	1. Agar dilakukan koordinasi dengan pengirim sampel dan pengembangan kompetensi penanganan sampel KLB KP	Melakukan koordinasi dengan pengirim sampel Mengikuti bimtek penanganan sampel KLB KP	Selesai	-	-	Ya	S-03 O-09	1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sampel dan tidak ada kaji ulang permintaan pengujian yang sesuai dengan identifikasi epidemiologi. Laboratorium harus mengulang pengujian dengan berbagai parameter karena permintaan uji yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan penggunaan reagen dan media yang tidak efisien dan waktu pengujian yang lama. Kurangnya pemahaman mengenai penanganan sampel KLB KP. Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan fungsi pemeriksaan dan BPOM di Belitung agar alur penanganan sampel KLB KP sesuai dengan kaidah epidemiologi.								
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	Realisasi : Pada Bulan maret telah dilakukan sampling terhadap komoditi PIRT sebanyak 14 sampel (Target bulan Maret seharusnya 15 sampel). Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling awal (sebelum adanya revisi target rincian output) Kendala : Terdapat 1 sampel PIRT yang tidak dapat dilakukan sampling dikarenakan adanya kendala pengujian yaitu tidak memiliki peralatan LC MS MS untuk parameter uji prioritas identifikasi bahan kimia obat (sildenafil dan turunannya), sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2026	1. Mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Kategori Sampel PIRT ke Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan selaku unit pengampu 2. Segera melakukan sampling setelah adanya balasan perubahan kategori sampel PIRT dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Mengingatkan kembali kepada PJ sampling pangan olahan untuk melakukan sampling terhadap sisa 1 sampel PIRT jika telah diperoleh balasan perubahan kategori sampel PIRT dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Selesai	-	-	Ya	-	-
		Realisasi : Pada bulan Maret laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 14 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk	1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan 2. Melakukan evaluasi terhadap renlak yang telah ditetapkan karena masih terdapat 1 sampel yang tidak sesuai	1. Koordinasi terkait perubahan kategori pangan sampel PIRT 2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan renlak	Selesai	-	-	Ya	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dilakukan tindak lanjut. Kendala : Terdapat 1 target sampel untuk minuman serbuk botanical yang tidak dapat dilakukan pengujian identifikasi BKO dengan LC MS MS karena tidak tersedia peralatan LC MS MS Capaian terhadap target : Realisasi pada bulan Maret adalah 99,33% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 102,94% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan terkait kendala peralatan yang dimiliki agar dapat dilakukan perubahan kategori pangan sampel PIRT tersebut agar realisasi IKU tercapai								
	Mei	Realisasi : Telah dilakukan sampling 1 sampel PIRT Kategori pangan Hasil Olahan Biji Bijian, Kacang Kacangan Dan Umbi setelah Surat dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan No. T-PW.04.03.54.03.26.727 perihal Jawaban Usulan Perubahan Kategori PIRT diterima Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi PIRT bulan April	Agar selalu berkoordinasi dengan tim pengujian	Menginformasikan PJ sampling untuk selalu berkoordinasi dengan tim pengujian setiap akan dilakukan sampling	Selesai	-	-	Ya	-	-
		Realisasi : Pada bulan April laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian	Agar segera dilakukan pelaporan sampel PIRT ke pusat melalui SIPT	Melakukan pengecekan laporan pada SIPT dan memastikan sudah terkirim ke pusat untuk seluruh sampel sebelum 30 Juni 2026	Selesai	-	-	Ya	O-10	Sampel PIRT terlambat dilaporkan

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sampel PIRT Capaian terhadap target : Realisasi pada bulan April adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan terkait kendala peralatan yang dimiliki agar dapat dilakukan perubahan kategori pangan sampel PIRT tersebut agar realisasi IKU tercapai								
	Juni	Tidak terdapat target sampling PIRT pada bulan Mei. Seluruh sampel PIRT telah selesai di sampling terakhir pada bulan April	-	-	Selesai	-	-	Ya	-	-
		Realisasi : Sampai dengan bulan Mei laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 15 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pengujian sampel PIRT dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan target waktu dan standar Capaian terhadap target : Realisasi pada bulan Mei adalah 100% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 103,63% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel TMS	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pada sampel PIRT yang melebihi target revisi	Dilakukan penyesuaian renlak dengan target RO revisi	Selesai	-	-	Ya	O-10	Sampel PIRT terlambat dilaporkan
Persentase keputusan/rekomendasi	April	Realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	Menerbitkan surat permintaan CAPA kedua kepada sarana	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum	Selesai	-	-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bulan februari sebesar 44.03%. Target tidak tercapai dikarenakan pada realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti pada parameter pelaku usaha sebesar 88.06% namun pada parameter lintas sektor sebesar 0% . Hal ini terkendala akibat adanya 1 rekomendasi yang diberikan kepada GFK dan 2 rekomendasi yang diberikan kepada Puskesmas selaku lintas sektor, namun belum terdapat jawaban CAPA meskipun masih sesuai dengan timeline yang ditentukan.	GFK dan Puskesmas yang belum memberikan respon CAPA	menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap sarana yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA						
	Mei	Kendala : Dari 94 rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha hanya terdapat 82 jawaban Tindak Lanjut. Dari 12 rekomendasi yang belum dijawab, 4 diantaranya merupakan hasil pengawasan bulan maret (2 Melebihi timeline dan 2 sesuai timeline) dan sisanya merupakan hasil pengawasan bulan April Dari 15 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, baru terdapat 8 jawaban Tindak Lanjut. Dari 7 rekomendasi yang belum dijawab, seluruhnya merupakan rekomendasi yang diberikan pada tanggal 21 dan 23 April 2026 (masih sesuai timeline) Target tidak tercapai dikarenakan pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan jawaban merupakan target pemeriksaan bulan April yang baru di periksa pada tanggal 21-23 April 2026 sehingga pelaku usaha dan lintas sektor belum dapat memberikan tindak lanjut secara langsung dengan waktu yang terlalu singkat	1. Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan 2. Lakukan penyesuaian perencanaan agar pemeriksaan ke lintas sektor terakhir dilakukan pada bulan Oktober 2026	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap sarana yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	Selesai	-	-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Juni	Dari 110 rekomendasi yang diberikan kepada Pelaku usaha, telah terdapat 101 jawaban Tindak Lanjut. Dari 19 rekomendasi yang diberikan kepada Lintas sektor, telah terdapat 15 jawaban Tindak Lanjut. Target tercapai dengan realisasi 85.38%. Hal ini merupakan hasil dari follow up melalui whatsapp yang dilakukan setiap minggu ke-4 / akhir bulan. Kendala : Pelaku usaha / Lintas Sektor hanya akan mengirimkan Tindak Lanjut jika semua temuan telah diselesaikan	Lakukan follow up terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA 3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan	Selesai	-	-	Tidak	-	-
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi selama bulan maret	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan April	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Juni	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan Mei	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi selama bulan maret	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	Terdapat Nota Dinas dari Sekretaris Utama BPOM Nomor PR.04.02.2.04.26.321 mengenai Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pemeriksaan sarana produksi bulan Mei hingga Desember 2026. Kendala : Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan April	Lakukan penyesuaian target pemeriksaan sesuai Rekapitulas Penyesuaian Target RO 2026	Melakukan revisi rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi mulai bulan Mei hingga Desember 2026	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Juni	Tidak terdapat target pemeriksaan bulan Mei	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	April	Pada bulan maret dilakukan pemeriksaan ke 6 sarana distribusi sediaan farmasi dengan rincian 2 PKM	1. Melakukan pemeriksaan kembali status pengiriman SIPT agar tidak melebihi tanggal 5	1. Segera memberitahukan kepada kepala Balai untuk dapat melakukan pengiriman	Selesai	-	-	Ya	O-15	Data pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi yang diinput pada SIPT

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		dan 4 Apotek, serta 4 Sardist KOS. Realisasi sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan maret sebesar 100% (total 25 sarana) Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi bulan maret	bulan berikutnya 2. Memberitahukan kepada kepala Balai untuk dapat melakukan pengiriman SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim	SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim						tidak sesuai dengan jumlah sarana yang telah diawasi
	Mei	1. Terdapat personil pemeriksaan yang sakit sehingga terjadi kekurangan tim pemeriksa 2. Padatnya kegiatan bulan April (Bimtek IP CPPOB, Audit Kearsipan, Inspektur CDOB, Bimtek Vaksin, Bimtek Pengawasan OBA) yang menyebabkan terjadinya kekurangan tim pemeriksa	Berkoordinasi dengan Tim Kerja lain terkait usulan pegawai yang memungkinkan untuk diperbantukan dalam Tim Pemeriksaan	Meminta usulan pegawai ke Ketua tim kerja lain yang memungkinkan untuk diperbantukan dalam Tim Pemeriksaan	Selesai	-	-	Ya	-	-
	Juni	Jumlah hari kerja pada bulan Mei yang terbatas sehingga menyebabkan petugas melakukan pemeriksaan beruntun pada minggu ke-2 dan ke-3 bulan Mei. Hal ini menyebabkan pembuatan Surat TL baru dapat diselesaikan pada akhir bulan Mei dan Input SIPT baru bisa diselesaikan pada awal bulan Juni	Lakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana dengan mempertimbangkan jadwal sampling, sertifikasi dan pendampingan serta hari libur	Melakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi bulan Juni sebaik mungkin agar pembuatan tindak lanjut dan input SIPT dapat diselesaikan tepat waktu	Selesai	-	-	Ya	-	-
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	Pada bulan maret dilakukan pemeriksaan ke 16 Sardist Pangan. Realisasi sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan maret sebesar 98.33% (total 42 sarana) Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan bulan maret	Ketua tim agar segera menginfokan kepada kepala Balai untuk dapat melakukan pengiriman SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim	Akan dilakukan konfirmasi kembali via Whatsapp kepada kepala balai setiap selesai melakukan verifikasi laporan SIPT	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	1. Terdapat personil pemeriksaan yang sakit sehingga terjadi kekurangan tim pemeriksa 2. Padatnya kegiatan bulan April (Bimtek IP CPPOB, Audit Kearsipan, Inspektur CDOB, Bimtek Vaksin, Bimtek Pengawasan OBA) yang menyebabkan terjadinya kekurangan tim pemeriksa	Berkoordinasi dengan Tim Kerja lain terkait usulan pegawai yang memungkinkan untuk diperbantukan dalam Tim Pemeriksaan	Meminta usulan pegawai ke Ketua tim kerja lain yang memungkinkan untuk diperbantukan dalam Tim Pemeriksaan	Selesai	-	-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Juni	Jumlah hari kerja pada bulan Mei yang terbatas sehingga menyebabkan petugas melakukan pemeriksaan beruntun pada minggu ke-2 dan ke-3 bulan Mei. Hal ini menyebabkan pembuatan Surat TL baru dapat diselesaikan pada akhir bulan Mei dan Iput SIPT baru bisa diselesaikan pada awal bulan Juni	Lakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana dengan mempertimbangkan jadwal sampling, sertifikasi dan pendampingan serta hari libur	Melakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan bulan Juni sebaik mungkin agar pembuatan tindak lanjut dan input SIPT dapat diselesaikan tepat waktu	Selesai	-	-	Ya	-	-
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	April	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Maret telah dilaksanakan dengan realisasi 93,34 % Kendala dalam pemenuhan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan - Terdapat pelaporan iklan OBA dan SK yang dilaporkan tidak tepat waktu - Terdapat keterbatasan media luar ruang yang diawasi untuk iklan kosmetik	- Melakukan verifikasi data iklan yang telah dientry agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisi ke Kepala Balai	- Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan iklan di setiap bulan - Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah meneruskan data Iklan di setiap bulannya	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan April telah dilaksanakan dengan realisasi 94,70 % Kendala: Untuk pengawasan iklan kosmetik terkendala pengawasan media cetak yang terbatas, untuk capaian iklan OBA dan SK dipengaruhi oleh capaian akumulasi bulan sebelumnya.	- Melakukan verifikasi data iklan yang telah dientry agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisi ke Kepala Balai	Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah meneruskan data Iklan di setiap bulannya	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Juni	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Mei telah dilaksanakan dengan realisasi 95,63% Tidak terdapat kendala dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di bulan Mei	- Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisi ke Kepala Balai	Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah meneruskan data Iklan di setiap bulannya	Selesai	-	-	Tidak	-	-
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	April	- Pengawasan label tembakau pada bulan Maret telah dilaksanakan sesuai dengan target bulanan dengan realisasi 100% - Capaian terhadap target IKU melebihi 110 % dikarenakan terdapat pemenuhan terhadap target output sehingga terdapat berpengaruh terhadap capaian target indikator	- Melakukan verifikasi data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Dilakukan penyesuaian jumlah produk tembakau yang diawasi di setiap bulan agar capaian tidak melebihi 110 %	- Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan di setiap bulan - Melakukan konfirmasi segera kepada Kepala balai setelah meneruskan SIPT di setiap bulannya - Dilakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label	Selesai	-	-	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %						
	Mei	- Penentuan target kinerja mengacu pada capaian realisasi tahun 2025 sebesar 84,03% sebagai baseline perencanaan. - Dalam pelaksanaannya hingga bulan April realisasi kinerja mencapai lebih dari 110% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dikarenakan adanya pemenuhan terhadap target output yang berpengaruh terhadap target indikator	- Meneruskan data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Perlu dilakukan penyesuaian jumlah produk tembakau yang diawasi di setiap bulan agar capaian tidak melebihi 110 %	- Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan di setiap bulan - Dilakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %	Selesai	-	-	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
	Juni	- Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar 92,5 % - Telah dilakukan penyesuaian label rokok yang dilaporkan semula 12 menjadi 6 label sehingga menurunkan realisasi indikator dengan capaian 110,07 %	- Meneruskan data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Untuk label tembakau yang belum dilaporkan pada bulan Mei akan tetap dilaporkan pada bulan Juni - Perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %	- Melakukan monitoring data produk tembakau yang telah dientry di SIPT dan perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan - Melaporkan label tembakau bulan Mei pada bulan Juni - Melakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %	Selesai	-	-	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	April	Merupakan target tahunan. 1. Hingga bulan Maret telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 10 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka selama tahun 2025 pada tanggal 13 Maret 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Gubernur tentang Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026	Selesai	-	-	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter								
	Mei	Merupakan target tahunan. 1. Hingga bulan April telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 14 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada bulan April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka selama tahun 2025 (TW I) pada tanggal 13 Maret 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Terdapat 2 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan Surat Edaran Pelarangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 5. Bimtek AMR akan dijadwalkan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah dan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Tengah terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung, ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah dan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya 3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Selesai	-	-	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Juni	Merupakan target tahunan. 1. Hingga bulan Mei telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 16 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada bulan April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka selama tahun 2025 (TW I) pada tanggal 13 Maret 2026 di Sosial Media Balai Besar POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Mei, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR akan dijadwalkan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah (Konfirmasi terakhir pada 4 Juni, bahwa pelaksanaan Bimtek akan dilaksanakan pada 18 Juni 2026) dan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up (mengirimkan surat resmi) ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026 2. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah terkait rencana pelaksanaan Bimtek pada 18 Juni 2026 3. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya 4. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Selesai	-	-	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	April	1. Terjadi perubahan standar peralatan kimia dan biologi. - Kimia : conductivity meter dikeluarkan dari standar. - Biologi : conductivity meter dikeluarkan dari standar, inkubator CO2 tidak dihitung sebagai standar karena sudah memiliki 15 unit anaerobic jar. 2. Inkubator yang seharusnya sudah rusak berat dan dimusnahkan tahun 2022 masih tercatat existing s/d Desember 2025. Sudah dilakukan penyesuaian data di DIKOLABORASI.	Lakukan perubahan target sesuai perencanaan yang telah disusun.	Melakukan perubahan target IKU "Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" tahun 2026 dari 77 menjadi 78,6.	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	- Telah dilakukan perhitungan perencanaan pemenuhan SKL TW 2, yaitu 78,6. - SRL : 2 MA peningkatan SRL di Lab Kosmetik (termasuk juga bagian dari komponen SKL Verif MA) belum terlaksana karena laboratorium masih menyelesaikan pelaporan sampel dengan ketentuan terbaru dari PPPOMN. Peningkatan SRL direncanakan kembali di bulan Mei-Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2. - Peningkatan kompetensi : Telah dilakukan peningkatan kompetensi di Lab Obat tapi tidak mengubah capaian; telah dilakukan peningkatan kompetensi di Lab OTSKOK tapi belum dilaporkan dan tidak mengubah capaian. - Peralatan : Pengadaan instrumen AAS sudah datang di bulan April, dilakukan instalasi April-Mei dan pembayaran direncanakan di bulan Juni. - Verif MA : 3 MA yang direncanakan diverifikasi di Lab Kosmetik belum terlaksana karena laboratorium masih menyelesaikan pelaporan sampel dengan ketentuan terbaru dari PPPOMN. Verif MA direncanakan kembali di bulan Mei-Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2. - Verifikasi peralatan : Secara	Memastikan pelaksanaan pemenuhan SKL dilaksanakan sesuai rencana.	Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di bulan Mei.	Selesai	-	-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		keseluruhan, laboratorium belum melaporkan verifikasi peralatan secara tepat waktu dan masih ada verifikasi peralatan yang belum dilaksanakan secara tepat waktu.								
	Juni	- SRL : Belum ada peningkatan SRL. Peningkatan 2 SRL Kosmetik direncanakan di bulan Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2. - Peningkatan kompetensi : Peningkatan kompetensi di Lab OTOKSK di bulan April sudah dilaporkan di bulan Mei dan tidak mengubah capaian. - Peralatan : Sudah dilakukan pelatihan AAS dari akhir Mei dan direncanakan hingga awal Juni 2026. - Verif MA : Lab Obat dan Lab Kosmetik masing-masing memverifikasi 1 MA dan telah dilaporkan. Verif 2 MA lainnya di Lab Kos direncanakan di bulan Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2. - Realisasi SKL s/d Mei : 78,4. - Verifikasi peralatan : Lab Obat, Kos, Pangan dan Mikro telah melaporkan seluruh verifikasi peralatan di bulan Mei. Sementara Lab OT baru melaporkan 4 dari 5 verifikasi peralatan; dan satu verifikasi mikropipet bulan April belum dilaporkan (ada kesalahan item yang diverifikasi di bulan April). - Pengisian kertas kerja monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL bulan Mei masih belum optimal, terutama di Lab Kos dan OTOKSK.	1. Pengisian kertas kerja monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL agar lebih dioptimalkan dan seluruh laporan dilaporkan tepat waktu. 2. Lakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2 secara tepat waktu.	1. Follow up pelaporan verifikasi peralatan di bulan Mei. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2.	Selesai	-	-	Tidak	-	-
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	April	Belum terdapat kendala merupakan Target Tahunan proses pendampingan akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Melakukan Koordinasi awal dengan Pemerintah Daerah terkait Program KKPA	Melaksanakan Rapat Advokasi ke Pemeriintah Daerah terkait Prgoram KKPA melalui Zoom Meeting	Selesai	-	-	Ya	S-06, S-07	1. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA 2. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
										penilaian dan Data Dukung KKPA
	Mei	Telah dilaksanakan Rapat Advokasi Program Kabupaten Kota Pangan Aman pada tanggal 30 April 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah se-wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang, meliputi Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Bangka Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, serta instansi terkait lainnya. Kendala : Pemerintah Kabupaten/ Kota belum menginput nama Person in Charge (PIC) sebagai penanggung jawab untuk memperoleh akses pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman	Perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui penyampaian surat permintaan penetapan Person in Charge (PIC) pada masing-masing instansi terkait guna mendukung akses pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/ Kota Pangan Aman.	1. Menyusun dan menyampaikan surat permintaan penetapan Person in Charge (PIC) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 2. Melaksanakan Pendampingan dalam pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/ Kota Pangan Aman guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dukung yang diinput oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	Selesai	-		-	Ya	S-07	Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKP
	Juni	Telah disampaikan Surat Permintaan Penetapan Person In Charge (PIC) kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten/Kota wilayah kerja BBPOM di Pangkal Pinang guna mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Sampai dengan akhir bulan Mei 2026, Kabupaten Bangka Barat telah mulai melakukan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kendala : Sampai dengan akhir bulan Mei 2026, sebagian besar Kabupaten/Kota masih dalam tahap koordinasi internal dan pengumpulan	Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai target yang telah ditetapkan.	1. Melaksanakan pendampingan teknis kepada PIC Kabupaten/Kota dalam proses pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pengisian tools dan kelengkapan data dukung pada masing-masing Kabupaten/Kota.	Selesai	-		-	Ya	S-07	Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKP

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		data dukung sehingga progres pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman belum berjalan optimal.								
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	April	Belum ditetapkannya jumlah target KIE menjadi kendala utama dalam perencanaan, karena menyebabkan belum dapat dipastikan kebutuhan sumber daya dalam menyapai target	Melaksanakan KIE Obat dan Makanan sesuai dengan targte perencanaan yang sudah ditetapkan	Melaksanakan KIE Obat dan Makanan sesuai dengan targte perencanaan yang sudah ditetapkan	Selesai	-	-	Ya	-	-
	Mei	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 60 orang siswa SMA Negeri 3 Toboali Kabupaten Bangka Selatan serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Selesai	-	-	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.
	Juni	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 50 orang masyarakat di Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.	Selesai	-	-	Ya	O-23	Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE.
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	April	Saat ini telah dilakukan penyesuaian target akan tetapi belum terdapat penetapan secara resmi dari unit pengampu, Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan sekolah yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan.	1. Mengkoordinasikan penetapkan jumlah target sekolah sasaran secara lebih awal dengan berkoordinasi dengan unit pengampu dan Roren 2. Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target awal yaitu 7 Sekolah	Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target 7 Sekolah	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	Telah dilaksanakan Rapat Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 April 2026 sebagai tahapan awal pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah.	Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Advokasi Lintas Sektor sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan pelaporan melalui aplikasi Sapa Sekolah (sapasekolah.pom.go.id)	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Juni	Belum terdapat pelaksanaan kegiatan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Perlu dilakukan koordinasi dan persiapan teknis pelaksanaan Program Sekolah yang	1. Menyiapkan materi serta kebutuhan administrasi dan sarana pendukung	Selesai	-	-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		karena tahapan selanjutnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2026. Meskipun demikian, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program, telah dilakukan penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi dasar koordinasi dan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan pembudayaan keamanan pangan di sekolah. Adapun progres pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Mei 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Mei 2026 capaian progres Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai 25% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan	Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan guna memastikan kegiatan Sosialisas Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan Juli 2026.	pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan Pendampingan Sekolah yang telah diintervensi Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah pada bulan Juli 2026.						
Jumlah desa pangan aman	April	Saat ini telah dilakukan penyesuaian target akan tetapi belum terdapat penetapan secara resmi dari unit pengampu, Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan desa yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan.	1. Mengkoordinasikan penetapkan jumlah target desa sasaran secara lebih awal kepada unit pengampu dan Biro perencanaan 2. Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target awal yaitu 3 Desa	Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target 3 Desa	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	Telah dilaksanakan Rapat Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 April 2026 sebagai tahapan awal pelaksanaan program Desa Pangan Aman.	Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Advokasi Lintas Sektor sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan Program Desa Pangan Aman	Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah aplikasi GKPD Online (gkpdonline.pom.go.id).	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Juni	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pada desa yang telah	Perlu dilakukan koordinasi dan persiapan teknis pelaksanaan	1. Menyiapkan materi serta kebutuhan lainnya terkait	Selesai	-	-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		diintervensi Program Desa Pangan Aman sebagai upaya pembinaan dan pemantauan keberlanjutan program. Selain itu, telah dilakukan penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi dasar koordinasi dan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Program Desa Pangan Aman Tahun 2026 Adapun progres pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sampai dengan bulan Mei 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Mei 2026 capaian progres Program Desa Pangan Aman telah mencapai 25% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan.	Program Desa Pangan Aman guna memastikan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan Juli 2026.	pelaksanaan kegiatan. 2. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa pada bulan Juli 2026.						
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	April	Saat ini telah dilakukan penyesuaian target akan tetapi belum terdapat penetapan secara resmi dari unit pengampu, Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan pasar yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan.	1. Melakukan koordinasi dengan unit pengampu dan Biro Perencanaan (Roren) untuk percepatan penetapan target sekolah dan desa, sehingga pelaksanaan intervensi di pasar dapat segera dilaksanakan. 2. Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target 1 pasar	Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target 1 Pasar	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	Telah dilaksanakan Rapat Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 April 2026 sebagai tahapan awal pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	1. Perlu dilakukan penyusunan laporan hasil Advokasi Lintas Sektor sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. 2. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan dinas terkait tentang Pembentukan Tim Keamanan Pangan pada	1. Melakukan Penyusunan Laporan Hasil Advokasi Lintas Sektor di Kabupaten Bangka Tengah serta pelaporan melalui aplikasi SIPAMAN (sipaman.pom.go.id). 2. Menyusun dan menyampaikan Surat Pembentukan Tim Keamanan Pangan kepada Dinas terkait	Selesai	-	-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. 3. Melaksanakan kegiatan selanjutnya	yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka Pembentukan Tim Keamanan Pangan pada Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. 3. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I						
	Juni	Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I di Pasar Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 12–13 Mei 2026. Berdasarkan hasil Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I, ditemukan 2 (dua) sampel terasi yang mengandung Rhodamin B, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa pembinaan dan pengawasan lanjutan untuk mencegah peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya. Adapun progres pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan bulan Mei 2026 adalah sebagai berikut: 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. 2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 dengan bobot capaian sebesar 25%. Dengan demikian, sampai dengan bulan Mei 2026 capaian progres Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1. Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I sebagai dasar pembinaan dan perbaikan penerapan keamanan pangan di Pasar Simpang Katis. 2. Perlu dilakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas terkait guna mendukung pelaksanaan tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas selanjutnya.	1. Menyusun Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan Tahap I 2. Melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Pasar	Selesai	-	-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan kegiatan yang direncanakan.								
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	April	Telah dilakukan penetapan target pendampingan sebanyak 7 sarana yang terdiri dari 1 sarana Obat Tradisional dan 6 sarana Pangan Olahan Kendala: Masih terdapat kekurangan 2 target sarana Pangan Olahan dikarenakan adanya sarana yang direkomendasikan belum memenuhi ketentuan untuk dilakukan pendampingan	Koordinasi dengan wadah pemberdayaan UMKM BUMN dan lintas sektor terkait guna memperoleh rekomendasi UMKM yang berpotensi untuk ditingkatkan dan dilakukan pendampingan	- Penambahan target UMKM pangan olahan sebanyak 2 sarana - Konfirmasi sarana hasil rekomendasi lintas sektor - Melanjutkan tahapan verifikasi sarana UMKM yang akan didampingi	Selesai	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya penambahan target UMKM pangan olahan yang potensial dan dikutkan sebagai peserta Bimtek IP CPPOB secara Daring yang dilaksanakan pada bulan April 2026	Mei	Tidak	-	-
	Mei	UMKM Pangan Olahan: Telah dilakukan Bimtek IP CPPOB kepada UMKM pangan olahan dengan jumlah peserta sebanyak 6 sarana. Berdasarkan Nota dinas Sestama No PR.04.02.2.04.26.321 tanggal 29 April 2026 tentang penyampaian rekapitulasi penyesuaian target RO maka akan dilakukan penyesuaian target pendampingan pangan olahan yang sebelumnya 8 menjadi 4 sarana. Kendala UMKM OBA Belum adanya penanggung jawab teknis pada UMKM OBA menyebabkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang direncanakan pada bulan April tidak dapat dilaksanakan. Realisasi melebihi 110 % dikarenakan perhitungan target masih berdasarkan perhitungan target RO yang lama sehingga diperlukan revisi target RAPK dengan target yang telah disesuaikan	UMKM Pangan Olahan: Penyesuaian target pendampingan pangan olahan UMKM OBA: Perlu dilakukan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM OBA yang sebelumnya dijadwalkan di bulan April. Penyesuaian ulang RAPK bulanan dengan target RO yang telah dikurangi	- Revisi SK target pendampingan pangan olahan - Melaksanakan Bimtek bagi pelaku UMKM OBA - Melakukan exercise perhitungan ulang target RAPK	Belum Selesai	- Bimtek bagi pelaku usaha UMK OBA belum dapat dilaksanakan dikarenakan karena masih terkendala penanggungjawab teknis sarana - Revisi target RAPK belum dilaksanakan	Juni	Tidak	-	-
	Juni	UMKM Pangan Olahan: - Telah diterbitkan IP CPPOB kepada 1 UMK pangan olahan di bulan Mei. - Telah dilakukan revisi SK target Pendampingan UMK Pangan Olahan UMK Obat Bahan Alam: -Telah dilakukan pendampingan awal untuk UMK OBA untuk persiapan sarana Target tidak tercapai karena pada UMKM-OBA yang sudah dijadikan target	- UMK Pangan Olahan : Melanjutkan tahapan pendampingan ke pelaku usaha UMK OBA: Perlu dilakukan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM OBA yang sebelumnya dijadwalkan di bulan April - Penyesuaian ulang RAPK	- UMK Pangan : Melanjutkan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan UMKM OBA: Melaksanakan Bimtek bagi pelaku UMK OBA -Melakukan exercise perhitungan ulang target RAPK	Belum Selesai	- Belum ada penanggungjawab teknis untuk sarana UMK OBA sehingga BImtek belum dapa dilaksanakan - Revisi target RAPK belum dilaksanakan	Juli	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dikarenakan belum adanya penanggung jawab teknis pada UMKM OBA menyebabkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang direncanakan belum dapat dilaksanakan. Realisasi melebihi 110 % dikarenakan perhitungan target masih berdasarkan perhitungan target RO yang lama sehingga diperlukan revisi target RAPK dengan target yang telah disesuaikan	bulanan dengan target RO yang telah dikurangi							
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	April	1. Pada bulan Maret Pemantauan jalannya persidangan Tersangka a.n H yaitu pada tanggal 12 Maret dibacakan putusan perkara dengan Vonis denda sebesar Rp. 2.000.000 2. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 3 Maret 2026 Kendala : Sebagai efek anggaran AEA sangat terbatas yaitu sebesar Rp. 5.230.000 yang seharusnya di dalamnya ada anggaran Kegiatan Terpadu sehingga Kegiatan Terpadu diakomodasikan ke anggaran QCD yaitu Forkom PPNS dan Diklat Pembentukan PPNS"	dalam penggunaan anggaran supaya efektif dan efisien maka dilakukan pendalaman informasi terhadap target-target potensial untuk dijadikan target perkara	melakukan kegiatan intelijen terhadap target-target potensial	Selesai	-	-	Ya	K3-02 O-30 O-57	Keselamatan Petugas terancam saat melakukan Kegiatan dan Operasi Intelijn Bocornya Informasi Kejahatan Obat dan Makanan Informasi pada kegiatan atau operasi intelijen tidak bisa dijadikan sumber informasi awal
	Mei	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan : 1. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 1,2,22,23,29 April 2026 dengan menghasilkan 1 Laporan Informasi. dari 1 Laporan Infomasi tersebut masih dibutuhkan pendalaman untuk bisa dinaikkan ke Proses Pro Justicia 2. Dilakukan koordinasi secara informal dengan BNNP dan Bea Cukai terkait profil penyebaran OOT di Pulau Bangka Kendala : Terbatasnya Anggaran dalam kegiatan	Penyesuaian SDM yang ditugaskan dalam kegiatan intelijen dalam pendalaman informasi	Pendalaman Informasi kepada Target Potensial sehingga bisa dilakukan Operasi sesuai Target yaitu di bulan Juni	Selesai	untuk pemenuhan target perkara direncanakan dilaksanakan Rapat Perencanan Operasi Penindakan dengan Kepala Balai di bulan Juni	Juni	Ya	K3-02 O-30 O-57	Keselamatan Petugas terancam saat melakukan Kegiatan dan Operasi Intelijn Bocornya Informasi Kejahatan Obat dan Makanan Informasi pada kegiatan atau operasi intelijen tidak bisa dijadikan sumber informasi awal

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Intelijen sehingga dalam pendalaman informasi agak terbatas								
	Juni	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan : 1. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 19 dan 21 Mei 2026 dengan menghasilkan 4 Laporan Informasi. dari 4 Laporan Infomasi tersebut masih dibutuhkan pendalaman untuk bisa dinaikkan ke Proses Pro Justicia 2. Dilakukan Revisi Anggaran DJA sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3. Nota Dinas ini berisi untuk mengusulkan perubahan target perkara dari 2 (dua) menjadi 1 (satu) dengan rincian anggaran semula Rp. 142.830.000 menjadi Rp. 120.822.000 (-Rp. 22.008.000) Kendala : Dengan berkurangnya anggaran sebesar Rp. 22.008.000 adanya penyesuaian anggaran akun QCD di kegiatan Forkom PPNS dan Anggaran Perjadin Diklat PPNS	Mengkoordinasikan dengan fungsi lain untuk bisa sharing anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penindakan	Dalam pelaksanaan Kegiatan Forkom PPNS dan Perjadin Diklat PPNS yang telah dianggarkan sebelumnya, akan dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Kerja Pemeriksaan terkait kemungkinan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran Pemeriksaan	Selesai	-	-	Tidak	-	-
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	April	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Maret secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 17 (tujuh belas) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling bulan Maret telah dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan secara tepat waktu pada tanggal 16 Maret 2026 (c) Hasil MOnitoring Rekomendasi	Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform	Laporan Profiing Siber memanfaatkan Open Source Intelligence Platform atau melaporkan NIHIL apabila informasi terbatas	Selesai	-	-	Ya	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		takedown s.d Februari, sebanyak 23 link dari 39 link telah ditakedown (58,97%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Maret telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum tersedia di TW I 3. Analisis Kerawanan Kejahatan Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Maret melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data Kendala : Anggaran AEA yang sangat terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan								kejahatan tidak ditindaklanjuti
	Mei	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan April secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 35 (tiga puluh lima) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling bulan April telah dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan secara tepat waktu pada tanggal 23 April 2026. Di dalam mendukung pelaporan Profiling bulan April ini dilakukan Verifikasi Lapangan dengan menggunakan Anggaran QCD (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Maret, sebanyak 50 link dari 57 link telah ditakedown (87,72%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun	Data Kerawanan ini bisa dimanfaatkan untuk a. Mendukung kegiatan teknis pengawasan b. Mendukung kegiatan penindakan c. Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat d. Mendukung kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha e. Mendukung sinergisme kegiatan dengan pemangku kepentingan f. Mendukung penyusunan strategi pengawasan BPOM	Dilakukan Monitoring Pemanfaatan Data Kerawanan oleh Tim Kerja Penindakan	Selesai	-	-	Ya	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d April telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum tersedia di TW I 3. Analisis Kerawanan Kejahatan Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan April melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data Kendala : pemanfaatan data kerawanan sudah mulai dilakukan monev oleh Dit CT sebagai TL Rekomendasi BPK								
	Juni	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejakan Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Mei secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 28 (dua puluh delapan link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling NIHIL telah dilaporkan telah dilaporkan melalui Srikandi secara tepat waktu pada tanggal 18 Mei 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d April, sebanyak 97 link dari 68 link telah ditakedown (70,1%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Mei telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum	Untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran penyerapan Anggaran AEA dilakukan sesuai RPD yang telah direncanakan	Penyerapan Anggaran sesuai RPD	Selesai	-		-	Tidak	-	-

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		tersedia di TW I 3. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Mei melalui ADP dengan jumlah 10 (sepuluh) data dengan 11 data kerawanan Kendala : Belum dilakukan penyerapan anggaran AEA dikarenakan anggaran AEA hanya bisa dimanfaatkan 2 OK Perjalanan Dinas sehingga perlu diatur untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran Balai								
Indeks Pelayanan Publik UPT	April	Belum terdapat kendala, Merupakan Indikator target tahunan	1. Perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap sarana dan prasarana layanan publik guna memastikan fasilitas pelayanan tetap berfungsi dengan baik dan mendukung kenyamanan masyarakat. 2. Perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP), termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan publik agar pelaksanaan penilaian dapat berjalan optimal.	1. Melakukan pemeliharaan Sarana Prasarana layanan publik 2. Menunggu pelaksanaan dimulainya pengukuran Indeks Pelayanan Publik dan melakukan pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Selesai	-	-	Ya	O-33. R-01, IT-01	1. Tidak terpenuhinya data dukung sesuai dengan tools penilaian 2. Masyarakat tidak menggunakan layanan publik yang disediakan BPOM di Pangkalpinang 3. Masyarakat tidak dapat mengakses sistem informasi layanan publik
		Realisasi : Pada bulan Januari terdapat 1 sampel pihak ketiga pangan yang telah diuji dan dilaporkan tepat waktu Kendala : Tidak terdapat kendala yang mengganggu pelaksanaan pengujian sampel pihak ketiga Capaian terhadap target : Belum dapat dihitung karena berasal dari berbagai faktor dan merupakan target tahunan	Identifikasi terhadap kebutuhan pengujian pihak ketiga	Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga	Selesai	-	-	Ya	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Upaya yang telah dilakukan : Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga								
		Sampel pihak ketiga obat nappza : 20 Sampel dikerjakan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi timeline sampel pihak ketiga	Dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten	Selesai	-	-	Ya	SDM-20 R-02	- Pengujian sampel pihak ketiga Nappza melewati timeline yang ditetapkan - Pelanggan tidak puas dengan layanan pengujian sampel narkotika
		Pada bulan Januari terdapat permohonan 2 sertifikasi CDOB yang telah diselesaikan tepat waktu	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Mei	Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan Indikator dengan target tahunan. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan April telah dilakukan beberapa upaya, antara lain: 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan publik guna memastikan fasilitas pelayanan tetap berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat secara optimal 2. Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kendala : 1. Terdapat kerusakan pada perangkat TV di ruang pelayanan publik yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan penyampaian informasi kepada pengguna layanan. 2. Belum dilantiknya Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang, sehingga penetapan Standar Pelayanan Publik belum dapat dilakukan.	1. Perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap sarana dan prasarana layanan publik termasuk perangkat pendukung penyampaian informasi, guna memastikan fasilitas pelayanan berfungsi optimal dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. 2. Perlu dilakukan koordinasi dengan unit pengampu terkait dalam Penetapan Standar Pelayanan Publik sebagai bagian dari pemenuhan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). 3. Perlu dilakukan persiapan yang optimal dalam rangka pelaksanaan pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP), termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta kelengkapan dokumen pendukung.	1. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana layanan publik, termasuk perbaikan Televisi pada ruang pelayanan. 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengampu dalam rangka Penetapan Standar Pelayanan Publik 3. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana serta dokumen lainnya dalam rangka menghadapi pelaksanaan pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Selesai	-	-	Ya	O-33	Tidak terpenuhinya data dukung sesuai dengan tools penilaian
		Realisasi : Pada bulan April tidak terdapat sampel pihak ketiga pangan	Koordinasi dengan dinas kesehatan untuk jadwal masuk sampel DAK	Melakukan kaji ulang permintaan pengujian sampel DAK dari dinas kesehatan	Selesai	-	-	Ya	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Kendala : Tidak terdapat kendala yang mengganggu pelaksanaan pengujian sampel pihak ketiga Capaian terhadap target : Belum dapat dihitung karena berasal dari berbagai faktor dan merupakan target tahunan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga								
		Realisasi : Sampai dengan bulan April telah dilakukan pengujian sebanyak 113 sampel napza, 1 sampel obat. Semua pengujian dilakukan sesuai timeline yg telah ditetapkan.	Agar dipastikan pengujian sampel pihak ketiga sesuai batas timeline yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi timeline pengujian sampel pihak ketiga.	Selesai	-	-	Ya	SDM-20 R-02	- Pengujian sampel pihak ketiga Nappza melewati timeline yang ditetapkan - Pelanggan tidak puas dengan layanan pengujian sampel narkotika
		Realisasi : Sampai dengan bulan April terdapat permohonan 2 Sertifikasi CDOB yang telah diselesaikan tepat waktu	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
	Juni	Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan Indikator dengan target tahunan. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan Mei telah dilakukan tahapan Penilaian Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), meliputi pengisian Formulir F-01 pada aplikasi EVORTALA, pelaksanaan wawancara dan verifikasi data dukung oleh tim evaluator pada tanggal 29 Mei 2026.	1. Perlu dilakukan tindak lanjut atas hasil verifikasi dan evaluasi PEKPPP Tahun 2026 melalui penyempurnaan data dukung dan pemenuhan dokumen yang masih diperlukan. 2. Perlu dilakukan penguatan pelaksanaan survei pelayanan publik sebagai bagian dari pemenuhan komponen penilaian PEKPPP	1. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan data dukung PEKPPP sesuai hasil wawancara dan verifikasi yang telah dilakukan oleh tim evaluator. 2. Melaksanakan pengisian Formulir F-03 melalui survei kepada 10 (sepuluh) pengguna layanan sebagai bagian dari proses penilaian PEKPPP Tahun 2026. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan komponen penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mendukung pencapaian target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2026.	Selesai	-	-	Ya	O-33	Tidak terpenuhinya data dukung sesuai dengan tools penilaian

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Realisasi : Pada bulan Mei terdapat 4 sampel masuk Kendala : Tidak terdapat kendala yang mengganggu pelaksanaan pengujian sampel pihak ketiga sampai dengan bulan Mei Capaian terhadap target : Belum dapat dihitung karena berasal dari berbagai faktor dan merupakan target tahunan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga	Koordinasi dengan dinas kesehatan untuk jadwal masuk sampel DAK	Melakukan kaji ulang permintaan pengujian sampel DAK dari dinas kesehatan	Selesai	-	-	Ya	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel
		Realisasi : Pada bulan Mei telah dilakukan pengujian sebanyak 50 sampel pihak ketiga. Terdapat 4 sampel yang melewati 48 jam.	Agar dilakukan evaluasi terkait hal tersebut	Melakukan pembahasan dengan sub bagian tata usaha terkait upaya yang dapat dilakukan untuk pencapian timeline pengujian sampel nappza	Selesai	Sudah dilakukan pembahasan dengan tim Tata Usaha dan disepakati beberapa percepatan administrasi	-	Ya	SDM-20 R-02	- Pengujian sampel pihak ketiga Nappza melewati timeline yang ditetapkan - Pelanggan tidak puas dengan layanan pengujian sampel narkotika
		Sampai dengan Bulan Mei terdapat 2 Sertifikasi CDOB dan 1 IP CPPOB yang telah diselesaikan tepat waktu	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	April	Realisasi Kegiatan : Merupakan indikator dengan target tahunan,beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Maret diantaranya yaitu : 1. Melakukan sosialisasi RENJA masing-masing tim kerja kepada seluruh pegawai pada tanggal 6 Maret 2026 via zoom meeting. 2. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi SAKIP tanggal 9 Maret 2026 3. Melakukan review standar pelayanan publik pada tanggal 13 Maret 2026 4. Melaksanakan kegiatan sharing session terkait inovasi Smart Laura dan si paling Berakhlak tgl 13 maret 2026. 5. Melaksanakan Inovasi Sapa Bang Robee dengan tema Upgrade Skill Digital: Belajar Google Site tanggal 16	1. Agar dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi RENJA TW 1 2. Agar dilaksanakan sharing session dengan kantor Imigrasi Tanjung Pandan terkait proses pembangunan WBBM (diluar agenda rakernas tanggal 15-19 april 2026) 3. Agar dipastikan pengisian LKE sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh inspektorat.	1. Akan dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi RENJA TW 1 2. Akan dilaksanakan sharing session dengan kantor Imigrasi Tanjung Pandan 3. Akan dilakukan monitoring pengisian LKE	Selesai	-	-	Ya	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BBPOM Pangkal Pinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Maret 2026. 6. Melakukan penginputan data benturan kepentingan seluruh pegawai ke dalam aplikasi Sang integritas hingga 31 maret 2026 7. Melakukan penginputan SKP seluruh pegawai ke dalam aplikasi SIMAKIN hingga 31 maret 2026 Kendala : Belum ada kendala dalam pelaksanaan								
	Mei	Realisasi Kegiatan : Merupakan indikator dengan target tahunan,beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan April diantaranya yaitu : 06 april : rapat monitoring dan evaluasi renja TW 1 13 april : sosialisasi daftar risiko (inovasi GERASAK) kepada seluruh pegawai 10 April : telah diupload hasil review LKE oleh auditor internal dengan hasil capaian sebesar 98,42 13 April : telah dilakukan sosialisasi terkait WIB dari pokja 5 (Waktu Indonesia Berintegritas) 20 April : telah dilaksankaan desk pemenuhan LKE dengan inspektorat dengan melakukan beberapa perbaikan data dukung dan narasi 23 April : Sharing Session dengan Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Pandan secara luring 28 April : pengisian survei BERakhlak dari PPSDM - Telah dilaksanakan survei BerAKHLAK internal dengan hasil 3,552 tetapi hasil masih dibawah target yang ditetapkan 3,6-3,9 masih terdapat gap sebesar 0,048 Kendala : Belum ada kendala dalam pelaksanaan	- Melaksanakan rencana kerja secara konsisten sesuai dengan perencanaan - Melakukan evaluasi terkait saran dan masukan pada hasil survei BerAKHLAK internal - Untuk pelaksanaan inovasi CFD dapat dialihkan menjadi kegiatan daring	- Melakukan monitoring dan evaluasi RENJA dalam rapat monev RENJA TW 2 - Menindaklanjuti saran dan masukan pada survei BerAKHLAK internal sebagai upaya perbaikan	Belum Selesai	Monev RENJA TW 2 akan dilaksanakan bulan Juli 2026	July 2026	Ya	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Juni	Realisasi Kegiatan : Merupakan indikator dengan target tahunan,beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Mei diantaranya yaitu : 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan perencanaan 2. Menjalankan inovasi sesuai perencanaan misalnya : podcast getas bulan ini telah dilakukan podcast bekerjasama dengan universitas muhammadiyah bangka belitung, pemberian reward dan punishment melalui inovasi pulau ketawai. 3. Melakukan kegiatan refreshment terkait manajemen risiko oleh inspektorat Kendala : Belum ada kendala dalam pelaksanaan	Agar dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana kerja tim RB	1. Mengingatkan kepada Ketua tim RB dan AOC untuk dilakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja.dan POA. 2. Akan dilakukan rapat tim AOC pada jumat 12 Juni 2026	Selesai	- Telah dilakukan reminder untuk pengisian monev Renja dan proker AOC - Rapat AOC telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026	-	Ya	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM
Nilai AKIP UPT BPOM	April	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Maret kegiatan pengelolaan SAKIP yang telah dilaksanakan adalah : 1. Rapat Monev bulan Februari 2026. 2. Pemberian reward punishment atas capaian kinerja 3. Publikasi capaian kinerja melalui Ig dan WAG Balai 4. Penyusunan MPH dan SKP Tahun 2026 5. Pelaporan Monev bulanan di Simetris Laporan monev Bappenas sampai dengan saat ini masih belum bisa dilakukan karena aplikasi masih belum bisa diakses. Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	Agar terus lakukan pemantauan aplikasi e-monev Bappenas, dan lakukan pelaporan segera setelah ases aplikasi dibuka Lakukan pelaporan monev, penyusunan laporan evaluasi internal dan laporan kinerja secara tepat waktu dan sesuai pedoman SAKIP Laporkan RATL Evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan pada triwulan I	1. Melakukan Pelaporan Monev bulanan 2. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal 3. Penyusunan laporan kinerja interim 4. Menyusun data dukung RATL Evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan pada triwulan I dan menyampaikannya melalui SAPAAPIP	Selesai	-	-	Ya	SDM-06	Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Mei	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam upaya mencapai Nilai AKIP, pada bulan April telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan AKIP berupa : 1. Penyampaian laporan monev di e-performance 2. Penyusunan dan penyampaian laporan evalusi internal 3. Penyusunan dan penyampaian laporan interim tw 1 4. Pelaporan monev melalui e-bappenas 5. Menyusun data dukung RATL Evaluasi AKIP dan update data dukung di SAPAAPIP Pada bulan april ditemukan adanya kesalahan rumus pada RHPK yang berakibat terjadinya perbedaan data capaian kinerja sampai dengan Maret 2026 dengan yang telah dirapatkan pada periode sebelumnya. Namun hal ini telah dilakukan penyesuaian baik itu pada laporan monev maupun pada laporan evaluasi internal dan Laporan Interim triwulan 1. Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.	- Agar masing-masing penanggungjawab, memastikan kembali rumus RHPK telah sesuai dengan DO indikator kinerjanya. - Agar lakukan monitoring RATL Evaluasi SAKIP dan lakukan tindaklanjut sesuai rencana yang telah disusun. - Lakukan penyesuaian yang dibutuhkan pada perencanaan Kinerja dengan adanya perubahan target output (RO) - Pastikan pengelolaan SAKIP sesuai dengan pedoman pengelolaan SAKIP terbaru	1. Kroscek kesesuaian rumus RHPK pada saat penginputan data kinerja april sebelum dilaporkan. 2. Melakukan tindak lanjut RATL Evaluasi AKIP 2025 berupa sharing pengelolaan AKIP dari UPT Lain 3. Melakukan identifikasi perubahan PK dan RAPK akibat perubahan target output 4. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman	Belum Selesai	Sharing Pengelolaan AKIP dengan BBPOM di Mataram sudah dijadwalkan pada tanggal 22 Mei 2026, namun BBPOM Mataram minta dijadwalkan ulang pada bulan Juni.	Juni	Ya	SDM-14	Terdapat perubahan data kinerja pada RHPK dari data yang telah dilaporkan
	Juni	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam upaya mencapai Nilai AKIP, pada bulan Mei telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan AKIP berupa : 1. Penyampaian laporan monev di e-performance 2. Pelaporan monev melalui e-bappenas 3. Menyusun data dukung RATL Evaluasi AKIP dan update data dukung di SAPAAPIP	- Agar lakukan koordinasi lebih lanjut terkait penjadwalan ulang kegiatan Sharing AKIP dengan BBPOM di Mataram - Pastikan pengelolaan SAKIP sesuai dengan pedoman pengelolaan SAKIP terbaru	1. Koordinasi dengan BBPOM Mataram untuk pelaksanaan Sharing AKIP di bulan Juni. 2. Melakukan pelaporan monev bulanan sesuai pedoman	Selesai	-	-	Ya	SDM-06	Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Rencana Sharing AKIP dengan BBPOM Mataram yang semula dijadwalkan pada tanggal 22 Mei 2026, belum dapat dilaksanakan karena permintaan dari BBPOM Mataram. Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.								
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	April	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Maret kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan monitoring anggaran dan RPD Maret 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. Mengikuti sosialisasi pelaporan output pada aplikasi SAKTI Laporan Target dan Realisasi output pada aplikasi SAKTI belum bisa dilakukan karena aplikasi belum dibuka, masih menunggu infomasi dari Kemenkeu. Nilai IKPA sd bulan Maret masih belum optimal, karena nilai Caput belum ada. Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan anggaran mendapat nilai 83,58. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA	Sudah memasuki bulan April, agar lakukan penyesuaian RPD triwulan II dan lakukan pemantauan pencapaian RPD secara berkala. Upayakan RPD yang disusun dapat memenuhi target serapan anggaran triwulan 2. Lakukan proses pencairan tagihan sesuai ketentuan. Lakukan pengecekan secara berkala terhadap aplikasi pelaporan output, agar segera dilakukan penyusunan rencana dan pelaporan realisasi setalh aplikasi dibuka.	1. Melakukan update RPD/ Revisi Hal III DIPA 2. Melakukan pemantauan RPD April secara berkala 3. Melakukan pencairan tagihan belanja sesuai ketentuan 4. Menyampaikan rencana target output dan realisasi output sd maret (jika aplikasi telah dapat diakses)	Selesai	-	-	Ya	SDM-07, SDM-09, O-36	-Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. -Lambatnya proses pencairan tagihan -Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan
	Mei	Merupakan indikator dengan target tahunan.Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan	1. Pastikan agar target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing	Selesai	-	-	Ya	SDM-07, SDM-09, O-36	-Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		April telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan monitoring anggaran dan RPD April 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. melakukan penginputan target output 2026 dan realisasi output sd maret pada aplikasi SAKTI Nilai IKPA sd bulan April masih belum optimal, karena nilai Caput belum ada. Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan anggaran mendapat nilai 66,65. Penyerapan anggaran nilainya akan optimal pada bulan di akhir tw. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA	2. Lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan sehingga dapat mendukung pencapaian target serapan anggaran tw 2	penanggungjawab output. 2. Monitoring pencapaian RPD bulan Mei						yang belum lengkap. -Lambatnya proses pencairan tagihan -Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan
	Juni	Merupakan indikator dengan target tahunan.Sebagai upaya dalam pencapaian target tahunan, pada bulan Mei telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan monitoring anggaran dan RPD Mei 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. melakukan penginputan target output 2026 dan realisasi output sd April pada aplikasi SAKTI 5. Revisi RPD triwulan II (hal III DIPA) Nilai IKPA sd bulan Mei masih belum optimal, karena nilai Caput belum ada (penginputan paling lama 10 Juni 2026). Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III	1. Pastikan agar target output yang telah disusun setiap bulannya tercapai 2. Lakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian RPD bulan berjalan sehingga dapat mendukung pencapaian target serapan anggaran tw 2	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab output. 2. Monitoring pencapaian RPD bulan Juni	Selesai	-	-	Ya	SDM-07, SDM-09, O-36	-Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. -Lambatnya proses pencairan tagihan -Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk Penyerapan anggaran mendapat nilai 74,97. Penyerapan anggaran nilainya akan optimal pada bulan di akhir tw. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA								
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	April	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Maret kegiatan yang telah dilakukan diantaranya 1. Melakukan perbaikan risiko sem 1 tahun 2026 2. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP 3. Melakukan internalisasi terkait risiko di Instagram (oleh tim kerja penguatan {engawasan) Terdapat penyusunan risiko atas program kerja baru AoC yang perlu untuk diperbaiki, sehingga sosialisasi daftar risiko ditunda sanpai dengan seluruh risiko final. Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026	Segera lakukan perbaikan atas risiko program kerja baru AoC dan lakukan update daftar risiko di SAPAAPIP Lakukan Sosialisasi Daftar Risiko kepada seluruh pegawai	1. Melakukan perbaikan identifikasi risiko program kerja baru AoC 2. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP 3. Melakukan sosialisasi Risiko sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai	Selesai	-	-	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman
	Mei	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam rangka upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan April telah dilakukan kegiatan diantaranya : 1. Melakukan perbaikan identifikasi risiko program kerja baru AoC 2. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP 3. Melakukan sosialisasi Risiko sem 1	Agar berkoordinasi dengan Inspektorat terkait peningkatan kompetensi mengenai Manajemen Risiko melalui pelaksanaan refreshment materi manrisk bagi seluruh pegawai	Membuat surat permohonan untuk refreshment penerapan manajemen risiko ke Inspektorat II	Selesai	-	-	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		tahun 2026 kepada seluruh pegawai Kendala : Pelaksanaan peningkatan Kompetensi pegawai terkait Manrisk tahun 2026 belum dapat dilaksanakan karena pada aplikasi IDEAS belum tersedia materi terbaru yang dapat diikuti pegawai. Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026								
	Juni	Merupakan indikator dengan target tahunan. Dalam rangka upaya pencapaian target tahun 2026, pada bulan Mei telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai terkait Manajemen Risiko dengan mengundang Inspektorat sebagai Narasumber pada tanggal 26 Mei 2026. Dari hasil kegiatan Refreshment Manajemen Risiko tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan pada daftar risiko sem I tahun 2026 Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026	Agar dilakukan reviu kembali terhadap daftar risiko Semester I tahun 2026 yang telah disusun sesuai masukkan dari inspektorat.	1. Melakukan penyesuaian daftar risiko Sem I tahun 2026 yang telah disusun. 2. Melakukan penyesuaian Daftar risiko pada aplikasi SAPAAPIP	Selesai	-	-	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

2. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Besar POM di Pangkal Pinang Tahun 2025. Dari hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Utama memberikan beberapa rekomendasi untuk melakukan perbaikan kedepannya terkait implementasi SAKIP Balai Besar POM di Pangkal Pinang. Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dan melaksanakan tindak lanjut sesuai rencana aksi yg telah disusun.

Tabel 3.138 Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
A	PERENCANAAN KINERJA		
1	Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	Membuat matriks kesesuaian Renstra BPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	TW II
2	Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1) keselarasan antar dokumen perencanaan dan/atau; 2) tidak adanya perbedaan nomenklatur dan/atau; 3) tidak adanya perbedaan target kinerja.	1. Membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan 2. Menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan kinerja (jika ada)	TW II - TW IV
3	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja	1. Melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal 2. Melampirkan tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan evaluasi internal	TW II - TW IV
4	Mengajukan penetapan SKP Kepala Balai POM di Pangkal Pinang	Bersurat ke Biro SDM agar SKP Kepala Balai yang telah ditetapkan dapat diakomodir	TW II

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
		untuk ditandatangani oleh atasan pada aplikasi simakin	
B	PENGUKURAN KINERJA		
1	Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Melakukan sosialisasi media pengumpulan sumber data 3. Mengupload sumber data pada media yang sudah disediakan	TW I - TW IV
2	Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Mengunci link drive pengumpulan sumber data setiap bulan setelah rapat evaluasi	TW I - TW IV
3	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.	Mengupload kertas kerja perhitungan data capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data setiap bulan	TW II - TW IV
C	PELAPORAN KINERJA		
1	Mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah disusun untuk memastikan tahapan pengendalian internal dalam proses pengukuran dan pelaporan data kinerja telah memadai	Sharing/diskusi dengan UPT lainnya terkait mekanisme pengumpulan data kinerja	TW II
2	Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	Melampiran lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan Kepala Balai pada laporan kinerja	TW II - TW IV
3	Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumber daya baik sasaran maupun IKU pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW I - TW IV

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
	telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dan lainnya secara lebih optimal		
4	Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan.	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumber daya baik sasaran maupun IKU pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW I - TW IV
D	EVALUASI INTERNAL		
1	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja	Membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan memonitoring progres tindak lanjut rekomendasi setiap bulannya	TW II - IV
2	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam notulen dan laporan hasil evaluasi untuk menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap hasil analisa kendala/hambatan dan penetapan rekomendasi/rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target <100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi	TW I - IV

Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas evaluasi SAKIP tahun 2025. Berikut rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sampai dengan triwulan II.

Tabel 3.139 Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2026 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
			Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
PERENCANAAN KINERJA						
Belum ada matriks kesesuaian Renstra BBPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	TW II	Membuat matriks kesesuaian Renstra BPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM			Telah membuat matriks kesesuaian Renstra BPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM
1. Belum membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan 2. Belum menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan kinerja	Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1) keselarasan antar dokumen perencanaan dan/atau; 2) tidak adanya perbedaan nomenklatur dan/atau; 3) tidak adanya perbedaan target kinerja.	TW II - TW IV	1. Pada Laporan Kinerja Tahun 2025 telah melampirkan Tabel Identifikasi Kesesuaian Nomenklatur Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan beserta justifikasi ketidaksesuaiannya (**Lampiran 26**) 2. Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I 2026 telah melampirkan Tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan tahun 2026 (**Lampiran 12** dan **Lampiran 13**)	1. Membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan tahun 2026 2. Menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja (tahun 2026) antar dokumen perencanaan di laporan kinerja interim tahun 2026	TW III - TW IV	1. Telah membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan 2. Telah menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan kinerja
	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja	TW II - TW IV		1. Melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal 2. Melampirkan tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan evaluasi internal	TW III - TW IV	

Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
			Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
Belum bersurat mengajukan penetapan SKP Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang ke biro SDM	Mengajukan penetapan SKP Kepala Balai POM di Pangkal Pinang	TW II	Bersurat ke biro SDM agar SKP Kepala Balai yang telah ditetapkan dapat diakomodir untuk ditandatangani oleh atasan pada aplikasi simakin			Telah bersurat ke Biro SDM mengajukan penetapan SKP Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang
PENGUKURAN KINERJA						
Telah dibuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive namun belum mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja	Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya	TW I - TW IV	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Melakukan sosialisasi media pengumpulan sumber data 3. Mengupload sumber data pada media yang sudah disediakan sampai dengan Bulan Juni 2026	Mengupload sumber data pada media yang sudah disediakan	TW III - TW IV	Telah dibuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive
Telah dibuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive namun belum mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja	Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur	TW I - TW IV	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Mengunci link drive pengumpulan sumber data setiap bulan setelah rapat evaluasi (sampai dengan Bulan Juni 2026)	Mengunci link drive pengumpulan sumber data setiap bulan setelah rapat evaluasi	TW III - TW IV	Telah membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive dan mengunci link drive setiap bulannya
Belum mendokumentasikan kertas kerja perhitungan capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.	TW II - TW IV	Mengupload kertas kerja perhitungan data capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data sampai dengan Bulan Juni 2026	Mengupload kertas kerja perhitungan data capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data setiap bulan	TW II - TW IV	Telah mendokumentasikan RHPK pada media pengumpulan sumber data sampai dengan Bulan Juni 2026
PELAPORAN KINERJA						
Belum mereviu kembali pengumpulan data kinerja	Mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah disusun untuk memastikan tahapan pengendalian internal dalam proses pengukuran dan	TW II	Telah mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja dan melakukan upaya berikut: 1. Sharing SAKIP dengan BBPOM			Telah mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja

Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
			Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	pelaporan data kinerja telah memadai		di Mataram termasuk didalamnya membahas mekanisme pengumpulan data kinerja 2. Melakukan revisi SK Tim Monitoring dan Evaluasi Internal Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang			
Belum mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang	Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	TW II - TW IV	Telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan reviu berjenjang: 1. Membuat kolom approval pada RHPK 2. Melampirkan lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan kepala balai pada Notulen dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I	Melampirkan lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan Kepala Balai pada laporan kinerja	TW III - TW IV	Telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan reviu berjenjang
Belum melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif	Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dan lainnya secara lebih optimal	TW I - TW IV	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun IKU pada: 1. Laporan kinerja tahun 2025 (tercantum **di BAB 3.1 poin h.Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.4 poin d Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran**) 2. Laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 (tercantum **di bab 3.1 poin f Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun IKU pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW II - TW IV	Telah menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026

Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
			Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			setiap IKU dan **bab 3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan**)			
Belum menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja	Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan.	TW I - TW IV	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun IKU pada: 1. Laporan kinerja tahun 2025 (tercantum **di BAB 3.1 poin h.Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.4 poin d Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran**) 2. Laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026 (tercantum **di bab 3.1 poin f Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja** di setiap IKU dan **bab 3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan**)	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun IKU pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW II - TW IV	Telah menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2026, serta didalamnya telah menjelaskan penyebab efisiensi dan inefisiensi penggunaan sumber daya
EVALUASI INTERNAL						
	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja	TW II - IV		Membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan lebih dari 110%, serta memonitoring progres tindak lanjut rekomendasi setiap bulannya	TW III - IV	

Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
			Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
Belum menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam notulen dan laporan hasil evaluasi untuk menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap hasil analisa kendala/hambatan dan penetapan rekomendasi/rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai	TW I - IV	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi Bulan Maret-Mei 2026	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi bulan berikutnya	TW II - IV	Telah menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi Bulan Maret-Mei 2026

3.3 REALISASI ANGGARAN

a. **Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja**

Pada Triwulan II 2026, total realisasi anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang yaitu sebesar Rp **6.521.886.372** dari pagu yang bisa digunakan (diluar pagu blokir) sebesar Rp **11.566.954.000** dengan capaian sebesar **56,38%** atau **55,96%** bila dibandingkan dengan Pagu Total (dengan pagu blokir). Pada Triwulan II capaian penyerapan Balai Besar POM di Pangkal Pinang belum mecapai target penyerapan IKPA indikator Penyerapan Anggaran dengan target dan capaian masing-masing belanja yaitu: Belanja Pegawai dengan target 40% capaian 49,95%; Belanja Barang dengan target 50% dan capaian 45,43%; dan Belanja Modal dengan target 40% dan capaian 100%.

Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Berikut perbandingan realisasi kinerja dibandingan dengan realisasi anggaran di Balai Besar POM di Pangkal Pinang:

Tabel 3.140 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

No	Indikator	IKU			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		Target (RPD TW II)	Realisasi	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	350.530.500	231.138.023	78.694.815	34,05
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5.983.000	5.982.000	5.982.000	100,00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	145.518.500	27.608.941	22.952.541	83,13
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	7.862.400	0	0	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63	8.985.600	0	0	-
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	85	86,73	102,04	15.592.900	6.236.200	6.792.600	108,92

No	Indikator	IKU			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		Target (RPD TW II)	Realisasi	%
	Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder							
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	20.761.700	5.666.440	7.989.244	140,99
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100	106,10	80.930.900	18.342.254	27.017.141	147,29
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100	103,52	102.082.450	49.568.560	39.013.113	78,71
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99	181.090.550	90.069.166	91.464.965	101,55
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53	3.960.000	0	0	-
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03	18.946.000	4.688.100	3.666.900	78,22
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	18.038.500	7.155.230	7.922.385	110,72
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,4	78,5	100,13	3.637.116.000	2.600.275.936	2.725.589.823	104,82
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	22.160.000	4.320.000	4.704.000	108,89
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	100,67	116.138.000	56.503.000	62.079.000	109,87
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100	68.788.000	10.300.000	13.972.000	135,65
18	Jumlah desa pangan aman	25	25	100	71.827.000	15.660.000	19.271.000	123,06
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100	36.173.000	26.056.000	23.989.000	92,07
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	62,88	68,32	108,65	27.008.000	10.737.000	10.495.000	97,75

No	Indikator	IKU			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		Target (RPD TW II)	Realisasi	%
	Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan							
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38,33	57,5	150,01	120.822.000	38.693.000	38.066.612	98,38
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	5.230.000	4.350.000	4.482.000	103,03
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	7.591.000	2.200.000	510.000	23,18
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	657.410.000	415.514.304	437.985.681	105,41
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	157.270.000	59.946.042	58.983.192	98,39
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	5.454.781.000	2.649.821.222	2.663.344.023	100,51
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	312.707.000	147.106.851	166.919.337	113,47
	TOTAL			105,25	11.655.304.000	6.487.938.269	6.521.886.372	100,52

b. Realisasi anggaran per Sasaran

Apabila dilihat dari sasaran kegiatan, realisasi anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.141 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	PAGU	Input (Anggaran)		
			Target (RPD TW I)	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4.619.559.000	3.051.050.850	3.021.789.527	99,04
2	Meningkatnya efektivitas KIE	292.926.000	108.519.000	119.311.000	109,94
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	27.008.000	10.737.000	10.495.000	97,75
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	120.822.000	38.693.000	38.066.612	98,38
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.230.000	4.350.000	4.482.000	103,03
6	Layanan Publik UPT yang prima	7.591.000	2.200.000	510.000	23,18
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	6.582.168.000	3.272.388.419	3.327.232.233	101,68
	TOTAL	**11.655.304.000**	**6.487.938.269**	**6.521.886.372**	**100,52**

c. Evaluasi dan Analisis Anggaran berisi perbandingan rencana dan realisasi anggaran per program/kegiatan dan analisa tingkat pencapaiannya.

Pada tahun 2026 Balai Besar POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar Rp 13.918.203.000. Pada bulan Desember 2025 dilaksanakan revisi kewenangan

DJA untuk pergeseran anggaran kedalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Dilakukan pergeseran anggaran dari pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 2.230.083.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 88.350.000 sehingga total pagu Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 11.688.120.000 atau pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000.

Pada bulan April dilaksanakan revisi kewenangan DJA berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.04.26.260 tanggal 8 April 2026 tentang Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN TA 2026 dimana dilakukan revisi penurunan target Rincian Output (RO) akibat adanya efisiensi anggaran pada bulan Desember 2025 sesuai hasil kesepakatan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit teknis sebelumnya. Penurunan target tersebut dilakukan pada KRO BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT), BDB.001 (Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan), BDB.002 (Desa Pangan Aman), BDB.003 (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas), BDC (Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE), BMB.001 (Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT), QDG (UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT), QIA.001 (Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT), QIA.002 (Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT), QIC.001 (Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT), dan QIC.004 (Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT). Selain penyesuaian target output tersebut dilakukan juga pemotongan anggaran untuk beberapa akun belanja barang sebesar Rp 10.808.000. Pada bulan Mei dilakukan kembali revisi kewenangan DJA berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3 dimana dilakukan pemotongan target output dan anggaran pada RO Perkara QCD.U66 (PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PANGKAL PINANG) sesuai dengan SBK 1 Perkara. Sampai dengan bulan Juni 2026 total pagu blokir Balai Besar POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 88.350.000 dan **Pagu Total sebesar Rp 11.655.304.000**.

Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Apabila dilihat dari Rincian Output (RO), realisasi anggaran Balai Besar POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.142 Perbandingan Realisasi Output dengan Realisasi Anggaran

No	Kegiatan	Output			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		T (RPD)	R	%
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	6	6	100,00	Rp 5.230.000	Rp 4.350.000	Rp 4.482.000	103,03
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	82	191	232,93	Rp 7.591.000	Rp 2.200.000	Rp 510.000	23,18
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00	Rp 68.788.000	Rp 10.300.000	Rp 13.972.000	135,65
4	Desa Pangan Aman	25	25	100,00	Rp 71.827.000	Rp 15.660.000	Rp 19.271.000	123,06
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	70	70	100,00	Rp 36.173.000	Rp 26.056.000	Rp 23.989.000	92,07
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	220	227	103,18	Rp 89.633.000	Rp 41.702.998	Rp 46.269.000	110,95
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	72	72	100,00	Rp 14.986.000	Rp 4.688.100	Rp 3.666.900	78,22
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	48	60	125,00	Rp 7.999.000	Rp 3.220.000	Rp 4.245.000	131,83
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	2	2	100,00	Rp 26.505.000	Rp 14.800.000	Rp 15.810.000	106,82
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	45	48	107,37	Rp 1.672.956.000	Rp636.115.936	Rp761.433.473	119,70
11	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	100	45	45,00	Rp 120.822.000	Rp 38.692.999	Rp 38.066.612	98,38
12	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	Rp 5.983.000	Rp 5.982.000	Rp 5.982.000	100,00
13	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20	36,00	180,00	Rp 20.097.000	Rp 10.737.000	Rp 10.495.000	97,75

No	Kegiatan	Output			PAGU	Anggaran		
		T	R	%		T (RPD)	R	%
14	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	96	99	103,13	Rp 183.337.000	Rp 31.928.941	Rp 27.656.541	86,62
15	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	271	282	104,06	Rp 343.795.000	Rp 231.138.023	Rp 78.694.815	34,05
16	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8	8	100,00	Rp 21.624.000	Rp 8.365.000	Rp 12.125.000	144,95
17	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	129	132	102,33	Rp 419.629.000	Rp 168.672.870	Rp168.074.448	99,65
18	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100	100	100,00	Rp 1.964.160.000	Rp1.964.160.000	Rp1.964.156.350	100,00
19	Layanan BMN	25	25	100,00	Rp 2.700.000	Rp -	Rp -	0,00
20	Layanan Perkantoran	50	50	100,00	Rp 6.571.469.000	Rp3.269.168.402	Rp3.322.987.233	101,65
	TOTAL			110,15	11.655.304.000	6.487.938.269	6.521.886.372	100,52

Upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pangkal Pinang dalam pengelolaan anggaran antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan rencana penarikan dana secara berkala.
2. Melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan seperti kegiatan terpadu yang sesuai SK Kegiatan Terpadu terdapat penyesuaian yang mana terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan atau dilakukan secara daring untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
3. Melakukan revisi Halaman III DIPA untuk menyesuaikan rencana penarikan dana setiap triwulan.
4. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.

5. Melakukan evaluasi kegiatan dan anggaran sampai dengan triwulan II dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Berikut penyesuaian anggaran yang sudah dilaksanakan Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada triwulan II untuk mengoptimalkan anggaran serta efktif dan efisien:

Tabel 3.143 Penyesuaian Anggaran dalam Mencapai Kinerja

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
1	Revisi Kanwil Halaman III DIPA	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mana menyatakan Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD Bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh setiap awal Triwulan; • Kebutuhan anggaran pada kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah Dan Pengawalan Sekolah Yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan yang berkenaan dengan IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan • Kebutuhan anggaran untuk pada kegiatan Advokasi Program PPABK yang berkenaan dengan IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.	• Penyesuaian anggaran pada akun perjalan dinas biasa (524111) untuk kegiatan sosialisasi keamanan sekolah • Penambahan anggaran Honor Tim Keamanan Pangan di Pasar (521213 Belanja Honor Output Kegiatan) dan Penggandaan Bahan/Spanduk/Pencetakan (521211 Belanja Bahan)	April
2	Revisi Kewenangan DJA	Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.04.26.260 tanggal 8 April 2026 tentang Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN	• Dilakukan revisi penurunan target Rincian Output (RO) akibat adanya efisiensi anggaran pada bulan Desember 2025 sesuai hasil kesepakatan	April

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
		TA 2026 yang berkenaan hampir dengan semua IKU.	dengan Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit teknis • Dilakukan juga pemotongan anggaran untuk beberapa akun belanja barang yaitu 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) 521213(Belanja Honor Output Kegiatan) 522151 (Belanja Jasa Profesi)	
3	Revisi Kanwil Halaman III DIPA	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mana menyatakan Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD Bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh setiap awal Triwulan; • Kebutuhan anggaran pada kegiatan Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian, Peningkatan ruang lingkup pengujian, dan Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium • kebutuhan anggaran untuk kegiatan Pertemuan	• Melakukan penyesuaian anggaran Pengadaan Kelengkapan K3 Laboratorium, Pembelian gas laboratorium, dan Pengadaan Media Mikro • melakukan penambahan belanja bahan dan transport kegiatan KTD ESO.	Mei

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
		Sosialisasi Fasilitas Distribusi Obat yang berkenaan dengan IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		
4	Revisi Kewenangan DJA	Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3 yang berkenaan dengan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Pemotongan target output dan anggaran pada RO Perkara QCD.U66 (Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Pangkal Pinang) sesuai dengan SBK 1 Perkara	Mei
5	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran pada kegiatan Pendampingan Kabupaten Kota Pangan Aman yang berkenaan dengan IKU Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman • kebutuhan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana yang berkenaan dengan IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	• Penyesuaian anggaran pada anggaran perjalanan dinas biasa (524111) dan belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) pada kegiatan kabupaten kota pangan aman • penyesuaian anggaran pada akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dan akun perjalanan dinas biasa (524111) pada kegiatan sarana distribusi	Juni

d. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan, sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan. Target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana).

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

$$= 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika berikut :

Jika IE $\geq$ SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berikut tingkat efisiensi sasaran kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 3.144 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,80	3.033.593.620	3.003.181.142	99,00	1,05	0,05	100% (Efisien)	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	100,17	108.519.000	119.311.000	109,94	0,91	-0,09	Tidak Efisien	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	108,65	10.737.000	10.495.000	97,75	1,11	0,11	100% (Efisien)	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	150,01	38.693.000	38.066.612	98,38	1,52	0,52	92% (Efisien)	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	4.350.000	4.482.000	103,03	0,97	-0,03	Tidak Efisien	

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%				
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	2.200.000	510.000	23,18	-	-	-	Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	3.272.388.419	3.327.232.233	101,68	-	-	-	Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
	TOTAL	112,53	3.195.892.620	3.175.535.754	99,36	1,13	0,13	100% (Efisien)	Anggaran dihitung dari IKU yang bisa dihitung TE nya

Dari 7 sasaran kegiatan, hanya 5 sasaran kegiatan yang bisa dihitung tingkat efisiensinya. Hasil pengukuran 5 sasaran kegiatan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,13 sehingga kategorinya capaiannya **100% (Efisien)** dengan rata-rata persentase capaian output sebesar 112,53% dan persentase capaian input (anggaran) sebesar 99,36%. Berikut analisis untuk tingkat efisiensi anggaran per sasaran kegiatan:

1) Pada Sasaran Kegiatan 1 **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 3.003.181.142 atau 99% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II sasaran kegiatan ini yaitu Rp 3.033.593.620. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan beserta pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian; rapat koordinasi pusat dan balai dalam manajemen sampling; pembelian suku cadang dan kolom, baku pembanding, reagensia dan media mikro, alat gelas, gas laboratorium; kalibrasi peralatan laboratorium dan perbaikan alat laboratorium; pengujian sampel pihak ketiga; pengadaan alat laboratorium dan sarana prasarana penunjang pengujian; edukasi pelaporan ESO ke sarana pelayanan Kesehatan; pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan dan pengujian; perjalanan koordinasi dalam kota dan luar kota; operasional laboratorium keliling; *food security*; perkuatan strategi dan pemantapan teknis pengawasan mutu obat beredar; perkuatan pengawasan iklan dan penandaan obat sesudah beredar; perkuatan pengawasan produk tembakau; pengawasan, sampling, dan evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik di sarana retail; dan pendampingan kabupaten kota pangan aman. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 103,80% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,05 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,05 dengan capaian TE **100% (Efisien)**. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran

kegiatan pertama adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,05) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

2) Pada Sasaran Kegiatan 2 **Meningkatnya efektivitas KIE**, anggaran yang direalisasikan telah melebihi rencana penarikan dana triwulan II. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ini sebesar Rp 119.311.000, sedangkan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II sasaran kegiatan ini yaitu Rp 108.519.000. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan program Keamanan Pangan Terpadu yaitu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Sedangkan capaian sasaran kegiatan (output) sebesar 100,17% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 0,91 dan Tingkat Efisiensi (TE) -0,09 dengan capaian **Tidak Efisien**. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah **tidak efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (0,91) lebih kecil dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih rendah dari capaian input. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, antara lain kunjungan sekolah ke Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang memerlukan penyediaan konsumsi peserta serta pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Publik yang didukung melalui anggaran kegiatan KIE, percepatan pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2025 sebagai bagian dari pembinaan keberlanjutan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, serta percepatan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawalan terhadap desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari pembinaan keberlanjutan Program Desa Pangan Aman.

3) Pada Sasaran Kegiatan 3 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 10.495.000 atau 97,75% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II sasaran kegiatan ini yaitu Rp 10.373.000. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM dan Bimtek IP CPPOB BBPOM di Pangkal Pinang. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 108,65% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,11 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,11 dengan capaian TE 100% (Efisien). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,11) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

4) Pada Sasaran Kegiatan 4 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 38.066.612 atau 98,38% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II Sasaran Kegiatan ini yaitu Rp 38.693.000. Anggaran ini digunakan untuk berbagai rangkaian kegiatan penindakan dalam upaya penegakan hukum. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 150,01% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,52 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,52 dengan capaian TE 92% (Efisien). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan keempat adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,52) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

5) Pada Sasaran Kegiatan 5 **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 4.482.000 atau 103,03% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II Sasaran Kegiatan ini yaitu Rp 4.350.000. Total anggaran selama setahun yang dialokasikan untuk sasaran kegiatan pada tahun 2026 sebesar Rp 5.230.000 yang digunakan untuk kegiatan Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber. Sedangkan capaian sasaran kegiatan (output) sebesar 103,03% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 0,97 dan Tingkat Efisiensi (TE) -0,03 dengan capaian **Tidak Efisien**. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah **tidak efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (0,97) lebih kecil dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih rendah dari capaian input. Kondisi tidak efisien ini secara administratif dikarenakan adanya kebutuhan operasional dalam proses penyelesaian kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada saat penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga realisasi anggaran sedikit melebihi target Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II.

6) Pada Sasaran Kegiatan 6 **Layanan Publik UPT yang Prima**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 510.000 atau 23,18% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II sasaran kegiatan ini yaitu Rp 2.200.000. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan belum dilaksanakannya kegiatan sertifikasi, yang dijadwalkan pada periode berikutnya sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan Anggaran ini digunakan

untuk kegiatan pelayanan publik dan audit sertifikasi. Capaian sasaran kegiatan (output) ini diperoleh pada akhir tahun sehingga belum bisa diukur tingkat efisiensinya.

7) Pada Sasaran Kegiatan 7 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 3.327.232.233 atau 101,68% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II sasaran kegiatan ini yaitu Rp 3.272.388.419. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan untuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pembinaan Kinerja oleh Deputi Pembina, pengelolaan limbah B3, simulasi K3, koordinasi lintas sektor, pembayaran gaji dan tunjangan, langganan daya dan jasa, administrasi kegiatan, pengelolaan sistem akuntansi instansi, pengadaan jasa tenaga outsourcing, operasional pelaporan, peningkatan kompetensi petugas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Capaian Sasaran Kegiatan (output) ini diperoleh pada akhir tahun sehingga belum bisa diukur tingkat efisiensinya.

Tabel 3.145 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output Triwulan II Tahun 2026

No	Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		%	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	103,03	**0,97**	**-0,03**	**Tidak Efisien**	
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	232,93	23,18	**10,05**	**9,05**	**75% (Tidak Efisien)**	
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	135,65	**0,74**	**-0,26**	**Tidak Efisien**	
4	Desa Pangan Aman	100,00	123,06	**0,81**	**-0,19**	**Tidak Efisien**	
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100,00	92,07	**1,09**	**0,09**	**100% (Efisien)**	
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	103,18	110,95	**0,93**	**-0,07**	**Tidak Efisien**	
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	100,00	78,22	**1,28**	**0,28**	**95% (Efisien)**	
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	125,00	131,83	**0,95**	**-0,05**	**Tidak Efisien**	
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	106,82	**0,94**	**-0,06**	**Tidak Efisien**	
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	107,37	119,70	**0,90**	**-0,10**	**Tidak Efisien**	

No	Kegiatan	Output %	Input %	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
11	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	45,00	98,38	**0,46**	**-0,54**	**Tidak Efisien**	
12	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	100,00	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**	
13	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	180,00	97,75	**1,84**	**0,84**	**88% (Efisien)**	
14	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	103,13	86,62	**1,19**	**0,19**	**100% (Efisien)**	
15	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	104,06	34,05	**3,06**	**2,06**	**75% (Tidak Efisien)**	
16	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	144,95	**0,69**	**-0,31**	**Tidak Efisien**	
17	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	102,33	99,65	**1,03**	**0,03**	**100% (Efisien)**	
18	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,00	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**	
19	Layanan BMN	100,00	-	-	-	-	**Tidak dapat dihitung TE nya**
20	Layanan Perkantoran	100,00	101,65	**0,98**	**-0,02**	**Tidak Efisien**	
	TOTAL	110,68	100,52	1,10	0,10	100% (Efisien)	

Pada tahun 2026, Balai Besar POM di Pangkal Pinang melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan utama atau Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 7 Sasaran Kegiatan. Dari 20 Rincian Output (RO), 19 RO dapat dihitung tingkat efisiensinya, sedangkan 1 RO lainnya tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya yaitu RO Layanan BMN. RO Layanan BMN belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum ada capaian input (anggaran) sampai dengan Triwulan II ini. Anggaran RO Layanan BMN rencana akan direalisasikan pada Bulan November 2026.

Dilihat dari data tabel di atas, 19 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya diperoleh nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,10 dengan capaian **TE 100% (Efisien)**. Hal ini dikarenakan nilai Indeks Efisiensi (1,10) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan persentase capaian output yang lebih tinggi dari persentase capaian input. Beberapa upaya yang telah

dilakukan untuk memperoleh efisiensi dalam penggunaan sumber daya sampai dengan triwulan II antara lain:

1. Monitoring realisasi anggaran dan RPD (Rencana Penarikan Dana) sampai dengan triwulan II
2. Melakukan revisi anggaran dan revisi kegiatan sesuai dengan prioritas dan pagu anggaran yang ada
3. Melakukan revisi halaman III DIPA sampai dengan Triwulan II
4. Mereviu kembali target output tahunan sesuai dengan pagu anggaran 2026 dan mengajukan revisi target output melalui revisi kewenangan DJA.
5. Melakukan revisi target bulanan Rincian Output pada triwulan II
6. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Rincian Output (RO) Bulan Januari Juni 2026

Namun Balai Besar POM di Pangkal Pinang tetap terus mempertahankan efisiensi hingga akhir tahun. Beberapa upaya yang terus dilakukan Balai Besar POM di Pangkal Pinang untuk mencapai efisiensi di tahun 2026 yaitu:

1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dan melakukan revisi kegiatan, serta melakukan optimalisasi anggaran.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Rincian Output (RO) setiap bulannya pada rapat evaluasi bulanan untuk memantau progres capaian Rincian Output.
3. Melakukan revisi halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana) setiap triwulan.
4. Melakukan revisi anggaran baik kewenangan KPA, Kanwil maupun DJA untuk pergeseran anggaran dalam rangka mencapai target RO dengan anggaran yang tersedia.
5. Melakukan revisi target bulanan Rincian Output setiap triwulan pada aplikasi sakti.

BAB IV

PENUTUP





BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara garis besar, dalam perhitungan NKO Balai Besar POM di Pangkal Pinang dinilai dari 7 Sasaran Kegiatan dan 27 Indikator kinerja yang ditetapkan. Berikut hasil pengukuran NKO pada Triwulan II Tahun 2026:

1. **11 (sebelas) indikator yang capaiannya Sangat Baik**, yaitu: 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, 5. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 6. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 7. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai kketentua, 8. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, 9. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, 10. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dan 11. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
2. **6 (enam) indikator yang capaiannya Baik**, yaitu: 1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, 2. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, 4. Jumlah desa pangan aman, 5. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dan 6. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
3. **2 (dua) indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan**, yaitu: 1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi

sesuai standar, dan 2. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

Berdasarkan **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026, terdapat 2 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% karena capaiannya melebihi 110% yaitu indikator **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar** dan **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026 sebesar **102,93%** dengan predikat **Istimewa**.

Sampai dengan Triwulan II, tidak terdapat Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Pangkal Pinang yang tidak mencapai target. Tapi dalam pelaksanaan kegiatannya, masih terdapat kendala yang dihadapi Balai Besar POM di Pangkal Pinang, yang menyebabkan dua indikator yang melebihi dari 110% yaitu pada IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Pada IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, capaian indikator yang melampaui target merupakan hasil dari optimalisasi pemenuhan target output kegiatan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja indikator.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik difokuskan pada penguatan strategi dan efektivitas kegiatan pengawasan. Ke depan, Balai Besar POM di Pangkal Pinang perlu melakukan perencanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan sebaran produk di wilayah pengawasan agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas akan

terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala, khususnya terkait dengan ketentuan terbaru mengenai pelabelan produk tembakau dan rokok elektronik.

Pada IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, Presentasi keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 38,33 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 57,50, sehingga capaian indikator ini melebihi dari 110%. Upaya yang akan dilakukan terhadap capaian indikator ini akan melakukan pengusulan revisi target RAPK.

4.2 SARAN

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang.

1. Merencanakan pelaksanaan sampling obat kategori JKN 1-3 bulan kedepan dengan target yang lebih banyak pada Kab. Bangka Tengah / Kab. Bangka Selatan
2. Melakukan pemetaan merk kosmetik bentuk sediaan Lip Color dengan bobot sampel yang cukup besar dan melakukan pendataan lebih banyak target sarana sampling kosmetik sebagai cadangan tempat sampling apabila sampel sulit ditemukan.
3. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap 2 sarana per bulan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso Badan POM
4. Melakukan follow up dan audiensi saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juli
5. Berkomunikasi dengan dinas kesehatan / pemilik sampel DAK agar dilakukan pembagian jadwal pengiriman sampel ke laboratorium
6. Menyusun rencana koordinasi penanganan kasus keracunan pangan
7. Melakukan pemantauan berkala terhadap informasi adanya KLB keracunan pangan
8. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP
9. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA
10. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap pelaku usaha dan lintas sektor yang belum memberikan tanggapan

11. Melakukan monitoring data produk tembakau yang telah dientry di SIPT dan perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan
12. Melakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi capaian indikator apablila dilakukan penyesuaian label tembakau yang dilaporkan sehingga capaian tidak melebihi 110 %
13. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026
14. Berkoordinasi dengan PIC DAK Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan terkait jadwal pelaksanaan Bimtek Saryanfar yang akan disisipkan materi AMR di dalamnya
15. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Infokom mengenai penyisipan materi AMR pada KIE selanjutnya
16. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
17. Melaksanakan pendampingan teknis lanjutan kepada PIC Kabupaten/Kota dalam proses pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
18. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pengisian tools dan kelengkapan data dukung pada masing-masing Kabupaten/Kota.
19. Menyampaikan hasil monitoring kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi dan percepatan pemenuhan target indikator Program Kabupaten/Kota Pangan Aman
20. Melaksanakan kegiatan Pengawalan terhadap Pasar yang telah diintervensi pada tahun 2025 sebagai upaya pemantauan keberlanjutan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
21. UMKM Pangan : Melanjutkan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan dan follow up akun oss yang akan dilakukan pendaftaran e sertifikasi

22. UMKM OBA: Melaksanakan Bimtek bagi pelaku usaha jika telah terdapat penanggung jawab teknis.
23. Melakukan exercise perhitungan ulang target RAPK untuk dilakukan revisi
24. Pengusulan revisi target RAPK di bulan Juli untuk IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
25. Menyusun RPD Triwulan III dengan pendekatan target serapan anggaran triwulan III
26. Melakukan revisi target output tw II
27. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan oleh masing-masing penanggungjawab output
28. Melakukan reviu atas RTP semester 1 tahun 2026 serta Menyusun daftar risiko Semester 2 tahun 2026 dan menyampaikan pada aplikasi SAPAAPIP sebelum 20 Juli 2026

LAMPIRAN





Lampiran 1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Januari	14,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Februari	59,00	98,75	100,00	100,00	100,00	100,00
Maret	96,00	98,75	100,00	100,00	100,00	100,00
April	147,00	98,76	100,00	100,00	100,00	100,00
Mei	208,00	98,75	100,00	100,00	100,00	100,00
Juni	282,00	98,75	100,00	100,00	100,00	100,00

Obat

Bulan	Jumlah sampel yang disampling	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A1	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	A2	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A3
Januari	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00
Februari	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00
Maret	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00
April	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	100,00
Mei	57,00	56,00	100,00	57,00	56,00	100,00	57,00	56,00	100,00
Juni	74,00	73,00	100,00	74,00	73,00	100,00	74,00	73,00	100,00

Bulan	A Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)	Jumlah sampel yang sesuai Renlak waktu	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	B1	Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan	jumlah target sampel untuk dievaluasi penandaan sampai dengan periode yang	B2	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan *(UPT yang melakukan*	jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud *(UPT yang melakukan*	C1
Januari	30,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	20,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	30,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	20,00	17,00	17,00	100,00
Maret	30,00	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00
April	30,00	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	100,00	20,00	36,00	36,00	100,00
Mei	30,00	57,00	56,00	100,00	57,00	56,00	100,00	20,00	38,00	38,00	100,00
Juni	30,00	74,00	73,00	100,00	74,00	73,00	100,00	20,00	73,00	73,00	100,00

Bulan	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)	Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D1	Jumlah sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud 2	D2	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20	jumlah laporan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan	jumlah laporan yang harus dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	E1	E Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%)	% Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6,00	6,00	100,00	10,00	#DIV/0!
Februari	20,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	20,00	6,00	6,00	100,00	10,00	100,00
Maret	20,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	20,00	7,00	7,00	100,00	10,00	100,00
April	20,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	20,00	8,00	8,00	100,00	10,00	100,00
Mei	20,00	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	100,00	20,00	15,00	15,00	100,00	10,00	100,00
Juni	20,00	57,00	57,00	100,00	57,00	57,00	100,00	20,00	57,00	57,00	100,00	10,00	100,00

Obat Bahan Alam

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling *(UPT yang melakukan pengujian)*	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya *(UPT yang melakukan pengujian)*	A2
Januari	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	15,00	15,00	100,00	12,00	12,00	100,00
Maret	22,00	22,00	100,00	19,00	19,00	100,00
April	37,00	37,00	100,00	31,00	31,00	100,00
Mei	51,00	51,00	100,00	45,00	45,00	100,00
Juni	66,00	66,00	100,00	58,00	58,00	100,00

Bulan	A % Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	B Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	C Kesesuaian parameter uji
Januari	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	100,00
Maret	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00
April	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00
Mei	100,00	36,00	36,00	100,00	36,00	36,00	100,00
Juni	100,00	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	100,00

Bulan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	D Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	2,00	2,00	100,00	#DIV/0!
Februari	12,00	12,00	100,00	5,00	5,00	100,00	100,00
Maret	15,00	15,00	100,00	6,00	6,00	100,00	100,00
April	25,00	25,00	100,00	8,00	8,00	100,00	100,00
Mei	36,00	36,00	100,00	9,00	9,00	100,00	100,00
Juni	49,00	49,00	100,00	10,00	10,00	100,00	100,00

Suplemen Kesehatan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling *(UPT yang melakukan pengujian)*	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya *(UPT yang melakukan pengujian)*	A2	A % Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	B Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
Januari	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00	1,00	1,00	100,00
Februari	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00	1,00	1,00	100,00
Maret	3,00	3,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00	2,00	2,00	100,00
April	6,00	6,00	100,00	10,00	10,00	100,00	100,00	6,00	6,00	100,00
Mei	15,00	9,00	100,00	10,00	10,00	100,00	100,00	6,00	6,00	100,00
Juni	19,00	14,00	100,00	20,00	20,00	100,00	100,00	15,00	15,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	C Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	D Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	2,00	2,00	100,00	#DIV/0!
Februari	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Maret	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
April	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Mei	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Juni	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00

Kosmetik

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling *(UPT yang melakukan pengujian)*	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya *(UPT yang melakukan pengujian)*	A2	A % Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diperiksa pada periode yang dimaksud	B Kesesuaian pelaksanaan sampling
Januari	4,00	4,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00	4,00	4,00	100,00
Februari	27,00	27,00	100,00	32,00	32,00	100,00	100,00	27,00	27,00	100,00
Maret	44,00	44,00	100,00	52,00	52,00	100,00	100,00	44,00	44,00	100,00
April	66,00	66,00	100,00	62,00	62,00	100,00	100,00	66,00	66,00	100,00
Mei	95,00	92,00	100,00	78,00	78,00	100,00	100,00	95,00	92,00	100,00
Juni	123,00	120,00	100,00	111,00	111,00	100,00	100,00	123,00	120,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	C Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai	Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	D Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	5,00	5,00	100,00	#DIV/0!
Februari	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00	7,00	7,00	100,00	100,00
Maret	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	100,00	8,00	8,00	100,00	100,00
April	53,00	53,00	100,00	53,00	53,00	100,00	11,00	11,00	100,00	100,00
Mei	95,00	92,00	100,00	95,00	92,00	100,00	13,00	13,00	100,00	100,00
Juni	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	100,00	14,00	14,00	100,00	100,00

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	0	0,00	#DIV/0!	-	1. Menetapkan 45 Sarana target KIE Farmakovigilans 2. Mempersiapkan pelaksanaan KIE Farmakovigilans
Februari	-	0	45	0	Kendala : Setelah pelaksanaan KIE Farmakovigilans, masih terdapat Tenaga Kesehatan / Tenaga Medis yang belum melakukan pendaftaran akun e-meso sarananya	1. Membantu pembuatan akun e-meso sarana yang belum melakukan pendaftaran 2. Membatasi jumlah akun yang difasilitasi pembuatannya sebagai strategi untuk mencapai IKU yang diharapkan
Maret	-	0	45	0	Kendala : Sarana lupa mengenai teknis pelaporan menggunakan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan April 2. Memberikan link materi yang berisi materi dan buku saku petunjuk pelaporan KTD/ESO melalui e-meso
April	-	2	45	4,44	Kendala : Sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan dan lupa mengenai teknis pelaporan menggunakan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Mei 2. Melakukan follow up sarana target dan memberikan link materi yang berisi materi dan buku saku petunjuk pelaporan KTD/ESO melalui e-meso
Mei	-	3	45	6,67	Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juni 2. Melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
					sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar	
Juni	-	6	45	13,33	Dari 45 sarana yang telah dilakukan bimtek, terdapat 6 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO hingga bulan Juni yaitu PKM Pasir Putih, PKM Kacang Pedang, PKM Air Itam, RS Umum Bakti Timah Muntok, RS Umum Daerah Kriopanting Payung dan PKM Payung. Realisasi hingga bulan Juni yaitu 13.33% Kendala : 1. PIC sarana ragu dalam memilih kasus yang akan dilaporkan 2. Terdapat update tampilan webste e-meso yang menyebabkan PIC Sarana bingung mengenai teknis terbaru penginputan laporan dan harus melakukan update password meskipun sebelumnya telah memiliki akun yang terdaftar 3. Adanya interfensi dari dokter yang tidak mengizinkan pelaporan KTD / ESO dikarenakan perbedaan persepsi mengenai jenis KTD / ESO yang dapat dilaporkan	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan Juli 2. Agar melakukan follow up sarana target mengenai kendala dalam pelaporan KTD/ESO 3. Agar melakukan audiensi ke dokter di puskesmas dan rumah sakit yang terdeteksi mempunyai perbedaan persepsi mengenai KTD / ESO

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	12,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Februari	29,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maret	29,00	98,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
April	30,00	98,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mei	63,00	98,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Juni	82,00	98,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2A. Kesesuaian Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling *(UPT yang melakukan pengujian)*	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya *(UPT yang melakukan pengujian)*	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
Januari	12,00	12,00	100,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00	37,00	37,00	100,00	100,00
Maret	30,00	29,00	100,00	39,00	39,00	100,00	100,00
April	40,00	40,00	100,00	51,00	51,00	100,00	100,00
Mei	63,00	63,00	100,00	81,00	81,00	100,00	100,00
Juni	82,00	82,00	100,00	106,00	106,00	100,00	100,00

2B. Kesesuaian Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	30,00	30,00	100,00
April	40,00	40,00	100,00
Mei	63,00	63,00	100,00
Juni	82,00	82,00	100,00

2C. Ketepatan Pengam. Keputusan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	30,00	30,00	100,00
April	40,00	40,00	100,00
Mei	63,00	63,00	100,00
Juni	82,00	82,00	100,00

2D. Ketepatan Waktu Pengambilan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	30,00	30,00	100,00
April	40,00	40,00	100,00
Mei	63,00	63,00	100,00
Juni	82,00	82,00	100,00

2E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	30,00	30,00	100,00
April	40,00	40,00	100,00
Mei	63,00	63,00	100,00
Juni	82,00	82,00	100,00

2F. Tindak Lanjut sesuai Pedoma

Bulan	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (%)
Januari			#DIV/0!
Februari	2,00	2,00	100,00
Maret	2,00	2,00	100,00
April	3,00	3,00	100,00
Mei	3,00	3,00	100,00
Juni	7,00	7,00	100,00

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	100	0	Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan	Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan
Februari	100	0	Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan	Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan
Maret	100	100	Keterbatasan informasi kronologi kejadian keracunan pangan	-Meningkatkan koordinasi antar fungsi dalam penanganan keracunan pangan dengan -mengusulkan pembentukan TGC dengan melibatkan seluruh fungsi yang terkait -Melakukan koordinasi dengan pihak terkait -Melakukan pelaporan pada SPIMKER KLB KP -Usulan untuk pembentukan TGC KLB KP
April	100	100	Kendala : Tidak terdapat laporan/dokumen kronologi kejadian dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga pelaporan pada SPIMKER perlu perbaikan	Agar dilakukan koordinasi dan pemantauan dengan TGC UPT
Mei	100	100	Kendala : Laboratorium hanya menerima sampel tanpa penjelasan kronologi dari pengirim sampel dan tidak ada kaji ulang permintaan pengujian yang sesuai dengan identifikasi epidemiologi. Laboratorium harus mengulang pengujian dengan berbagai parameter karena permintaan uji yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan penggunaan reagen dan media yang tidak efisien dan waktu pengujian yang lama. Kurangnya pemahaman mengenai penanganan sampel KLB KP.	1. Forum koordinasi dengan linsek terkait KLB 2. Agar dilakukan koordinasi dengan pengirim sampel dan pengembangan kompetensi penanganan sampel KLB KP
Juni	100	100	Tidak terdapat kendala pada bulan Juni 2026	Agar dilakukan pemantauan berita KLB KP

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,33
April	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Juni	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3A. Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling* *Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan Renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling** Cat: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Sampel PIRT
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	14,00	15,00	93,33	18,00	18,00	100,00	96,67
April	15,00	15,00	100,00	19,00	19,00	100,00	100,00
Mei	15,00	15,00	100,00	19,00	19,00	100,00	100,00
Juni	15,00	15,00	100,00	19,00	19,00	100,00	100,00

3B. Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel sesuai parameter uji	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	14,00	14,00	100,00
April	15,00	15,00	100,00
Mei	15,00	15,00	100,00
Juni	15,00	15,00	100,00

3C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	14,00	14,00	100,00
April	15,00	15,00	100,00
Mei	15,00	15,00	100,00
Juni	15,00	15,00	100,00

3D. Ketepatan Waktu Sampling

Bulan	Jumlah sampel yang dilakukan sampling dan pengujian s.d TW 2	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	14,00	14,00	100,00
April	15,00	15,00	100,00
Mei	15,00	15,00	100,00
Juni	15,00	15,00	100,00

3E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel tepat waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pelaporan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	14,00	14,00	100,00
April	15,00	15,00	100,00
Mei	15,00	15,00	100,00
Juni	15,00	15,00	100,00

3F. Tindak Lanjut

Bulan	Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	3,00	3,00	100,00
April	3,00	3,00	100,00
Mei	3,00	3,00	100,00
Juni	3,00	3,00	100,00

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari	85,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Februari	85,00	81,40	0,00	40,70
Maret	85,00	88,06	0,00	44,03
April	85,00	87,23	53,33	70,28
Mei	85,00	91,82	78,95	85,38
Juni	85,00	88,46	85,00	86,73

6A. Pelaku Usaha

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Januari	15,00	15,00	100,00
Februari	35,00	43,00	81,40
Maret	59,00	67,00	88,06
April	82,00	94,00	87,23
Mei	101,00	110,00	91,82
Juni	115,00	130,00	88,46

6B. Lintas Sektor

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	1,00	0,00
Maret	0,00	3,00	0,00
April	8,00	15,00	53,33
Mei	15,00	19,00	78,95
Juni	17,00	20,00	85,00

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Maret	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
April	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Mei	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Juni	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00

Sarana Produksi Obat

Bulan	Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan	Jumlah sasaran dan cakupan target renlak	A. % Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan sesuai renlak	Jumlah target sesuai renlak	B. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah inspeksi dengan tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C1. % Ketepatan penetapan tindak lanjut
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!

Bulan	Jumlah inspeksi dengan waktu penyampaian tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 2	C2. % Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut	Jumlah inspeksi dengan penulisan laporan sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 3	C3. % Kesesuaian format laporan inspeksi	Jumlah laporan yang disampaikan melalui SIPT	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 4	C4. % Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!

Bulan	Jumlah inspeksi dengan kesesuaian keseluruhan cakupan CPOB	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 5	C5. % Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi	Jumlah inspeksi dengan penulisan PLOR yang tepat	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 6	C6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	% Sarprod Obat
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Sarana Produksi OBA

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod OBA
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Maret	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
April	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Mei	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Juni	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Sarana Produksi OBA SK

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!

Bulan	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan	Jumlah seluruh tindak lanjut	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas	% Sarprod SK
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Sarana Produksi Kosmetik

Bulan	Target Sarana	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
Januari	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
April	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!

Bulan	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan	% Sarprod Kosmetik
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	94,25	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
Februari	94,25	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Maret	94,25	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
April	94,25	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	100,00
Mei	94,25	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	100,00
Juni	94,25	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00	100,00

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	Sardis Kosme	% Sardis
Januari	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Februari	3,00	95,00	100,00	#DIV/0!	100,00	98,33
Maret	3,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00
April		95,16	100,00	100,00	97,92	98,27
Mei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Juni		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

9A. % Sardis Obat

Bulan	Jumlah **total fasilitas** yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, **yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT** setiap bulan pada tahun berjalan	Jumlah **total fasilitas** yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat **yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan** melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan	% pemenuhan target pemeriksaan	A: Jumlah total **tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas** yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, **yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*)**, pada periode bulan berjalan	B. Jumlah **total usulan tindak lanjut** hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total usulan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat dari tim inspeksi, **yang dinyatakan sesuai** dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan	C. Jumlah **total fasilitas** yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, **yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT** setiap bulan pada tahun berjalan	% kesesuaian tindaklanjut	% Sardis Obat
Januari	3	3	100,00	3	3	3,00	100,00	100,00
Februari	9	10	90,00	9	9	9,00	100,00	95,00
Maret	16	16	100,00	16	16	16,00	100,00	100,00
April	28	31	90,32	28	28	28,00	100,00	95,16
Mei	38	38	100,00	38	38	38,00	100,00	100,00
Juni	47	47	100,00	47	47	47,00	100,00	100,00

9B. % Sardis OBA

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis OBA
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
Maret	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
April	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	100,00
Mei	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
Juni	8	8	100,00	8	8	100,00	8	8	100,00	8	8	100,00	100,00

9C. % Sardis SK

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil	% Sardis SK
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
April	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
Mei	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
Juni	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00

9D. % Sardis KOS

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	% Pelaksanaan Inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0
Februari	4	4	100	4	4	100	4	4
Maret	8	8	100	8	8	100	8	8
April	11	12	92	11	11	100	11	11
Mei	13	13	100	13	13	100	13	13
Juni	16	16	100	16	16	100	16	16

Bulan	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil	% Sardis Kos
Januari	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	100,00	4	4	100,00	100,00
Maret	100,00	8	8	100,00	100,00
April	100,00	11	11	100,00	97,92
Mei	100,00	13	13	100,00	100,00
Juni	100,00	16	16	100,00	100,00

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa 2	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)
Januari	93,25	12	12	20,00	11	12	64,17
Februari	93,25	26	26	20,00	25	26	67,31
Maret	93,25	42	42	20,00	41	42	68,33
April	93,25	49	50	19,60	48	49	68,57
Mei	93,25	55	52	20,00	54	55	68,73
Juni	93,25	60	57	20,00	59	60	68,83

Bulan	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa 3	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	12	12	10,00	94,17
Februari	26	26	10,00	97,31
Maret	42	42	10,00	98,33
April	49	49	10,00	98,17
Mei	55	55	10,00	98,73
Juni	60	60	10,00	98,83

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari		#DIV/0!	100,00	66,67	66,67	94,00	81,83
Februari		100,00	100,00	86,67	80,00	94,50	92,23
Maret		100,00	95,83	90,48	85,71	94,67	93,34
April		100,00	96,88	92,98	88,89	94,75	94,70
Mei		100,00	97,50	94,20	91,67	94,80	95,63
Juni		100,00	97,92	95,24	92,86	95,00	96,20

11A. % Iklan Obat

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak 2	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
Maret	12	12	100,00	12	12	100,00	100,00
April	18	18	100,00	18	18	100,00	100,00
Mei	24	24	100,00	24	24	100,00	100,00
Juni	30	30	100,00	30	30	100,00	100,00

11B. % Iklan Kos

Bulan	Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online
Januari	1	1	100,00	1	1	100,00	15	15	100,00
Februari	2	2	100,00	2	2	100,00	30	30	100,00
Maret	3	3	100,00	2	3	66,67	45	45	100,00
April	3	4	75,00	4	4	100,00	60	60	100,00
Mei	4	5	80,00	5	5	100,00	85	75	100,00
Juni	5	6	83,33	6	6	100,00	98	90	100,00

Bulan	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai	Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang	Jumlah iklan yang dievaluasi 2	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Ketepatan Waktu Pelaporan	% Iklan Kos
Januari	3	3	100,00	100,00	20	20	100,00	20	20	100,00	100,00	100,00
Februari	6	6	100,00	100,00	40	40	100,00	40	40	100,00	100,00	100,00
Maret	10	9	100,00	91,67	60	60	100,00	60	60	100,00	100,00	95,83
April	13	12	100,00	93,75	80	80	100,00	80	80	100,00	100,00	96,88
Mei	15	15	100,00	95,00	109	109	100,00	109	109	100,00	100,00	97,50
Juni	20	18	100,00	95,83	129	129	100,00	129	129	100,00	100,00	97,92

11C. % Iklan OBA OK

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi 2	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA
Januari	4	4	100,00	0	4	0,00	4	4	100,00	66,67
Februari	10	10	100,00	6	10	60,00	10	10	100,00	86,67
Maret	14	14	100,00	10	14	71,43	14	14	100,00	90,48
April	19	19	100,00	15	19	78,95	19	19	100,00	92,98
Mei	23	23	100,00	19	23	82,61	23	23	100,00	94,20
Juni	28	28	100,00	24	28	85,71	28	28	100,00	95,24

11D. % Iklan SK

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang	Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan
Januari	3	3	100,00	0	3	0,00	3	3	100,00	66,67
Februari	5	5	100,00	2	5	40,00	5	5	100,00	80,00
Maret	7	7	100,00	4	7	57,14	7	7	100,00	85,71
April	9	9	100,00	6	9	66,67	9	9	100,00	88,89
Mei	12	12	100,00	9	12	75,00	12	12	100,00	91,67
Juni	14	14	100,00	11	14	78,57	14	14	100,00	92,86

11E. % Iklan PO

Bulan	Target iklan yang diawasi sesuai renlak	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan (40%)	Target Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak)	Realisasi Media Cetak	Target Media Online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online)	Realisasi Media Online
Januari	10	10	1	40,00	1	4	100,00%	5	4	80,00%
Februari	20	20	1	40,00	2	5	100,00%	10	9	90,00%
Maret	30	30	1	40,00	3	10	100,00%	15	14	93,33%
April	40	40	1	40,00	4	13	100,00%	20	19	95,00%
Mei	50	50	1	40,00	5	13	100,00%	25	24	96,00%
Juni	60	60	1	40,00	6	13	100,00%	30	32	100,00%

Bulan	Target Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran)	Realisasi Media Penyiaran	Target Media Luar Ruang	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang)	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan (20%)	Jumlah Iklan yang telah Dilaporkan ke Pusat	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan (40%)	% Iklan PO
Januari	2	0	0,00%	2	2	100,00%	14,00	10	10	40,00	94,00
Februari	4	0	0,00%	4	6	100,00%	14,50	20	20	40,00	94,50
Maret	6	0	0,00%	6	6	100,00%	14,67	30	30	40,00	94,67
April	8	0	0,00%	8	8	100,00%	14,75	40	40	40,00	94,75
Mei	10	0	0,00%	10	13	100,00%	14,80	50	50	40,00	94,80
Juni	12	0	0,00%	12	15	100,00%	15,00	60	60	40,00	95,00

12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-	-	Lakukan perubahan target sesuai perencanaan yang telah disusun.
Februari	-	-	-	Lakukan monitoring pengisian tools SKL sesuai arahan PPPOMN.
Maret	78,2	78,2	-	Lakukan perhitungan perencanaan untuk TW 2 untuk melihat apakah dengan penurunan capaian karena perubahan standar peralatan. target TW 2 masih bisa tercapai.
April	78,2	78,2	- SRL : 2 MA peningkatan SRL di Lab Kosmetik (termasuk juga bagian dari komponen SKL Verif MA) belum terlaksana karena laboratorium masih menyelesaikan pelaporan sampel dengan ketentuan terbaru dari PPPOMN. Peningkatan SRL direncanakan kembali di bulan Mei-Juni 2026 dengan pelaporan sebagai realisasi SKL TW 2.	Memastikan pelaksanaan pemenuhan SKL dilaksanakan sesuai rencana.
Mei	78,2	78,2	Pengisian kertas kerja monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL bulan Mei masih belum optimal, terutama di Lab Kos dan OTOKSK.	1. Pengisian kertas kerja monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL agar lebih dioptimalkan dan seluruh laporan dilaporkan tepat waktu. 2. Lakukan monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2 secara tepat waktu.
Juni	78,4	78,5	1. Pelaporan verifikasi peralatan di bulan Mei telah difollow up. 2. Monitoring dan evaluasi pengisian tools SKL TW 2 telah dilakukan dengan realisasi IKU sebesar 78,5 atau 100,2% (hasil laporan PPPOMN) dengan rincian : penambahan 2 SRL di Lab Kos, 1 MA Terverifikasi di Lab Obat dan 3 MA Terverifikasi di Lab Kos. 3. Hasil monitoring rencana aksi SKL bulan Juni : - peningkatan 3 PU kompetensi di Lab Kosmetik belum terlaksana dengan justifikasi : sampel yang	Ketepatan waktu pelaporan rencana aksi SKL agar lebih dioptimalkan lagi.

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			dibutuhkan untuk pengujian 2 PU kompetensi adalah sampel bulan Juni dan pengujian baru dijadwalkan minggu I bulan Juli karena banyaknya PUK yang harus diuji, sementara 1 PU lainnya masih menunggu sampel masuk/ dibeli (Lab Kosmetik : Agar perencanaan lebih dioptimalkan). 4. Ada peningkatan ketepatan waktu pelaporan rencana aksi SKL setiap bulannya.	

13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-	-	Segera menyusun perencanaan Kegiatan KIE
Februari	-	-	Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT masih terkendala belum pastinya jumlah target output sasaran serta keterbatasan anggaran. Kondisi ini menyebabkan cakupan sasaran menjadi terbatas dan pemilihan target KIE belum dapat dilakukan secara optimal.	1. Menetapkan target output KIE sasaran secara jelas dengan mengkoordinasikan ke Biro Perencanaan dan Unit Pengampu, 2. Melakukan prioritisasi KIE berbasis risiko serta, 3. Mengoptimalkan metode KIE yang efisien sesuai ketersediaan anggaran.
Maret	86,85	88,79	Belum ditetapkannya jumlah target KIE menjadi kendala utama dalam perencanaan, karena menyebabkan belum dapat dipastikan kebutuhan sumber daya dalam menyapai target	Melaksanakan KIE Obat dan Makanan sesuai dengan targte perencanaan yang sudah ditetapkan
April	86,85	87,66	Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran tanpa ada kendala	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE
Mei	86,85	87,36	Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran tanpa ada kendala	Melaksanakan Kegiatan KIE lanjutan kepada sasaran yang berbeda di Kabupaten Bangka Tengah serta melakukan survei evaluasi berkelanjutan terhadap efektifitas pelaksanaan KIE.
Juni	86,85	87,43	Telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 63 orang siswa SMA Negeri 1 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah serta dilakukan survei tingkat efektivitas KIE. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE berjalan dengan baik dan telah mencapai target sasaran.	Perlu dilakukan KIE kepada sasaran dan kabupaten yang berbeda sehingga lebih variatif peserta kegiatan KIE

14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-	Belum terdapat kendala selama perencanaan bulan Januari	Melakukan perencanaan pelaksanaan setiap butir kegiatan yang menunjang IKU AMR
Februari	-	-	Belum terdapat kendala selama perencanaan bulan Februari	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Bimtek AMR dan Join Inspection ke Dinas Kesehatan Kabupaten yang menjadi target
Maret	-	-	Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Gubernur tentang Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
April	-	-	Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur, Bupati Kab. Bangka dan Bupati Kab. Bangka Tengah terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
Mei	-	-	Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up (mengirimkan surat resmi) ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter
Juni	-	-	Merupakan target tahunan. Telah dilakukan pelaporan Monev AMR TW II pada 2 Juli 2026 1. Hingga bulan Juni telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 19 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Juni, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan dana DAK	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter (Bersurat secara resmi)

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026. Disisipkan pada Materi KIE Tim Kerja Infokom dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya" Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	

15. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi
Januari		5,00				5,00
Februari	12	10,00				10,00
Maret	35	15,00	10,00	10,00		35,00
April	55	25,00	15,00	15,00		55,00
Mei	75	25,00	25,00	25,00		75,00
Juni	85	25,00	25,00	25,00	10,00	85,00

16. Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Realisasi
Januari						0,00
Februari	10	10,00				10,00
Maret	30	15,00	15,00			30,00
April	40	25,00	15,00			40,00
Mei	50	25,00	15,00	10,00		50,00
Juni	60	25,00	15,00	15,00		55,00

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi
Januari	5	5,00				5,00
Februari	12	10,00				10,00
Maret	29	15,00	5,00	5,00		25,00
April	51	25,00	10,00	10,00		45,00
Mei	68	25,00	15,00	15,00	5,00	60,00
Juni	94	25,00	25,00	25,00	15,00	90,00

18. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
Januari	2,5	40,00	0,00	0,00	4,44	9
Februari	2,7	43,20	0,00	0,00	4,80	9
Maret	12,9	102,40	10,00	0,00	12,49	9
April	41,23	241,60	10,00	0,00	50,32	5
Mei	52,05	276,60	20,00	0,00	59,32	5
Juni	62,88	321,60	20,00	0,00	68,32	5

18A. UMKM Pangan Olahan

Bulan	Target	Pengumpulan Data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan (Jan-Maret) Bobot 5%	Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PO Target (Jan-Maret) Bobot 10%	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Pendampingan CPPOB dalam hal Penyiapan Sarana Prasarana sesuai IP CPPOB (Feb-Des) 15%	Pendampingan penyusunan dokumen (Feb-Des) 15%	Coaching esertifikasi/akun (Okt- Nov) 15%	Terbit IP CPPOB (April-Des) 5%	Pelaksanaan Pendampingan UMK PO (Feb-Des) Bobot 50%	Pelaporan (Feb-Des) Bobot 5%	Progress	Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB Tahun Berjalan
Januari	5	40,00							0,00		40,00	8
Februari	5,4	40,00							0,00	3,2	43,20	8
Maret	15,8	40,00	60,00						0,00	2,4	102,40	8
April	52,45	20,00	40,00	120,00	60,00				60,00	1,6	241,60	
Mei	59,1	20,00	40,00	120,00	60,00	15,00	15,00	5,00	95,00	1,6	276,60	1
Juni	65,75	20,00	40,00	120,00	60,00	45,00	30,00	5,00	140,00	1,6	321,60	

18B. UMKM OBA

Bulan	Target	Penetapan target UMKM obat tradisional (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (Maret - April)	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (April - Okt)	Sertifikasi (Sept - Des) Bobot 20%	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sept - Des) Bobot 10%	Progress
Januari	0	0,00					0,00
Februari	0	0,00					0,00
Maret	10	10,00	0,00				10,00
April	30	10,00	0,00				10,00
Mei	45	10,00	0,00	10,00			20,00
Juni	60	10,00	0,00	10,00	0,00		20,00

18C. UMKM KOS

Bulan	Target	Penetapan target UMKM Kosmetik (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (Maret - April)	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sept - Des) Bobot 20%	Monev dan Pelaporan (Sept - Des) Bobot 10%	Progress
Januari		0,00					0,00
Februari		0,00					0,00
Maret		0,00					0,00
April		0,00	0,00				0,00
Mei		0,00	0,00				0,00
Juni		0,00	0,00	0,00			0,00

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II
Januari		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Februari		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Maret		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
April		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Mei		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Juni		1	1	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	1	1

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	50	50,00%	-	Melaporkan Laporan Penjejakan Digital dan Kerawanan Kejahatan secara tepat waktu
Februari	50	50,00%	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang lintas fungsi belum dilakukan secara komprehensif 2. Anggaran AEA yang sangat terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan	1. Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform 2. Perlu dibuatkan tools dalam rangka monitoring TL Rekomendasi dan pemanfaatan Data Kerawanan yang melibatkan lintas fungsi sehingga Data Kerawanan bisa mendukung kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, sinergisme dengan pemangku kepentingan
Maret	50	50,00%	Anggaran AEA yang sangat terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan	Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform
April	50	50,00%	Kendala : pemanfaatan data kerawanan sudah mulai dilakukan monev oleh Dit CT sebagai TL Rekomendasi BPK	Data Kerawanan ini bisa dimanfaatkan untuk a. Mendukung kegiatan teknis pengawasan b. Mendukung kegiatan penindakan c. Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat d. Mendukung kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha e. Mendukung sinergisme kegiatan dengan pemangku kepentingan f. Mendukung penyusunan strategi pengawasan BPOM
Mei	50	50,00%	Kendala : Belum dilakukan penyerapan anggaran AEA dikarenakan anggaran AEA hanya bisa dimanfaatkan 2 OK Perjalanan Dinas sehingga perlu diatur untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran Balai	Untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran penyerapan Anggaran AEA dilakukan sesuai RPD yang telah direncanakan
Juni	50	50,00%	Merupakan target tahunan. Telah dilakukan	1. Mengarsipkan seluruh data dukung

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			pelaporan Monev AMR TW II pada 2 Juli 2026 1. Hingga bulan Juni telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 19 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 dan terkait penerbitan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Pemerintah Kab. Bangka Tengah pada 27 April 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka TW I 2026 pada 13 Maret 2026 dan TW II 2026 pada 30 Juni 2026 di Sosial Media Balai POM di Pangkal Pinang 4. Hingga bulan Juni, terdapat 3 Kota / Kabupaten yang telah menerbitkan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter yaitu Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dan Pemerintah Kab. Bangka Tengah 5. Bimtek AMR telah dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis Saryanfar oleh Dinas Kesehatan Kab. Bangka Tengah pada 25 Juni 2026 dengan menggunakan dana DAK Pengawasan Saryanfar 6. Telah dilakukan KIE mengenai bahaya AMR di SMA Negeri 1 Simpang Katis pada 19 Juni 2026. Disisipkan pada Materi KIE Tim Kerja Infokom dengan tema "Remaja Cerdas, Kenali Obat dan Hindari Penyalahgunaannya" Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter (Bersurat secara resmi)

21. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)
Januari	84,04	100,00	100,00	100,00
Februari	84,04	100,00	100,00	100,00
Maret	84,04	100,00	100,00	100,00
April	84,04	100,00	100,00	100,00
Mei	84,04	95,00	90,00	92,50
Juni	84,04	100,00	91,67	95,83

21A. Pemenuhan Target

Bulan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi s.d bulan N	Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi s.d bulan N	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	24,00	24,00	100,00
Maret	36,00	36,00	100,00
April	48,00	48,00	100,00
Mei	57,00	60,00	95,00
Juni	72,00	72,00	100,00

21B. Ketepatan Waktu

Bulan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu s.d bulan N	Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi s.d bulan N	% Ketepatan waktu pelaporan label
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	24,00	24,00	100,00
Maret	36,00	36,00	100,00
April	48,00	48,00	100,00
Mei	54,00	60,00	90,00
Juni	66,00	72,00	91,67

Lampiran 2
Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang
Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705
email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK .02.02.7B.10.25.285 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PANGKAL PINANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang :
a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Makanan di Pangkal Pinang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 09 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.10.25.285 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31.25
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.75
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.4
		Nilai AKIP UPT BPOM	81.80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AGUS RIYANTO
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
AGUS RIYANTO	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.85
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.5
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	84.04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		sesuai Standar	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78.6
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7
		05 - Jumlah desa pangan aman	3
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31.25
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.85
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.4
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 11,688,120,000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,107,936,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	6,580,184,000

Pangkal Pinang, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

AGUS RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Balai POM di Pangkal Pinang

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	343,795,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan		A - Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik					192,545,000		192,545,000
			2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan		A - Pengadaan Sampel					151,250,000		151,250,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.85	5,983,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans		A - Pertemuan Sosialisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/KLINIK)					5,983,000		5,983,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	143,609,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan		A - Pengadaan Sampel					44,057,000		44,057,000
			2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengujian laboratorium sampel makanan		A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan					117,120,000		99,552,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,198,400
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengujian laboratorium sampel makanan		A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan					117,120,000		8,198,400
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	9,369,600
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengujian laboratorium sampel makanan		A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan					117,120,000		9,369,600
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan [illegible]		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,751,400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti oleh stakeholder													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	10,885,000	1,088,500
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	4,589,000	458,900
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2,040,000	204,000

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,852,220

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	4,589,000	596,570
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	10,885,000	1,415,050
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2,040,000	265,200
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA	4,110,000	575,400

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	17,020,380

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	2,040,000	1,570,800
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA	4,110,000	3,534,600
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	10,885,000	8,381,450
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	4,589,000	3,533,530

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang [illegible]	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	145,596,160

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika di Medan	3,917,000	3,917,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP di Bandung	2,015,000	2,015,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	32,800,000	22,960,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	17,000,000	9,180,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	111,794,000	60,368,760
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Forum Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik di Jakarta	3,602,000	3,602,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian II dan III di jakarta	4,155,000	2,908,500
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian I di Jkaarta	2,067,000	2,067,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar di Palembang	1,491,000	1,491,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - Perkuatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di Jakarta	2,067,000	2,067,000
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Jakarta	4,796,000	4,796,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - Peningkata Kompetenesi Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah)di Jakarta	2,077,000	2,077,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	K - Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II di Jakarta	3,469,000	3,469,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - Evaluasi Sampling Kosmetik di Surabaya	6,745,000	6,745,000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam di Jakarta	2,077,000	2,077,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEIKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA	68,535,000	9,594,900
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam di Jakarta	4,155,000	4,155,000
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Forum Koordinasi dan Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik terkait Pemasukan Kosmetik dan Sertifikasi CPKB di Batam	2,105,000	2,105,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	253,730,440

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling\Kegiatan gabungan dengan Kedeputian II dan III di jakarta	4,155,000	1,246,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEIKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA	68,535,000	58,940,100
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	17,000,000	6,120,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	111,794,000	40,245,840
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PEMERIKSAAN JAJANAN BUKA PUASA	48,525,000	48,525,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FOOD SECURITY	81,165,000	81,165,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Q - Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator di Serang	4,172,000	4,172,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	R - Workshop Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan di Padang	6,756,000	6,756,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	32,800,000	6,560,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	4,144,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OT di Jakarta	2,077,000	2,077,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar (back to back dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar di Jakarta	2,067,000	2,067,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	14,986,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - Pengadaan Sampel	14,986,000	14,986,000
2.	-	-	A - Pengadaan Sampel	0	0

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	16,159,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	17,000,000	1,700,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya	32,800,000	3,280,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	111,794,000	11,179,400

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			78.2	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.6	3,639,932,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - PENGADAAN ALAT GELAS	80,000,000	80,000,000
2.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	161,000,000	161,000,000
3.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - Pengadaan Baku pembanding	100,000,000	100,000,000
4.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - BIMBINGAN TEKNIS KALIBRASI	9,917,000	9,917,000
5.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM	311,650,000	311,650,000
6.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZA - PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM	41,100,000	41,100,000
7.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BB/BALAI POM	39,668,000	39,668,000
8.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	ZA - KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN LABORATORIUM	47,250,000	47,250,000
9.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - Pertemuan Manajerial Pengujian Mikrobiologi dan biologi molekuler	6,800,000	6,800,000
10.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN PENUNJANG LABORATORIUM	330,000,000	330,000,000
11.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	E - BIMBINGAN INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	24,963,000	24,963,000
12.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - WORKSHOP ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORY (ARFLI DI PPPOMN	9,917,000	9,917,000
13.	OR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - BIMTEK INTERNAL DENGAN INSTRUKTUR PPPOMN	61,605,000	61,605,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - WORKSHOP REGIONALISASI LABORATORIUM	7,147,000	7,147,000
15.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - PERBAIKAN PERALATAN LABORATORIUM	120,741,000	120,741,000
16.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - Uji Profisiensi Eksternal	12,000,000	12,000,000
17.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - PEMBELIAN SAMPEL RUANG LINGKUP	2,000,000	2,000,000
18.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN LABORATORIUM	206,000,000	206,000,000
19.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium	1,964,160,000	1,964,160,000
20.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM OLEH PETUGAS PPPOMN	29,001,000	29,001,000
21.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - SURVEILAN TERJADWAL KAN DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP AKREDITASI	75,013,000	75,013,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	22,160,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENDAMPINGAN KABUPATEN KOTA PANGAN AMAN	22,160,000	22,160,000

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	116,138,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN	84,781,000	84,781,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Forum Konsultasi Publik	4,852,000	4,852,000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - TALKSHOW, KIE DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	26,505,000	26,505,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	25	25	70	70	95	95	100	7	69,515,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN	8,439,000	8,439,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - PERJALANAN KOORDINASI	2,855,000	2,855,000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	18,313,000	18,313,000
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	18,876,000	18,876,000
5.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - MONITORING DAN SERTIFIKASI SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN	21,032,000	21,032,000

05 - Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	25	25	50	50	70	70	100	3	72,577,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI PROGRAM TERPADU KEAMANAN PANGAN	15,900,000	15,900,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA	8,050,000	8,050,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA	9,795,000	9,795,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	10,560,000	10,560,000
5.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - MONITORING EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN	13,035,000	13,035,000
6.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	5,280,000	5,280,000
7.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - FASILITASI PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN DESA	3,000,000	3,000,000
8.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	B - PENGAWALAN DESA	6,957,000	6,957,000

06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	50	70	80	100	100	100	100	1	36,673,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS PASAR	8,795,000	8,795,000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev	6,300,000	6,300,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	3,521,000	3,521,000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan	C - Pengawalan	3,957,000	3,957,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Komunitas				
5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - Pembelian test kit	12,600,000	12,600,000
6.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - ADVOKASI PROGRAM PPASK	1,500,000	1,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	2.7	12.9	41.23	52.05	62.88	71.2	75.15	89.73	94.3	99.5	31.25	20,097,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PENDAMPINGAN UMKM	12,975,000	12,975,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Bimtek IP CPPOB BPOM di Pangkal Pinang	7,122,000	7,122,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		33.33	33.33	33.33	33.33	38.33	38.33	51.67	51.67	66.67	65	92.5	142,830,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2,000,000	2,000,000
2.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	E - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM	39,260,000	39,260,000
3.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	670,000	670,000
4.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	32,877,000	32,877,000
5.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	268,000	268,000
6.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	268,000	268,000
7.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	6,965,000	6,965,000
8.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	1,680,000	1,680,000
9.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	15,870,000	15,870,000
10.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	670,000	670,000
11.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	1,000,000	1,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	4,860,000	4,860,000
13.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmalitrik	29,992,000	29,992,000
14.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	D - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2026	6,250,000	6,250,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	94	5,230,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber	5,230,000	5,230,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.85	7,591,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT SERTIFIKASI DI DALAM KOTA	3,991,000	3,991,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - AUDIT SERTIFIKASI DI LUAR KOTA	3,600,000	3,600,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.4	661,291,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PENGADAAN PAKAIAN DINAS	43,200,000	43,200,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	185,836,000	185,836,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	104,050,000	104,050,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	1,020,000	1,020,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40,000,000	40,000,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	60,000,000	60,000,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	T - Pembinaan Kinerja oleh Deputi Pembina	5,525,000	5,525,000
8.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENGELOLAAN LIMBAH B3	2,700,000	2,700,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - SIMULASI K3	5,000,000	5,000,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	92,160,000	92,160,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	112,000,000	112,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	9,800,000	9,800,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80.1	156,999,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	R - PERJALANAN KOORDINASI/KONSULTASI PIMPINAN	74,420,000	74,420,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - OPERASIONAL PELAPORAN	75,600,000	75,600,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	6,979,000	6,979,000

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM														5	5,454,781,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	13,800,000	13,800,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - LANGGANAN DAYA DAN JASA	497,932,000	497,932,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - ADMINISTRASI KEGIATAN	86,160,000	86,160,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA TENAGA OUTSOURCING	759,792,000	759,792,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai	4,097,097,000	4,097,097,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.94	315,112,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	239,400,000	239,400,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - SEWA RUMAH DINAS PIMPINAN	70,000,000	70,000,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5,712,000	5,712,000

														Total	11,688,120,000

Pangkal Pinang, 26 Februari 2026

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5

SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Balai POM di Pangkal Pinang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang
Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705
email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.8B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pangkal Pinang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.8B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BPOM di Pangkal Pinang
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BPOM di Pangkal Pinang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Pangkal Pinang
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik BPOM di Pangkal Pinang yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Pangkal Pinang
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Pangkal Pinang
9.2	Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang
9.3	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Pangkal Pinang
9.4	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG,

AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 6

SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Revisi

Balai POM di Pangkal Pinang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang
Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705
email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.12.25.340 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG 2025-2029

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.02.25.51 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.7B.12.25.339 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.02.25.51 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.12.25.340 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
SK 2	**Meningkatnya efektivitas KIE**
2.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2.3	Jumlah desa pangan aman
2.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 3	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
3.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 4	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 5	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
5.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK 6	**Layanan Publik UPT yang prima**
6.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 7	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
7.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
7.2	Nilai AKIP UPT BPOM
7.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
7.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7

Realisasi IKU Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	Apr	98,75	100,00	101,27%	101,27%	Rp 348.770.500	Rp 41.337.683	Rp 41.337.683	100,00%
			Mei	98,75	100,00	101,27%	101,27%	Rp 350.221.000	Rp 53.837.683	Rp 54.735.347	101,67%
			Juni	98,75	100,00	101,27%	101,27%	Rp 350.530.500	Rp 231.138.023	Rp 78.694.815	34,05%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	Apr	-	-	-	-	Rp 5.983.000	Rp 3.639.000	Rp 3.639.000	100,00%
			Mei	-	-	-	-	Rp 5.983.000	Rp 5.982.000	Rp 5.982.000	100,00%
			Juni	-	-	-	-	Rp 5.983.000	Rp 5.982.000	Rp 5.982.000	100,00%
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,90	Apr	98,9	100,00	101,11%	101,11%	Rp 144.855.500	Rp 14.427.929	Rp 14.427.929	100,00%
			Mei	98,9	100,00	101,11%	101,11%	Rp 145.463.000	Rp 20.508.941	Rp 20.509.941	100,00%
			Juni	98,9	100,00	101,11%	101,11%	Rp 145.518.500	Rp 27.608.941	Rp 22.952.541	83,13%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	Apr	100	100,00	100,00%	100,00%	Rp 8.198.400	Rp -	Rp -	0
			Mei	100	100,00	100,00%	100,00%	Rp 7.862.400	Rp -	Rp -	0
			Juni	100	100,00	100,00%	100,00%	Rp 7.862.400	Rp -	Rp -	0
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,50	Apr	96,5	100,00	103,63%	103,63%	Rp 9.369.600	Rp -	Rp -	0
			Mei	96,5	100,00	103,63%	103,63%	Rp 8.985.600	Rp -	Rp -	0
			Juni	96,5	100,00	103,63%	103,63%	Rp 8.985.600	Rp -	Rp -	0
6	Persentase keputusan/rekomendasi	85,00	Apr	85	70,28	82,69%	82,69%	Rp 14.630.800	Rp 3.614.200	Rp 3.614.200	100,00%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
	hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		Mei	85	85,38	100,45%	100,45%	Rp 15.072.900	Rp -	Rp 4.469.200	0
			Juni	85	86,73	102,04%	102,04%	Rp 15.592.900	Rp 6.236.200	Rp 6.792.600	108,92%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Apr	100	100,00	100,00%	100,00%	Rp 19.076.500	Rp 3.140.210	Rp 3.140.210	100,00%
			Mei	100	100,00	100,00%	100,00%	Rp 18.989.640	Rp 4.339.830	Rp 5.466.039	125,95%
			Juni	100	100,00	100,00%	100,00%	Rp 20.761.700	Rp 5.666.440	Rp 7.989.244	140,99%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	Apr	94,25	100,00	106,10%	106,10%	Rp 79.240.480	Rp 13.572.428	Rp 13.572.428	100,00%
			Mei	94,25	100,00	106,10%	106,10%	Rp 72.176.580	Rp 15.782.258	Rp 17.997.813	114,04%
			Juni	94,25	100,00	106,10%	106,10%	Rp 80.930.900	Rp 18.342.254	Rp 27.017.141	147,29%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,60	Apr	96,6	98,27	101,73%	101,73%	Rp 109.656.680	Rp 18.410.431	Rp 18.410.431	100,00%
			Mei	96,6	100,00	103,52%	103,52%	Rp 114.523.830	Rp 26.654.581	Rp 26.883.654	100,86%
			Juni	96,6	100,00	103,52%	103,52%	Rp 102.082.450	Rp 49.568.560	Rp 39.013.113	78,71%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	Apr	93,25	98,17	105,28%	105,28%	Rp 172.896.140	Rp 81.411.020	Rp 81.411.020	100,00%
			Mei	93,25	98,73	105,87%	105,87%	Rp 179.248.550	Rp 85.637.770	Rp 84.882.225	99,12%
			Juni	93,25	98,83	105,99%	105,99%	Rp 181.090.550	Rp 90.069.166	Rp 91.464.965	101,55%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	Apr	93,83	94,70	100,93%	100,93%	Rp 4.144.000	Rp -	Rp -	0
			Mei	93,83	95,63	101,92%	101,92%	Rp 3.780.000	Rp -	Rp -	0
			Juni	93,83	96,20	102,53%	102,53%	Rp 3.960.000	Rp -	Rp -	0
12	Persentase label produk tembakau	84,04	Apr	84,04	100,00	118,99%	118,99%	Rp 17.053.000	Rp 1.223.900	Rp 1.223.900	100,00%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
	dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		Mei	84,04	92,50	110,07%	110,07%	Rp 18.766.000	Rp 1.918.100	Rp 1.554.200	81,03%
			Juni	84,04	95,83	114,03%	114,03%	Rp 18.946.000	Rp 4.688.100	Rp 3.666.900	78,22%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	Apr	-	-	-	-	Rp 16.159.400	Rp 3.747.080	Rp 3.747.080	100,00%
			Mei	-	-	-	-	Rp 17.288.500	Rp 5.420.230	Rp 5.458.485	100,71%
			Juni	-	-	-	-	Rp 18.038.500	Rp 7.155.230	Rp 7.922.385	110,72%
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	Apr	78,2	78,2	100,00%	99,49%	Rp 3.639.932.000	Rp 296.567.308	Rp 296.567.308	100,00%
			Mei	78,2	78,2	100,00%	99,49%	Rp 3.637.116.000	Rp 503.449.911	Rp 498.085.084	98,93%
			Juni	78,4	78,5	100,13%	99,87%	Rp 3.637.116.000	Rp 2.600.275.936	Rp 2.725.589.823	104,82%
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40,0	Apr	-	-	-	-	Rp 22.160.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!
			Mei	-	-	-	-	Rp 22.160.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!
			Juni	-	-	-	-	Rp 22.160.000	Rp 4.320.000	Rp 4.704.000	108,89%
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	Apr	86,85	87,66	100,93%	100,93%	Rp 116.138.000	Rp 18.969.000	Rp 18.969.000	100,00%
			Mei	86,85	87,36	100,59%	100,59%	Rp 116.138.000	Rp 48.403.000	Rp 49.053.000	101,34%
			Juni	86,85	87,43	100,67%	100,67%	Rp 116.138.000	56.503.000	62.079.000	109,87%
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	Apr	25,00	25,00	100,00%	25,00%	Rp 69.515.000	Rp 7.300.000	Rp 7.300.000	100,00%
			Mei	25,00	25,00	100,00%	25,00%	Rp 68.788.000	7.300.000	7.300.000	100,00%
			Juni	25,00	25,00	100,00%	25,00%	Rp 68.788.000	10.300.000	13.972.000	135,65%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
18	Jumlah desa pangan aman	3	Apr	25,00	25,00	100,00%	25,00%	Rp 72.577.000	Rp 5.520.000	Rp 5.520.000	100,00%
			Mei	25	25,00	100,00%	25,00%	Rp 71.827.000	15.660.000	19.271.000	123,06%
			Juni	25	25,00	100,00%	25,00%	Rp 71.827.000	15.660.000	19.271.000	123,06%
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Apr	25,00	25,00	100,00%	25,00%	Rp 36.673.000	Rp 11.988.000	Rp 11.988.000	100,00%
			Mei	50	50,00	100,00%	50,00%	Rp 36.173.000	22.235.000	21.364.000	96,08%
			Juni	70	70,00	100,00%	70,00%	Rp 36.173.000	26.056.000	23.989.000	92,07%
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	Apr	41,23	50,32	122,05%	-	Rp 37.257.000	Rp 6.034.000	Rp 6.034.000	100,00%
			Mei	52,05	59,32	113,97%	-	Rp 28.930.000	Rp 8.917.000	Rp 7.344.000	82,36%
			Juni	62,88	68,32	108,65%	-	Rp 27.008.000	10.737.000	10.495.000	97,75%
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,50	Apr	33,33	33,33	100,01%	36,04%	Rp 142.830.000	20.755.000	20.755.000	100,00%
			Mei	33,33	33,33	100,01%	36,04%	Rp 142.830.000	27.005.000	25.305.000	93,70%
			Juni	38,33	57,50	150,01%	62,16%	Rp 120.822.000	Rp 38.693.000	Rp 38.066.612	98,38%
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	Apr	50	50,00	100,00%	53,19%	Rp 5.230.000	Rp -	Rp -	0
			Mei	50	50,00	100,00%	53,19%	Rp 5.230.000	0	0	0
			Juni	50	50,00	100,00%	53,19%	Rp 5.230.000	4.350.000	4.482.000	103,03%
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	Apr	-	-	-	-	Rp 7.591.000	510.000	510.000	100,00%
			Mei	-	-	-	-	Rp 7.591.000	Rp 510.000	Rp 510.000	100,00%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
			Juni	-	-	-	-	Rp 7.591.000	2.200.000	510.000	23,18%
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,40	Apr	-	-	-	-	Rp 661.291.000	140.784.304	140.784.304	100,00%
			Mei	-	-	-	-	Rp 656.895.000	164.924.304	171.981.400	104,28%
			Juni	-	-	-	-	Rp 657.410.000	415.514.304	437.985.681	105,41%
25	Nilai AKIP UPT BPOM	80,10	Apr	-	-	-	-	Rp 157.270.000	Rp 35.946.042	Rp 35.946.042	100,00%
			Mei	-	-	-	-	Rp 157.270.000	Rp 48.946.042	Rp 51.236.442	104,68%
			Juni	-	-	-	-	Rp 157.270.000	59.946.042	58.983.192	98,39%
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Apr	-	-	-	-	Rp 5.454.781.000	Rp 1.667.681.132	Rp 1.667.681.132	100,00%
			Mei	-	-	-	-	Rp 5.454.781.000	Rp 2.044.864.133	Rp 2.051.728.920	100,34%
			Juni	-	-	-	-	Rp 5.454.781.000	2.649.821.222	2.663.344.023	100,51%
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	Apr	-	-	-	-	Rp 315.112.000	Rp 134.250.851	Rp 134.250.851	100,00%
			Mei	-	-	-	-	Rp 313.222.000	141.154.851	141.853.653	100,50%
			Juni	-	-	-	-	Rp 312.707.000	147.106.851	166.919.337	113,47%
Total Anggaran Bulan April								**Rp 11.688.391.000**	**Rp 2.530.829.518**	**Rp 2.530.829.518**	
Total Anggaran Bulan Mei								**Rp 11.677.312.000**	**Rp 3.253.450.634**	**Rp 3.272.971.403**	
Total Anggaran Bulan Juni								**Rp 11.655.304.000**	**Rp 6.487.938.269**	**Rp 6.521.886.372**	

Lampiran 8

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Output Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T (RPD)	R	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	6	6	100,00	Rp4.350.000	Rp4.482.000	103,03	**0,97**	**-0,03**	**Tidak Efisien**	
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	82	191	232,93	Rp2.200.000	Rp510.000	23,18	**10,05**	**9,05**	**75% (Tidak Efisien)**	
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00	Rp10.300.000	Rp13.972.000	135,65	**0,74**	**-0,26**	**Tidak Efisien**	
4	Desa Pangan Aman	25	25	100,00	Rp15.660.000	Rp19.271.000	123,06	**0,81**	**-0,19**	**Tidak Efisien**	
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	70	70	100,00	Rp26.056.000	Rp23.989.000	92,07	**1,09**	**0,09**	**100% (Efisien)**	
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	220	227	103,18	Rp41.702.998	Rp46.269.000	110,95	**0,93**	**-0,07**	**Tidak Efisien**	
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	72	72	100,00	Rp4.688.100	Rp3.666.900	78,22	**1,28**	**0,28**	**95% (Efisien)**	
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	48	60	125,00	Rp3.220.000	Rp4.245.000	131,83	**0,95**	**-0,05**	**Tidak Efisien**	
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan	2	2	100,00	Rp14.800.000	Rp15.810.000	106,82	**0,94**	**-0,06**	**Tidak Efisien**	

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T (RPD)	R	%				
	oleh UPT										
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	45	48	107,37	Rp636.115.936	Rp761.433.473	119,70	**0,90**	**-0,10**	**Tidak Efisien**	
11	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	100	45	45,00	Rp38.692.999	Rp38.066.612	98,38	**0,46**	**-0,54**	**Tidak Efisien**	
12	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	Rp5.982.000	Rp5.982.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**	
13	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20	36,00	180,00	Rp10.737.000	Rp10.495.000	97,75	**1,84**	**0,84**	**88% (Efisien)**	
14	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	96	99	103,13	Rp31.928.941	Rp27.656.541	86,62	**1,19**	**0,19**	**100% (Efisien)**	
15	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	271	282	104,06	Rp231.138.023	Rp78.694.815	34,05	**3,06**	**2,06**	**75% (Tidak Efisien)**	
16	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8	8	100,00	Rp8.365.000	Rp12.125.000	144,95	**0,69**	**-0,31**	**Tidak Efisien**	
17	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	129	132	102,33	Rp168.672.870	Rp168.074.448	99,65	**1,03**	**0,03**	**100% (Efisien)**	

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T (RPD)	R	%				
	Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT										
18	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100	100	100,00	Rp1.964.160.000	Rp1.964.156.350	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**	
19	Layanan BMN	25	25	100,00	Rp-	Rp-	-	**-**	**-**	**-**	**Tidak dapat dihitung TE nya**
20	Layanan Perkantoran	50	50	100,00	Rp3.269.168.402	Rp3.322.987.233	101,65	**0,98**	**-0,02**	**Tidak Efisien**	
	TOTAL			**110,68**	**Rp6.487.938.269**	**Rp6.521.886.372**	**100,52**	**1,10**	**0,10**	**100% (Efisien)**	**Dihitung dari output yang dapat dihitung tingkat efisiensinya**

Lampiran 9

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Indikator Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	231.138.023	78.694.815	34,05	2,97	1,97	75% (Tidak Efisien)	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5.982.000	5.982.000	100,00	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	27.608.941	22.952.541	83,13	1,22	0,22	95% (Efisien)	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	0	0	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100	103,63	0	0	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86,73	102,04	6.236.200	6.792.600	108,92	0,94	-0,06	Tidak Efisien	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	5.666.440	7.989.244	140,99	0,71	-0,29	Tidak Efisien	

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%				
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100	106,10	18.342.254	27.017.141	147,29	**0,72**	**-0,28**	**Tidak Efisien**	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100	103,52	49.568.560	39.013.113	78,71	**1,32**	**0,20**	**100% (Efisien)**	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99	90.069.166	91.464.965	101,55	**1,04**	**0,04**	**100% (Efisien)**	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53	0	0	-	-	-	-	**Tidak dapat dihitung TE nya**
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03	4.688.100	3.666.900	78,22	**1,46**	**0,46**	**92% (Efisien)**	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	7.155.230	7.922.385	110,72	-	-	-	**Tidak dapat dihitung TE nya**
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,4	78,5	100,13	2.600.275.936	2.725.589.823	104,82	**0,96**	**-0,04**	**Tidak Efisien**	
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam	-	-	-	4.320.000	4.704.000	108,89	-	-	-	**Tidak dapat dihitung**

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%				
	pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman										TE nya
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	100,67	56.503.000	62.079.000	109,87	0,92	-0,08	Tidak Efisien	
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100	10.300.000	13.972.000	135,65	0,74	-0,26	Tidak Efisien	
18	Jumlah desa pangan aman	25	25	100	15.660.000	19.271.000	123,06	0,81	-0,19	Tidak Efisien	
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100	26.056.000	23.989.000	92,07	1,09	0,09	100% (Efisien)	
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	62,88	68,32	108,65	10.737.000	10.495.000	97,75	1,11	0,11	100% (Efisien)	
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38,33	57,5	150,01	38.693.000	38.066.612	98,38	1,52	0,52	92% (Efisien)	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	4.350.000	4.482.000	103,03	0,97	-0,03	Tidak Efisien	
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	2.200.000	510.000	23,18	-	-	-	Tidak dapat dihitung

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%				
											TE nya
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	415.514.304	437.985.681	105,41	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	59.946.042	58.983.192	98,39	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	2.649.821.222	2.663.344.023	100,51	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	147.106.851	166.919.337	113,47	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
	TOTAL			105,84	3.195.892.620	3.175.535.754	99,36	1,07	0,065	100% (Efisien)	Rata-rata dari IKU yang bisa dihitung efisiensinya

Lampiran 10

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW II)	Realisasi	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,80	3.033.593.620	3.003.181.142	99,00	**1,05**	**0,05**	**100% (Efisien)**	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	100,17	108.519.000	119.311.000	109,94	**0,91**	**-0,09**	**Tidak Efisien**	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	108,65	10.737.000	10.495.000	97,75	**1,11**	**0,11**	**100% (Efisien)**	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	150,01	38.693.000	38.066.612	98,38	**1,52**	**0,52**	**92% (Efisien)**	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	4.350.000	4.482.000	103,03	**0,97**	**-0,03**	**Tidak Efisien**	
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
	TOTAL	**112,53**	**3.195.892.620**	**3.175.535.754**	**99,36**	**1,13**	**0,13**	**100% (Efisien)**	**Anggaran dihitung dari IKU yang bisa dihitung TE nya**

Lampiran 11

Capaian RAPK Triwulan II Tahun 2026 BBPOM di Pangkal Pinang

KERTAS KERJA CAPAIAN RAPK
TRIWULAN II TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI PANGKAL PINANG

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan APRIL				Realisasi s.d bulan MEI				Realisasi s.d bulan JUNI				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	98,75	100,00	101,27	101,27	98,75	100,00	101,27	101,27	98,75	100,00	101,27	101,27	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zzC_n4vu1-VlLwVeiKOmI_8dZX1A4_-HxRRSwCGpvw/edit?gid=2048744216#gid=2048744216	https://drive.google.com/drive/folders/1hVV3qHJxCPdmQa_kUm_v44-0BAssRRuD?usp=sharing
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvqA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248174	https://drive.google.com/drive/folders/1V0_4sB2pmzh_1pghDtVCykpo8YTuk5_Y?usp=sharing
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	98,90	100,00	101,11	101,11	98,90	100,00	101,11	101,11	98,90	100,00	101,11	101,11	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jAoa4w5eTMCEcUGFM5g8iH1nGc7MsoY1w_GM7QdtbGk/edit?gid=1985572361#gid=1985572361	https://drive.google.com/drive/folders/1TxK15UhVMMcD112A2xLoZSIXobLxYbLt?usp=sharing
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvqA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248174	https://drive.google.com/drive/folders/1l3fCA4kZ-8rUQMPLTxfLJaD2m8FP1yax?usp=sharing
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	96,50	100,00	103,63	103,63	96,50	100,00	103,63	103,63	96,50	100,00	103,63	103,63	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kfMty2iPral8FHpuQjTL48cjstwUb0P57FipiKXVpfs/edit?gid=1763099736#gid=1763099736	https://drive.google.com/drive/folders/1AHz8uJgN1DS-DwZk01jmUAJOdas-0b2_?usp=sharing
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85,00	70,28	82,69	82,69	85,00	85,38	100,45	100,45	85,00	86,73	102,04	102,04	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wbwki8a-0mjhfz2G7NriwS6BwY4Lg8Zu25oGp6SEqWw/edit?gid=1780692388#gid=1780692388	https://drive.google.com/drive/folders/1iECuPqGijvh6uWTBqq9Lq11kX__l0LQM?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan APRIL				Realisasi s.d bulan MEI				Realisasi s.d bulan JUNI				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_jUCzlZvKPK5gB8Bh_faM_RrFQCH2B9qLwGJ9i50FjE/edit?gid=181525344#gid=181525344	https://drive.google.com/drive/folders/1VKDdQ3NXBSmHaEcv7WtHK5BiBA0wGqPg?usp=sharing
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	94,25	100,00	106,10	106,10	94,25	100,00	106,10	106,10	94,25	100,00	106,10	106,10	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OgLSrzDe-XsuK-mQxGcs9eKFv803wlOTFryBDbWf_Oo/edit?gid=377682384#gid=377682384	https://drive.google.com/drive/folders/1tZLE51Jiz7JL6216c0P-UCYiScqhCjQo?usp=sharing
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	96,60	98,27	101,73	101,73	96,60	100,00	103,52	103,52	96,60	100,00	103,52	103,52	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6hJzQMRrDcq7k2PJloMRS4aBEg2-R6dyz_7GPs4Txg/edit?gid=2115003066#gid=2115003066	https://drive.google.com/drive/folders/100HtW44VSVgkEYqg7bAE2J7r5z4AouRR?usp=sharing
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	93,25	98,17	105,28	105,28	93,25	98,73	105,87	105,87	93,25	98,83	105,99	105,99	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lIl6rlyBNs78Mz22NLtfajCGo-y2P1H9Xyn8784VrdM/edit?gid=1136053142#gid=1136053142	https://drive.google.com/drive/folders/1tpmxgOAd94i0QjtQL0XGTeeGcq5aYvit?usp=sharing
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,83	94,70	100,93	100,93	93,83	95,63	101,92	101,92	93,83	96,20	102,53	102,53	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KivnvD-RLgvRxXMTpe-_hgRQ2zCTwrLWTjMQ1rMqNVY/edit?gid=1366600169#gid=1366600169	https://drive.google.com/drive/folders/1XQE6nXlHlHeVQtb28RHdTTR2Rx9R_r7j?usp=sharing
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	84,04	100,00	118,99	100	84,04	92,50	110,07	92,50	84,04	95,83	114,03	95,83	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sejjCeM4fPASOlwIK7_IDEmOB44ADhb6RjO16tlo-5Q/edit?gid=1337970582#gid=1337970582	https://drive.google.com/drive/folders/19-bPTfjX69Z_IRQY7nxQ_mPnienzOukj?usp=sharing
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvgA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248174	https://drive.google.com/drive/folders/1g2dM4PWuGpSUOazaNe4q7x_A2l8j1yF?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan APRIL				Realisasi s.d bulan MEI				Realisasi s.d bulan JUNI				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	78,20	78,2	100,00	99,49	78,20	78,2	100,00	99,49	78,40	78,5	100,13	99,87	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvgA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1PMcHrNiRyogrQG-76csJM8MYkYI2Sd82C?usp=sharing
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvgA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1ofIbub4PNt-tPS2vxcRMRqBF-xrB5eRi?usp=sharing
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	86,85	87,66	100,93	100,93	86,85	87,36	100,59	100,59	86,85	87,43	100,67	100,67	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvgA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/19niLJ9_SDXW5E1FvjkvmHiAbPV9rFYyXP?usp=sharing
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfzEujBbkFOa3yegnub1oeTwyT2qacS2HcXtpsFLyc/edit?gid=341469048#gid=341469048	https://drive.google.com/drive/folders/1Tvb4bu6AU0Ff1fnOoq6_B--nYG4qFqK9?usp=sharing
18	Jumlah desa pangan aman	3	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XcOxyx1wVw_SdjzileZFIWP12d8hRpZ65EpkqOytvVU/edit?gid=1741298471#gid=1741298471	https://drive.google.com/drive/folders/16DeAYg0wG8HBPbygIC_Bo7Il-aGLYAXm?usp=sharing
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25,00	25,00	100,00	25,00	50,00	50,00	100,00	50,00	70,00	70,00	100,00	70,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16vUCJxFpSMPMiOXQaQD-mdfYe5ak3lEPiLXJ-9OXqE/edit?gid=1180720909#gid=1180720909	https://drive.google.com/drive/folders/111GceQxnK-Efu7Bxj9hp1l44eoxV2f7c?usp=sharing
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	41,23	50,32	122,05	161,02	52,05	59,32	113,97	189,82	62,88	68,32	108,65	218,62	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17grDtQSsi3AOvcPBQqoFNg2NPoFblbX8_-m_Kejcmvc/edit?gid=14868497#gid=14868497	https://drive.google.com/drive/folders/1IGgFYjMWtmSnIEKZuAI2LfOfhfG2S9EV?usp=sharing
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	33,33	33,33	100,01	36,04	33,33	33,33	100,01	36,04	38,33	57,50	150,01	62,16	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Geq5p2BKwJsKpRC2J4mWqSriIiwqrArRxpipe5ZDK6Y/edit?gid=249718768#gid=249718768	https://drive.google.com/drive/folders/1L-k6kjs3AzZW8pqgHcxsU4cTFcaAb7CH?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan APRIL				Realisasi s.d bulan MEI				Realisasi s.d bulan JUNI				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	50,00	100,00	53,19	50,00	50,00	100,00	53,19	50,00	50,00	100,00	53,19	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvqA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1mygX-51ZpXGj66oljNvoEU2iAO92SC5d?usp=sharing
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvqA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1ClnkgRrd3q1RbdrKbOpg2fWYtpfvQZFI?usp=sharing
24	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvqA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1-y6r48LlKOhKdVv8vnnLQunAwMSupaj_?usp=sharing
25	Nilai AKIP UPT	80,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvqA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1VFDO4_3i5ggjvEViXns3fi2IMVgBJECO?usp=sharing
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvqA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1SaZlbT0GqQclrxPUlidzUymYHJpgjUo?usp=sharing
27	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5fU-ZQvqA2RDyAl3BZA6sz_a41le17DAkUujs/edit?gid=841248174#gid=841248176	https://drive.google.com/drive/folders/1Bkr_g3cfLKH2lJFHlQoFMB7weL3Q80zy?usp=sharing

Pangkal Pinang, 13 Juli 2026
Kepala Balai Besar POM di Pangkal Pinang

Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 12

Tabel Keselarasan Nomenklatur Data Kinerja Triwulan Tahun 2026

Nomenklatur Sasaran Kinerja

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	RAPK 2026	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sesuai
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Sesuai
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Sesuai
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sesuai
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sesuai
6	Layanan Publik UPT	Layanan Publik UPT	Layanan Publik UPT yang	Layanan Publik UPT	Layanan Publik UPT yang	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	RAPK 2026	Keterangan
	yang prima	yang prima	prima	yang prima	prima	
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Sesuai

Nomenklatur Indikator Kinerja Utama

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	RAPK 2026	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Sesuai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Sesuai
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	RAPK 2026	Keterangan
	dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sesuai
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Sesuai
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Sesuai
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	RAPK 2026	Keterangan
	UPT	UPT	wilayah UPT	wilayah UPT	wilayah UPT	
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sesuai
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Sesuai
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			Sesuai
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sesuai
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sesuai
19	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Sesuai
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sesuai
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	RAPK 2026	Keterangan
	pangan olahan	olahan	pangan olahan	pangan olahan	pangan olahan	
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Sesuai
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Sesuai
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Sesuai
25	Nilai Pembangunan ZI UPT	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Sesuai
26	Nilai AKIP UPT	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP UPT BPOM	Sesuai
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Sesuai
28	Indeks Manajemen Risiko UPT	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Sesuai

Lampiran 13

Tabel Keselarasan Data Perencanaan Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Renstra (2026)	RKT 2026	PK 2026
				Target	Target	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,25	90,25	98,75
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	27	27,85
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	98,9
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	96,5
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	94,25
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	95,75	96,6

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Renstra (2026)	RKT 2026	PK 2026
				Target	Target	Target
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	93,25
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,6	89,6	93,83
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81	81	84,04
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77	77	78,6
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	40	40
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	86,85	86,85
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	7
		18	Jumlah desa pangan aman	6	6	3
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Renstra (2026)	RKT 2026	PK 2026
				Target	Target	Target
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	31,25	31,25
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	91	92,5
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	91	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75	4,75	4,85
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	90,4	90,4
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	81,8	81,8	80,1
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	2,94	2,94

Lampiran 14

Tabel Keselarasan Data Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27%	98,75	100,00	101,27%	98,75	100,00	101,27%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	98,9	100,00	101,11%	98,9	100,00	101,11%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	100,00	102,94%	96,5	100,00	102,94%	96,5	100,00	102,94%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86,73	51,80%	85	86,73	51,80%	85	86,73	51,80%

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10%	94,25	100,00	106,10%	94,25	100,00	106,10%
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52%	96,6	100,00	103,52%	96,6	100,00	103,52%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,45%	93,25	98,83	105,45%	93,25	98,83	105,45%
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	99,48%	93,83	96,20	99,48%	93,83	96,20	99,48%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	118,99%	84,04	95,83	118,99%	84,04	95,83	118,99%
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,4	78,5	100,00%	78,4	78,5	100,00%	78,4	78,5	100,00%
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	87,43	102,23%	86,85	87,43	102,23%	86,85	87,43	102,23%
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00%	25	25	100,00%	25	25	100,00%
		18	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00%	25	25	100,00%	25	25	100,00%
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00%	70	70	100,00%	70	70	100,00%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	62,88	68,32	96,81%	62,88	68,32	96,81%	62,88	68,32	96,81%

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38,33	57,5	100,00%	38,33	57,5	100,00%	38,33	57,5	100,00%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	50	50	100,00%	50	50	100,00%
7	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 15

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	-	-		
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,90	100,00	101,11	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,50	100,00	103,63	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	86,73	102,04	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,60	100,00	103,52	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,83	105,99	▲	Tercapai/ Melampaui

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	96,20	102,53	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	95,83	114,03	▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	-	-		
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,60	78,5	99,87	▲	Akan Tercapai
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40,00	-	-		
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87	87,43	100,67	▲	Tercapai/ Melampaui
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	25,00	25,00	▼	Perlu Upaya Keras
Jumlah desa pangan aman	3	25,00	25,00	▼	Perlu Upaya Keras
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70,00	70,00	▲	Akan Tercapai
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	68,32	-		
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	57,50	62,16	▼	Perlu Upaya Keras

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	% Capaian Terhadap Target Tahunan		Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19	▼	Perlu Upaya Keras
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-		
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,40	-	-		
Nilai AKIP UPT BPOM	80,10	-	-		
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	-	-		
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	-	-		

Lampiran 16

Penyesuaian anggaran Triwulan II Tahun 2026

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
1	Revisi Kanwil Halaman III DIPA	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mana menyatakan Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD Bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh setiap awal Triwulan; • Kebutuhan anggaran pada kegiatan SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH dan PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN yang berkenaan dengan IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan • Kebutuhan anggaran untuk pada kegiatan ADVOKASI PROGRAM PPABK yang berkenaan dengan IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.	• Penyesuaian anggaran pada akun perjalan dinas biasa (524111) untuk kegiatan sosialisasi keamanan sekolah • Penambahan anggaran Honor Tim Keamanan Pangan di Pasar (521213 Belanja Honor Output Kegiatan) dan Penggandaan Bahan/Spanduk/Pencetakan (521211 Belanja Bahan)	April
2	Revisi Kewenangan DJA	Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.04.26.260 tanggal 8 April 2026 tentang Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN TA 2026 yang berkenaan hampir dengan semua IKU.	• Dilakukan revisi penurunan target Rincian Output (RO) akibat adanya efisiensi anggaran pada bulan Desember 2025 sesuai hasil kesepakatan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit teknis • Dilakukan juga pemotongan anggaran untuk beberapa akun belanja barang yaitu 521119 (Belanja Barang	April

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
			Operasional Lainnya) 521213(Belanja Honor Output Kegiatan) 522151(Belanja Jasa Profesi)	
3	Revisi Kanwil Halaman III DIPA	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mana menyatakan Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD Bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh setiap awal Triwulan; • Kebutuhan anggaran pada kegiatan Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian, Peningkatan ruang lingkup pengujian, dan Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium • kebutuhan anggaran untuk kegiatan Pertemuan Sosialisasi Fasilitas Distribusi Obat yang berkenaan dengan IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	• Melakukan penyesuaian anggaran Pengadaan Kelengkapan K3 Laboratorium, Pembelian gas laboratorium, dan Pengadaan Media Mikro • melakukan penambahan belanja bahan dan transport kegiatan KTD ESO.	Mei
4	Revisi Kewenangan DJA	Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.05.26.353 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA ke-3 yang berkenaan dengan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan	Pemotongan target output dan anggaran pada RO Perkara QCD.U66(PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG) sesuai dengan SBK 1	Mei

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
		Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkara	
5	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran pada kegiatan PENDAMPINGAN KABUPATEN KOTA PANGAN AMAN yang berkenaan dengan IKU Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman • kebutuhan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana yang berkenaan dengan IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	• Penyesuaian anggaran pada anggaran perjalanan dinas biasa (524111) dan belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) pada kegiatan kabupaten kota pangan aman • penyesuaian anggaran pada akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dan akun perjalanan dinas biasa (524111) pada kegiatan sarana distribusi	Juni

Lampiran 17

Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja

BADAN POM

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.01	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	99		90.25	90.25	98.75	Target disesuaikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan prediksi permasalahan yang mungkin dihadapi di tahun 2026.		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27		27	27.00	27.85	Realisasi pada tahun 2025 telah mendekati target tahun 2026 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi sedikit lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemungkinan jumlah laporan KTD		ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
								yang akan disampaikan sarana		
DR.3165.01.03	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	99		91	91.00	98.90	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0	0		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029 karena pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi untuk indikator ini sehingga belum diperoleh data baseline		ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	96		90	90.00	96.50	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.		ok
DR.3165.01.06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	84		85	85.00	85.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	100		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	94		92	92.00	94.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2028 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Pengurangan target RO (jumlah sarana yang diperiksa) berhubungan erat terhadap faktor pembagi perhitungan IKU		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	97		95,75	95.75	96.60	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	✓	ok
DR.3165.01.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	93		92	92.00	93.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	0	94		89,6	89.60	93.83	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	✓	ok
DR.3165.01.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	0	86		81	81.00	85.87	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	✗	1. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki. 2.
DR.3165.01.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	105		100	100.00	100.00	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Tingginya realisasi tahun 2025 disebabkan tingginya capaian salah satu dari empat komponen penilaian IKU AMR yaitu penggunaan tools pengawasan AMR yang ditargetkan hanya sebesar 80%	✗	pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	78		77	77.00	78.60	Penyesuaian target karena realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026	✓	ok
DR.3165.01.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	20		40	40.00	40.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.04.01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96	87		86,85	86.85	86.85	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✗	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.04.04	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	76	7		10	10.00	4.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 10 sekolah yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 7 sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 40,58% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 4 sekolah	✗	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. target yang dicantumkan dalam PK masih mengacu pada target RO sesuai dipa awal, bukan hasil desk penyesuaian kemarin. 3. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dari b1.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					yang akan diintervensi		
DR.3165.04.05	Jumlah desa pangan aman	31	3		6	6.00	2.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 6 desa yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 3 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 43,07% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. target yang dicantumkan dalam PK masih mengacu pada target RO sesuai dipa awal, bukan hasil desk penyesuaian kemarin. 3. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dari b1.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 2 desa yang akan diintervensi.		
DR.3165.04.06	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	1		1	1.00	1.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dari b1.
DR.3165.05.01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	17		31,25	31.25	27.08	Terdapat perbedaan antara target PK tahun 2026 dalam Renstra sebanyak 8 sarana dan target RO tahun 2026 adalah sebanyak 9 sarana. Dengan adanya pemotongan anggaran hasil identifikasi Kementrian Keuangan sebanyak 45,45 % maka dilakukan penyesuaian target menjadi 5 sarana sehingga mengurangi jumlah akumulatif sarana		1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					yang didampingi tahun 2025-2029. Oleh karena itu diusulkan penyesuaian target tahunan menjadi 27,08 %		
DR.3165.06.01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	93		91	91.00	92.50	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025		pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja.
DR.3165.07.01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	0	94		91	91.00	0.00	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025		realisasi 2025 sudah melebihi target 2026, maka target harus disesuaikan/dinaikan
DR.3165.08.01	Indeks Pelayanan Publik UPT	5	5		4,75	4.75	4.85	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025		ok
DR.3165.09.01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90		90,4	90.40	90.40	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		ok
DR.3165.09.02	Nilai AKIP UPT BPOM	82	80		81,8	81.80	80.10	Realisasi tahun 2025 sebesar 80,10 lebih rendah dari target tahun 2026 pada Renstra. Dari hasil exercise		catatan agar dilengkapi kertas kerja perhitungan target yang lebih rendah dari target pada renstra

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					prediksi Nilai AKIP tahun 2026, diperoleh nilai AKIP sebesar 79,97 (lebih rendah dari realisasi 2025). Oleh karena itu diusulkan target 2026 sama dengan realisasi 2025 yaitu sebesar 80,10		
DR.3165.09.03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5		5	5.00	5.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		ok
DR.3165.09.04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	3		2,94	2.94	2.94	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029		ok

Lampiran 18

Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja Setelah Perbaikan

BADAN POM

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.01	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	98.73		90.25	90.25	98.75	Target disesuaikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan prediksi permasalahan yang mungkin dihadapi di tahun 2026.	✓	ok
DR.3165.01.02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	26.67		27	27.00	27.85	Realisasi pada tahun 2025 telah mendekati target tahun 2026 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi sedikit lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemungkinan jumlah laporan KTD yang akan disampaikan sarana	✓	ok
DR.3165.01.03	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	98.75		91	91.00	98.90	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	✓	ok
DR.3165.01.04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00	0.00		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029 karena pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi untuk indikator ini sehingga belum	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					diperoleh data baseline		
DR.3165.01.05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	96.00		90	90.00	96.50	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	✓	ok
DR.3165.01.06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0.00	84.49		85	85.00	85.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.01.07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	100.00		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.01.08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	94.20		92	92.00	94.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2028 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Pengurangan target RO (jumlah sarana yang diperiksa) berhubungan erat terhadap faktor pembagi perhitungan IKU	✓	ok
DR.3165.01.09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	96.53		95,75	95.75	96.60	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi		
DR.3165.01.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	93.21		92	92.00	93.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	✓	ok
DR.3165.01.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	0.00	93.82		89,6	89.60	93.83	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	✓	ok
DR.3165.01.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	0.00	85.86		81	81.00	84.04	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	✓	ok
DR.3165.01.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	104.72		100	100.00	100.00	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Tingginya realisasi tahun 2025 disebabkan tingginya capaian salah satu dari empat komponen penilaian IKU AMR yaitu penggunaan tools pengawasan AMR yang ditargetkan hanya sebesar 80%	✓	ok
DR.3165.01.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0.00	78.20		77	77.00	78.60	Penyesuaian target karena realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.01.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	20.00		40	40.00	40.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.04.01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.54	86.51		86,85	86.85	86.85	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.04.04	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	76.00	7.00		10	10.00	7.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 10 sekolah yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 7 sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian	✓	agar disesuaikan kertas kerjanya

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
								terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 40,58% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 4 sekolah yang akan diintervensi		
DR.3165.04.05	Jumlah desa pangan aman	31.00	3.00		6	6.00	3.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 6 desa yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 3 desa. Selanjutnya, dalam	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025					pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 43,07% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 2 desa yang akan diintervensi.		
DR.3165.04.06	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10.00	1.00		1	1.00	1.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.05.01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	0.00	16.67		31,25	31.25	31.25	Terdapat perbedaan antara target PK tahun 2026 dalam Renstra sebanyak 8 sarana dan	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
	IP CPPOB pangan olahan							target RO tahun 2026 adalah sebanyak 9 sarana. Dengan adanya pemotongan anggaran hasil identifikasi Kementrian Keuangan sebanyak 45,45 % maka dilakukan penyesuaian target menjadi 5 sarana sehingga mengurangi jumlah akumulatif sarana yang didampingi tahun 2025-2029. Oleh karena itu diusulkan penyesuaian target tahunan menjadi 27,08 %		
DR.3165.06.01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00	92.50		91	91.00	92.50	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	✓	ok
DR.3165.07.01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	0.00	94.00		91	91.00	94.00	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
	diselesaikan sesuai standar									
DR.3165.08.01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.93	4.84		4,75	4.75	4.85	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	✓	ok
DR.3165.09.01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.20	90.35		90,4	90.40	90.40	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.09.02	Nilai AKIP UPT BPOM	81.62	80.10		81,8	81.80	80.10	Realisasi tahun 2025 sebesar 80,10 lebih rendah dari target tahun 2026 pada Renstra. Dari hasil exercise prediksi Nilai AKIP tahun 2026, diperoleh nilai AKIP sebesar 79,97 (lebih rendah dari realisasi 2025). Oleh karena itu diusulkan target 2026 sama dengan realisasi 2025 yaitu sebesar 80,10	✓	agar dilengkapi kertas kerja perhitungan target yang lebih rendah dari target pada renstra

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025							
DR.3165.09.03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00		5	5.00	5.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok
DR.3165.09.04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	2.94		2,94	2.94	2.94	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	✓	ok

Lampiran 19

Perbandingan Capaian Kinerja TW II 2026 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan II 2026	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	100,00	106,95	Tercapai/ Melampaui
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106,38	Tercapai/ Melampaui
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	Tercapai/ Melampaui
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100,00	105,26	Tercapai/ Melampaui
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	86,73	102,04	Tercapai/ Melampaui
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100,00	100,00	Tercapai/ Melampaui
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100,00	105,26	Tercapai/ Melampaui
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	Tercapai/ Melampaui
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	98,83	104,04	Tercapai/ Melampaui

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan II 2026	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,6	96,20	102,78	Tercapai/ Melampaui
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84	95,83	114,09	Tercapai/ Melampaui
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	84,3	78,5	93,12	Akan Tercapai
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	-	-	-
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,43	87,43	97,76	Akan Tercapai
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	25,00	2,08	Tidak Dapat Dibandingkan
18	Jumlah desa pangan aman	7	25,00	3,57	Tidak Dapat Dibandingkan
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70,00	70,00	Tidak Dapat Dibandingkan
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	97,92	68,32	69,77	Tidak Dapat Dibandingkan
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	57,50	61,17	Perlu Upaya Keras

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan II 2026	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19	Perlu Upaya Keras
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,9	-	-	-
24	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,7	-	-	-
25	Nilai AKIP UPT	82,1	-	-	-
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	-
27	Indeks Manajemen Risiko UPT	3,06	-	-	-

Lampiran 20

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Triwulan II 2026

No	Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
		Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	98,75	100,00	101,27
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	98,9	100,00	101,11
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	100	100	100,00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	99,33	102,93	96,5	100	103,63
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80	85	86,73	102,04
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100	100	100,00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10	94,25	100,00	106,10
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52	96,6	100,00	103,52

No	Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
		Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,33	105,45	93,25	98,83	105,99
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48	93,83	96,20	102,53
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100,00	118,99	84,04	95,83	114,03
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,2	78,20	100,00	78,4	78,5	100,13
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,79	102,23	86,85	87,43	100,67
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00	25	25	100,00
18	Jumlah desa pangan aman	10	10	100,00	25	25	100,00
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00	70	70	100,00
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,9	12,49	96,82	62,88	68,32	108,65

No	Indikator	Triwulan I			Triwulan II		
		Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33,30	33,33	100,09	38,33	57,50	150,01
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	50	50	100,00
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Lampiran 21

Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	015	063	672842	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	89,61 20 17,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,40	100,00 25 25,00	100,00	97,92	100,00%	0,00	97,92

Lampiran 22

Nota Dinas Sekretaris Utama tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: PR.04.02.2.12.25.771

Yth.	:	1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM 3. Para Kepala UPT BPOM di Seluruh Indonesia
Dari	:	Sekretaris Utama
Lampiran	:	4 Lembar
Hal	:	Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden
Tanggal	:	22 Desember 2025

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden dan Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-415/MK/AG/2025, tanggal 19 Desember 2025 tentang Tanggapan atas Permohonan Perubahan Jenis Belanja, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan prioritas Direktif Presiden TA 2026, **BPOM diminta agar tetap mengacu pada hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan** pada seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPOM sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025.
2. Hasil identifikasi dimaksud berasal dari anggaran belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang **bersifat rutin dan administratif**, seperti rapat, perjalanan dinas, dan belanja keperluan kantor, baik sumber dana Rupiah Murni (RM) maupun sumber PNBP.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan atas alokasi anggaran TA 2026 pada seluruh Satker di lingkungan BPOM **diminta untuk disesuaikan kembali dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026**.
4. Rincian besaran anggaran yang dapat digeser harus **merujuk pada besaran dan rincian hasil identifikasi untuk tiap Satker sesuai hasil yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan** yang dapat dilihat melalui https://sites.google.com/view/penganggaranbadanpom/ menu "**Input Informasi**", Sub menu "**Lampiran Hasil Identifikasi yang Dilakukan Kementerian Keuangan pada Seluruh Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan BPOM sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025"**. Rincian tersebut menjadi dasar seluruh Satker untuk melakukan penyesuaian pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada RO Khusus serta pemblokiran anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Seluruh Satker agar menyampaikan usul revisi anggaran sesuai hasil identifikasi, dengan ketentuan:
   a. hasil identifikasi yang bersumber dari RM dilakukan pergeseran ke RO Khusus melalui proses **pergeseran pengurangan anggaran** oleh masing-masing Satker pada Aplikasi SAKTI.
   b. hasil identifikasi yang bersumber dari PNBP diberikan **catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A** - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya oleh masing-masing Satker pada Aplikasi SAKTI.
   c. untuk **proses penginputan ke dalam RO khusus** akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada Aplikasi SAKTI.
6. Melakukan pencadangan anggaran sebagai antisipasi adanya kebutuhan prioritas mendesak sehingga memerlukan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat namun tetap terjaga tata kelolanya, melalui **Penundaan Pembangunan Lanjutan dan Renovasi Gedung Laboratorium pada 8 (delapan) Satker** yaitu: Loka POM di Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Sorong, BPOM di Tasikmalaya, BPOM di Kota Indragiri Hulu, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Loka POM di Kabupaten Buleleng, BPOM di Banyumas, dan BBPOM Makassar.
7. Seluruh Satker diminta untuk **melengkapi data dukung** berupa:
   a. Surat penyampaian revisi pergeseran anggaran kedalam RO Khusus TA 2026;
   b. Matriks semula menjadi form 1 dan 2 aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA;
   c. RKA Satker aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA.

Seluruh data dukung agar dapat disampaikan selambat-lambatnya hari **Selasa, 23 Desember 2025** melalui https://sites.google.com/view/penganggaranbadanpom/ pada menu Usulan Revisi Anggaran.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SATUAN KERJA	ALOKASI ANGGARAN (DILUAR BELANJA PEGAWAI)	HASIL IDENTIFIKASI RO KHUSUS SUMBER DANA RM SESUAI SURAT S-817/MK.03/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	HASIL IDENTIFIKASI BLOKIR SUMBER DANA PNBP SESUAI SURAT S-817/MK.03/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	ALOKASI ANGGARAN EFEKTIF HASIL IDENTIFIKASI TERMASUK BLOKIR PNBP (DILUAR BELANJA PEGAWAI)
14	BALAI BESAR POM PALEMBANG	13.775.447.000	2.630.274.000	77.554.000	11.145.173.000
15	BALAI BESAR POM PEKAN BARU	19.505.224.000	3.318.800.000	244.379.000	16.186.424.000
16	BALAI BESAR POM PONTIANAK	13.047.588.000	2.119.815.000	155.947.000	10.927.773.000
17	BALAI BESAR POM SAMARINDA	13.537.675.000	2.076.942.000	51.752.000	11.460.733.000
18	BALAI BESAR POM SEMARANG	20.870.223.000	4.173.198.000	502.670.000	16.697.025.000
19	BALAI BESAR POM SURABAYA	28.458.610.000	6.211.311.000	168.360.000	22.247.299.000
20	BALAI BESAR POM YOGYAKARTA	14.530.166.000	1.836.943.000	545.687.000	12.693.223.000
21	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	15.003.982.000	2.132.223.000	341.005.000	12.871.759.000
22	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	9.726.642.000	1.676.845.000	64.921.000	8.049.797.000
23	BALAI BESAR POM DI KUPANG	14.056.546.000	2.916.530.000	616.304.000	11.140.016.000
24	BALAI POM AMBON	11.405.833.000	1.737.167.000	60.800.000	9.668.666.000
25	BALAI POM BENGKULU	12.901.434.000	2.128.306.000	104.415.000	10.773.128.000
26	BALAI POM DI BATAM	14.078.208.000	2.219.022.000	173.069.000	11.859.186.000
27	BALAI POM DI MANOKWARI	14.880.346.000	2.874.201.000	230.500.000	12.006.145.000
28	BALAI POM DI PANGKAL PINANG	9.821.106.000	2.230.083.000	88.350.000	7.591.023.000
29	BALAI POM DI TARAKAN	8.392.579.000	1.724.960.000	-	6.667.619.000
30	BALAI POM JAMBI	9.976.170.000	1.689.018.000	99.537.000	8.287.152.000
31	BALAI POM KENDARI	10.529.229.000	2.095.479.000	53.330.000	8.433.750.000
32	BALAI POM MAMUJU	8.053.771.000	1.460.464.000	-	6.593.307.000
33	BALAI POM PALU	12.313.172.000	1.888.055.000	85.105.000	10.425.117.000
34	BALAI POM SOFIFI	7.939.026.000	1.587.086.000	-	6.351.940.000
35	BALAI POM DI BALIKPAPAN	2.423.003.000	571.321.000	-	1.851.682.000
36	BALAI POM DI BANYUMAS	6.474.990.000	597.450.000	-	5.877.540.000
37	BALAI POM DI BAU-BAU	2.778.103.000	678.963.000	-	2.099.140.000
38	BALAI POM DI BIMA	2.515.580.000	685.770.000	-	1.829.810.000
39	BALAI POM DI BOGOR	7.147.339.000	1.704.769.000	-	5.442.570.000
40	BALAI POM DI DUMAI	3.151.213.000	887.667.000	-	2.263.546.000
41	BALAI POM DI ENDE	5.253.317.000	1.339.254.000	-	3.914.063.000
42	BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	21.170.223.000	673.887.000	-	20.496.336.000
43	BALAI POM DI JEMBER	4.925.270.000	1.022.094.000	-	3.903.176.000
44	BALAI POM DI KEDIRI	5.045.469.000	1.196.556.000	-	3.848.913.000
45	BALAI POM DI PALOPO	5.433.157.000	1.104.029.000	-	4.329.128.000
46	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	23.959.444.000	1.048.344.000	-	22.911.100.000
47	BALAI POM DI SANGGAU	2.653.763.000	687.931.000	-	1.965.832.000
48	BALAI POM DI SURAKARTA	6.912.507.000	1.450.762.000	-	5.461.745.000
49	BALAI POM DI TABALONG	2.404.714.000	602.485.000	-	1.802.229.000
50	BALAI POM DI TANGERANG	6.445.458.000	1.653.756.000	-	4.791.702.000
51	BALAI POM DI TANJUNGBALAI	2.044.622.000	506.820.000	-	1.537.802.000
52	BALAI POM DI TASIKMALAYA	22.515.863.000	1.457.498.000	-	21.058.365.000
53	BALAI POM DI TULANG BAWANG	2.296.484.000	543.256.000	-	1.753.228.000
54	LOKA POM DI ACEH T SELATAN	2.550.076.000	577.320.000	-	1.972.756.000
55	LOKA POM DI ACEH TENGAH	5.916.035.000	480.995.000	-	5.435.040.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 23

Lembar Persetujuan Data Kinerja Bulan Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN DATA KINERJA

BULAN JUNI 2026

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyetujui data kinerja capaian IKU dan Output yang menjadi tanggung jawab kami sebagaimana tertuang dalam notulen rapat evaluasi di atas.

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan Persetujuan	Keterangan
1	Ma'rifah Ebtasari, S.Farm., Apt.	Ketua Tim Kerja Area Penguatan Manajemen Perubahan		
2	Tri Astuti Rahmawati, S.T.P., M.Sc.	Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Pangan Mikro		
3	Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt.,	Ketua Tim Kerja Pemeriksaan		
4	Sony Lawrensia, S.Farm., Apt.	Ketua Tim Kerja Kegiatan Sertifikasi		
5	Welinda Syafri, S.Farm, Apt	Ketua Tim Kerja Good Laboratory (GLP)		
6	Puspa Sari Paniti Ratri, S.Farm., Apt.	Ketua Tim Kerja Infokom		
7	Frenandha Dwi Dharmawan, S.Si.	Ketua Tim kerja Kegiatan Penindakan		
8	Ria Emeilia, S.Farm, Apt.	Ketua Tim Kerja Penguatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja		
9	Priya Tri Nanda, S.Si	Ketua Tim Kerja Pengadaan Barang dan Jasa II		
10	Ade Yan Emerson, S.Kom.	Ketua Tim Kerja Ketatausahaan Umum	-	Data Kinerja Belum ada di Bulan Ini
11	Netty Desi Margaretta Manullang, S.E.	Ketua Tim Kerja Pengadaan Barang dan Jasa I	-	Data Kinerja Belum ada di Bulan Ini

Pangkal Pinang,6 Juli 2026
Mengetahui
Kepala Balai POM di Pangkalpinang,

Agus Riyanto, S.Farm, Apt. M.M.

BADAN POM

1500533
HALO BPOM

bpompangkalpng

bpom.pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang

bpom.pangkalpinang@pom.go.id

(0717) 439278, 434705